

Negara kesatuan, UUD 1945 dan Pancasila memang tidak lagi diperdebatkan tetapi muncul masalah lain tidak bisa terhindarkan. Seperti apakah corak dan wujud “karakter bangsa” yang sesuai ketika usaha mengayuh biduk kehidupan bangsa mencapai pantai harapan sedang diayunkan? Apakah mungkin didapatkan “karakter bangsa” yang ideal setelah selama empat puluh tahun mengalami turun naiknya suasana otoritarianisme, meskipun sang penguasa tetap mengibarkan bendera demokrasi?

Dalam membahas masalah “karakter bangsa” buku ini memuat tulisan-tulisan yang bertolak dari hasrat untuk membawa bangsa ke pantai harapan yang dicita-citakan. Dalam usaha membuat “skenario” masa depan ini para pemikir bertolak dari pengalaman langsung ataupun dari pemakaian disiplin ilmiah tertentu. Bukanlah ketepatan pengamatan akan realitas sosial-kultural dan politik yang menjadi ukuran tetapi hasrat ideal untuk membawa bangsa ke pantai harapan yang diidamkan.

Sebagai buku yang berkisah tentang dinamika dan bahkan juga gejala dari arus pemikiran anak bangsa buku ini mengambil empat masalah yang strategis dalam usaha merumuskan dan memperjuangkan corak “karakter bangsa” yang ideal. Masalah itu ialah “**demokrasi**”, “**kebudayaan**”, “**pendidikan**”, serta “**pembangunan dan kesejahteraan sosial**”. Setiap masalah “dijawab” oleh tiga orang pemikir, yang praktis mewakili latar belakang pendidikan bahkan pengalaman kultural yang boleh dikatakan berbeda-beda.

Buku ini bukan saja mengingatkan pada kearifan yang diwarisi para pemikir bangsa tetapi juga sebagai pengantar ketika pahit getir pengalaman bangsa dalam mengayuh sampan menuju pantai yang dicita-citakan ingin direnungkan.



Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

ISBN : 978-602-1289-23-5

TOKOH PEMIKIR KARAKTER BANGSA

DITERBITKAN OLEH :
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI BUDAYA
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2015



TOKOH PEMIKIR KARAKTER BANGSA

TOKOH PEMIKIR KARAKTER BANGSA



Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2015

Tokoh Pemikir Karakter Bangsa

Pengarah :

1. Kacung Marijan
Direktur Jenderal Kebudayaan
2. Nono Adya Supriyatno
Plt. Direktur Sejarah

Narasumber :

1. Taufik Abdullah
2. Susanto Zuhdi
3. Anhar Gonggong
4. Mukhlis PaEni

Editor :

Amurwani Dwi Lestariningsih

Penulis :

1. Rhoma Dwi Aria Yuliantri
2. Jajat Burhanudin
3. Muhamad Dirga Fawakih
4. Setyadi Sulaiman
5. M. Nursam

Riset Ilustrasi :

1. Isak Purba
2. Tirmizi
3. Agus Widiatmoko
4. Budi Harjo Sayoga
5. Hermasari Ayu Kusuma
6. Esti Warastika
7. Dwi Artiningsih
8. Maemunah
9. Surya Agung

Tata Letak & Grafis :

Agus Antoso

Penerbit :

Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan
Jakarta 10270
Telp./Fax . : 021-5725044

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
Dilarang mengutip seluruh atau sebagian
isi buku tanpa izin dari penerbit

Cetakan : Tahun 2015

ISBN : 978-602-1289-23-5

KATA PENGANTAR

Plt. DIREKTUR SEJARAH DAN NILAI BUDAYA

Buku Tokoh Pemikir Karakter Bangsa digagas untuk menggali pemikiran-pemikiran tokoh sejarah tentang corak karakter kebangsaan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa, antara lain, demokrasi, kebudayaan, pendidikan, serta pembangunan dan kesejahteraan sosial. H. O. S. Tjokroaminoto, Abdul Rivai, Mohammad Natsir (aspek demokrasi); Sultan Takdir Alisjahbana, Soetomo, Muhammad Yamin (aspek kebudayaan); Ki Hajar Dewantara, Mohamad Sjafei, dan Rahmah el-Yunusiyah (aspek pendidikan); Soedjatmoko, Widjojo Nitisastro, Mubyarto (aspek pembangunan), adalah beberapa tokoh sejarah yang diupayakan ditelaah pemikirannya.

Pemikiran mereka sangat penting untuk diketahui sebagai ungkapan rasa perhatian dan kepedulian mereka terhadap kemajuan bangsa. Pemikiran mereka mewarnai perjalanan kehidupan bangsa bahkan menjadi menjadi karakter bangsa saat ini. Pemikiran mereka juga menginspirasi dan menggugah generasi penerus untuk memikirkan permasalahan bangsa dan berupaya menjawabnya sesuai dengan jiwa zamannya.

Oleh karena itu, pemikiran yang terkandung dalam buku ini diharapkan menjadi teladan sekaligus dapat memperkuat karakter generasi penerus. Generasi yang berkarakter akan menjadi sumber daya manusia yang andal dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selamat membaca.

Plt. Direktur Sejarah dan Nilai Budaya



Nono Adya Supriyatno

NIP. 19580805 198503 1 002

KATA SAMBUTAN
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pembangunan bangsa dan karakter menjadi hal penting untuk terus dilakukan dalam memajukan bangsa. Realitas suku bangsa yang beragam ini, yang dipersatukan oleh jaringan memori kolektif yang berpuncak pada momen Sumpah Pemuda pada tahun 1928, perlu selalu menjadi perhatian kita semua untuk menjaga dan merawat keutuhan sebagai satu bangsa. Bangsa yang bersatu menjadi modal utama dalam pembangunan sehingga segenap unsur masyarakat dapat saling bekerja sama membangun kemajuan Indonesia dalam berbagai bidang.

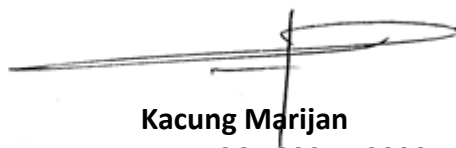
Untuk memperkuat persatuan dan kemajuan bangsa, pembangunan karakter bangsa harus selalu dilaksanakan. Secara internal, pembangunan karakter positif akan menguatkan identitas dan secara eksternal akan memperkuat daya saing bangsa dalam dunia global.

Karakter bangsa mewujud dalam dinamika kesejarahan bangsa. Dari Sejarah, dapat diungkap asal-mula dan perkembangan segala macam nilai, istiadat, lembaga, teknologi, sistem dan lain sebagainya. Nilai-nilai kesejarahan tersebut menjadi sumber inspirasi dan aspirasi generasi penerus dengan pengungkapan model-model tokoh sejarah dari berbagai bidang. Oleh karena itu, sejarah masih relevan untuk dipakai menjadi perbendaharaan suri-teladan, cinta dan berkorban untuk tanah air, berdedikasi tinggi dalam pengabdian, tanggung jawab sosial besar, kewajiban serta keterlibatan penuh

dalam hal-hwal bangsa dan tanah air, mengutamakan kepentingan umum, tak kenal jerih payah dalam usaha untuk berprestasi dan lain sebagainya.

Dan Buku Tokoh Pemikir Karakter Bangsa dari 12 tokoh sejarah ini berupaya merumuskan pemikiran tentang aspek demokrasi, kebudayaan, pendidikan, dan pembanguna serta kesejahteraan sosial yang bercorak karakter kebangsaan dalam menjawab permasalahan bangsa pada zamannya. Oleh karena itu, saya menyambut baik diterbitkannya buku ini. Semoga butir-butir pemikiran para tokoh ini menjadi cermin dan inspirasi bagi generasi penerus dalam menggali dan memperkuat karakter bangsa untuk persatuan dan kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selamat membaca.

Direktur Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



Kacung Marijan
NIP. 1964.0325.198901.1.002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
SAMBUTAN	v
DAFTAR ISI	vii
PENGANTAR “Karakter Bangsa” dalam	
<i>Pemikiran Indonesia Modern</i>	1
BAB I Bapak Karakter Bangsa Demokrasi:	
Pemikiran dan Praktik	27
1.1. H. O. S Tjokroaminoto (1882-1934).....	31
1.2. Abdul Rivai (1871-1937)	39
1.3. Mohammad Natsir (1908-1993).....	47
1.4. Penutup	64
BAB II Kebudayaan untuk Kemajuan dan	
Pembangunan Bangsa	69
2.1. Sutan Takdir Alisjahbana:	
Kebudayaan Barat untuk Kemajuan Indonesia	74
2.2. Riwayat Hidup.....	75
2.3. Sutan Takdir Alisjahbana dan Pujangga Baru	76
2.4. Sutan Takdir dalam Polemik Kebudayaan	81
2.5. Dr. Soetomo dan Gagasan Pendidikan	
Pekerti Timur	106
2.6. Riwayat Hidup.....	107
2.7. Dalam Arus Pergerakan Nasional	109
2.8. Terlibat dalam Polemik Kebudayaan.....	114

2.9. Penutup	129
2.10. Muhammad Yamin: Kebudayaan untuk Persatuan Indonesia	133
2.11. Karir Politik	134
2.12. Politik Bahasa.....	138
2.13. Menggagas Kebudayaan Nasional.....	142
2.14. Sejarah sebagai Ideologi Persatuan.....	148
2.15. Menggagas Filsafat Sejarah Nasional	155
2.16. Pengajaran dan Pendidikan	160
2.17. Penutup	162

BAB III Pendidikan dan Penguatan Karakter Bangsa:**Sketsa Pemikiran dan Gerakan Tokoh Pendidikan**

di Indonesia.....	169
--------------------------	------------

3.1. Pendahuluan.....	169
3.2. Pendidikan sebagai Pilar Pembentukan Karakter Bangsa: Pergumulan Awal	172
3.3. Ki Hadjar Dewantara: Bapak Pendidikan Nasional	178
3.4. Riwayat Hidup.....	178
3.5. Cita-Cita Pendidikan Ki Hajar	187
3.6. Mendirikan Perguruan Taman Siswa.....	190
3.7. Kurikulum/Isi Rencana Pelajaran Taman Siwa	192
3.8. Panca Dharma dan Pesan Pendidikan dari Taman Siswa	193
3.9. Pengabdian pada Masa Indonesia merdeka	195
3.10. Mohammad Syafei : Tokoh Pendidikan dari Sumatera Barat.....	197
3.11. Riwayat Hidup dan Pendidikan.....	197
3.12. Cita-Cita dan Pandangan Syafei tentang Pendidikan ...	201
3.13. Mendirikan Ruang Pendidik INS Kayutanam	203
3.14. Tujuan Sekolah Menurut Syafei	207
3.15. Pemikiran Pendidikan Mohammad Sjafei	213

3.16. Rahmah el-Yunusiah: Pejuang Pertama bagi Pendidikan Kaum Wanita	221
3.17. Latar Belakang Keluarga	223
3.18. Riwayat Pendidikan	224
3.19. Pandangan Rahmah tentang Perempuan	228
3.20. Diniyah School Putri: Perwujudan Cita-Cita Pendidikan Rahmah	232
3.21. Sekolah-Sekolah yang Didirikan: Pengabdian pada Pendidikan	234
3.22. Pandangannya tentang Sekolah: Sebuah Independensi	237
3.23. Memperjuangkan Kemerdekaan: Pendidikan Politik Rahmah	239
3.24. Penghargaan Masyarakat	241
BAB IV Beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan	251
4.1. Pengantar	251
4.2. Pembangunan Ekonomi Orde Baru	253
4.3. Soedjatmoko dan Pembangunan Holistik dan Demokratis	261
4.4. Kerangka pembangunan.....	262
4.5. Unsur-Unsur Pembangunan	265
4.6. Masyarakat Internasional	268
4.7. Nilai Pembangunan	269
4.8. Widjojo Nitisastro: Rasionalitas dan Efisiensi Ekonomi	275
4.9. Mubyarto dan Gagasan Ekonomi Pancasila	287
4.10. Catatan Akhir	300
DAFTAR PUSTAKA	305

PENGANTAR
“KARAKTER BANGSA” DALAM
PEMIKIRAN INDONESIA MODERN

Taufik Abdullah

Pendahuluan

Apakah terjemahan kata “*history of ideas*” ke dalam bahasa Indonesia harus berbeda dengan terjemahan kata “*intellectual history*?” Apakah kata yang pertama harus diterjemahkan “sejarah ide-ide”, sedangkan yang kedua sebagai “sejarah pemikiran?” Tetapi bukankah terjemahan yang pertama terasa kaku? Kalau begitu barangkali lebih baik dipakai saja terjemahan yang sama. Hanya saja dalam bahasa Inggris ada perbedaan konseptual dari kedua istilah ini. Jika istilah yang dipakai ialah “*history of ideas*” maka sasaran studi boleh dikatakan terbatas pada tumbuh dan berkembangnya pemikiran yang bersifat ideologis – liberalisme, nasionalisme, sosialisme dan sebagainya dan tidaklah jarang dilanjutkan pula dengan uraian historis tentang dialog atau bahkan perbenturan keras dari berbagai aliran pemikiran ideologis itu. Bukanlah pula hal yang aneh kalau sejarah ide-ide ini menguraikan pula latar belakang sosial-historis dari masa lahir dan pertumbuhan ideologi yang dibicarakan itu. Tetapi istilah *intellectual history* memberikan konotasi yang bukan saja berbeda tetapi mempunyai arti yang jauh lebih luas.

Istilah *intellectual history* dipakai untuk mengatakan sebuah corak studi kesejarahan yang mengisahkan pertumbuhan dan pergumulan dari beragam corak pemikiran dalam perjalanan waktu. *Intellectual history* memberikan “rekonstruksi” riwayat hidup dan perjalanan karir sang aktor – pemikir atau intelektual yang dibicarakan. Kalau hal ini telah disinggung maka bisalah diharapkan juga kajian ini membicarakan alur perjalanan sejarah sosial-politik yang sedang dialami oleh sang tokoh. Tentu bisa diharapkan juga karya akademis ini membahas juga kemungkinan persamaan dan corak perbedaan pendapat atau pemikiran tentang sesuatu masalah serta corak pendekatan mereka—para intelektual atau pemikir yang dibicarakan itu—dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan sosial-politik dan kebudayaan. Jadi bisalah dibayangkan juga bahwa dalam konteks sejarah pemikiran—dalam pengertian sebagai kajian *intellectual history*—kita akan berhadapan dengan hasil rekonstruksi dari dinamika alur pemikiran dan sistem pendekatan para aktor, para pemikir yang dibicarakan itu, tentang berbagai corak masalah kemasyarakatan dan bahkan mungkin juga tentang dinamika kebudayaan umumnya. Maka bisalah dikatakan bahwa semakin pemikiran itu mendekati suasana kontemporer maka semakin kompleks pulalah pemasalahan yang harus dijelajahi. Bukankah penetrasi dari pengaruh asing atau studi komparatif mungkin pula terjadi? Rekonstruksi dan uraian *intellectual history* semakin mengasyikkan bila studi ini tidak sekedar menghamparkan butir-butir pemikiran tentang berbagai hal yang disampaikan oleh para pemikir tetapi juga juga tentang apa yang disebut oleh seorang ahli (Pocock) sebagai “*second order of language or theory*”—yaitu perdebatan antarpara pemikir.

Seperti halnya dengan kisah historis yang telah umum diketahui, apa yang disebut sebagai sejarah pemikiran (dalam pengertian *intellectual history*) ini boleh dikatakan terdiri atas dua corak pendekatan. Pertama, sejarah pemikiran yang bersifat umum—yaitu karya akademis yang berusaha mengungkapkan dinamika pemikiran tentang berbagai aspek kehidupan kemasyarakatan,

kebudayaan dan kenegaraan, yang serba menyeluruh dan umum. Dengan pendekatan ini bisalah diharapkan hadirnya karya sejarah pemikiran yang memaparkan dan menguraikan lahir, tumbuh dan berkembangnya satu-dua dan bahkan berbagai persoalan kemasyarakatan yang sempat dipermasalahakan kalangan terpelajar dalam wilayah dan zaman tertentu. Karya Robert van Niel, *The Emergence of Modern Indonesian elite* (The Hague, Bandung: W. Van Hoeve, 1960), umpamanya, tidaklah sekadar rekonstruksi historis tentang awal tumbuhnya “elite terpelajar baru” di awal abad ke-20, tetapi juga menguraikan keragaman pandangan dan pemahaman para “elite modern” itu tentang dunia baru yang telah terhampar dan tentang berbagai corak tantangan zaman yang dihadapi masyarakat perkotaan. Para terpelajar yang berpendidikan Barat pun mulai mempertanyakan makna kultural dari fakta empiris yang kini telah mereka hadapi. Mengapakah bangsa-bangsa Barat – mereka yang datang dari “dunia sana”-- bukan saja berhasil menanamkan kekuasaan di negeri asing tetapi juga dengan penuh percaya diri telah semakin jauh berhasil melangkah ke dalam “dunia kemajuan?” Bagaimana halnya dengan “kita”—orang pribumi? Bukankah terasa juga betapa “kita” masih asyik—ataukah terbelenggu?-- dalam suasana keterkebelakangan kultural? Maka bisalah dipahami juga kalau karya van Niel ini berkisah juga tentang awal mula tumbuhnya kesadaran nasionalisme yang merelatifkan batas-batas kultural etnisitas di negeri yang masih disebut “tanah Hindia” ini.

Kedua, sejarah pemikiran tematis, yaitu corak studi yang melakukan rekonstruksi historis tentang dinamika pemikiran tentang tema-tema tertentu. Dinamika dan bahkan gejolak pemikiran Islam yang melanda kehidupan umat dari masa ke masa adalah sebuah contoh dari studi awal tentang sejarah pemikiran Islam di Indonesia. Selain itu tentu saja bisa dilihat juga berbagai studi tentang percaturan kebudayaan (seperti masalah kebudayaan asli berhadapan dengan pengaruh asing), perbenturan pandangan ideologis, dan sebagainya. Maka bisalah dibayangkan juga bahwa pengisahan biografi para “pemikir” (filosof, ilmuwan, atau lebih

sering—tokoh politik) bisa saja memakai halaman yang banyak juga dalam studi ini. Bukankah mereka yang menyatakan pemikiran tentang berbagai macam masalah itu adalah para individu yang telah bersentuhan dengan beraneka-ragam permasalahan kemasyarakatan? Karena itu janganlah heran kalau biografi sang tokoh bisa saja menempati tempat yang utama dalam penulisan sejarah pemikiran yang bersifat tematis ini. Bukankah pemikiran tentang “ini” atau “itu” tidak datang begitu saja? Berbagai corak pendekatan pun bisa juga menampilkan dirinya. Ada biografi yang menjelaskan tempat sang intelektual dalam dinamika kemasyarakatan di zamannya. Ada juga biografi yang lebih bersifat “umum”, yang secara lengkap menguraikan asal usul, pendidikan, tindak tanduk serta alur pemikirannya dan tentu saja nasib peruntungan sang tokoh dalam perjalanan waktu. Maka bisalah juga dipahami kalau ada juga biografi yang lebih menekankan aspek “dinamika pemikiran” sang tokoh daripada uraian tentang tindak tanduknya sebagai anggota atau tokoh masyarakat. Tulisan Bernard Dahm *Sukarno and the Struggle for Indonesian Independence* (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1964) umpamanya, lebih bercorak “sejarah pemikiran” daripada riwayat hidup yang berkisah tentang rangkaian pengalaman dan gejolak keragaman aktivitas politik yang pernah dilalui sang tokoh. Meskipun tidak mengatakannya tetapi sebenarnya beberapa artikel yang pernah diterbitkan dalam berbagai majalah atau buku yang bersikan biografi beberapa orang tokoh boleh juga dikatakan termasuk *genre* sejarah pemikiran. *Manusia dalam Kemelut Sejarah*, yang berkisah tentang Sukarno, Sjahrir, Tan Malaka, Sudirman dan lain-lain (terbitan LP3ES, 1978 dan telah diulang cetak beberapa kali), umpamanya, juga lebih sejarah pemikiran daripada sekadar riwayat hidup dari para tokoh nasional yang dibicarakan.

Jadi bolehlah dikatakan bahwa baik sejarah pemikiran yang bersifat “umum”, maupun yang bercorak “tematis” (lebih terfokus pada aspek-aspek tertentu) sangat dekat hubungannya dengan biografi pribadi dan sejarah-umum dari masyarakatnya. Bukankah

asal usul keluarga dan pengalaman hidup bisa mempunyai dampak juga pada pilihan perhatian dan kecenderungan pemikiran dalam merenungkan realitas kehidupan sosial? Bukankah sang pemikir adalah pula bagian dari masyarakatnya? Apakah sang pemikir itu adalah seorang “reformis”, pembaharu, yang ingin membawa masyarakat ke tatanan sosial-kultural yang baru atau sebaliknya, seorang penganut “konservatisme”, yang berpendirian bahwa nilai-nilai dan bahkan bentuk perwujudan kultural yang diwarisi senantiasa berharga bagi masa kini bangsa dan bahkan untuk masa depan, namun yang jelas keduanya adalah bagian yang integral dari sejarah pemikiran. Bahkan andaikan ia, sang tokoh pemikir itu, adalah seorang “reaksioner”, yang secara keras mengusahakan kembalinya masyarakat ke tatanan sosial-politik yang dianggap umum sudah tidak lagi sesuai dengan keharusan zaman, biografi kehidupannya dapat juga memberi keterangan tentang “mengapa semua yang dikatakannya dan diperjuangkannya” adalah juga sesungguhnya hasrat kultural yang biasa saja.

Jadi pada tahap awal dalam proses pemahaman bolehlah dikatakan bahwa sejarah pemikiran itu tidak ubahnya dengan sejarah umum, yaitu uraian kesejarahan yang berusaha mengadakan rekonstruksi tentang alur dan dinamika peristiwa yang terjadi dalam rentangan waktu dan wilayah tertentu. Hanya saja perhatian sejarah pemikiran, *pertama* terfokus pada pemikiran seorang atau beberapa tokoh dengan catatan singkat tentang perjalanan hidup dan *kedua*, struktur dan realitas sosial-politik dan ekonomi dan bahkan kebudayaan diperlakukan sebagai konteks struktural dari kehadiran sang pemikir. Arti historis dari kehadiran sang pemikir dan makna sosial-kultural dari pemikirannya bagi masyarakat akan lebih mungkin bisa dipahami kalau faktor *pertama—isi dan alur pemikiran—* dan *kedua—struktur sosial kultural dari kehadirannya—*telah dipertemukan dalam sebuah wacana akademis (*academic discourse*).

”Sejarah Pemikiran” dalam Lintasan Historiografi Indonesia modern

Kalau tinjauan selintas dilakukan untuk mendapatkan pemahaman tentang sejarah pemikiran Indonesia modern ternyata sampai sekarang belum seberapa jumlah buku yang telah diterbitkan dalam bahasa Indonesia. Barangkali buku yang pertama ialah Herbert Feith & Lance Castle (editors) *Pemikiran Politik Indonesia: 1945-1965*-- edisi bahasa Inggris 1970 (Cornell University Press, Ithaca, New York), sedangkan edisi Indonesia diterbitkan tahun 1988 (LP3ES, Jakarta). Dengan mengadakan klasifikasi – sesuai dengan alur pemikiran ideologis dari tokoh-tokoh politik yang tulisan mereka dikutip—buku ini memperlihatkan pergumulan ideologis yang terjadi di tanah air dalam masa dua puluh tahun, sejak tahun awal kemerdekaan sampai saat-saat menjelang meletusnya usaha *coup d’etat*, yang dikenal sebagai “peristiwa G-30-S” (kalau ingin bernada politik kata PKI ditambahkan di belakangnya). Jika saja masa keberlakuan UUD dipakai sebagai titik tolak maka dengan melihat angka tahun yang dipakai (1945-1965) mudalah ditebak bahwa buku ini dimulai dengan adanya kesatuan relatif dari pemikiran politik masa revolusi kemerdekaan). Tetapi kemudian Indonesia memasuki zaman ketika pergumulan ideologis, yang boleh dikatakan ekstrim juga—inilah zaman ketika Indonesia sedang berada dalam suasana UUD Sementara 1950, yang berlandaskan sistem “demokrasi parlementer”. Tetapi zaman yang penuh gejolak ini mulai memasuki suasana baru ketika suasana ketenangan dalam pergulatan ideologis yang dipaksakan dimasuki dengan lahirnya Demokrasi Terpimpin. Dengan “Dekrit Presiden 21 Juli 1959”, Indonesia “kembali ke UUD 1945”. Begitulah buku ini merekam pergulatan pemikiran ideologis sejak Proklamasi Kemerdekaan dikumandangkan sampai dengan terjadinya tragedi nasional yang teramat memprihatinkan.

Kemudian dengan gaya dan sistem penulisan yang nyaris sama David Boocheier dan Vedi R. Hadiz menyelenggarakan penerbitan *Pemikiran Politik Indonesia, Periode 1965-1999* juga dalam dua versi edisi Inggris (Routledge-Curzon, 2003) dan Indonesia (Freedom Institute & Grafiti, 2006). Tetapi lain dari buku Feith dan

Castle yang disebut di atas, buku ini bertolak dari pemahaman tentang dinamika sejarah yang terjadi dalam masa tiga puluh empat tahun. Dimulai dengan periode pertama (1965-1973), ketika Indonesia – menurut buku ini—sedang “mencari format politik “ (bagian I), kemudian diikuti oleh kisah ketika “Orde Baru di puncak kejayaan” (1973-1988) selanjutnya (bagian III) yang diberi judul “tema-tema di akhir Orde Baru” dan akhirnya (bagian IV) tentang “Krisis dan Reformasi”, maka bisalah dibayangkan juga corak dan peralihan suasana sosial-politik dalam masa Orde Baru itu. Jadi tidak seperti buku Feith dan Castle buku ini lebih merupakan rangkaian dan peralihan pemikiran dan harapan yang terpantul dalam masa pemerintahan Orde Baru—sebuah regim yang mulai kibaran bendera “pembangunan dalam naungan Pancasila” tetapi kemudian—seperti halnya dengan Demokrasi Terpimpin—menampilkan diri sebagai sebuah “negara serakah”, yang ingin menguasai semua.

Kedua buku ini memang lebih bersifat pendokumentasian berbagai corak pandangan dan harapan dalam perjalanan zaman. Hanya saja jika buku Feith dan Castle bermula dari ekpose keragaman ideologi tetapi mengalami klimaks ketika suara Pemimpin Besar Revolusi telah teramat dominan, buku Bouchier dan Hadiz bermula dengan “pemakzulan keabsahan ideologi komunisme” dan suasana keterbukaan dalam perumusan gagasan baru yang dikatakan sesuai dengan ajaran Pancasila.

Salah satu masalah dari kedua buku yang berharga ini (baik dalam versi Indonesia maupun Inggris) ialah kehadiran kedua buku ini hanya berarti bagi mereka yang telah mendalami atau setidaknya mengetahui juga perjalanan dan dinamika sejarah dalam masa dua periode yang direkam buku ini—periode 1945-1965 (revolusi nasional sampai dengan awal krisis “Demokrasi Terpimpin”) dan 1965-1999 (masa krisis Demokrasi Terpimpin sampai dengan jatuhnya Orde Baru). Kedua buku ini memuat juga riwayat hidup dan keterangan singkat tentang para pemikir dan peserta yang tulisan mereka dikutip.

Pada tahun 2013 Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya menerbitkan buku yang berjudul *Sejarah Pemikiran Indonesia Modern*. Terdiri atas lima bab dan sebuah pengantar panjang, buku ini boleh dikatakan sebagai kisah sejarah bangsa—sejak awal abad ke-20 sampai dengan berakhirnya zaman Orde Baru – ditinjau dari gejala pemikiran anak bangsa dalam menjawab tantangan sejarah. Bab “pengantar” lebih merupakan “renungan kesejarahan” tentang arus dan dinamika pemikiran anak bangsa, sejak awal abad ke-20 sampai dengan berakhirnya zaman “Orde Baru”. Sedangkan bab-bab yang menyusul adalah uraian historis tentang pertumbuhan kesadaran nasionalisme, pergumulan ideologis, dan renungan kebudayaan tentang kebudayaan nasional sampai akhirnya pergumulan pemikiran dalam penentuan corak kekuasaan.

“Pembentukan Bangsa” dalam Dinamika Sejarah Pemikiran

Barangkali tidaklah berlebih-lebihan kalau dikatakan bahwa tema yang paling awal dan mungkin juga sangat mendasar dari sejarah pemikiran—dalam pengertian sebagai *“intellectual history--Indonesia modern* ialah menjawab pertanyaan “bagaimanakah proses terjadinya pembentukan bangsa Indonesia?” Rangkaian peristiwa sejarah apakah yang setahap demi setahap yang akhirnya melahirkan kesadaran nasionalisme? Kalau pertanyaan ini yang diajukan sebagai *academic exercise*, latihan akademis, maka hal yang lebih dulu harus dilakukan ialah mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang perubahan struktural yang terjadi sejak bermulanya perluasan jaringan kekuasaan kolonial.

Jika memang begitulah sebaiknya maka dapatlah dikatakan bahwa sudah sejak awal ketimpangan geografis dalam rekonstruksi sejarah terpaksa harus terjadi juga. Hal ini terjadi karena fakta yang sederhana saja--perluasan kekuasaan kolonial terjadi dalam proses sejarah yang panjang. Ketika Batavia telah dibuat menjadi sebuah kota yang meniru struktur perkotaan di negeri Belanda, Aceh-Darussalam, umpamanya, masih merupakan sebuah kesultanan yang

sedang asyik mengadakan hubungan luar negeri. Bukankah baru di tahun 1904—setelah perang sejak awal tahun 1870-an--Aceh baru resmi berada di bawah kekuasaan Hindia Belanda? Tentu sekian banyak kasus lain bisa dikatakan juga. Tetapi secara keseluruhan—dalam perspektif garis besar dari wacana kesejarahan (*historical discourse*)--bisalah dikatakan bahwa menjelang awal abad ke-20 “Hindia Belanda” telah merupakan realitas politik yang mencakup seluruh wilayah yang kemudian—sejak bulan Agustus tahun 1945--dinyatakan sebagai keutuhan yang tidak terpisahkan dari Republik Indonesia.

Sejak masa awal kolonialisme itulah pula mata rantai kekotaan mulai terentang dan bahkan telah pula semakin meluas. Dengan begini maka suatu corak ikatan sosial yang barupun mulai pula terjalin. Hanya saja suasana kekotaan itu bercirikan sistem sosial yang bersifat kolonial--orang Eropa berada di lapis atas dari stratifikasi sosial sedangkan “pribumi” berada di landasan. Meskipun demikian di kota-kota ini pula benih-benih pemikiran baru mulai bersemi. Perbedaan kelas sosial dalam realitas pergaulan semakin terasa juga ketika suasana keterpelajaran telah mulai memasuki celah-celah sistem pengetahuan dan kesadaran anak negeri.

Tetapi suasana apakah yang secara riil mulai dirasakan anak negeri dan harapan apa pula yang mulai bersemi di kalangan mereka? Maka sebuah kasus yang agak menonjol dari sebuah kota kecil yang terletak di pantai Barat pulau Sumatra bisa dipakai sebagai contoh. Kasus yang terjadi di kota Padang adalah sebuah contoh yang sampai kini masih meninggalkan bekas. Dalam suasana ketika golongan bumiputra telah mulai sayup-sayup merasakan angin segar dunia baru yang diperkenalkan setelah konflik berdarah yang dahsyat (perang Padri, 1803-1821--“perang saudara” dan 1821-1837—intervensi *kompeni*) dan pemberontakan-pemberontakan yang terpencar-pencar berakhir, para terpelajar “modern” menerbitkan sebuah majalah bulanan berbahasa “Melayu”, *Insulide* (1901-1904). Jika majalah ini sempat dibaca (masih tersimpan di perpustakaan KITLV, yang sekarang telah

menjadi milik Universitas Leiden) maka tampaklah bahwa hampir di setiap nomer majalah yang mempunyai pembantu di kota-kota utama Jawa dan Sumatra ini tidak lupa dengan pesan utama yang bernada ajakan untuk ikut melibatkan diri dalam arus “kemajuan” dan melibatkan diri dalam kegairahan untuk “memasuki dunia maju”. Keberhasilan Jepang, sebuah negara kecil, mengalahkan kekaisaran Tiongkok yang besar, 1893, dijadikan contoh tentang betapa sebuah negara kecil, yang telah menggapai “kemajuan”, berhasil mengalahkan sebuah kekuatan besar.

Jika kasus wilayah Sumatra Barat dilanjutkan, maka bisalah dikisahkan pula betapa suasana penuh harapan ini terganggu ketika pemerintah kolonial memutuskan untuk tidak lagi “membebaskan” rakyat Minangkabau dari pembayaran pajak (“belasting”). Betapapun para “terpelajar” yang tinggal di kota-kota membujuk masyarakat Minang agar bersedia membayar “belasting” dengan imbalan pelebaran jaringan pendidikan. Tetapi masyarakat nagari (desa yang merupakan kesatuan adat terkecil) tidak pernah bisa melupakan bahwa sudah sejak berakhirnya zaman Perang Padri--ketika Minangkabau resmi menjadi bagian dari wilayah Hindia Belanda--keharusan membayar “belasting” telah dianggap sebagai suatu penghinaan kultural. Soalnya ialah pada tahun 1833—ketika “masa damai” sementara berhasil dipaksakan “kompeni”--Gubernur Jenderal mengeluarkan *Korte Verklaring*, yang mengatakan “kompeni” tidak akan memungut pajak, tetapi ingin menjadi pemegang monopoli kopi. Maka begitulah ketika keharusan pembayaran “belasting” telah diumumkan Gubernur Jenderal seketika itu pula apa yang dikenal sebagai “perang anti-belasting (1908)” yang terpencar-pencar terjadi di banyak tempat. “Perang Kamang”, “perang Mangopoh”, “perang Lintau”, serta demonstrasi penolakan di beberapa kota-kecil terjadi. Kesemua “perang” itu berakhir dalam suasana tragedi politik dan kemanusiaan.

Sejak tragedi “perang belasting” inilah masyarakat sadar apa artinya berada dalam suasana kolonial. Sejak itulah perhatian kepada pendidikan menaik—apalagi diwaktu bersamaan pergerakan

“reformasi Islam” (biasa disebut sebagai “gerakan kaum muda). Beberapa tahun setelah berakhirnya “perang anti-belasting” ini Sumatra Barat menjadi salah satu daerah (di samping Minahasa dan Tapanuli Utara—dua daerah Kristen) dengan prosentase tertinggi penduduk yang masuk sekolah.

Sebenarnya sebelum pemberontakan itu terjadi seorang “dokter Jawa”, kelahiran Minangkabau, Dr. A. Rivai telah menjadi editor *Bandera Wolanda*, kemudian *Warta Hindia*, yang diterbitkan di negeri Belanda. Meskipun melanjutkan pesan dan himbuan “kemajuan”, yang dipelopori *Insulinde*, Rivai, yang sedang melanjutkan studi kedokterannya, melancarkan kritik sosiologis juga pada situasi yang masih menyelimuti wilayah yang ketika itu dikenal sebagai “tanah Hindia”. Dalam tulisan-tulisan iapun membagi masyarakat “tanah Hindia” atas dua kelompok, yaitu “kaum muda”—para pelopor kemajuan—dan “kaum tua”—kaum konservatif. Ia juga memperkenalkan konsep baru tentang kebangsawanan dengan membedakan “bangsawan pikiran”—yaitu para pelopor kemajuan—dan “bangsawan darah”. Ia pun mengingatkan pula bahwa jika *kemajuan* pribadi telah dicapai kesadaran sebagai seorang “Hindia” harus tetap dipertahankan. Dalam konteks inilah Rivai menganjurkan agar “kaum muda” mendirikan organisasi demi kelancaran usaha ke arah semakin tercapainya hasrat “kemajuan”.

Terpengaruh oleh tulisan-tulisan Rivai (sebagaimana diungkapkannya dalam tulisannya yang dimuat dalam surat kabar berbahasa Jawa, *Retno Dhumilah*, yang terbit di Surakarta) dokter Wahidin Sudirohusodo menganjurkan hal yang sama. Iapun mengatakan jika tidak tahu bagaimana caranya maka Dr.A. Rivai bisa dijadikan sebagai penasehat. Begitulah, akhirnya atas inisiatif Sutomo, mahasiswa Stovia, pada tanggal 20 Mei 1908 organisasi modern yang pertama, Boedi Oetomo, didirikan di kalangan murid-murid “sekolah dokter Jawa” itu. Tetapi pada bulan September organisasi, yang mencita-citakan “kemajuan” bagi “bangsa Jawa” ini praktis diambil oleh para priyayi. Gubernur Jenderal pun menunjuk Bupati Karanganyar sebagai ketua pertama. Sejak itu dalam

pergerakan nasional B.U. termasuk golongan ko-operator—artinya bersedia bekerja sama dengan pemerintah demi tercapainya “kemajuan” anak negeri. Ketika *Volksraad* didirikan unsur B.U. selalu mendapat kursi.

Suasana serba-tenteram, demi kemajuan ini, mulai agak terguncang ketika di tahun 1912 Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam. Diikat oleh rasa kesatuan agama organisasi yang sadar dengan dirinya sebagai “pribumi yang beragama Islam ini mula-mula hanya aktif dalam gerakan “kemajuan” (khususnya ekonomi), tetapi tidak lama kemudian S.I. mulai tergelincir pada masalah politik. Bahkan salah satu cabangnya—Semarang—mulai mempersoalkan kelas sosial dan kedudukan ekonomi. Di sinilah semboyan “*sama rata, sama rasa*”, yang dirumuskan oleh Marco, menjadi seruan perjuangan. Sejak itu pula bermulanya “dialog” Islam dan sosialisme baik dalam perumusan pemikiran demi masa depan bangsa maupun dalam persaingan pengaruh. Hanya saja ketika nasionalisme dan sosialisme telah mengalami proses radikalisasi baik secara ideolog—maka partai komunisme pun didirikan—maupun dalam perilaku, maka apa yang disebut “pemberontakan komunis” terjadilah di Banten (Desember 1926) dan Silungkang (Januari 1927).

Pada tahun 1913 pemerintah Hindia Belanda memperingati terbebasnya Belanda dari pendudukan kekuasaan Napoleon. Tetapi mengapa memperingati kemerdekaan di tanah jajahan? Maka Suwardi Suryaningrat (anggota B.U. dan S.I, dan salah seorang pendiri *Indische Partij*) menulis tulisan klasik-nya, *Als ik eens Nederlander was*--“kalau saya seorang Belanda”, katanya, “saya tidak akan merayakan kemerdekaan tanah air saya di negeri jajahan”. Seketika tulisan ini telah diterjemahkan ke bahasa “Melayu” (oleh Abdul Moeis) maka unsur nasionalisme politik pun mulai memasuki kesadaran anak negeri.

Ketika itu *Indische Partij*, yang dipimpin tiga sekawan (Douwes Dekker, Suwardi, dan Tjipto Mangunkusumo) telah membuat perbedaan yang jelas antara “bangsa Hindia” dengan yang bukan. Maka perbedaan antara *blijvers* dan *trekkers*--antara

penduduk setempat dengan pendatang yang mondar mandir --pun diperkenalkan. Dengan membedakan keduanya maka secara tidak langsung perbedaan antara bangsa sendiri dengan bangsa asing telah diperjelas. Dengan sikap yang telah mulai membayangkan semangat nasionalisme bisalah dipahami juga kalau ketiga pemimpin itu diasingkan dari "tanah Hindia". Tetapi untunghlah mereka bisa pergi ke negeri Belanda. Tetapi kalau Tjipto, karena kesehatan, harus kembali ke "tanah Hindia" (di tahun 1930-an diasingkan ke Banda Neira) sedangkan Douwes Dekker berkelana di Eropa dan bahkan juga Afrika Selatan. Tetapi di negeri yang dipertuan ini—Belanda--Suwardi mempelajari masalah dan teori pendidikan. Beberapa tahun kemudian ketika ia telah dibolehkan pulang iapun mendirikan sekolah dengan landasan ideologis nasionalisme, Taman Siswa, dan iapun dikenal dengan nama baru, Ki Hadjar Dewantara.

Tahun 1910-an adalah masa ketika para pelajar yang berasal dari berbagai daerah mendirikan perkumpulan yang mula-mulanya berdasarkan solidaritas kepulauan. Di masa inilah Jong Java (1915 mula-mula bernama Tri Koro Dharmo) didirikan. Kemudian menyusul Jong Sumatranen Bond, Jong Celebes, Jong Ambon dan lain-lain. Ketika Jong Islamieten Bond didirikan (1925)—maka benih tumbuhnya intelektual Islam (berlatar belakang pendidikan Barat tetapi mendalami pengetahuan dan pemahaman tentang ajaran dan tradisi serta filsafat Islam) telah mulai ditanamkan.

Pada tanggal 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda II diakhiri dengan pernyataan yang kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Maka dengan begini "jalan kembali" kepada kesetiaan ke daerahan telah tertutup. Sejak itu "nasionalisme Indonesia" telah merupakan realitas yang tidak teringkari, setidaknya begitulah realitas yang hidup di kalangan para pembaca surat kabar di kota-kota.

Dikatakan atau tidak dan langsung ataupun bukan *Sumpah Pemuda* jelas dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran dan aktivitas organisasi yang mula-mula bernama *Indische Vereniging* kemudian menjadi *Indonesische Vereniging* dan akhirnya (1925) *Perhimpunan Indonesia*—sebuah perkumpulan para mahasiswa

Indonesia di Eropa, yang memakai semboyan *Indonesia Vrij Nu* dan menerbitkan majalah bernama *Indonesia Merdeka*. Tetapi pada tahun 1928 ketua P.I. dihadapkan ke pengadilan Den Haag, karena dituduh mengadakan komplotan. Maka sang ketua, Mohammad Hatta, mengucapkan pidato *Indonesia Vrij*—sebuah karya klasik dalam sejarah pergerakan kebangsaan.

Pada tahun 1926 Soekarno menerbitkan artikel yang menyerukan persatuan “Nasionalisme, Islam dan Marxisme”. Memang pada waktu itu ketiga inilah aliran utama dalam pergerakan kebangsaan. Tetapi nasionalisme dan Islam, bahkan juga Marxisme tidaklah ideologi yang utuh. Ketiganya mempunyai nuansa yang bisa juga memecah persatuan anak negeri. Tetapi kemudian ternyata juga bahwa bahkan perbedaan dalam strategi perjuangan yang terwujud dalam perumusan ideologi bisa juga memecah kesatuan dalam perjuangan. Dalam hal strategi perjuangan inilah perdebatan (1930) antara Sukarno dengan Hatta dan Sjahrir terjadi. Bagi Sukarno “persatuan” adalah segala-galanya, sedangkan bagi Hatta persatuan hanya mungkin terwujud jika dilandaskan pada asas dan strategi perjuangan yang sama. Tetapi ternyata juga betapa sikap terhadap sejarah dalam mengayuh biduk ke masa depan bisa juga menimbulkan perdebatan.

Perdebatan Islam dan nasionalisme boleh dikatakan yang paling awal dan yang sampai sekarang masih agak terasa juga seperti agak enggan untuk berhenti. Setelah perdebatan golongan Marxist dengan Islam – antara Tan Malaka, Semaun berhadapan dengan HA Salim, Abdul Muis dan Tjokroaminoto, kemudian Sukarno, sang nasionalis, yang sedang berada di tanah pembuangan (Bengkulen) terlibat dalam perdebatan yang bermutu tinggi tentang “Islam dan kebangsaan” dengan seorang pemikir muda yang namanya sedang mulai menanjak (Mohammad Natsir).

Apakah peristiwa ini suatu kebetulan saja ataukah sesungguhnya suatu keharusan sejarah? Ketika para tokoh politik terkemuka itu telah disingkirkan dan perdebatan tentang strategi perjuangan (seperti antara Sukarno dan Hatta) atau bahkan tentang

ideologi yang fundamental telah mulai mengendor, di saat itu pula sastra Indonesia modern semakin menjadi bagian dari suasana kehidupan kota-kota. Kalau dalam tradisi puisi pantun dan syair telah dirasakan sebagai gaya lama, maka kini soneta telah tampil sebagai gaya puisi baru. Dalam prosa pergumulan pandangan dan visi diungkapkan dalam bentuk novel yang biasanya juga benuansa romantik terjadi juga perubahan. Jika *Sitti Nurbaya* (karya Marah Rusli) terbitan tahun 1920-an, masih disibukkan oleh masalah konflik adat dan hasrat modern, maka *Salah Asuhan* (karya Abdul Muis, bekas tokoh Sarekat Islam) telah mempersoalkan hubungan kultural Timur dan Barat. Tetapi ketika novel *Belenggu* (karya Armijn Pane) telah terbit (awal 1940) masalah dinamika kehidupan kalangan terpelajar dalam zaman modern telah menjadi problematik kultural.

Jika demikian halnya dengan sastra yang dianggap “resmi”—artinya diakui secara formal sebagai karya sastra—maka semakin meriah suasananya dalam apa yang disebut “setengah mengejek dan setengah merendahkan”, roman picisan. Sastra “tidak resmi” ini tidak saja nekad bercerita tentang percintaan anak muda, tetapi agak sering juga tampil dengan kisah percintaan dalam konteks suasana nasionalisme yang tidak selamanya ditutup-tutup. Sementara itu film dan sandiwara yang biasa memakai bahasa Melayu-pasar pun semakin menampilkan diri sebagai penyalur bahasa Indonesia modern.

Dalam suasana inilah apa yang kemudian dikenal sebagai “polemik kebudayaan” (sesuai dengan judul buku yang berisikan perdebatan tentang “kebudayaan Indonesia”) terjadi dan terjadi dengan penuh gairah. Meskipun semua dilakukan melalui berbagai corak penerbitan pers—majalah atau surat kabar—tetapi kegairahan dalam berpolemik sangat terasa juga. Bukankah perdebatan pers bisa melibatkan peserta dari berbagai kota? Seperti apakah kebudayaan Indonesia ini sesungguhnya? Apakah Indonesia adalah sesungguhnya perpanjangan saja dari masa lalu—masa ketika realitas historis hanya memperlihatkan keterpisahan kultural daerah-daerah ataukah suatu ikatan kebangsaan baru yang dengan sengaja “dilahirkan”? Polemik

semakin panas setelah keluar pernyataan keras dari Sutan Takdir Alisyahbana, yang lebih dikenal sebagai penyair dan novelis, bahwa “kebudayaan pre-Indonesia telah mati semati-matinya”. Maka begitulah polemik kebudayaan, yang terjadi ketika para pemimpin terkemuka dari pergerakan kebangsaan telah berada di daerah pengasingan, bukan saja telah memancing keikutsertaan para pemikir, ilmuwan, tetapi juga kaum pergerakan moderat.

Wacana “Karakter Bangsa” dalam Dinamika Sejarah

Meskipun memakaikan pendekatan yang berbeda-beda tetapi ketiga buku yang telah diterbitkan tentang “sejarah pemikiran Indonesia modern” pada dasarnya bertolak dari pertanyaan yang sama—“Apakah yang terpikirkan dan terimpikan serta diperdebatkan masyarakat-bangsa ketika perubahan dalam realitas kehidupan sosial-politik dan kecenderungan kultural sedang terjadi? Bagaimanakah realitas yang telah mengalir itu bisa dipahami dan diatur sesuai dengan cita-cita dan harapan?” Maka berbagai pendapat pun diajukan dan perdebatan tentang pemahaman sejarah, struktur kekinian dan harapan masa depan dan bahkan landasan ideologi pun tidak selamanya bisa terelakkan. Setelah melalui revolusi nasional (1945-1950) akhirnya kemerdekaan bangsa mendapat pengakuan dunia internasional. Sebuah Republik kebangsaan yang mencakup seluruh persada tanah air—“dari Barat sampai ke Timur, berjajar pulau-pulau. Sambung-menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia” kata lirik sebuah lagu--kini telah terwujud. Tetapi perbedaan pendapat dan impian tentang masa depan yang diinginkan seperti terjadi begitu saja. Bahkan dalam suasana ini pula pergumulan kekuasaan sesama anak bangsa tidak pula selamanya bisa terelakkan.

Ketika langkah sedang diayunkan untuk mendapatkan tatanan sosial dan politik yang diidamkan bersama telah direnungkan maka bagaimanakah berbagai corak konflik internal dan bahkan tragedi yang pernah melanda kehidupan bangsa bisa terlupakan?

Bukankah di saat revolusi nasional sedang bergejolak, ketika cita-cita nasional sedang diperjuangkan dengan “darah dan air mata”, di waktu itu pula apa yang biasa diejek kaum Republikan (yaitu mereka yang setia pada Republik Indonesia dengan ibukota sementara Yogyakarta) sebagai “negara boneka” didirikan di beberapa tempat oleh mereka yang menganggap diri sebagai penyalur hasrat masyarakat daerah. Entah karena bujukan atau mungkin juga hasutan sang penjajah, dan entah dorongan hasrat akan kekuasaan yang provincialis atau karena faktor lain, tetapi kehadiran berbagai “negara boneka” itu membayangkan suasana keretakan dalam kesatuan bangsa. Maka bisalah dipahami juga kalau di suatu saat—ketika Konferensi Meja Bundar (Den Haag, 1949) diadakan—jumlah dari apa yang disebut kaum Republikan “negara boneka” itu ternyata lebih dari dua-puluh buah, meskipun yang terbesar dan terkuat tetap yang tertua juga (Negara Indonesia Timur, Negara Sumatra Timur).

Di samping itu bagaimanakah bisa terlupakan berbagai corak krisis dan perbenturan fisik yang keras antara sesama anak bangsa—mulai dari apa yang disebut “revolusi sosial” sampai dengan yang terang-terangan ingin mendirikan “negara dalam negara” terjadi di saat bangsa sedang menghadapi ancaman dari pasukan tentara bekas penjajah, Belanda. Tetapi terlepas dari soal siapa yang salah dan siapa pula yang benar, harus diakui juga bahwa sudah sejak awal tahun 1946 berbagai corak konflik internal telah mulai menjadi bagian dari dinamika revolusi nasional. Ada kalanya konflik internal itu berdimensi kecil saja tetapi ada juga yang bukan saja menggoncang ketenteraman masyarakat tetapi juga praktis berhasil “mengubah jalan sejarah”. “Perang Cumbok” di Aceh Timur (1946) menyebabkan terbunuhnya sekian banyak kaum *uluebalang* dan terjadinya peralihan dalam sistem kekuasaan. Para *uluebalang* tersingkir, golongan ulama tampil sebagai penentu arus politik. Sementara itu apa yang biasa disebut “revolusi sosial” meledak di keresidenan Sumatra Timur. Sekian banyak kaum bangsawan Melayu, penguasa dari beberapa kesultanan, tersingkir dari wilayah

kekuasaan yang diwarisi dan bahkan mati terbunuh. “Revolusi sosial” juga mengikis kekayaan para bangsawan dari beberapa kesultanan. Maka mestikah diherankan kalau seketika kesempatan terbuka kaum bangsawan yang terhindar dari “revolusi sosial” yang keras itu mendirikan apa yang disebut sebagai “Negara Sumatra Timur”—sebuah negara yang didukung oleh pasukan Belanda yang telah berhasil menduduki kota Medan dan sekitarnya. Di waktu ini pula di pantai Utara Jawa Tengah terjadi apa yang disebut “Peristiwa Tiga Daerah” (Brebes, Pematang, Tegal). Ketika itulah berbagai corak tindakan yang dianggap “revolusioner” terjadi pula. Para pejabat yang telah berkuasa sejak zaman penjajahan Belanda disingkirkan—dengan desakan atau bahkan dengan paksaan. Seperti halnya dengan kasus “revolusi sosial” di Sumatra Timur hanyalah ketegasan tentara nasional suasana krisis dengan gaya revolusioner ini akhirnya berhasil dihentikan.

Kalau ancaman internal terhadap keutuhan Republik Indonesia yang baru berdiri itu telah disinggung maka bagaimanakah akan terlupakan dua peristiwa yang sampai kini terlalu enggan untuk terpuus dari sistem ingatan bangsa? Pertama, usaha separatisme dan pembangkangan Darul Islam, yang bermula ketika persetujuan Indonesia-Belanda, diawasi PBB, yang diadakan di atas kapal Renville (1948). Hasil perundingan ini memang umum dianggap merugikan Republik, karena itulah Perdana Menteri Amir Syarifuddin kehilangan dukungan dari KNIP, yang berfungsi sebagai parlemen sementara. Dengan perjanjian Renville ini berarti tentara Republik Indonesia tidak dibolehkan berada di wilayah yang dikatakan di belakang “garis van Mook”. Artinya TNI (pasukan Divisi Siliwangi) harus meninggalkan Jawa Barat. Tetapi pembangkangan Darul Islam barulah diketahui ketika Belanda melancarkan agresi kedua (Desember 1948). Ketika pasukan TNI kembali memasuki wilayah Jawa Barat ternyata bukan sambutan persahabatan yang didapatkan, tetapi sikap permusuhan yang diungkapkan dengan tindakan kekerasan. Barulah pada awal 1960-an masalah D.I. ini boleh dikatakan selesai.

Tidak lama setelah Komite Nasional Indonesia Pusat (parlemen sementara, di masa revolusi nasional) menyatakan mosi tidak percaya pada kabinet Amir Sjarifuddin, maka sang mantan perdana menteri ini mengumumkan bahwa ia adalah seorang komunis dan iapun bergabung dengan “Sayap Kiri”. Di bawah pimpinan Muso, tokoh komunis Indonesia yang telah bertahun-tahun tinggal di Moskow, pasukan yang telah dipengaruhi PKI menduduki Madiun dan mulai mengancam keutuhan Republik. Maka korban pun berjatuh. Presiden Sukarno pun minta rakyat untuk menentukan pilihan-- “ Sukarno-Hatta “atau “Muso-Amir”. Sebagaimana sudah bisa diduga pilihan ini sama sekali tidak dirasakan rakyat sebagai hal yang bersifat dilematis. Dengan teramat mudah rakyat menentukan pilihan mereka. Tetapi bagaimanapun juga sebuah tragedi dalam kehidupan bangsa telah terjadi. Akhirnya apa yang disebut sebagai “peristiwa Madiun” bisa diselesaikan—diselesaikan tetapi korban di kalangan rakyat telah lebih dahulu berjatuh.

Tidak lama setelah “peristiwa Madiun” ini diselesaikan, maka tentara kerajaan Belanda secara mendadak (19 Desember 1948) menyerang Yogyakarta dan menduduki sekian banyak kota dan wilayah di Jawa dan Sumatra. Tetapi untunglah keutuhan Republik terjaga karena Sjafruddin Prawiranegara--sesuai dengan rencana—berhasil mendirikan dan memimpin Pemerintah Darurat Republik Indonesia dari “*somewhere in the jungle*” Sumatra. Jenderal Sudirman pun mengakui otoritasnya sebagai pelaksana jabatan kepresidenan.

Ujian akan keutuhan Republik masih terus terjadi—sekian kali krisis pemerintahan harus dilalui, sekian banyak pemberontakan besar dan kecil harus diatasi dan sekian banyak pula kekecewaan rakyat harus diobat—maka bisalah dipahami juga kalau masalah sistem pemerintah yang cocok sering diperdebatkan. Setelah Republik Indonesia Serikat (Desember 1949-Agustus 1950) kembali menjadi negara kesatuan , maka Indonesia pun melalui suasana politik yang biasa disebut “zaman Demokrasi parlementer”, sesuai

dengan UUD Sementara 1950. Tetapi ketidakstabilan pemerintahan – kabinet jatuh-bangun dan pergolakan daerah – akhirnya mendorong Presiden untuk mengeluarkan keputusan 5 Juli 1959 yang menyatakan Indonesia kembali ke UUD 1945. Indonesia kini telah memasuki zaman Demokrasi terpimpin. Tetapi tergelincir dalam situasi serba revolusi yang diperkenalkan bukan saja telah menyebabkan terjadinya krisis ekonomi tetapi juga memicu terjadinya musibah sosial-politik yang luar biasa.

Dalam suasana serba-konflik yang diajarkan, apa yang kini dikenal sebagai peristiwa G-30-S pun terjadi. Seketika hal ini bisa diatasi maka ketika itu bangsa tergelincir ke dalam situasi konflik yang teramat memprihatinkan. Tiba-tiba dendam sosial-politik yang telah sempat tersimpan selama masa Demokrasi Terpimpin berada di puncak kekuasaan seakan-akan “tumpah ke luar” tanpa adanya bendungan yang menghambat. Maka bangsa pun tergelincir pada situasi ketika dendam sejarah enggan untuk menghilang.

Tetapi sementara itu negara kesatuan, UUD 1945 dan Pancasila tidak lagi diperdebatkan. Masalah lain pun tidak bisa terhindarkan. Seperti apakah corak dan wujud “karakter bangsa” yang sesuai ketika usaha mengayuh biduk kehidupan bangsa mencapai pantai harapan sedang diayunkan? Apakah mungkin didapatkan “karakter bangsa” yang ideal setelah selama empat puluh tahun mengalami turun naiknya suasana otoritarianisme, meskipun sang penguasa tetap mengibarkan bendera demokrasi?

Dengan kata lain dalam membahas masalah “karakter bangsa” buku ini tidak menjanjikan hasil kajian akademis tentang dinamika kehidupan masyarakat dan corak kehidupan bangsa tetapi memuat tulisan-tulisan yang bertolak dari hasrat untuk membawa bangsa ke pantai harapan yang dicita-citakan. Tetapi biasalah dipahami juga kalau dalam usaha membuat “skenario” masa depan ini para pemikir bertolak dari pengalaman langsung ataupun dari pemakaian disiplin ilmiah tertentu. Meskipun demikian bukanlah ketepatan pengamatan akan realitas sosial-kultural dan politik yang

menjadi ukuran tetapi hasrat ideal untuk membawa bangsa ke pantai harapan yang diidamkan.

Begitulah setelah mempelajari pengalaman yang telah dilalui bangsa dan tidak pula jarang ditambah dengan pengetahuan yang didapat dari pengalaman bangsa asing—para pemikir bangsa ini “membuat skenario” menuju masa depan yang dicita-citakan bersama. Berbagai corak dan ragam peristiwa telah dilalui bangsa, baik oleh mereka yang tinggal “di sana”, maupun yang dilahirkan dan dibesarkan “di sini”. Ada “tragedi” yang terjadi di saat perjuangan untuk menuju masa depan cerah sedang dijalankan. Tetapi bukankah terjadi juga “komedi” yang memperlihatkan betapa kenaiifan ketika jembatan menuju masa depan yang cerah sedang dilalui?

Sebagai buku yang berkisah tentang dinamika dan bahkan juga gejala dari arus pemikiran anak bangsa buku ini mengambil empat masalah yang strategis dalam usaha merumuskan dan memperjuangkan corak “karakter bangsa” yang ideal. Masalah itu ialah “**demokrasi**”, “**kebudayaan**”, “**pendidikan**”, serta “**pembangunan dan kesejahteraan sosial**”. Setiap masalah “dijawab” oleh tiga orang pemikir, yang praktis mewakili latar belakang pendidikan bahkan pengalaman kultural yang boleh dikatakan berbeda-beda. Perbedaan *pertama* ialah biografis – tiga tokoh pemikir—Abdul Rivai, Tjokroaminoto dan Sutomo—telah meninggal dunia ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan dan berbagai corak dinamika dalam kehidupan kemasyarakatan mengalami goncangan yang drastis juga. Kesamaan mereka yang lain—ketiganya dikenal juga sebagai pemimpin pergerakan kebangsaan, meskipun dikenal dengan gaya dan bahkan ideologi politik yang berbeda-beda. *Kedua*, tiga tokoh pemikir lain—Soedjatmoko, Widjojo Nitisastro dan Mubyarto—bukan saja hidup sezaman tetapi juga sama-sama terlibat dalam suasana perdebatan intelektual tentang strategi pembangunan nasional ketika regim Demokrasi Terpimpin telah berakhir dan Orde Baru telah mulai mengayunkan langkah ke periode sejarah bangsa yang sempat

dibanggakan sebagai “era pembangunan”. *Ketiga*, dari dua belas tokoh yang ditampilkan – Ki Hadjar Dewantara , Mohammad Sjafei, Mohammad Yamin dan Mohammad Natsir, di samping Widjojo Nitisastro—pernah dipercaya sebagai anggota kabinet R.I. Tetapi hanya Natsir, mantan Menteri Penerangan di masa Revolusi, sempat menjadi Perdana Menteri ketika Indonesia kembali menjadi “negara kesatuan”. Sedangkan tokoh yang lain, kecuali Widjojo, pernah menjadi menteri atau wakil menteri pendidikan dan kebudayaan. Tetapi dua yang pertama menjabat kedudukan yang terhormat itu ketika revolusi nasional sedang berkecamuk, jadi tidak banyak yang bisa mereka kerjakan. Salah satu peninggalan Yamin sebagai menteri ialah didirikannya apa yang waktu itu disebut PTPG (Perguruan Tinggi Pendidikan Guru—kemudian menjadi IKIP dan akhirnya Universitas) di beberapa kota. Tetapi, bagaimanapun juga, dalam sejarah nasional nama Yamin tidak tercatat sebagai tokoh pendidikan. Ia lebih diingat sebagai penyair soneta, tokoh pergerakan kebangsaan (salah seorang anggota Panitia Sembilan—perumus Pembukaan UUD) dan politik dan ahli konstitusi. *Keempat* dari kedua belas nama-nama ini dua orang—Rahmah el Junusiyah dan Mubyarto--boleh dikatakan tidak terlibat secara langsung, meskipun tidak pula bisa dikatakan absen, dalam gejolak politik nasional. Mereka berkecimpung dalam dunia pendidikan. Hanya saja tidak bisa dilupakan adalah fakta historis yang keras—Rahmah adalah pelopor pendidikan Islam modern bagi kaum wanita. Akhirnya, *kelima*, tidak salah kalau diingatkan juga bahwa “jabatan resmi” dari empat orang mereka—Takdir, Yamin, Widjojo dan Mubiyarto—adalah guru besar di universitas masing-masing.

Tetapi bagaimanakah halnya dengan perhatian utama mereka? Kalau hanya dilihat dari sudut etnisitas Abdul Rivai sama saja dengan Natsir, keduanya berasal dari Minangkabau, tetapi baik usia—Rivai telah menjadi tokoh terkenal ketika Natsir masih bersekolah—dan pengalaman pendidikan berbeda-beda—Rivai bersekolah di Eropa, sedangkan Natsir tamatan AMS Bandung. Demikian juga kalau dibandingkan Tjokroaminoto dengan Natsir. Keduanya hasil pendidikan Barat tetapi sangat mendalami ajaran dan

sejarah Islam, Natsir tampil sebagai seorang pemikir Islam (kemudian juga terlibat dalam politik) ketika Tjokroaminoto telah berpulang. Natsir tampil ketika perdebatan “Islam dan nasionalisme” sedang hangat dan di saat masalah hubungan “Islam dan sosialisme”, sebagaimana yang pernah dialami oleh Tjokroaminoto, telah mengendur akibat “peristiwa pemberontakan PKI 1926/1927”. Sebagaimana selalu dikatakannya, Natsir menganggap dirinya sebagai salah seorang murid Haji Agus Salim. Bukankah Haji Agus Salim pelopor dari pembentukan (1925) *Jong Islamieten Bond*—organisasi Islam dari mereka yang mendapat pendidikan Barat?

Dalam dunia pendidikan praktis tidak terjadi “perdebatan”, meskipun terdapat pendekatan yang berbeda-beda. Ketiganya – Ki Hadjar, Rahmah, dan Syafei—saling menghargai. Kalau Ki Hadjar ingin memperkenalkan sistem “nasional” dengan isi pendidikan yang bertolak dari pengalaman dan kearifan tradisi dalam mengharungi zaman modern, maka Syafei lebih bertolak dari kemampuan anak didik mempergunakan “akal, perasaan, dan tangan”. Maka bisalah dipahami juga mengapa tamatan sekolah INS Kayutanam umumnya bisa memainkan satu-dua alat musik (paling biasa gitar dan biola) bertukang, di samping memperlihatkan diri sebagai seorang terpelajar. Sedangkan Rahmah yang terpengaruh oleh aliran “kaum muda Islam “ atau biasa juga disebut modernisme Islam, membuka sekolah “umum berlandaskan Islam” bagi para gadis remaja. Ternyata yang datang bersekolah ke Dinyah Putri (di kota Padang Panjang) bukan saja para gadis Minangkabau, tetapi juga dari mereka yang datang dari Jawa dan bahkan dari Tanah Semenanjung Malaya. Sekarang tingkatan Dinyah Putri tidak lagi sampai tingkat sekolah menengah saja, tetapi telah sampai perguruan tinggi.

Meskipun Soedjatmoko telah mulai dikenal masyarakat sebagai seorang intelektual-pemikir sejak tahun 1950-an dan Widjojo Nitisastro telah memperlihatkan diri sebagai ahli demografi Indonesia yang cemerlang sejak awal 1960-an tetapi pemikiran mereka—seperti juga halnya dengan Moebyarto—semakin diperhitungkan ketika Orde Baru telah mereka telah langsung terlibat dalam perdebatan dan

perumusan “pembangunan nasional”. Dalam periode inilah Soedjatmoko, yang membayangkan betapa perlunya terjadi “transformasi sosial yang menyeluruh” tampil dengan dua nilai normatif pembangunan. Keduanya ialah, pertama “pembangunan sebagai pembangunan manusia” dan kedua, “pembangunan sebagai pertumbuhan manusia dan peradaban”. Tetapi Widjojo bersama-sama kawan-kawannya dari Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia telah mulai memikirkan masalah “pembangunan” sejak Indonesia masih berada dalam “masa Revolusi” Demokrasi Terpimpin. Dia dan kawan-kawannya langsung menghadapi perhatian pada “*breakthrough*”—keterlepasan dari jebakan keterbelakangan ekonomi. Ketika terjadi perdebatan antara pilihan “*growth*” (pertumbuhan) atau “*equity*” (pemerataan), ia dan kawan-kawan lebih mendahulukan keharusan terjadinya “pertumbuhan”. Dalam masalah inilah Mubyarto ikut serta dalam wacana masalah pembangunan. Apakah “pertumbuhan” harus melupakan landasan dasar kehidupan kenegaraan, Pancasila? Maka iapun tampil dengan gagasan “ekonomi Pancasila”, yang secara praktis berlandaskan pada strategi ke arah terjadinya “pengentasan kemiskinan”.

Meskipun tokoh dan pemikir yang dibicarakan dalam buku ini mempunyai karir dan aktivitas yang berbeda-beda dan bahkan juga hidup dalam zaman yang tidak pula sama tetapi tujuan utama mereka sama – mereka ingin menemukan perumusan strategi yang tepat dalam usaha memajukan kehidupan bangsa. Bukankah harapan “kemajuan” yang diajukan Dr.A.Rivai di awal abad ke-20 bisa saja dipakaikan ke zaman sekarang, meskipun dalam bentuk yang sama sekali belum sama sekali terbayangkan satu abad yang lalu. Walaupun ajakan untuk memasuki dunia pendidikan yang dilontarkan para ahli pendidik di awal pergerakan kebangsaan – seperti Ki Hadjar Dewantara atau Rahmah el -Junusyah—kini telah dianggap hal yang biasa saja, tetapi bukankah ini menunjukkan keabadian dari seruan yang telah dikumandangkan? Bukankah pula masalah “strategi pembangunan nasional” harus kembali direnungkan kembali? Apakah strategi yang sesuai dengan situasi kesekarang kita—Indonesia yang telah mengalami berbagai corak ujian sosial-politik?

Penutup

Begitulah dengan menempatkan seruan atau anjuran yang mereka sampaikan dalam konteks kekinian maka semua skenario dalam usaha pembentukan “karakter bangsa” yang sesuai dengan tuntutan zaman akan bisa juga dirumuskan. Bagaimanakah seruan atau anjuran serta pendapat mereka tentang “karakter bangsa” bisa diwujudkan dalam realitas kekinian setelah berbagai corak pengalaman bangsa—kemenangan yang pernah didapatkan, kekecewaan yang pernah dirasakan, dan bahkan tragedi kehidupan bangsa yang sempat diderita—dipahami dalam konteks kekinian? Bagaimanakah angkatan muda membuat perumusan baru tentang “karakter bangsa” dalam konteks perubahan zaman yang telah terjadi dan bahkan telah pula semakin cepat mengalir—sesuatu yang sekarang masih dianggap “*hangat*” dalam beberapa waktu saja telah termasuk dalam kategori “sesuatu yang *belum lama ini baru saja muncul*”.

Kehadiran buku ini semakin penting juga karena bisa juga memberi pelajaran sejarah tentang betapa berbagai corak ujian bisa juga diatasi, meskipun ada kalanya dengan bayaran yang teramat mahal. Bukankah berbagai corak tragedi dalam kehidupan bangsa telah kita lalui? Memang kalau diingat-ingat dan direnungkan maka akan tampaklah betapa kearifan tidak selamanya mendampingi bangsa dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi itu. Mudah-mudahan dengan buku ini terasalah bahwa bahwa “kebenaran” tidak selamanya berhasil menyelesaikan ancaman pada dirinya dan bahkan tidak pula jarang keberhasilan yang didapatkannya harus dibayar dengan tertinggalnya “rasa dendam” di hati sebagian anak bangsa. Bukankah bangsa harus menyadari juga bahwa adakalanya keberhasilan hanyalah perwujudan lahir sekadar menutupi tragedi yang telah terjadi.

Buku ini bukan saja mengingatkan pada kearifan yang diwarisi para pemikir bangsa tetapi juga sebagai pengantar ketika pahit getir pengalaman bangsa dalam mengayuh sampan menuju pantai yang dicita-citakan ingin direnungkan. Semoga pemikiran baru yang sesuai

dengan tuntutan zaman dapat terangsang dalam usaha mendalami pesan yang mungkin terselubung dalam buku ini.

Semoga buku ini tidak saja memberikan segenggam kearifan yang diperlukan di hari ini, tetapi juga mengingatkan pada pengalaman pahit bangsa yang juga sering terlupakan.

BAB I

Bapak Karakter Bangsa

Demokrasi: Pemikiran dan Praktik

Rhoma Dwi Aria Yuliantri

Demokrasi bukanlah konsep yang mudah dipahami. Demokrasi memiliki banyak makna, evolutif, dan dinamis. Pemaknaan demokrasi terkadang bersifat interpretatif, bahkan subyektif. Setiap penguasa berhak mengklaim negaranya sebagai negara yang demokratis meskipun pada praktiknya masih jauh dari nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi.

Oleh karena itu, bukan hal yang mengherankan apabila terdapat cukup banyak variasi terkait penafsiran dan penerapan demokrasi dalam sistem pemerintahan di suatu negara. Ada yang menganut demokrasi liberal, demokrasi rakyat, demokrasi proletar, demokrasi komunis, demokrasi terpimpin, demokrasi parlementer, demokrasi Pancasila, dan lainnya.¹

Demokrasi adalah konsep yang evolutif dan dinamis, bukan konsep yang statis. Demokrasi selalu mengalami perubahan, baik bentuk formal maupun substansinya, sesuai dengan konteks dan dinamika sosio-historis yang berkembang. Perkembangan demokrasi bersifat evolutif. Apa yang dipahami sebagai gagasan demokrasi pada masa Yunani Kuno, misalnya, tidak harus sesuai dan relevan dengan ide-ide perkembangan demokrasi dewasa ini.²

Di Indonesia, pemahaman umum tentang demokrasi dimaknai sebagai “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”.³ Dari pengertian tersebut, rakyat sesungguhnya memiliki peran utama, baik secara langsung maupun diwakilkan, dalam sistem

pemerintahan, meskipun sampai saat ini Indonesia belum mampu mencapai level kehidupan berdemokrasi seperti yang dicita-citakan.

Ciri khas sebuah negara yang menganut sistem demokrasi adalah bahwa kekuasaan sepenuhnya di tangan rakyat. Dengan kata lain, rakyat adalah pihak yang paling berkuasa dan paling berdaulat. Pemerintah atau pemimpin tidak bisa menjalankan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak atau aspirasi rakyat. Dalam negara demokrasi, pemimpin adalah orang yang ditunjuk oleh rakyat untuk melayani dan mengabdikan kepada rakyat, bukan justru sebaliknya.

Dengan demikian, semua anggota masyarakat memiliki hak yang sama sebagai manusia dan warga negara, tidak ada orang atau kelompok tertentu yang diperkenankan memerintah orang lain tanpa persetujuan dan penugasan dari warga masyarakat sendiri. Dalam kehidupan berdemokrasi, hak asasi setiap warga negara Indonesia dihargai secara sama dan setara tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, serta jenis dikotomi lainnya.

Inti dari demokrasi adalah persamaan hak dan kedudukan dari setiap warga di dalam sebuah negara. Ruang lingkup demokrasi meliputi banyak aspek, termasuk politik, sosial, ekonomi, hukum, dan pendidikan. Di samping itu, demokrasi juga harus menjunjung tinggi keadilan. Menurut Amien Rais (1999), demokrasi yang tidak menjamin keadilan adalah demokrasi bohong-bohongan, demokrasi palsu yang harus disingkirkan jauh-jauh dari kamus kehidupan bangsa Indonesia.⁴

Indonesia sendiri menganut dan menerapkan sistem pemerintahan demokrasi setelah berdiri sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat sejak diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Masa awal demokrasi di Indonesia ditandai oleh peristiwa penting, yaitu ditandatanganinya Maklumat No. X oleh Mohammad Hatta selaku Wakil Presiden Republik Indonesia Pertama saat itu. Hatta meyakini bahwa demokrasi merupakan sistem politik terbaik karena rakyat bisa menentukan nasibnya sendiri. Hak menentukan nasib sendiri, menurut Hatta, adalah hal yang teramat penting. Jika

rakyat tidak memperoleh hak tersebut, maka rakyat akan sengsara dan ditindas, baik oleh bangsa sendiri maupun oleh bangsa asing.

Maklumat No. X yang ditandatangani oleh Hatta bertujuan agar masyarakat negara Indonesia yang memiliki kapabilitas untuk mengelola negara segera membentuk kendaraan politik yang bisa mengakomodasi kepentingan negara. Jaminan kehidupan yang demokratis diberikan dalam maklumat yaitu dengan akan diselenggarakannya pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat (anggota DPR dan MPR).

Akan tetapi, jauh sebelum Maklumat No. X dirilis, gagasan demokrasi, nasionalisme, dan kerakyatan di Indonesia sebenarnya sudah tercetus sebelumnya. Hal ini bisa dilihat dalam pemikiran tokoh-tokoh bangsa yang sudah berkiprah sejak era pergerakan nasional, yakni H.O.S Tjokroaminoto (1882-1934), Abdul Rivai (1871-1937), dan Mohammad Natsir (1908-1993).



H. O. S Tjokroaminoto, Lahir di Ponorogo, Jawa Timur 16 Agustus 1882
(Sumber : Arsip Nasional Republik Indonesia – ANRI)

1.1. H. O. S Tjokroaminoto (1882-1934)

Hadji Oemar Said Tjokroaminoto adalah salah satu tokoh terbesar pada era pergerakan nasional bangsa Indonesia pada awal abad ke-20.⁵ Orang-orang Belanda menyebut Tjokroaminoto sebagai *De Ongekroonde van Java* atau "Raja Jawa Tanpa Mahkota". Sebutan itu tentunya bukan tanpa alasan. Tjokroaminoto memang menjadi sosok paling berpengaruh pada masa itu, ketika ia memimpin organisasi kebangsaan bernama Sarekat Islam (SI).

Gagasan Tjokroaminoto tentang sebuah organisasi berasaskan kerakyatan terlihat dari idenya untuk mengubah nama Sarekat Dagang Islam (SDI) menjadi Sarekat Islam (SI).⁶ Tjokroaminoto berpendapat, kata "dagang" sangat membatasi ruang gerak organisasi. Hal itu ditujukan agar organisasi dapat mengembangkan sayapnya ke seluruh wilayah Hindia Belanda dan tidak saja berkecimpung dalam bidang ekonomi, melainkan juga di sektor politik. Nampak jelas bahwa setelah masuknya Tjokroaminoto, SI lebih banyak bergerak di bidang politik ketimbang menangani urusan-urusan ekonomi.⁷

Menurut akte baru yang disusun Tjokroaminoto, tujuan Sarekat Islam adalah "Memajukan semangat perdagangan Bumiputera, membantu anggota-anggota yang kesulitan, memajukan perkembangan spiritual dan minat di bidang materi di kalangan Bumiputera, dan menentang salah paham tentang Islam serta memajukan kehidupan beragama."⁸ Artinya Agama Islam lebih berfungsi sebagai ideologi sehingga gerakan itu lebih merupakan suatu revivalisme, yaitu menghidupkan kembali kepercayaan dengan jiwa atau semangat yang berkobar-kobar.

Dengan demikian, atas gagasan Tjokroaminoto, Sarekat Islam telah meletakkan dasar perjuangannya atas tiga prinsip dasar, yaitu: *Pertama*, asas agama Islam sebagai dasar perjuangan organisasi; *Kedua*, asas kerakyatan sebagai dasar himpunan organisasi; *Ketiga*, asas sosial ekonomi sebagai usaha untuk

meningkatkan kesejahteraan rakyat yang umumnya berada dalam taraf kemiskinan.

Salah satu hasil pemikiran Tjokroaminoto yang paling terkenal adalah tentang perpaduan Islam dan sosialisme, yang akhirnya bermuara pada konsep demokrasi. Terkait Islam dan Sosialisme, Tjokroaminoto telah menuliskannya dalam sebuah buku yang terbit pertama kali pada bulan November 1924. Gagasan Tjokroaminoto tentang Islam dan sosialisme sebenarnya merupakan reaksinya atas kondisi SI Semarang di bawah oleh Semaoen, Darsono yang cenderung radikal dengan condong ke arah komunisme.

Tjokroaminoto memaparkan asal-muasal dan definisi sosialisme. Sosialisme, tulisnya, berasal dari bahasa latin "*socius*" yang berarti "maker" dalam bahasa Belanda atau "teman/sahabat" dalam bahasa Indonesia. Sementara dalam bahasa Jawa adalah "konco", sedangkan dalam bahasa Arab berarti "*asrat*". Dengan demikian, sosialisme merupakan akar dari cita-cita yang nikmat, yaitu "*cita-cita het kameraadschappelijke (de kameraadschap)* pertemanan-persahabatan, *musahabah* atau *mu'asjarah, kekancan*." ⁹

Pergerakan sosialisme, muncul pertama kali karena mulai maraknya kerusakan pada masyarakat yang kemudian berlanjut pada tiap-tiap zamannya. Benih pergerakan tersebut, kata Tjokroaminoto, tidak hanya mendapat siraman dari cita-cita hikmah (*wijsgeerige idealen*), tetapi terutama sekali mendapat siraman juga dari perasaan-perasaan keagamaan yang mendalam. ¹⁰

Islam dan sosialisme dapat berjalan beriringan karena mengusung tujuan serupa, yaitu membela manusia dari penindasan yang dilakukan oleh manusia lainnya. Bagi Tjokroaminoto, tanpa dasar agama (Islam), sosialisme tidak akan dapat berjalan dengan baik, bahkan bisa menyesatkan dan membawa kerusakan kepada manusia. Selain itu, Tjokroaminoto juga ingin menunjukkan bahwa menjadi seorang sosialis bagi seorang muslim tidak perlu menjadi seorang Marxis apalagi seorang komunis. ¹¹ Dia menulis:

“Sosialisme hanyalah bisa menjadi sempurna apabila tiap-tiap manusia tidak hidup hanya untuk dirinya sendiri saja sebagai binatang atau burung, tetapi hidup untuk keperluan masyarakat bersama, karena segala apa saja yang ada hanyalah berasal atau dijadikan oleh satu kekuatan atau satu kekuasaan, ialah Allah Yang Maha Kuasa.”¹²

Tjokroaminoto bahkan menghubungkan sosialisme dengan firman Tuhan yang termaktub dalam Alquran, yakni surat Adz-Dzariyat ayat 56 yang artinya: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.”

Prinsip dari sosialisme, seperti yang dituliskan oleh Tjokroaminoto, bisa menjadi sempurna apabila tujuan hidup dari tiap-tiap manusia tidak hanya untuk mengejar keperluan dan kesenangan biasa, yaitu kesenangan dunia, tetapi manusia hendaklah juga mengejar tujuan hidup yang lebih tinggi. Sosialisme menghendaki cara hidup satu untuk semua dan semua untuk satu. Tjokroaminoto menjelaskan tentang hal ini, “yaitu cara hidup yang hendak mempertunjukkan kepada kita bahwa kita adalah yang memikul tanggung jawab atas perbuatan kita satu sama lain.”¹³

Nabi Muhammad SAW, dalam pemikiran Tjokroaminoto, ternyata juga menerapkan prinsip-prinsip sosialisme dalam kehidupan bernegara maupun beragama. Nabi Muhammad bahkan secara gigih memperjuangkan sosialisme dan dipadukan dengan ajaran Islam yang mengajarkan bagaimana manusia harus menjadi bagian dari banyak manusia lainnya dan mengedepankan kepentingan orang banyak.

Tjokroaminoto meyakini bahwa dasar sosialisme Islam adalah ajaran Nabi Muhammad terkait kemajuan budi pekerti rakyat. Tjokroaminoto membagi sosialisme Islam pada tiga anasir, yaitu kemerdekaan (*vrijheid-liberty*), persamaan (*gelijkheid-equality*), dan persaudaraan (*broederschap-fraternity*). Terkait hal ini, dia menulis:

“Adapun yang menjadi dasar pengertian sosialismenya Nabi Muhammad yaitu kemajuan perikeutamaan dan kemajuan

budi pekerti rakyat. Umat Islam adalah orang yang cakap sekali dalam melakukan kehendak sosialisme yang sejati itu. Sejak Nabi Muhammad SAW. memegang kekuasaan negara, maka negara itu segeralah diaturnya secara sosialis dan semua tanah dijadikannya milik negara. Politik yang demikian itu dilanjutkannya, malahan sampai Islam telah melancarkan dirinya ke negeri-negeri luar.”¹⁴

“Bahwa rasa persaudaraan dan persatuan dalam dunia Islam, yaitu dasar yang sesungguhnya bagi sosialisme, tiada akan pernah mati bahkan akan selalu bertambah-tambah di dalam hati umat Islam. Bagi kita orang Islam, tidak ada sosialisme atau rupa-rupa isme yang lain-lainnya yang lebih baik, lebih elok, dan lebih mulia, selain sosialisme yang berdasarkan Islam, itu saja.”

Dari sinilah terlihat bahwa Tjokroaminoto adalah sosok pemikir bangsa yang mendukung penerapan konsep demokrasi dalam pemerintahan suatu bangsa. Dari pemikirannya, tampak bahwa konsepsi negara demokrasi yang diinginkan dan diperjuangkan oleh Tjokroaminoto mengacu kepada konsep negara republic Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad. Sebuah negara Islam merdeka dengan mencontoh Negara Madinah adalah di antara harapan Tjokroaminoto bagi Indonesia pada saat itu.¹⁵

Negara Madinah merupakan prototipe negara demokrasi yang dijiwai semangat sosialisme Islam dan tertuang dalam Piagam Madinah sebagai konstitusi negara.¹⁶ Piagam Madinah diyakini sebagai konsep awal negara demokrasi yang digagas oleh Nabi Muhammad. Piagam ini adalah sebuah persetujuan antarsuku-suku dan para penganut kepercayaan seperti Islam, Nasrani, dan Yahudi untuk menjaga hubungan dan keharmonisan.

Piagam Madinah digagas dan kemudian disusun dengan tujuan untuk memelihara perdamaian dan kerjasama, melindungi hidup dan harta seluruh masyarakat Madinah yang majemuk. Selain itu, juga untuk melawan peperangan dan ketidakadilan tanpa

menghiraukan suku atau agama serta menjamin kebebasan beragama dan melakukan pembaruan.¹⁷

Dalam Piagam Madinah terkandung nilai-nilai yang sangat penting, terutama dalam hal kesetaraan antarwarga, kebebasan beragama, dan jaminan keamanan. Ketiga hal ini menjadi poin krusial karena telah dianggap menjadi sebuah keniscayaan dalam demokrasi. Madinah pada masa Nabi Muhammad memberikan pengalaman dan pelajaran yang sangat berharga yang perlu untuk dijadikan rujukan sehingga umat Islam dapat melanjutkan keteladanan politik sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad.

Pada hakikatnya, Piagam Madinah merupakan sebuah konstitusi yang dilahirkan dari proses demokrasi liberatif, yaitu demokrasi yang bersumber dari aspirasi seluruh penduduk Madinah yang diperkuat dengan sendi-sendi moralitas serta spiritualitas dalam agama-agama samawi, khususnya Islam.¹⁸ Dari situlah Tjokroaminoto mulai memikirkan gagasan demokrasi untuk bangsa Indonesia jika merdeka dan memiliki negara sendiri yang berdaulat penuh suatu saat nanti.

Dari aspek bentuk negara merdeka, Tjokroaminoto telah merumuskan tentang dasar negara merdeka dan strategi untuk memperoleh kemerdekaan bagi umat Islam yang diperjuangkan melalui Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) yang tidak lain adalah bentuk baru dari Sarekat Islam (SI) dalam mewujudkan sebuah partai politik.

Dalam konsepsi Tjokroaminoto, negara merdeka yang akan dibangun adalah negara yang berlandaskan pada Syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad. Tjokroaminoto memandang Islam sebagai ikatan yang dapat dijadikan sebagai unsur pemersatu. Hal ini telah dibuktikannya ketika memimpin dan membesarkan Sarekat Islam sejak tahun-tahun awal dekade kedua abad ke-20.

Disamping mengacu kepada model negarademokrasi pada masa Nabi Muhammad di Madinah, negara demokrasi dalam

pandangan Tjokroaminoto juga merujuk pada sistem demokrasi yang diterapkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab, yang memberikan hak kepada setiap warga negara untuk mengemukakan pendapatnya.

Konsep negara Madinah pada masa Nabi Muhammad dan Khalifah Umar bin Khattab itu telah mewarnai pemikiran Tjokroaminoto dalam merumuskan negara demokrasi yang mengacu pada sistem perwakilan (parlemen), yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum yang harus diterapkan di negara yang menganut republik atau kerajaan. Sistem perwakilan itu merupakan bentuk demokrasi yang paling memungkinkan untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan yang bisa diawasi rakyat.

Gagasan demokrasi yang diterapkan di Negara Madinah pada akhirnya memang tidak dapat dipertahankan karena terbatasnya sumber daya. Akan tetapi, bentuk kemoderenan Negara Madinah itu dipandang sebanding dengan kehidupan politik demokratis pada zaman modern dewasa ini.

Kecenderungan Tjokroaminoto terhadap konsep demokrasi juga terlihat dari sikap tidaksetujuinya terhadap feodalisme. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang menjunjung tinggi kesetaraan hak seluruh lapisan masyarakat tanpa mengenal sekat-sekat pembedaan. Maka dari itu, meskipun terlahir dari keluarga ningrat Jawa, Tjokroaminoto kerap tidak “mematuhi” aturan adat. Prinsip ini pun diterapkannya di Sarekat Islam sehingga Tjokroaminoto dikenal sebagai sosok yang modern, progresif, dan anti-feodalisme.

Tjokroaminoto tidak ingin ada jurang pemisah di kalangan elemen Sarekat Islam. Adat jongkok dan menyembah bagi kaum yang “lebih rendah” kepada golongan yang “lebih tinggi”—yang oleh Tjokroaminoto disebut dengan istilah adat Modjopaitan atau adat kodokan—tidak berlaku di Sarekat Islam. Semua anggota perhimpunan yang terdiri dari berbagai golongan dan latar belakang pekerjaan bisa duduk bersama dengan bersilang kaki, merokok, serta berbincang santai satu sama lain tanpa perlu jongkok dan sembah.¹⁹

Tjokroaminoto selalu menegaskan bahwa semua anggota Sarekat Islam itu bersaudara, tidak memandang umur, pangkat, dan status. Anggota Sarekat Islam seolah-olah merasakan hidup di dunia baru di mana tata cara hirarki Jawa-Belanda ditiadakan untuk sementara. Mereka menemukan suatu kondisi langka di mana rakyat biasa bisa duduk sejajar dengan pejabat-pejabat Belanda, bahwa semua orang sama harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Tidak adanya perbedaan kelas atau golongan di Sarekat Islam membuat organisasi ini semakin diminati dan anggotanya pun bertambah banyak dari hari ke hari. Dari para petinggi organisasi, kaum priyayi, pegawai pemerintah, saudagar batik, hingga rakyat pribumi biasa alias *kaum kromo*, sejajar dengan para bangsawan kerajaan dan pejabat tinggi.

Tidak hanya sebatas di Jawa saja, di bawah pimpinan Tjokroaminoto, Sarekat Islam juga meluaskan sayapnya hingga ke Sumatera dan wilayah-wilayah lain di tanah air. Pada tahun 1919, jumlah anggota Sarekat Islam mencapai dua juta orang.²⁰ Jumlah tersebut meningkat dengan cepat menjadi dua setengah juta orang di perjalanan tahun yang sama.²¹

Selain berjuang untuk kepentingan bangsanya yang ditindas kaum asing di negeri sendiri, Tjokroaminoto juga tidak absen mencermati situasi dunia internasional pada umumnya, termasuk maraknya gerakan Pan-Islamisme yang bertujuan untuk mempersatukan umat Islam demi membentuk solidaritas dunia. Tjokroaminoto adalah tokoh muslim Indonesia yang respek terhadap Pan-Islamisme.

Pemikiran Tjokroaminoto tentang Pan-Islamisme semakin dalam tertanam di Sarekat Islam. Hal ini tampak pada tulisannya yang dibuat pada tahun 1931 dengan judul “Tafsir Program Asas dan Program Tandhim Syarikat Islam” yang dijadikan sandaran nilai dan gerak para kader Sarekat Islam.

Menurut Tjokroaminoto, Pan-Islamisme sangat bisa diandalkan sebagai sikap politik untuk menyatukan seluruh umat

Islam di Indonesia pada khususnya dan di seluruh dunia pada umumnya. “Prinsip ini erat hubungannya dengan masalah kehidupan bangsa dan negeri tempat tumpah darah kita sendiri, dan dalam pengertian prinsip ini juga termasuk suatu sikap politik yang bertujuan untuk mencapai persatuan dan kesatuan umat Islam yang berada di lain-lain negara.”²²

Selain itu, Tjokroaminoto juga melihat adanya korelasi antara Pan-Islamisme dengan pergerakan Ahmadiyah yang mulai berkembang pesat pada dekade awal abad ke-20. “Malahan di Hindustan (India), kira-kira semenjak sepuluh tahun hingga sekarang ini sudah ada satu pergerakan Ahmadiyah Andjumani Ishaat-i-Islam yang dengan amat rajin dan berani melakukan propaganda Islam di seluruh dunia, sehingga sudah tidak sedikit lagi jumlah orang-orang dari lain agama yang masuk memeluk Islam, di antaranya ada beberapa orang ternama dan terpelajar.”²³

Paradigma nasionalisme juga dikenalkan Tjokroaminoto, bisa jadi menjadi salah satu orang Indonesia pertama yang memperkenalkan paradigma nasionalisme serta menuntut pemerintahan sendiri. Dalam suatu pidatonya, Tjokroaminoto pernah berseru: “Yang kita inginkan adalah sama rasa. CSI (Centraal Sarekat Islam) ingin mengangkat persamaan ras di Hindia (Indonesia) sedemikian rupa sehingga mencapai pemerintahan sendiri. CSI menentang kapitalisme. CSI tidak akan mentolerir dominasi manusia terhadap manusia lainnya. Pemerintahan sendiri suatu saat harus ada di Hindia. Tidak boleh ada komedi!”²⁴

Tak hanya itu, Tjokroaminoto juga tidak pernah mengakui nama “Hindia Belanda”. Ia lebih bangga menyebut Indonesia atau Nusantara dengan sebutan “Hindia Timur” atau “Hindia” saja, tanpa embel-embel “Belanda” di belakangnya. Tjokroaminoto ingin membebaskan rakyatnya dari belenggu penjajahan.

1.2. Abdul Rivai (1871-1937)

Dilahirkan di Palembang, Sumatera Barat, pada 13 Agustus 1871, Abdul Rivai berasal dari keluarga yang cukup terpandang. Abdul Karim, sang ayah, dan kakak lelakinya berprofesi sebagai guru. Adapun sang ibunda, Siti Kemala Ria, masih memiliki garis keturunan dari Raja Muko-Muko, sebuah kerajaan lokal yang pernah eksis di Bengkulu. Latar belakang keluarganya yang terhormat itulah yang membuat Abdul Rivai memperoleh pendidikan yang baik.

Tahun 1908, Abdul Rivai mengikuti ujian masuk program doktor di Fakultas Kedokteran Universitas Gent di Belgia. Ia dinyatakan diterima pada tanggal 23 Juli 1908. Dengan demikian, Abdul Rivai telah mengukir satu prestasi lagi, yaitu orang Indonesia pertama yang diterima sebagai calon doktor di perguruan tinggi di Eropa.

Abdul Rivai memiliki konsep tentang nasionalisme bahasa. Hal ini bisa kita lihat dari kegiatannya di jurnalistik. Boleh dibilang, ia adalah orang Indonesia pertama yang menggawangi penerbitan surat kabar berbahasa Melayu dari luar negeri, tepatnya Belanda. Awal abad ke-20 itu, bahasa Melayu dianggap sebagai bahasa bangsa terjajah yang seringkali tidak berkulit di hadapan kuasa peradaban kolonial.

Inilah salah satu perjuangan budaya yang dilakukan Abdul Rivai, yaitu menggemakan bahasa Melayu di tengah-tengah dominasi dan intervensi bangsa penjajah yang masih sangat berkuasa di tanah air. Baginya, bahasa Melayu merupakan medium yang tepat untuk menyebarluaskan gagasan.

Abdul Rivai menilai bahasa Melayu merupakan bahasa persatuan bagi rakyat pribumi Hindia Belanda, bahasa yang menjadi penghubung bagi masyarakat yang multikultural dengan berbagai macam bahasa lokal.²⁵ Dalam pandangan Abdul Rivai, bahasa Melayu bisa menghapus sekat yang membatasi interaksi antar-suku bangsa di Nusantara. Dia menulis:

“Di seluruh Hindia, Malaka, dan Singapura, bahasa Melayu yang dipakai orang. Buat orang dagang dan turis (perjalanan), bahasa Melayulah yang perlu. Bahasa Jawa, Bahasa Sunda, dan Bahasa Madura memang bahasa yang bagus, tapi keperluan pandai bahasa itu cuma sebatas pada bagian pulau Jawa tersebut. Di luar Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bahasa Jawa tidak berguna lagi, cuma dipakai oleh orang Jawa saja.”²⁶

Secara politis, kesatuan bahasa bisa menjadi cara untuk mempersatukan masyarakat pribumi. Bahasa Melayu yang bersifat inklusif coba dimanfaatkan Abdul Rivai untuk menebarkan gagasannya kepada seluruh lapisan masyarakat di tanah air. Kesatuan bahasa ini menjadikan orang pribumi memiliki suatu identitas yang menyatukan jatidiri mereka.

Karakter Abdul Rivai bukanlah seorang pejuang radikal yang menantang kolonial secara frontal. Sebaliknya, ia berjuang dengan kecerdasan dan menjadi semacam agen ganda yang mengusung dua misi berbeda yang tentu saja bermuara kepada kepentingan pergerakan nasional. Namun, ketika dibutuhkan, Abdul Rivai bisa saja berubah menjadi orang yang paling keras dalam mengkritisi jalannya roda pemerintahan kolonial.

Abdul Rivai adalah pendukung politik etis yang menilai bahwa keberadaan kolonial tidak harus selalu dilawan dengan cara saling berhadapan. Surat kabar *Bintang Hindia* dijadikan oleh Abdul Rivai untuk memuluskan perjuangannya sebagai agen ganda itu. Di satu sisi, koran berbahasa Melayu itu dibiayai oleh pemerintah kolonial, namun di sisi lain, *Bintang Hindia* juga menjadi jalan bagi Abdul Rivai untuk menyebarkan ide-ide nasionalismenya.

Abdul Rivai sangat mengedepankan keilmuan daripada garis keturunan meskipun ia memiliki darah ningrat dari sang ibunda. Ia meyakini, manusia yang seharusnya dianggap paling terpandang adalah mereka yang besar karena ilmunya, bukan lantaran mempunyai darah bangsawan dari leluhurnya. Oleh karena itu, Abdul

Rivai mencoba menggugat konsep kenengratan yang selama ini dimaklumi dan diyakini oleh sebagian masyarakat di Indonesia yang memang masih berpola pikir tradisional. Menurutnya, ada dua jenis manusia dalam konteks kebangsawanan, yaitu bangsawan usul dan bangsawan pikiran.

Melalui artikel dalam *Bintang Hindia* edisi percontohan yang terbit pada tahun 1902, Abdul Rivai menjelaskan makna dari bangsawan usul dan bangsawan pikiran yang dirumuskannya itu:

“Bila kita bandingkan bangsa Hindia (Indonesia) dengan bangsa kulit putih, maka berbagai ada dua perbedaan yang akan diperoleh, sama besarnya dengan perbedaan bumi dan langit. Apakah sebab perbedaan ini? Di tanah Eropa adalah dua jenis bangsawan: Bangsawan Usul dan Bangsawan Pikiran.”

Menurut Abdul Rivai, bangsawan usul adalah orang-orang dari golongan ningrat yang status priyayinya berasal dari faktor keturunan. Dengan kata lain, mereka memang sudah tergaris ningrat dari asal-usul keluarganya. Masih dalam *Bintang Hindia* edisi yang sama, Abdul Rivai menulis:

“Bangsawan usul itu tidak usah kita berpanjangan kalam karena bangsawan ini adalah suatu takdir jua. Jika nenek moyang kita –oleh sebab yang acapkali tidak disengaja– pada zaman purbakala terhitung di dalam kaum orang bangsawan, maka nyatalah kita pun orang yang berbangsa, walaupun pengetahuan dan kepandaian kita seperti keadaan ‘katak dalam tempurung’. Niscayalah kita berhak akan berbesar diri. Akan tetapi, jika ada orang yang tidak hendak mengindahkan hak itu maka tiadalah boleh kita berkecil hati. Sebabnya, maka demikian, karena kita sekarang hidup di abad ke-20.”

Maksud dari tulisan Abdul Rivai di atas adalah bahwa status kenengratan yang dimiliki oleh kalangan bangsawan usul memang sudah berasal dari nenek moyang mereka. Namun, lanjut Abdul Rivai,

bagi orang-orang yang tidak memiliki garis keturunan ningrat tidak perlu merasa khawatir. Pasalnya, di abad ke-20, yang lebih diperlukan adalah ilmu pengetahuan, bukan status sosial keningratan semata.

Golongan yang telah menyerap banyak ilmu pengetahuan itulah yang disebut Abdul Rivai sebagai bangsawan pikiran. Bangsawan pikiran adalah golongan priyayi yang muncul bukan karena faktor keturunan, melainkan karena hal-hal yang Abdul Rivai sebut sebagai kelebihan luar biasa. Abdul Rivai mengupas lebih rinci mengenai bangsawan pikiran melalui *Bintang Hindia*, No. 11, Tahun Keempat, yang diterbitkan pada 1906, sebagai berikut:

“Kekuatan badan, ketinggian bangsa, dan kemuliaan usul tiadalah pasal yang pertama lagi akan menjadi orang yang terbilang. Sekarang bolehlah kepandaian dan ilmu pengetahuan menentukan ke dalam bagian manakah kita terhitung. Keadaan inilah yang melahirkan bangsawan pikiran.”

“Sebagai seponon kayu yang tumbuh di tanah yang subur, maka bangsawan pikiran ini bertambah lama bertambah besar, semakin lama semakin lebih tinggi dari bangsawan usul. Adapun bangsawan pikiran itu boleh didapat oleh sekalian manusia. Oleh sebab ini, bangsa Hindia (Indonesia) pun boleh menjadi sedemikian.”

Dengan demikian, menurut rumusan Abdul Rivai, bangsawan pikiran adalah mereka yang mau belajar dan mempelajari pemikiran serta pendapat orang lain yang lebih berilmu. Penggolongan Abdul Rivai atas kalangan intelektual sebagai bangsawan pikiran menunjukkan bahwa ia menempatkan kaum terpelajar Indonesia dalam posisi yang sangat penting untuk memimpin bangsanya menuju kemajuan.²⁷

Konsep “kaoem moeda” merupakan salah satu hal menarik yang digagas Abdul Rivai. Ia membuat rumusan tentang bangsawan usul dan bangsawan pikiran ternyata masih berlanjut. Abdul Rivai mempersepsikan golongan bangsawan usul terdiri dari kaum tua atau

kaum kuno. Sebaliknya, bangsawan pikiran diidentikkan dengan golongan kaum muda.²⁸

Abdul Rivai memang mempunyai gagasan khusus terkait kaum muda di Hindia Belanda saat itu. Melalui salah satu edisi *Bintang Hindia* yang terbit pada 1905, Abdul Rivai memperkenalkan sekaligus mendefinisikan istilah “kaoem muda” sebagai “semua orang Hindia (tua atau muda) yang tidak suka lagi memungut aturan kuno, adat kuno, kebiasaan kuno, tetapi yang mau memuliakan diri dengan pengetahuan dan ilmu.”

Pemaknaan “kaoem moeda” oleh Abdul Rivai tidak semata-mata ditakar berdasarkan usia. Ia menyebut “semua orang Hindia (tua atau muda)” dalam memaknai orang-orang yang termasuk golongan “kaoem moeda”. Itu berarti, siapapun yang mau mencari ilmu sebanyak-banyaknya dan tidak terkekang oleh adat atau aturan kuno, maka mereka termasuk golongan “kaoem moeda” atau bangsawan pikir, tidak peduli berapa umurnya.

Dengan demikian, istilah “kaoem moeda” digunakan secara luas dan merupakan pengejawantahan dari bangsawan pikiran. Istilah “kaoem moeda” merepresentasikan sebuah entitas kolektif dari mereka yang berbagi suatu titik kebersamaan (*common denominator*) dalam ambisi mereka untuk memperbaiki masyarakat Hindia (Indonesia) melalui jalur yang oleh Abdul Rivai disebut dengan istilah “kemadjoean”.²⁹

Menurut pandangan Abdul Rivai, para eksponen “kaoem moeda” itu sama sekali tidak homogen. Mereka berasal dari berbagai macam latar belakang sosial dan posisi subjek yang berbeda-beda karena Indonesia memiliki masyarakat yang plural. Singkatnya, “kaoem moeda” merupakan sebuah perwujudan kolektif dari prinsip “bersatu dalam perbedaan” dan “berbeda dalam persatuan”. Dengan kata lain, istilah “kaoem moeda” merupakan suatu ekspresi kolektif dari “suatu kesamaan identitas dalam perbedaan” (*identity in difference*) dan “keberagaman dalam kebersamaan identitas” (*difference in identity*).

Kiprah orang-orang Tionghoa yang hidup turun-temurun di Hindia Belanda menjadi salah satu contoh gerakan kaum muda yang sukses memikat hati Abdul Rivai dan membuatnya semakin berhasrat untuk memajukan bangsa bumiputera. Ia ingin masyarakat pribumi mencontoh pergerakan kaum muda seperti yang telah dilakukan oleh bangsa Tionghoa di Indonesia tersebut. Perhimpunan Tionghoa di Indonesia atau Tiong Hoa Hwee Koan (THHK) didirikan di Batavia pada 17 Maret 1900. Abdul Rivai pun menuliskan pendapatnya terkait hal ini melalui salah satu edisi *Bintang Hindia* yang terbit pada tahun 1904.

“Bahwa pikiran dan pendapatan bangsa Cina di tanah Hindia sekarang telah terbagi dua: Kaum Kuno dan Kaum Muda. Dalam dua-tiga tahun ini kita melihat betapa kedua kaum itu berikhtiar hendak mengembangkan pikiran dan pendapatan seseorang.”³⁰

Abdul Rivai menjadi salah seorang pribumi pertama yang memberikan dukungan penuh kepada THHK yang meminta kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda agar menyediakan fasilitas pendidikan bagi mereka. Ketika pada tahun 1906 pemerintah kolonial menyambut kedatangan duta kenegaraan dari Tiongkok, Abdul Rivai dengan mantap menyatakan bahwa orang Tionghoa telah beradab dan ia melontarkan pertanyaan: “Akankah kaum pribumi dapat mencapai status serupa?”

Pergerakan masif yang telah dilakukan THHK inilah yang membuat Abdul Rivai mendesak kepada kaum bumiputera untuk membentuk organisasi yang mampu menyatukan seluruh kaum muda atau elemen progresif dari kalangan pribumi di tanah air. Ia mengusulkan agar organisasi itu kelak diberi nama Perhimpunan Kaoem Moeda. Cabang-cabangnya harus didirikan di berbagai kota dan daerah di Hindia Belanda. Abdul Rivai bahkan memaparkan lebih rinci persoalan ini melalui tulisan bersambung yang dimuat di *Bintang Hindia* pada 1906. Ia meyakini bahwa pergerakan Tionghoa di Indonesia melalui THHK itu dimotori oleh generasi muda.

Selanjutnya, dalam *Bintang Hindia* edisi 1 April 1907, Abdul Rivai lagi-lagi menyatakan ketakjubannya terhadap gerakan muda Tionghoa. Ia bahkan mendesak kawan-kawan seperjuangannya untuk turut mengikuti kiprah anak-anak muda Tionghoa yang sudah berpikiran modern, atau yang oleh Abdul Rivai disebut dengan istilah “orang-orang Tionghoa yang sudah terbaratkan”.

Apa yang diserukan oleh Abdul Rivai itu ternyata benar-benar menjadi kenyataan beberapa lama kemudian. Pada tanggal 20 Mei 1908, kaum intelektual muda dari STOVIA—yang tidak lain adalah adik-adik angkatan Abdul Rivai—mendirikan perhimpunan yang diberi nama Boedi Oetomo (BO). Boedi Oetomo inilah yang oleh beberapa sejarawan diyakini sebagai organisasi pemuda bumiputera pertama di Indonesia (Hasibuan, 2008:22). Tanggal berdirinya Boedi Otoemo pun hingga saat ini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional oleh rakyat Indonesia.³¹



Mohammad Natsir, Lahir di Solok, Sumatera Barat 17 Juli 1908

(Sumber : Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI))

1.3. Mohammad Natsir (1908-1993)

Mohammad Natsir lahir pada 17 Juli 1908 di Alahan Panjang, Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, dari pasangan Idris Sutan Saripado yang berprofesi sebagai seorang juru tulis dan Khadijah. Sesuai tradisi Minangkabau, nama Natsir setelah dewasa dilengkapi dengan gelar adat, menjadi Mohammad Natsir Datuk Sinaro Panjang.

Sebagai negawaran, Natsir dikenal sebagai sosok yang jujur, berani, dan konsisten dalam bersikap. Ia hidup dalam dunia politik lintas ideologi. Sikap Natsir yang percaya bahwa Islam tidak perlu dipisahkan dengan negara dan bangsa barangkali bertentangan dengan pendapat beberapa tokoh bangsa lainnya, termasuk Soekarno. Akan tetapi, di sisi lain, Muhammad Natsir adalah sosok yang sangat gigih mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Natsir sudah berpikir tentang agama dan nasionalisme sejak usia remaja. Pemikiran tersebut semakin terasah saat ia melanjutkan studi ke sekolah menengah *Algemeene Middelbare School* (AMS) di Bandung. Selain itu, Natsir juga mulai bersinggungan dengan beberapa paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi saat ia aktif di *Jong Islamieten Bond* (JIB) maupun *Jong Sumatranen Bond* (JSB). Interaksi dengan para tokoh nasional mulai membentuk karakter Natsir menjadi seorang nasionalis-agamis.

Di masa ini, Natsir menyalurkan gairahnya dalam hal tulis-menulis dan berupaya menyejajarkan hak yang sama antara kaum pribumi dan orang-orang Belanda atau Eropa melalui jalur pendidikan. Untuk memperjuangkan hal ini, Natsir punya dua senjata ampuh, yaitu dakwah lewat tulisan dan *tarbiyah* alias sekolah atau pendidikan.

Usai tamat dari AMS dengan predikat sangat memuaskan, Natsir memperoleh beasiswa untuk studi ke *Rechtsnische Hoge School* (Sekolah Hukum Tinggi) di Batavia (Jakarta) atau Sekolah Tinggi Ekonomi di Rotterdam, Belanda.³² Natsir memang bercita-cita

menjadi *Meester de Rechten*, seorang ahli hukum. Namun, seiring dengan perubahan pemikirannya, Natsir tidak mengambil beasiswa untuk melanjutkan ke sekolah hukum dan justru membenamkan diri untuk aktif menulis, berorganisasi, dan mendirikan sekolah.

Pemahaman Natsir tentang agama dan pendidikan semakin berkembang setelah bertemu dengan Ahmad Hassan, seorang pria keturunan India asal Singapura yang kemudian menjadi ahli agama di organisasi Persatuan Islam (Persis) Bandung. Pertemuan dengan Ahmad Hassan dan dilanjutkan dengan diskusi yang intensif di antara keduanya membuat pemikiran Natsir berkembang. Selain bertukar gagasan, keduanya juga bahu membahu dalam membesarkan surat kabar *Pembela Islam*. Selain sebagai jurnalis, Natsir bersama Ahmad Hassan juga duduk sebagai penanggungjawab dan pemimpin redaksi di surat kabar *Pembela Islam*.³³

Salah satu perubahan pemikiran Natsir yang menjadi hasil bertukar pikiran dengan Ahmad Hassan adalah soal pendidikan Islam yang terbuka. Menurut Natsir, pendidikan harus memiliki tempat bergantung secara spiritual, artinya tidak hanya menghamba pada kekuatan akal dan logika semata. Natsir memaknai sisi spiritual tersebut ke dalam kata *tauhid* yang kemudian dijadikannya sebagai landasan dalam pemikiran mengenai pendidikan.

Di sisi lain, meskipun nilai spiritual sangat penting, Natsir secara tegas menolak dikotomi yang mengistilahkan pendidikan dengan “kebarat-baratan” atau “ketimur-timuran” yang seringkali dipertentangkan. Bagi Natsir, pendidikan tidak perlu mempertentangkan Barat dan Timur, karena Islam hanya mengenal hak (baik/benar) dan bathil (buruk/salah). Segala sesuatu yang hak harus diterima, meskipun datang dari Barat. Di sisi lain, semua yang harus disingkirkan, meskipun datang dari Timur.

Inilah yang menjadi pokok pikiran Natsir menyangkut konsep pendidikan. Menurutnya, pendidikan sama sekali tidak parokial, tapi universal. Pendidikan tidak Timur dan tidak pula Barat (*la syarqiyah wa la gharbiyah*).³⁴ Dalam tataran ini, pemikiran Natsir

secara jelas mencerminkan sikap dasar yang tidak memisahkan kehidupan beragama dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Menurut Natsir, Islam tidak harus melulu alergi terhadap kemajuan zaman yang bisa terjadi berkat perkembangan pemikiran manusia. Islam, lanjut Natsir, bahkan sangat menghargai kemerdekaan berpikir yang disebutnya sebagai salah satu tiang ajaran agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam buku *Capita Selecta* Jilid 1, Natsir menulis:

“Muhammad meletakkan akal pada tempat yang terhormat dan menjadikan akal itu sebagai salah satu alat untuk mengetahui Tuhan. Bertebaran dalam Alquran pertanyaan-pertanyaan yang memikat perhatian, menyuruh orang mempergunakan pikiran dan mendorong manusia supaya mempergunakan akal dengan sebaik-baiknya.” (Natsir, 1961:199)

Dalam pandangan Natsir, Islam telah berjasa memobilisasi, membuka, dan menggerakkan akal manusia yang selama ini tidak mendapatkan tempat yang semestinya dalam kehidupan, baik rohani dan jasmani. Hal ini, tulis Natsir, banyak ditegaskan dalam Alquran. “Bukalah Alquran halaman mana saja! Sudah pasti akan dirasa oleh tiap-tiap seseorang yang membacanya, betapa besar dorongan Islam untuk memakai akal dan mempergunakan pikiran sebagai nikmat Tuhan yang tidak ternilai harganya.”³⁵

Natsir meyakini bahwa orang Islam diwajibkan memakai akal untuk memikirkan ayat-ayat yang termaktub di kitab suci supaya mengerti maksud dan tujuannya. Oleh karena itu, ayat-ayat Alquran diturunkan untuk mereka yang mau berpikir, mengambil keputusan, mengetahui, dan menarik kesimpulan (*istinbath*).

Citra sebagai seorang muslim modern yang melekat pada Natsir juga tampak dari pemikirannya yang jauh dari fanatisme buta. Bahkan, Natsir sangat yakin bahwa Islam mendorong manusia untuk

berpikir kritis dalam hal apapun untuk menemukan kebenaran sejati, termasuk kepercayaan. Dia menulis:

“Islam amat mencela akan orang-orang untuk tidak mempergunakan akalnyanya, orang-orang yang tak terikat pikirannya dengan kepercayaan dan paham-paham yang tak berdasar kepada dasar yang benar, yaitu mereka yang tak mau memeriksa apakah kepercayaan atau paham-paham yang disuruh orang terima atau dianut mereka itu, *benar* dan adakah berdasar kepada *kebenaran* atau tidak.”³⁶

Dalam ajaran agama Islam, lanjut Natsir, akal memperoleh tempat yang sangat mulia. Dalam Islam, akal tidak ditindas dan dipaksa, tapi dipergunakan dan diberi jalan, disalurkan untuk ketinggian dan keluhuran manusia. Agama datang membangunkan akal dan membangkitkan akal itu serta mendorong agar manusia memakai akal dengan sebaik-baiknya sebagai suatu nikmat Ilahi yang maha indah.³⁷

Pemikiran Islam modern ini pada akhirnya diterapkan Natsir dalam kehidupan, termasuk melalui pendidikan. Ia berkeinginan untuk menggabungkan ilmu pengetahuan umum, sebagaimana diajarkan di sekolah Belanda, dengan pelajaran agama Islam. Keinginannya terjawab ketika ia mendirikan sekolah partikelir, yang di kemudian hari menjadi sekolah Pendidikan Nasional. Inilah proyek idealis seorang Natsir yang terealisasi pada 1932.³⁸ Sekolah partikelir milik Natsir ini, beralamat di Jalan Lengkong Besar No. 16 Bandung, pada akhirnya tidak mampu menampung murid yang terus bertambah. Berkat bantuan Haji Muhammad Yunus, Natsir pun memindahkan sekolahnya ke Jalan Lengkong Besar No. 74. Tempat ini lebih besar dari sekolah sebelumnya.

Pemikiran Natsir yang modern juga menyentuh ihwaldemokrasi. Dalam pidatonya pada 14 November 1950, Natsir yang saat itu menjabat sebagai perdana menteri, mengajak kepada semua rakyat Indonesia untuk bersama-sama membangun negeri yang baru saja merdeka dari penjajahan bangsa asing. Natsir

melibatkan seluruh lapisan masyarakat untuk membentuk dan mengelola negara Indonesia sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Natsir mengatakan dalam pidatonya, tingkatan perjuangan bangsa Indonesia sudah berganti, tidak lagi berjuang dengan perang gerilya dan mengangkat senjata. Masyarakat harus berjuang dengan tenaga dan pikiran untuk membangun negara supaya rakyat Indonesia memperoleh kehidupan yang layak di berbagai bidang. Menurutnya:

“Tenaga dan pikiran saudara diperlukan untuk membangunkan kehidupan yang lebih layak, baik dalam hubungan kekeluargaan dan rumah tangga sendiri, maupun dalam hubungan produksi dan pembangunan kesejahteraan umum. Tenaga dan pikiran saudara diperlukan untuk membangun negara dengan arti yang lebih luas, menyempurnakan negara kita yang masih muda ini dalam berbagai lapangan.”³⁹

“Sudah datang saatnya untuk menutup sejarah lama dan memulai lembaran baru. Sudah datang saatnya untuk memperbaiki persaudaraan kembali atas dasar saling mengerti, hidup bersama dalam udara negara merdeka yang sudah sama-sama kita tebus dengan pengorbanan yang demikian besarnya.”⁴⁰

“Walaupun bagaimana, juga bagi saudara terbuka jalan untuk menyumbangkan pikiran dan tenaga saudara-saudara menurut cita-cita yang terkandung, dengan cara yang tertib-teratur melalui saluran-saluran yang biasa, yang terbuka bagi tiap-tiap warga dari negara hukum yang berlandaskan Kedaulatan Rakyat ini.”⁴¹

Natsir menilai, demokrasi merupakan salah satu cara yang paling tepat untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan-kepentingan rakyat. Selain itu, menurutnya, demokrasi adalah warisan budaya yang tidak ternilai. Berikut ini nukilan isi pidato Natsir terkait demokrasi yang disampaikan di parlemen pada tanggal 28 Agustus 1953:

“Apakah kita menganut apa yang dinamakan demokrasi Barat, atau berpedoman kepada demokrasi Ketimuran, tidaklah akan saya jadikan persoalan di sini, karena segalanya itu adalah perbedaan dalam pelaksanaan tekniknya saja. Intisari dari tiap-tiap demokrasi dalam asas dan hakikatnya tidak lain tidak bukan ialah hasil permusyawaratan pikiran yang bebas dan merdeka antara kita yang bergaul, sekalipun di antara pendapat-pendapat dan penghilatan yang bertentangan.”⁴²

Hal tersebut disampaikan Natsir di hadapan parlemen untuk menetralkan situasi politik saat itu yang Masyumi, partai tempat Natsir bernaung, mendapat kesan sebagai pemecah belah bangsa. Natsir memang tidak sepenuhnya menolak namun juga tidak seutuhnya sepakat dengan konsep demokrasi ala Barat. Ia memahami demokrasi secara substantif dengan memasukkan nilai-nilai Islam di dalamnya.

Natsir sempat mengusulkan istilah *theistic democracy* di mana nilai-nilai ketuhanan menjadi salah satu faktor penting yang wajib ditonjolkan dalam berdemokrasi. Pemahaman Natsir tentang demokrasi adalah pelaksanaan ajaran-ajaran agama Islam secara utuh dan konsekuen sehingga menciptakan suatu kemaslahatan bagi umat. Dalam hal ini, dia Natsir berujar:

“Berdasarkan atas intisari dari pengertian demokrasi itu, maka memang sudah seharusnya ‘gayung bersambut, kata berjawab’ supaya jangan sampai menimbulkan kesan seolah-olah partai kami tukang perusak main, pemecah kesatuan nasional, dan lain-lain tuduhan, yang pada waktu belakangan ini justru oleh pihak-pihak tertentu kerap kali secara sembrono dilemparkan kemuka kami. Oleh karena partai kami lebih konsekuen dan lebih bertanggung jawab menurunkan politik yang diselenggarakannya, maka itulah sebabnya saya tidak mau meninggalkan apa yang sudah kita lazimkan itu.”⁴³

Natsir adalah salah satu orang yang mengusulkan digelarnya pemilihan umum setelah Kabinet Wilopo jatuh pada 2 Juni 1953. Di depan sidang Parlemen, Natsir menyesalkan sikap pemerintah saat itu yang dinilainya lambat dalam melanjutkan proses demokrasi dengan tidak segera menggelar pemilihan umum. Ia menilai, pemerintah sengaja mengulur-ulur waktu padahal situasi negara semakin tidak stabil. Menurutnya,

“Keadaan terombang-ambing seperti ini akan terus berjalan, sebelumnya ada pemilihan umum, yakni satu-satunya jalan untuk meletakkan dasar yang lebih kuat dan sehat. Dengan demikian, maka ada tugas yang sangat primer bagi kabinet ini untuk menolong demokrasi di negeri kita, ialah dengan melaksanakan pemilihan umum secepat mungkin.”

Saya menyesal melihat bahwa dari pihak Pemerintah ini tidak ada kelihatan tanda-tanda untuk betul-betul segera melaksanakan pembinaan dasar pertumbuhan parlementer stelsel ini, yang kelihatan ialah sebaliknya.”

“Dalam penjelasan pemerintah lebih lanjut, dengan sangat heran dan kecewa saya membaca bahwa pemilihan umum itu akan dilaksanakan menurut rencana 16 bulan lagi, terhitung mulai Januari 1954 di muka. Artinya, kalau tidak ada aral melintang, Kabinet ini harus kita hidupkan sekurang-kurangnya dalam tempo kira-kira dua tahun lagi. Dalam zaman yang dinamis ini, di mana kita setiap waktu mengalami perubahan dan pertukaran kekuasaan tangan di lapangan dunia internasional, yang memaksa kita mengambil putusan-putusan siasat dan taktik yang prinsipil, maka 20 bulan itu berarti waktu yang sangat lama.”

“Dengan demikian, sifat darurat dari Kabinet sekarang ini menjadi hilang, dan oleh sebab itulah Pemerintah ini maunya dari tadinya mesti disusun secara teliti dan hemat sekali, sehingga memenuhi syarat-syarat yang sanggup mempertahankannya selama itu. Karena hal tersebut tidak

terjadi, maka jelaslah bahwa kita terpaksa sangat skeptis sekali menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan dilaksanakan oleh Kabinet baru ini. Saya kira perlu saya berterus terang di sini, bahwa buat kami tidaklah dapat pemilihan umum sampai pada pelaksanaannya itu, dijadikan senjata untuk mempertahankan Kabinet ini.”⁴⁴

Soal agama dan negara, pemikiran Natsir tidak sependapat dengan Soekarno, presiden Republik Indonesia saat itu. Soekarno mempersoalkan kedudukan umat Islam dengan beberapa tulisan yang dimuat di *Pandji Islam*. Beberapa tulisan Soekarno tersebut berjudul “Apa Sebab Turki Memisahkan Agama dan Negara”, “Masjarakat Onta”, dan “Masjarakat Kapal Udara”. Dalam tulisan-tulisan tersebut, Soekarno menyerang kebekuan dan kekolotan para ulama serta pemikiran umat Islam di Indonesia. Soekarno menganjurkan paham nasionalisme dan mengkritik Islam sebagai ideologi .

Di sisi lain, Natsir menanggapi tulisan-tulisan Soekarno dengan menulis di surat kabar *Al Manaar* dan *Pandji Islam*. Beberapa tulisan Natsir tersebut berjudul “Tjinta Agama dan Tanah Air”, “Rasionalisme dalam Islam”, dan “Persatuan Agama dengan Negara”. Natsir berpendapat bahwa agama bisa memicu tumbuhnya nasionalisme.

Perdebatan panjang mengenai hubungan Islam dan negara di Indonesia sendiri sebenarnya sudah berlangsung lama, yakni sejak permulaan abad ke-20 yang merupakan masa awal Era Pergerakan Nasional. Muhammad Natsir menjadi salah satu tokoh nasional yang gencar melontarkan ide-ide politik tentang hubungan antara Islam dan kebangsaan itu.

Salah satu sumbangsih Mohammmad Natsir bagi bangsa Indonesia sebelum merdeka adalah gagasannya tentang hubungan antara Islam dan negara. Natsir “harus” ikut memberi sumbangan pemikiran tentang bagaimana bentuk negara Indonesia sejatinya menurut Islam. Natsir dalam beberapa kesempatan kembali

menegaskan bahwa agama bukanlah semata-mata ritual peribadatan dalam istilah sehari-hari seperti shalat dan puasa, melainkan meliputi semua kaedah-kaedah, batas-batas dalam muamalah, dan juga hubungan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, lanjut Natsir, untuk menjaga supaya aturan-aturan dan patokan-patokan tersebut dapat berlaku dan berjalan sebagaimana mestinya, perlu dan tidak boleh tidak, harus ada kekuatan dalam pergaulan hidup berupa kekuasaan dalam negara, seperti yang telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW kepada kaum Muslimin bahwa sesungguhnya Allah adalah pemegang kekuasaan penguasa.⁴⁵

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Natsir tampaknya ingin menegaskan bahwa Islam dan negara itu berhubungan secara integral, bahkan simbiosis, yaitu berhubungan secara resiprokal dan saling membutuhkan. Dalam pandangan Natsir, agama memerlukan negara karena dengan negara agama dapat berkembang. Di sisi lain, negara pun membutuhkan keberadaan agama karena dengan agama, negara dapat berkembang dalam bidang etika dan moral.⁴⁶

Sekali lagi Mohammad Natsir menegaskan bahwa Islam adalah ajaran yang lengkap untuk menuntun umat manusia. Dalam pandangannya, ajaran yang terkandung dalam agama Islam tidak hanya mengurus persoalan ibadah saja, tetapi juga memuat aspek-aspek atau sektor-sektor lain seperti bidang hukum tentang kenegaraan.⁴⁷ Maka dari itu, demikian Natsir melanjutkan, hubungan agama dan negara adalah suatu kemestian karena Islam bukanlah sekadar agama, tetapi juga merupakan peradaban yang komplit. Oleh sebab itulah adanya pemisahan agama dan negara bukan sesuatu yang relevan dalam Islam, karena nilai-nilai universal dalam ajaran Islam tidak bisa dipisahkan dari gagasan pembentukan sebuah negara.⁴⁸

Terkandungnya hukum-hukum kenegaraan dalam ajaran Islam, menurut Natsir, adalah suatu bukti bahwa Islam tidak mengenal pemisahan antara agama dan negara. Pandangan Natsir ini didasarkan pada Alquran dalam Surat Al-Dzariyyat ayat 56.

Mengenai Turki yang memisahkan urusan agama dengan negara, Natsir memiliki pandangan sendiri. Menurutnya Turki bukanlah negara yang berpemerintahan Islam. Dengan demikian, negara hanya merupakan instrumen, bukan tujuan, dan oleh karena itu, maka tidak perlu ada perintah Tuhan untuk mendirikan negara. Yang diperlukan hanyalah pedoman untuk mengatur pemerintahan supaya negara itu menjadi kuat dan subur serta menjadi media yang sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan hidup manusia yang terhimpun di dalamnya, baik untuk keselamatan maupun kesentosaan secara individu maupun masyarakat.⁴⁹

Apa yang diyakini Natsir mengenai kemestian pendirian sebuah negara ternyata hampir mirip dengan pemikiran politik yang dicetuskan oleh Ibnu Taimiyyah (1263-1328). Pemikir Islam dari Turki yang memiliki nama lengkap Abul Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyah al Harrani ini mengatakan bahwa memimpin dan mengendalikan rakyat adalah kewajiban asasi dalam agama. Bahkan, pelaksanaan agama tidak mungkin terealisasi kecuali dengan adanya kepemimpinan.⁵⁰

Natsir juga tidak terlalu mempersoalkan mengenai penyebutan kepala negara. Negara dalam pandangan Natsir bukanlah tujuan, melainkan hanya sebuah instrumen sehingga hal-hal yang tidak substansial bukanlah sesuatu yang sangat penting dan harus selalu menjadi bahan perdebatan. Seorang kepala negara, demikian Natsir memberikan contoh, tidak harus selalu memiliki gelar khalifah, namun bisa memakai nama penyebutan lainnya seperti presiden, amir, dan sejenisnya. Bagi Natsir, yang penting adalah bahwa sifat-sifat, hak dan kewajiban mereka harus sebagaimana dikehendaki Islam. Dengan begitu, yang menjadi syarat bagi kepala negara adalah agamanya, sifat dan tabiatnya, serta akhlak dan kecakapannya untuk memegang kekuasaan, dan bukan dilihat dari asal bangsa dan keturunannya ataupun semata-mata inteleknya saja.⁵¹

Natsir berpandangan bahwa tugas utama kepala negara yang terpilih adalah menggandeng dan mengadakan musyawarah dengan orang-orang yang dianggap layak dan patut dilibatkan untuk

menyelesaikan persoalan negara, dalam hal ini adalah masalah-masalah umat atau masyarakat. Untuk hal-hal yang sudah jelas ketentuan hukumnya, dalam hal ini menurut Islam, Natsir meyakini bahwa itu tidak perlu diperdebatkan lagi, seperti masalah alkohol, zina, perkawinan, waris, zakat, fitrah, dan lainnya. Hal-hal itu menjadi tanggungjawab penguasa sebagai pemimpin negara untuk menyikapinya berdasarkan hukum dan ketentuan yang berlaku.

Menyangkut persoalan pengambilan keputusan terhadap suatu masalah, menurut Natsir, dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan peradaban dan pemikiran manusia tentang tata kelola pemerintahan, meskipun bisa juga tetap menganut cara-cara yang dahulu diterapkan pada masa kekhalfahan. Dengan kata lain, Natsir mempersilakan bangsa Indonesia menerapkan sistem pemerintahan demokrasi dengan berdasarkan musyawarah yang dipadukan dengan hukum-hukum Islam.

Menurut penelitian Khumaidi (2005), Natsir tidak terlalu menekankan pada label dan bentuk dalam sebuah negara, melainkan lebih berpatokan pada isi atau substansi. Dengan demikian, pemikiran Natsir tentang negara pada masa perjuangan kemerdekaan cenderung substantif. Kendati begitu, pada kenyataannya, di era demokrasi parlementer (1950-1959), terutama saat berlangsungnya sidang konstituante, pemikiran kenegaraan Natsir dapat dikatakan cenderung formalistik. Hal ini dilihat dari pandangannya tentang signifikansi Islam untuk dijadikan dasar negara bagi negara republik Indonesia yang saat itu baru merdeka.⁵²

Natsir dengan tegas memaparkan dua pilihan dasar negara untuk Indonesia, yaitu sekularisme (*la diniyyah*) atau agama (*dini*). Ia menegaskan dua opsi tersebut, karena saat itu ada pihak-pihak yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara sekular. Di sisi lain, ada pula yang menginginkan agar negara Indonesia berlandaskan ajaran agama Islam. Tentu saja, Natsir berada dalam barisan pendukung pilihan kedua tersebut.

Dalam pandangan Natsir, negara hanyalah menjadi alat. Lantaran hanya sebagai alat, lanjutnya, maka Islam sebagai dasar negara telah tercakup di dalamnya. “Negara bukanlah tujuan, melainkan hanyalah alat untuk mewujudkan ajaran-ajaran Islam,” tulis Natsir dalam *Pandji Islam* yang dimuat tanggal 15 Juli 1940. Bukan tanpa alasan Natsir meyakini bahwa Islam sangat pantas untuk dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. Ia dengan tegas mengatakan bahwa Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna meskipun kesempurnaan ajaran itu terutama doktrin sosial politiknya hanya memberikan pedoman pedoman yang bersifat global dan tidak dalam bentuk rincian-rincian.⁵³

Alasan berikutnya, Natsir yang dalam hal ini mewakili kaum nasionalis-Islam di Indonesia mengatakan bahwa Islam merupakan agama yang dianut oleh sebagian besar rakyat Indonesia dan telah berakar kuat kepada masyarakat dan ajaran Islam memiliki sifat-sifat dan nilai-nilai sempurna bagi kehidupan negara dan masyarakat serta dapat menjamin keragaman hidup antar berbagai golongan dalam negara dengan penuh toleransi. Islam, lanjut Natsir, adalah agama yang menghargai dan menghormati agama lain yang bisa dijadikan fondasi yang kuat sebagai dasar negara.

Lebih lanjut, Natsir memaparkan: “Bukan semata-mata lantaran umat Islam adalah golongan yang terbanyak di kalangan rakyat Indonesia seluruhnya yang menjadi alasan bagi kami mengajukan Islam sebagai Dasar Negara kita, akan tetapi berdasarkan kepada keyakinan kami bahwa ajaran-ajaran Islam yang memiliki ketatanegaraan dan masyarakat hidup itu adalah mempunyai sifat-sifat yang sempurna bagi kehidupan negara dan masyarakat serta dapat menjamin hidup keragaman atas saling harga menghargai antara pelbagai golongan di dalam negara. Kalaupun besar tidak akan melanda, kalaupun tinggi malah akan melindungi.”⁵⁴

Meskipun begitu, Natsir tidak lantas menuntut bahwa Indonesia harus menjadi negara Islam. Baginya, yang terpenting adalah berjalannya hukum-hukum Allah yang bisa diimplementasikan sebagai bentuk dari negara yang berdasarkan ajaran agama Islam

seperti di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Menurut Natsir, integrasi antara Islam dan negara adalah saling mengisi satu sama lain. Atau dengan kata lain, Islam hanya menyediakan perangkat dasar untuk digunakan oleh negara sebagai alatnya. Sedangkan untuk implementasinya, Natsir menawarkan *ijtihad* sebagai salah satu opsi.

Begitu pula dengan politik. Natsir menekankan bahwa politik haruslah sungguh-sungguh bersifat Islami. Menurut hemat Natsir, segenap prinsip yang terkandung dan termuat dalam ajaran agama Islam harus diterapkan dalam berpolitik, baik dalam perilaku individu maupun dalam kehidupan sosial atau bermasyarakat.⁵⁵ Natsir dengan tegas menyatakan tidak sepakat dengan pemahaman yang meyakini bahwa politik sekuler merupakan satu-satunya model yang harus diikuti. Natsir bahkan pernah menolak konsep Pancasila yang diusung oleh Soekarno karena menganggapnya termasuk sekuler meskipun sebelumnya tidak demikian adanya.

Setelah kemerdekaan, Natsir sebenarnya sempat menampakkan diri sebagai tokoh nasional yang terkesan gigih membela Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, meskipun sebelumnya ia dikenal sebagai orang yang sangat mengharapkan Islam bisa dijadikan sebagai dasar negara. Sebelum Sidang Konstituante pertama yang digelar pada tanggal 10 November 1956, Natsir menyatakan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Natsir yang tidak termasuk dalam tim perumus Pancasila, pernah berucap sebagai berikut: "Alquran adalah dasar hidup yang luas bagi segenap golongan dalam keragaman dan kesatuan. Ia adalah induk-serbasila, yang memberi nilai-nilai hidup yang menghidupkan."⁵⁶ Perumusan Pancasila, tambah Natsir, merupakan hasil musyawarah antara para pemimpin-pemimpin ketika taraf perjuangan kemerdekaan memuncak pada tahun 1945. Natsir percaya bahwa para pemimpin yang berkumpul itu, yang sebagian besarnya adalah beragama Islam, pastilah tidak akan membenarkan

sesuatu perumusan yang menurut pandangan mereka nyata bertentangan dengan asas dan ajaran Islam.

Natsir bahkan pernah memaparkan bahwa Pancasila sangat selaras dengan ajaran Islam. Ia membeberkan masing-masing sila dalam Pancasila sama sekali tidak bertentangan dengan Islam, sebagai berikut:

1. Bagaimana mungkin ajaran Alquran yang memancarkan tauhid dapat bertentangan dengan ide Ketuhanan Yang Maha Esa?
2. Bagaimana mungkin Alquran yang ajaran-ajarannya penuh dengan kewajiban menegakkan *'ijtima'iyah* bertentangan dengan Keadilan Sosial?
3. Bagaimana mungkin ajaran Alquran yang justru memberantas feodalisme dan pemerintahan sewenang-wenang serta meletakkan dasar musyawarah dalam susunan pemerintahan dapat bertentangan dengan apa yang dinamakan Kedaulatan Rakyat?
4. Bagaimana mungkin ajaran Alquran yang menegakkan istilah *islahu bainan naas* sebagai dasar-dasar pokok yang harus ditegakkan umat Islam dapat bertentangan dengan apa yang disebut Perikemanusiaan?
5. Bagaimana mungkin ajaran Alquran yang mengakui adanya bangsa-bangsa dan meletakkan dasar yang sehat bagi kebangsaan dapat bertentangan dengan Kebangsaan?⁵⁷

Natsir secara mengejutkan tiba-tiba berbalik “menyerang” Pancasila di Sidang Kostituante. Ia tidak lagi memakai jubah sebagai sosok pembela Pancasila. Dalam sidang tersebut, Natsir memutuskan kembali masuk dalam barisan yang memperjuangkan Islam sebagai dasar negara Indonesia, bukan Pancasila.

Majelis Konstituante saat itu telah menyiapkan tiga rancangan untuk diajukan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila, Islam, dan Sosial-Ekonomi. Dalam kesempatan itu, Presiden Republik Indonesia Soekarno sangat aktif melancarkan intervensi politik dengan mendukung penuh Pancasila dan cenderung tidak menginginkan Islam menjadi dasar negara. Apa yang diusung Soekarno tersebut tak pelak mendapatkan tentangan dari tokoh-tokoh muslim, termasuk Mohammad Natsir.

Berbeda dengan pernyataan sebelumnya yang sempat mendukung Pancasila, kali ini Natsir mengatakan bahwa Pancasila itu *pure concept* yang tidak memiliki substansi. Ia menyebut Pancasila bersifat netral, bahkan sekular karena tidak mengakui wahyu Tuhan sebagai satu-satunya sumber kebenaran.⁵⁸

Menanggapi pernyataan Soekarno yang tidak setuju apabila Islam dijadikan sebagai dasar negara Republik Indonesia, Natsir menyatakan bahwa Soekarno tidak melihat Pancasila sebagai suatu filsafat yang berakar kuat, tetapi hanya sebagai tempat perpaduan dan pertemuan semua pandangan kelompok yang berbeda-beda.

Menurut Natsir, Pancasila tidak mampu membentuk realitas dalam situasi yang aktual. Kekaburan Pancasila tidak akan bisa meyakinkan umat Islam yang sudah memiliki ideologi yang jelas, untuk mendukung Pancasila sebagai pengganti Islam sebagaimana yang diserukan oleh Soekarno.

Apabila kenetralan Pancasila hilang, kata Natsir, maka fungsinya sebagai pemersatu akan turut lenyap pula. Oleh karena itulah Natsir berpendapat bahwa Pancasila tidak dapat dijadikan sebagai falsafah dan dasar negara. Dalam pandangan Natsir, Pancasila sangat kabur dan tidak bermakna apa-apa bagi umat Islam yang telah memiliki suatu ideologi yang pasti, jelas, dan sempurna. Natsir juga mengingatkan kepada umat Islam di Indonesia bahwa pindah dari Islam ke Pancasila adalah seperti melompat dari bumi ke tempat ke suatu ruang yang hampa udara.

Natsir secara tegas menyatakan bahwa Pancasila tidak patut dijadikan sebagai ideologi negara. Bagi Natsir, sila-sila yang terkandung dalam Pancasila bersifat relatif dan tidak tetap. Sementara Islam lebih tegas dalam hal ini karena memiliki hukum-hukum yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia melalui wahyu yang memberikan ukuran mutlak untuk mengatur persoalan-persoalan manusia.⁵⁹

Selain mengenai demokrasi dan hubungan antara Islam dengan negara, Natsir juga tidak jarang menyinggung tentang nasionalisme yang dipertautkannya dengan ajaran agama Islam. Sebelum Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, orang Indonesia mendapat julukan *het zachtste volk der aarde* (bangsa yang paling lunak di dunia). Akan tetapi, setelah proklamasi dikumandangkan, muncul anggapan bahwa bangsa Indonesia telah bermetamorfosa dari seekor domba menjadi macan. Menurut Natsir, perubahan itu disebabkan oleh sesuatu yang immaterial, yaitu seruan "Allahu Akbar".⁶⁰

"Kalau tadinya mereka diibaratkan sebagai seekor domba atau kambing yang menurut saja, sekarang sekonyong-konyong mereka menjelma menjadi macan yang memperlihatkan kegagahan dan keberanian yang luar biasa, sampai menakjubkan orang-orang di luar negeri. Maka terjadilah peristiwa yang mengagumkan seperti peristiwa Surabaya, peristiwa Semarang, peristiwa Bandung, dan peristiwa lain-lain di seluruh kepulauan Indonesia."⁶¹

Perubahan karakter orang-orang Indonesia ini, menurut Natsir, karena kunci dari kekuatan bangsa Indonesia telah ditemukan. Natsir memberikan contoh sosok Bung Tomo yang ketika berpidato selalu menggunakan kalimat "Allahu Akbar" untuk membakar semangat rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Agama memainkan perannya sebagai salah satu alat untuk memunculkan semangat nasionalisme. Pada tataran ini pula, agama dapat melebur, bahkan menjadi bahan bakar untuk membangkitkan semangat, dari yang semula dianggap lunak, menjadi sesuatu yang menakutkan.

Natsir melihat bahwa sebenarnya tidak ada masalah antara Islam dengan nasionalisme. Orang Islam dapat menjadi muslim yang taat di satu sisi, dan di sisi yang lain dapat dengan lantang menyanyikan lagu *Indonesia Raya*. Menurut Natsir, seorang muslim tidak harus meninggalkan fitrahnya sebagai manusia yang berbangsa dan berbudaya.⁶²

Perang paham yang terjadi antara Natsir dan Soekarno bukan berarti ada permusuhan di antara keduanya. Natsir dan Soekarno sebenarnya saling memberi dukungan dan berhubungan baik sejak Era Pergerakan Nasional. Salah satu contohnya adalah Soekarno ditangkap dan diadili oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada akhir 1929. Natsir dengan terang-terangan membela Soekarno melalui tulisan yang dimuat di surat kabar *Pandji Islam*. Bahkan ketika Soekarno dibuang ke Ende (Flores), kedua tokoh ini tetap saling berkorespondensi melalui surat kabar.

Di sisi lain, Soekarno ternyata juga mengagumi Natsir sebagai tokoh intelektual Islam yang patut diperhitungkan. Dalam suratnya kepada Ahmad Hassan yang tidak lain adalah rekan kental Natsir sekaligus pemimpin organisasi Persatuan Islam (Persis), Soekarno mengatakan bahwa mubalig-mubalig PERSIS (Persatuan Islam) sudah bagus-bagus dan ia menyebut nama Natsir sebagai sosok mubalig yang sangat bermutu dan cerdas.

Dengan segenap kekukuhannya tentang hubungan Islam dan negara, Natsir sekali lagi mempertegas bahwa salah satu karakteristik Islam adalah toleransi. Dalam merumuskan konsep negara yang berdasarkan Islam pun Natsir mencontoh sistem kenegaraan dari Barat yang tentunya tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Natsir menyatakan bahwa terkait ketatanegaraan dan kehidupan, agama Islam mempunyai sifat-sifat yang sempurna bagi kehidupan negara dan masyarakat, serta dapat menjamin keragaman atas saling menghargai berbagai golongan di dalam negara. Inilah yang menjadi penguat bahwa Mohammad Natsir adalah sosok religius yang sekaligus modernis dan nasionalis.

Penutup

Gagasan dan pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto, Abdul Rivai, dan Mohammad Natsir sangat penting dalam perwujudan demokrasi dan nasionalisme bangsa Indonesia. Terdapat banyak saluran dan ide-ide yang diungkapkan tentang demokrasi dan nasionalisme oleh ketiga tokoh bangsa tersebut.

Tjokroaminoto, misalnya, berdiri di jajaran terdepan sebagai pemersatu rakyat Indonesia yang saat itu masih terbelenggu oleh sistem kolonial. Bersama organisasi Sarekat Islam (SI) yang dipimpinya, Tjokroaminoto mengajak rakyat pribumi untuk bersama-sama menentang praktek kolonialisme dan turunannya, termasuk feodalisme. Tjokroaminoto telah memikirkan ide tentang demokrasi dan kesetaraan dengan menempatkan rakyat dalam posisi duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi.

Begitu pula dengan Abdul Rivai yang mengusung gagasan “kaoem moeda” sebagai golongan yang seharusnya bisa membawa bangsa Indonesia menuju ke arah yang lebih baik. Muara dari pemikiran Abdul Rivai ini tentu saja adalah perjuangan menuju cita-cita kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia meskipun pada saat itu peluang untuk lepas dari belenggu penjajahan masih cukup jauh dari harapan. Abdul Rivai juga menyusun rumusan mengenai konsep “Bangsawan Usul” dan “Bangsawan Pikiran”. Sama seperti Tjokroaminoto yang menentang keras praktek feodalisme, perjuangan Abdul Rivai menuju demokrasi adalah dengan mengajak rakyat Indonesia untuk meningkatkan derajat dan martabatnya melalui ilmu pengetahuan.

Dengan memiliki wawasan yang luas tentang ilmu pengetahuan yang nantinya berdampak positif pada tingkat kecerdasan dan kematangan dalam berpikir serta bertindak, Abdul Rivai percaya bahwa seseorang bisa mencapai level yang lebih baik sebagai bangsawan pikiran, yaitu kaum terhormat yang memperoleh kehormatannya bukan karena faktor keluarga atau keturunan.

Sementara Mohammad Natsir berupaya memadukan Islam dan negara untuk membentuk suatu pemerintahan yang kuat dan berkarakter. Menurut Natsir, Islam bukanlah penghalang bagi demokrasi. Justru sebaliknya, ajaran Islam bagi Natsir menjadi salah satu kekuatan utama dalam menerapkan tata pemerintahan negara yang demokratis.

Sumbangan pemikiran dan perjuangan H.O.S. Tjokroaminoto, Abdul Rivai, dan Mohammad Natsir tentu telah memberikan andil sangat besar dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Demikian pula dengan peran tokoh-tokoh pejuang nasional lainnya yang telah berjuang untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dan kedaulatan negara Republik Indonesia.

Catatan Akhir :

- ¹ Ahmad Suhelmi. *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001. hlm: 297.
- ² *Ibid.*
- ³ Denny Indrayana. *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran*. Bandung: Mizan Pustaka, 2007. hlm: 115.
- ⁴ Amien Rais. *Belajar dari Demokrasi ala Soeharto: Upaya Membangun Masyarakat Madani dalam Kultur Feodal*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1999. hlm: 184.
- ⁵ Oemar Said Tjokroaminoto dilahirkan di sebuah desa di Madiun, Jawa Timur, pada 16 Agustus 1882.
- ⁶ Gagasan ini muncul ketika Haji Samanhoedi sedang mencari orang yang mampu menyusun anggaran dasar sebagai syarat agar SDI mendapat pengakuan dari pemerintah kolonial. Seorang kolega Samanhoedi merekomendasikan nama Tjokroaminoto yang kala itu masih bekerja di Surabaya. Samanhoedi akhirnya bertemu dengan Tjokroaminoto untuk berdiskusi mengenai penyusunan anggaran dasar SDI.
- ⁷ Tjokroaminoto sebagai ketua umum pada Kongres Sarekat Islam ke-II yang dilangsungkan di Yogyakarta 19-20 April 1914.
- ⁸ Robert Van Niel. *Munculnya Elit Modern Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1960. hlm: 128.
- ⁹ H.O.S. Tjokroaminoto. *Islam dan Sosialisme*. Jakarta: Lembaga Penggali dan Penghimpun Sedjarah Revolusi Indonesia, Endang, dan Pemuda, 1963. hlm: 9.
- ¹⁰ *Ibid.*
- ¹¹ Djohan Efendi. *Pembaruan Tanpa Membongkar Tradisi: Wacana Keagamaan di Kalangan Generasi Muda NU Masa Kepemimpinan Gus Dur*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010. hlm: 77.
- ¹² H.O.S. Tjokroaminoto. 1963, *op.cit.*, hlm: 71-72.
- ¹³ *Ibid.*
- ¹⁴ *Ibid.*, hlm: 10.
- ¹⁵ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante*. Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1985. hlm: 80.
- ¹⁶ Sumarno. *Perjuangan Bernegara Demokrasi H.O.S. Tjokroaminoto: Telaah Historis Pemikirannya dalam Pergerakan Nasional Sarekat Islam 1912-1934*. Jakarta: Fakultas Pengetahuan Ilmu Budaya, Universitas Indonesia, 2000.
- ¹⁷ Fuad Fachruddin. *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*. Jakarta: Pustaka Alvabet & Yayasan INSEP, 2006. hlm: 275.

- ¹⁸ Zuhairi Misrawi. *Madinah: Kota Suci, Piagam Madinah, dan Teladan Muhammad SAW*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009. hlm: 26.
- ¹⁹ Takashi Shiraishi. *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997. hlm: 89.
- ²⁰ Rosihan Anwar. *Sejarah kecil "Petite Histoire" Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004. hlm: 5.
- ²¹ Zaini Muchtarom. *Santri dan Abangan di Jawa*. Jakarta: Penerbit INIS, 1988. hlm: 47.
- ²² H.O.S. Tjokroaminoto. *Tafsir Program Asas dan Program Tandhim Syarikat Islam*. Jakarta: Yayasan Bina Sari, 1985. hlm: 43.
- ²³ H.O.S. Tjokroaminoto. *Islam dan Sosialisme*. Jakarta: Bulan Bintang, 2003. hlm: 134.
- ²⁴ Robert Van Niel. *op.cit.* hlm: 141.
- ²⁵ Rudolf Mrazek. *Engineers of Happy Land: Perkembangan Teknologi dan Nasionalisme di Sebuah Koloni*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006. hlm: 49.
- ²⁶ Abdul Rivai. *Student Indonesia di Eropa*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2000. hlm: 3.
- ²⁷ Ahmat Adam. *Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran Keindonesiaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003. hlm: 176.
- ²⁸ Yudi Latif. *Inteligensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Abad ke-20*. Bandung: Mizan Pustaka, 2006. hlm: 152.
- ²⁹ *Ibid*, hlm: 153.
- ³⁰ Ahmat Adam. *op.cit*, hlm: 178.
- ³¹ M. Nasruddin Anshoriy Ch & Djunaidi Tjakrawerdya. *Rekam Jejak Dokter Pejuang & Pelopor Kebangkitan Nasional*. Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2008. hlm: 15-17.
- ³² Abibullah Djaini. *Pemikiran dan Perjuangan Mohammad Natsir*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996. hlm: 106.
- ³³ Yusuf Abdullah Puar. *70 Tahun M. Natsir*. Jakarta: Pustaka Antara, 1978. hlm: 15-17.
- ³⁴ *Ibid*, hlm: 102.
- ³⁵ Mohammad Natsir. *Capita Selecta, Jilid 1*. Bandung: Penerbit Sumup, 1961. hlm: 200.
- ³⁶ *Ibid*.
- ³⁷ *Ibid*, hlm: 201-203.
- ³⁸ Abibullah Djaini. *op.cit.*, hlm: 106.
- ³⁹ Mohammad Natsir. *Capita Selecta 2*. Jakarta: Pustaka Pendis, 1954. hlm: 20.
- ⁴⁰ *Ibid*.
- ⁴¹ *Ibid*.
- ⁴² *Ibid.*, hlm: 53
- ⁴³ *Ibid*.

- ⁴⁴ *Ibid.* hlm: 64.
- ⁴⁵ Mohammad Natsir. *Capita Selecta, Jilid 1*. Jakarta: Bulan Bintang, 1973. hlm 436.
- ⁴⁶ Din Syamsuddin. "Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam" dalam Jurnal *Ulumul Quran*, Volume IV, Nomor 2, 1993, hlm: 6.
- ⁴⁷ Khumaidi. "Islam dan Tata Negara: Pemikiran Sosial-Politik Mohammad Natsir", dalam Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan *Kontekstualita*, Volume 20, Nomor 1, Juni 2005, hlm: 114-115.
- ⁴⁸ Yusril Ihza Mahendra. "Modernisasi Islam dan Demokrasi: Pandangan Politik Mohammad Natsir", dalam Jurnal *Islamika*, No. 3, Januari-Maret 1994, hlm: 136).
- ⁴⁹ Mohammad Natsir. *op.cit.*, hlm: 443.
- ⁵⁰ Khumaidi. *op.cit.*, hlm: 115.
- ⁵¹ Mohammad Natsir, *loc.cit.*
- ⁵² Khumaidi. *op.cit.*, hlm: 115.
- ⁵³ Mohammad Natsir. *op.cit.*, hlm: 377.
- ⁵⁴ Mohammad Natsir. *Islam Sebagai Ideologi*. Jakarta: Pustaka Aida, 1959. hlm: 166.
- ⁵⁵ *Pandji Islam*, 15 Juli 1940.
- ⁵⁶ Mohammad Natsir. 1957. *Capita Selecta, Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Pendis, hlm: 273.
- ⁵⁷ Lukman Hakiem (ed.). *100 Tahun Mohammad Natsir: Berdamai dengan Sejarah*. Jakarta: Penerbit Republika, 2008. hlm: 171-172.
- ⁵⁸ Kostituante Republik Indonesia, 1957. *Risalah Perundingan Jilid V*. Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat, hlm: 276.
- ⁵⁹ Thohir Luth. *M. Natsir, Dakwah dan Pemikirannya*. Jakarta: PenerbitGema Insani, 1999. hlm: 104.
- ⁶⁰ Mohammad Natsir. *op.ci.t.*, hlm: 238.
- ⁶¹ *Ibid.*, hlm: 236.
- ⁶² *Ibid.*, hlm: 240.

BAB II

Kebudayaan untuk Kemajuan dan Pembangunan Bangsa

Jajat Burhanudin
Muhamad Dirga Fawakih

“Zaman Bergerak”; demikian istilah yang kerap digunakan untuk menggambarkan perkembangan pada awal abad ke-20 dalam sejarah Indonesia.¹ Perkembangan ini bermula dari perubahan kebijakan kolonial yang mulai fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat Hindia Belanda, “Politik Etis”, yang mulai diterapkan secara efektif ketika W.F. Idenburg menjadi Menteri Koloni (1902-5, 1908-9, 1918-19). Lepas dari perdebatan baik menyangkut konsep maupun implementasinya, politik etis bagaimanapun juga telah berdampak besar pada Hindia Belanda di awal abad ke-20. Di samping perkembangan ekonomi dan perubahan sosial-budaya, dampak penting lain adalah tumbuhnya sebuah elit baru berpendidikan modern. Meski jumlah mereka kecil jika dibandingkan dengan total penduduk saat itu, kelompok yang baru muncul tersebut tampil menjadi satu golongan sangat penting yang menentukan alur sejarah di Hindia Belanda.²

Demikianlah, didorong keinginan untuk mengarahkan sikap mental rakyat Hindia Belanda kepada modernitas, J.H. Abendanon, selaku Direktur Pendidikan di Hindia Belanda (1900-5), melakukan sejumlah perubahan penting dalam dunia pendidikan. Di bawah Abendanon, pada 1900 *hoofdscholen* tua (sekolah-sekolah kepala) di Magelang, Purbalingga, dan Bandung direorganisasi menjadi pusat-pusat pelatihan untuk para pegawai pribumi, OSVIA

(*Opleidingscholen voor Inlandsche Ambtenaren*). Sekolah ini kemudian dibuka untuk rakyat Hindia Belanda, tidak hanya khusus bagi elit aristokrat, dengan syarat mereka telah menyelesaikan Sekolah Rendah Eropa. Pada tahun 1900-2, Sekolah Dokter-Jawa di *Weltreveden* juga diubah menjadi STOVIA (*School tot Opleiding van Inlandsche Artsen*), sekolah untuk pelatihan para dokter pribumi.³

Dengan mereorganisasi sekolah-sekolah tersebut, Abendanon berusaha memperlebar kesempatan bagi rakyat biasa di Hindia Belanda untuk mengikuti sekolah-sekolah Belanda. Dia bahkan menghapuskan iuran bagi orang tua yang pendapatannya di bawah 50 gulden per bulan. Reformasi pendidikan yang dia cetuskan terus berkembang. Pada 1917, pemerintah membangun kembali di antaranya Sekolah Kelas Pertama menjadi *Hollandsch-Inlandsche School* (HIS). Meski masih ditujukan bagi elit Hindia Belanda, HIS secara resmi menjadi bagian sistem pendidikan Eropa, dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantarnya. Di atas HIS, Belanda mendirikan MULO (*Meer uitgebreid lager onderwijs*), sehingga para pelajar Hindia Belanda dapat memiliki kedudukan yang sama seperti orang Belanda dan orang Cina yang telah mendirikan lembaga mereka sendiri, *Hollandsch-Chineesch School*. Pada tahun 1919, AMS (*Algemene middelbare scholen*) didirikan dalam rangka menyediakan tingkat pendidikan yang lebih tinggi bagi para pelajar. Namun demikian, untuk tingkat universitas, para pelajar tersebut harus pergi ke Belanda.⁴

Dengan berdirinya sekolah-sekolah tersebut, jumlah rakyat Hindia Belanda yang terdidik di sekolah-sekolah Barat meningkat, dari hanya 269.940 pada tahun 1900 menjadi 1,7 juta pada tahun 1930-an. Jumlah ini tentu saja tidak signifikan jika dibandingkan dengan total penduduk Hindia Belanda. Jumlah rakyat yang terdidik mencapai tidak lebih dari 3 persen. Hanya saja, reformasi etis dalam bidang pendidikan telah menciptakan sebuah lapisan baru dalam masyarakat Hindia Belanda yang akrab dengan modernitas, yang disebut sebagai “elite Indonesia modern”. Mereka berbeda dari elit

tradisional yang kedudukannya semata-mata berdasarkan kelahiran dan keturunan.

Ketimbang menjadi *pangreh praja*, priyayi baru lebih memilih posisi-posisi baru yang tersedia di kota-kota, seperti guru, jurnalis, dan intelektual. Memang, priyayi baru berasal dari latar belakang priyayi lama. Kebijakan pemerintah Belanda dibuat untuk memberi kesempatan kepada keluarga priyayi memperoleh pendidikan. Tetapi, pengalaman belajar di sekolah Dokter-Jawa mendorong mereka untuk masuk dalam heterogenitas masyarakat perkotaan, di mana mereka berbaur dengan gaya hidup peranakan Cina dan Arab, Indo-Eropa (Erasia), dan kelompok santri. Akibatnya, mereka mulai memisahkan diri dari akar budaya yang menjadi asal-usul mereka. Mereka tampil sebagai kelompok yang secara kritis menggugat otoritas priyayi lama.⁵ Lebih dari itu, dengan latar belakang sosio-budaya ini, mereka juga tampil ke panggung diskursus yang tengah berkembang saat itu, dengan memperkenalkan ide kemajuan (*progress*) bagi rakyat Hindia Belanda.

Dalam diskursus kemajuan ini, Abdul Rivai (1871-1932), seorang lulusan Sekolah Dokter-Jawa, memegang peranan penting. Dengan *Bintang Hindia*—majalah berbahasa Melayu yang dia terbitkan di Belanda pada 1902—Abdul Rivai terlibat tidak hanya dalam advokasi tentang kebutuhan, tetapi juga perumusan gagasan kemajuan untuk rakyat Hindia Belanda. Didesain dalam kerangka Politik Etis, *Bintang Hindia* diterbitkan dengan tujuan “memperkenalkan perkembangan budaya penduduk pribumi dan memperkuat ikatan antara Belanda dan daerah jajahannya”.⁶ Oleh karena itu, gagasan kemajuan *Bintang Hindia* semaksud dengan mencapai standar modernitas Barat. Demikianlah, gagasan kemajuan terus berkembang sebagai satu wacana dominan pada awal abad ke-20. Bersama dengan Abdul Rivai, banyak tokoh lain yang menyuarakan hal yang sama, yang menjadikan gagasan kemajuan sebagai arus utama dalam kesadaran masyarakat Hindia Belanda.⁷

Namun demikian, wacana yang berkembang tidak berhenti pada gagasan kemajuan. Sejalan dengan menguatanya arus politik

dalam pergerakan, maka begitu pula halnya dengan strategi dan pola yang harus diadopsi dalam upaya menciptakan kemajuan tersebut. Di sini, pemikiran tentang kebudayaan mulai mengemuka. Dalam sejarah Indonesia, pemikiran tersebut berkembang pada tahun 1930-an, yang ditandai dengan perdebatan di sekitar rumusan budaya yang sesuai dengan alam rakyat Hindia Belanda.

Tiga orang tokoh akan ditampilkan di sini, yang mewakili setidaknya tiga corak pemikiran tentang strategi kebudayaan untuk kemajuan bagi rakyat Hindia-Belanda. Ketiga tokoh tersebut adalah Sutan Takdir Alisjahbana (1908-1994) yang menyuarakan perlunya menetapkan budaya Barat, Dr. Soetomo (1888-1938) yang menolak pemikiran Alisjahbana seraya menganjurkan pendidikan pekerti timur, dan kemudian Muhammad Yamin (1903-1962) dengan gagasan persatuan Indonesia. Ketiga tokoh tersebut akan ditampilkan di sini sebagai perumus pemikiran dan strategi kebudayaan bagi bangsa Indonesia.



Sutan Takdir Alisjahbana, Lahir di Natal, Sumatera Utara, 11 Februari 1908
(Sumber : Arsip Nasional Republik Indonesia-ANRI)

2.1. **Sutan Takdir Alisjahbana: Kebudayaan Barat untuk Kemajuan Indonesia**

Tidak diragukan lagi, Sutan Takdir Alisjahbana adalah salah seorang tokoh sentral yang terlibat secara intensif dalam merumuskan dasar kebudayaan Indonesia. Namanya banyak dikenal dan dikaitkan dengan bidang budaya dan sastra; ia adalah pemikir budaya, sastrawan, filosof, dan sejarawan. Pria kelahiran Minangkabau ini adalah tokoh lintas angkatan yang menjadi saksi sejarah akan perkembangan kebudayaan Indonesia.

Sutan Takdir banyak dikenal melalui novelnya yang cukup fenomenal, *Layar Terkembang*. Walaupun sebenarnya itu hanya satu dari sekian banyak karya yang telah dihasilkannya. Jauh lebih terkenal adalah pemikirannya yang sangat berorientasi Barat. Ia sangat gencar mendukung sifat-sifat budaya Barat, yakni intelektualisme, individualisme, materialisme, dan egosime, yang diyakini telah berhasil menghantarkan Barat pada kemajuan. Dan bagi Sutan Takdir, kemajuan Barat merupakan budaya ideal untuk diterapkan bagi upaya menciptakan kemajuan di bumi Indonesia. Bertolak dari pemikiran inilah Sutan Takdir terlibat dan memberi kontribusi sangat berarti dalam perbincangan tentang kebudayaan, yang lebih akrab disebut polemik kebudayaan. Bahkan, ia adalah pengawal dari polemik kebudayaan tersebut.⁸

Meski demikian, penting dicatat, hal itu tidak menjadikan lupa pada bumi kelahirannya. Ia berusaha merumuskan kebudayaan yang ideal untuk Indonesia. Bahkan, ia adalah aktivis budaya yang tak lelah mengkampanyekan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan Asia Tenggara. Maka dari itu, namanya bukan saja mahsyur di Indonesia tapi juga di negara ASEAN. Sutan Takdir juga terkenal sebagai tokoh yang pernah mengusulkan penggantian nama Asia Tenggara menjadi nama *Bumantara* (Bumi Antara).⁹

2.2. Riwayat Hidup

Sutan Takdir lahir di . Sutan Takdir memulai pendidikannya di sekolah dasar Belanda (HIS) di Bengkulu. Setelah lulus ia kemudian melanjutkan pendidikannya ke sekolah guru (*Kweek School*) di Lahat, Muara Enim. Dari situ, ia masuk ke sekolah tinggi keguruan (*Hoogere Kweek School*) di Bandung hingga tahun 1928. Setelah itu Sutan pergi ke Palembang dan menjadi guru di sana. Setelah beberapa lama menjadi guru di Palembang, kemudian Sutan pergi ke Jakarta untuk mengikuti *Hoofdtce Cursus* pada tahun 1931-1933. Ia berhasil mendapatkan gelar diploma. Selanjutnya Sutan Takdir mendaftarkan diri ke sebuah Fakultas Hukum di Jakarta dan mendapatkan gelar Mr. (*Meester in de Rechten*). Di samping itu, Sutan juga giat mengikuti kuliah di Fakultas Sastra, yang memang sesuai dengan semangat jiwanya.

Seperti tokoh pergerakan lainnya, Sutan juga memulai karir politiknya melalui organisasi-organisasi kepemudaan. Di organisasi tersebut Sutan muda selalu membawa semangat nasionalisme. Pada tahun 1924 Sutan mendirikan *organisasi Jong Sumatranen Bond*, sebagai perhimpunan pemuda Sumatera. Sutan juga diangkat menjadi salah satu ketua cabang JSB Muara Enim. Bahkan, pada saat ia menempuh pendidikannya di Bandung, ia sempat diangkat menjadi wakil ketua dan sekretaris JSB cabang Bandung.

Selanjutnya JSB menjadi arena politik Sutan. Ia banyak bersumbangsih dan berperan aktif dalam organisasi ini. JSB adalah salah satu dari beberapa organisasi kedaerahan yang juga turut dalam ikrar pemuda dalam Kongres Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Bahkan JSB melalui Muhammad Yamin, tokoh yang juga dibahas di baba ini, menjadi salah satu organisasi kedaerahan yang mengusulkan agar bahasa Melayu dijadikan bahasa Indonesia.

Karena itu, saat masih di Palembang Sutan Takdir bersama beberapa kawannya mendirikan majalah mingguan *Semangat Muda*. Yang menarik dalam majalah ini adalah, Sutan Takdir tidak lagi menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa majalah. Ia menggunakan

bahasa Indonesia. Hal ini adalah komitmennya dalam menjunjung tinggi kongres Pemuda yang menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.

Tak lama di Palembang Sutan Takdir harus melangkah ke kakinya ke rantauan lain. Jakarta kali ini menjadi tujuannya. Saat di Jakarta mendengar adanya lowongan di biro penerbitan pemerintah kolonial, Balai Pustaka, ia segera melamar dan akhirnya diterima. Sutan menjabat sebagai Redaktur Kepala majalah *Panji Pustaka*. Di Balai Pustaka inilah ia kemudian menanjaki karir intelektualnya, terutama dalam bidang sastra. Di sini Sutan berkesempatan untuk menuangkan gagasan-gagasannya di salah satu rubrik penting yang dikelolanya, yakni "Memadjoekan Kesusastraan".¹⁰ Di rubrik tersebut Sutan banyak mengulas puisi-puisi yang dikirim ke majalah tersebut, selain juga kerap kali menyampaikan gagasan-gagasannya. Ia sangat menakankan pada kebebasan sastrawan dalam mengekspresikan karyanya.

Pada tahun 1929, untuk pertama kalinya ia menulis roman berjudul *Tak Putus Dirundung Malang*. Setelah itu terbit roman keduanya yang berjudul *Dian yang Tak Kunjung Padam* pada tahun 1932. Jiwa muda Sutan kian mengelora untuk menyatukan para sastrawan dalam media yang berbeda. Bukan dalam media yang difasilitasi oleh pemerintah kolonial yang kian membuat hatinya risau. Ia sangat berambisi untuk menyatukan para sastrawan lokal dari seluruh penjuru Tanah Air. Atas dasar itu, ia bersama rekannya di Balai Pustaka mendirikan majalah *Pujangga Baru*. Usulan pendirian majalah ini sebenarnya datang dari sahabatnya, Armijn Pane. Namun Sutan Takdir sangat antusias menyambut usulan tersebut. Dan perkembangan majalah tersebut lebih banyak di tangan Sutan Takdir, sehingga namanya kerap diasosiasikan dengan majalah tersebut.

2.3. Sutan Takdir Alisjahbana dan Pujangga Baru

Seperti baru saja disinggung, pendirian majalah *Pujangga Baru* berawal dari kegelisahan Sutan Takdir saat bekerja di majalah

Panji Pustaka. Akhirnya, atas usul dan dorongan Amir Hamzah, ia bertekad untuk mendirikan majalah yang nantinya menjadi media untuk menghimpun para sastrawan dari seluruh plosok Tanah Air. Sutan Takdir menjadi ujung tombak dari pendirian majalah ini; ialah yang kemudian lebih banyak mencurahkan fikiran dan tenaganya dalam mendirikan majalah ini.

Akhirnya pada tahun 1933 Sutan Takdir Alisjahbana, Armijn Pane, dan Amir Hamzah mendirikan majalah *Pujangga Baru* dan pada tahun yang sama terbit pula edisi perdananya. Pada penerbitan pertama majalah ini hanya dicetak sebanyak 200 eksemplar. Pada awalnya keterangan resmi diberikan untuk majalah ini, yang berbunyi “majalah kesustraan dan bahasa serta kebudayaan umum”. Namun, sejak 1935 keterangan majalah tersebut berubah menjadi “Pembawa semangat baru dalam kesustraan, seni budaya, dan soal masyarakat umum”. Bahkan pada tahun 1936 keterangannya berubah lagi menjadi pembawa semangat baru yang dinamis untuk membentuk persatuan Indonesia.¹¹ Jika kita melihat keterangan-keterangan yang digunakan oleh Sutan Takdir dan kawan-kawannya dalam majalah *Pujangga Baru*, kita melihat bahwa setiap tahun visi dari majalah tersebut berubah-ubah sesuai dengan semangat zamannya.

Seketika majalah *Pujangga Baru* menjadi tempat berkumpul para penggiat budaya dan sastra, seniman, dan cendekiawan pada masa itu. Dalam lingkungan *Pujangga Baru* juga muncul berbagai tokoh yang menjadi anggota redaksi, seperti Armijn Pane, Mr. Sumanang, Mr. Amir Sjarifudin, Mr. S. Muh. Sjah, Dr. Ng. Perbatjaraka, WJS Purwadarminta, dan H.B Jassin. Nama-nama tersebut silih berganti meramaikan *Pujangga Baru*. Namun, dari sekian banyak nama tersebut, Sutan Takdirlah yang paling menunjukkan konsistensinya mengabdikan dalam majalah tersebut.

Majalah ini berhasil dalam mewujudkan cita-cita awalnya, yakni menghimpun para sastrawan dari seluruh penjuru Tanah Air. Muncul beberapa tokoh dari berbagai pelosok Tanah Air, di antaranya Dr. M. Amir (Tanjung Pura), LK Bohang (Jakarta), MR Dajoh (Bogor), Fatimah H. Delais (Palembang), Muhammad Dimjati (Solo),

Karim Halim (Padang), Ali Hasjmy (Aceh), Intojo (Rangkas Bitung), Aoh K. Hadimada (Parakan Salak), Or. Mandak (Medan), Selasih (Padang Panjang), Sutan Sjahrir (Bandaneira), Suwandhi (Yogyakarta), J.E. Tatengkeng (Ulu-Siau), AM. Tahir (Ujungpandang), dan beberapa tokoh lainnya. Bila dilihat nama-nama tokoh yang mendominasi memang kebanyakan berasal dari Sumtera. Namun, tidak bisa dipungkiri juga bahwa pada masa itu para sastrawan dari penjuru Tanah Air mulai membaaur satu. Kebinekaan sastra Indonesia kian terlihat jelas. Sejatinya sastra Indonesia memang bukan saja milik satu golongan suku atau wilayah tertentu saja, namun milik semua suku bangsa yang hidup diseluruh penjuru Nusantara.

Perjuangan Sutan Takdir memang tidak selalu mulus dalam *Pujangga Baru*. Ia beserta koleganya, Amir Hamzah, banyak mencurahkan tenaga, fikiran, dan materi demi kelangsungan penerbitan majalah ini. Keuntungan dari penerbitan majalah ini memang terbilang kecil. Selain itu dari sekitar 500 eksemplar yang dicetak yang hanya membayar tetap hanya berkisar 150 orang. Semua kekurangan dan kerugian dari penerbitan majalah tersebut sepenuhnya ditanggung Sutan Takdir dan Amir Hamzah. Memang, Sutan Takdir dan kawan-kawannya tidak melihat hal ini sebagai media untuk mendulang keuntungan, tapi sebagai investasi cita-cita Sutan Takdir dan kawan-kawannya. Meski mengalami masalah finansial, kehadiran majalah *Pujangga Baru* telah memberikan pengaruh signifikan dalam perkembangan sastra Indonesia.

Pada kisaran tahun 1933 hingga 1942, *Pujangga Baru* telah berhasil mengangkat isu-isu kebudayaan, persatuan Indonesia, dan isu lain yang mewakili nasionalisme kebudayaan. Gagasan Sutan Takdir dalam *Pujangga Baru* ini telah memberi pemahaman mengenai perlunya Indonesia baru di masa depan, yang meninggalkan masa lalu “pra-Indonesia” yang kian usang dimakan zaman. Konsep kebudayaan dan Identitas Indonesia mengemuka dan begeser menjadi sebuah pemikiran mengenai nasionalisme kebudayaan. Inilah yang kemudian menjadi sangat penting dari kehadiran *Pujangga Baru* dalam kancah kesusastraan Indonesia kala

itu. *Pujangga Baru* sangat berpengaruh kuat pada sikap, pemikiran, dan orientasi budaya generasi selanjutnya.¹²

Kontribusi lain dari *Pujangga Baru* dalam kancah kesusastraan Indonesia adalah membangkitkan tradisi berpolemik sebagai sebuah dinamika kebudayaan tentang bangsa atau tentang hal lain sebagai usaha menciptakan cara berfikir kritis. Dalam esai-esai yang ditulis oleh para tokoh *Pujangga Baru* kita juga dapat melihat betapa mereka sesungguhnya juga memiliki perbedaan dalam pandangan, khususnya dalam kebudayaan.

Ketika Jepang masuk dan menduduki Indonesia, majalah *Pujangga Baru* dilarang terbit. Pemerintah Jepang menganggap majalah *Pujangga Baru* bersifat kebarat-beratan. Kala itu salah satu misi Jepang di Indonesia adalah menghapus segala sesuatu yang berbau Barat. Nampaknya, pelarangan tersebut sama sekali tidak mematikan semangat Sutan Takdir bersama kawan-kawannya untuk tetap menghidupkan kembali penerbitan majalah itu selepas Indonesia merdeka.

Demikianlah, setelah Indonesia merdeka, Sutan Takdir mendapatkan amunisi baru dalam *Pujangga Baru* yang dipimpinya, yakni para sastrawan muda yang kemudian sangat terkenal. Di antara mereka adalah Chairil Anwar, Rivai Apin, Asrul Sani, Achdiat K. Mihadja, Dodong Djiwapraja, Hariadi S. Hartowardojo, S. Rukiah, dan beberap tokoh lainnya. Namun, pada 1953 Sutan Takdir menghentikan penerbitan majalah ini. Ia kemudian menerbitkan majalah baru bernama *Konfrontasi* (1954-1962). Staf redaksinya dijabat berbagai tokoh sastrawan seperti, Soejadmoko, Beb Vuyk, Hazil Tanzil, Achdiat K. Mihadja, dan lain-lain.

Meskipun pada tahun 1953 majalah *Pujangga Baru* telah ditutup, namun kelahirannya dalam kancah kesusastraan Indonesia telah banyak memberikan pengaruh yangsa sangat besar, terutama bagi perkembangan kesusastraan dan kebudayaan. Gagasan-gagasan yang baru dalam bidang sastra, bahasa, dan budaya juga banyak menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan. Berbagai esai yang

ditulis Sutan Takdir juga pada akhirnya banyak memicu terjadinya polemik. Dan polemik tersebut tidak saja terjadi dalam majalah *Pujangga Baru* tersebut, tapi bahkan meluas ke berbagai surat kabar dan majalah yang juga dipimpin oleh para tokoh-tokoh terkemuka zaman pergerakan.

Polemik golongan *Pujangga Baru* dengan kaum tua tidak hanya berkisar pada perdebatan mengenai bahasa dan sastra saja. Namun, lebih dari itu, *Pujangga Baru* memberikan perhatian pada persoalan-persoalan mengenai kebudayaan, pendidikan, pandangan hidup, dan kemasyarakatan. Berbagai tulisan Sutan Takdir dalam *Pujangga Baru* selalu dianggap kontroversial dan tak jarang menimbulkan berbagai reaksi sehingga benar-benar menciptakan tradisi berpolemik yang sehat dari berbagai tokoh lintas periode dan lintas bidang.

Sutan Takdir yang sangat pro-Barat mengatakan bahwa hanya dengan jalan mengambil ilmu dan roh Barat sepuas-puasannya kita dapat mengimbangi Barat. Pernyataan tersebut sontak menuai respon dari berbagai tokoh pergerakan seperti Dr. Soetomo, Ki Hajar Dewantara, Poerbtharaka, M. Amir, Sanusi Pane dan beberapa tokoh lainnya. Dr Soetomo dan KH Dewantara berbeda pandangan dengan Sutan Takdir Alisjahbana. Keduanya lebih memilih tradisionalisme sebagai identitas sebuah bangsa. Tokoh-tokoh lain juga mengemukakan pandangannya baik yang bersifat pro terhadap Sutan Takdir maupun yang kontra dengannya.

Masa-masa inilah yang kemudian menciptakan tradisi berpolemik yang sehat dan santun. Meskipun berbagai tokoh menyetakan perbedaan pandangan satu sama lain dan nampak bersikukuh dengan padangan mereka, namun dari situlah kita dapat melihat bahwa para pendahulu kita telah berfikir dan bekerja keras dalam merumuskan konsep kebudayaan untuk Indonesia. Dalam bahasan selanjutnya penulis akan memfokuskan pembahasan mengenai pandangan-pandangan Sutan Takdir dalam polemik kebudayaan.

2.4. Sutan Takdir dalam Polemik Kebudayaan

Polemik kebudayaan adalah suatu perdebatan tokoh lintas bidang dan latar belakang dalam menentukan konsep kebudayaan yang ideal untuk bangsa Indonesia. Perdebatan atau polemik ini terjadi pada bulan Agustus-September 1935, yang banyak menarik minat para tokoh untuk menjajaki arena perdebatan yang kian sengit. Dr Soetomo melalui surat kabar *Suara Umum* yang dipimpinnya menjadi lawan debat terdepan bagi Sutan Takdir, meskipun ada beberapa tokoh lain yang juga kontra dengan pemikirannya. Perdebatan ini sebenarnya banyak memfokuskan permasalahan pada bidang budaya, bahasa, dan pendidikan. Dari kesemua polemik atau perdebatan yang terjadi— oleh Achdiat dibagi menjadi tiga pokok persoalan polemik—Sutan Takdir selalu yang mengawali polemik.

Dalam polemik pertama, perdebatan dipicu oleh esai Sutan Takdir dalam majalah *Pujangga Baru*, yang selanjutnya menuai tanggapan dari Sanusi Pane dan Poerbatjaraka. Dalam esainya berjudul “Menuju Masyarakat dan Kebudayaan Baru”, Sutan Takdir banyak memaparkan gagasannya terkait dasar budaya yang harus dijadikan acuan agar kelak Indonesia dapat menjadi sebuah bangsa yang maju. Sutan Takdir mengusulkan agar nama Indonesia seharusnya kembali dirumuskan secara jelas. Arti kata Indonesia yang digunakan saat itu memang melingkupi wilayah yang membentang dari pulau Pulau Formosa sampai ke pantai Samudra Hindia. Menurutnya istilah yang digunakan untuk menamakan Indonesia masih sangat rancu. Iamisalhnya mengkritik mengenai penyebutan nama pahlawan seperti Tuanku Imam Bonjol dan Pangeran Diponegoro sebagai pahlawan Indonesia. Ia juga mengkritik keberadaan Borobudur yang dianggap sebagai keluhuran budaya Indonesia, Gamelan sebagai musik Indonesia, dan hikayat *Hang Tuah* menjadi buku kesusastraan Indonesia. Bagi Sutan Takdir, pelabelan ini sesungguhnya sangat rancu.

Ia menganggap bahwa perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan terdahulu bukanlah merupakan sebuah perjuangan yang telah sadar akan semangat keindonesiaan. Perjuangan tersebut

masih bersifat primordial, kesukuan, dan provinsional, sehingga tidak elok jika perjuangan mereka diatasnamakan sebagai ekspresi keindonesian. Begitupun dengan keluhuran Borobudur yang menurutnya tidak ada sangkut pautnya dengan semangat keindonesiaan. Singkatnya, Sutan Takdir menganggap bahwa segala bentuk pelabelan keindonesiaan yang kini melekat pada masyarakat luas tidak mewakili semangat keindonesiaan yang sesungguhnya. Mereka belum secara sadar mengatakan bahwa perjuangan mereka dan keluhuran karya mereka atas dasar semangat keindonesiaan.

Maka dari itu, Sutan Takdir mengkampanyekan agar nama Indonesia dirumuskan kembali dan tidak disangkutpautkan dengan semangat zaman pra-Indonesia atau sebelum abad ke-20, di mana masyarakat mulai sadar akan semangat kebangsaan. Terkait masalah ini Sutan Takdir menulis :

Kita mesti membuat kata “Indonesia” ini menjadi jelas jika perlu kita tidak boleh takut memakai pisau untuk membuang benalu dan parasit pada pohon keindonesiaan itu.

“Indonesia” yang timbul di kalangan bangsa kita, tidak dapat kita lepaskan dari perasaan dan semangat keindonesiaan. Semangat keindonesiaan itu merupakan ciptaan generasi abad kedua puluh, sebagai penjelmaan kebangkitan jiwa dan tenaga.

Semangat Indonesia itu sesuatu yang baru, menurut isi dan menurut banggunya. Ia tidak bertopang pada masa silam. Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang kebesaraannya dulu menguasai sebagian besar dari kepulauan ini, bukan pelopor keindonesiaan. Sebab waktu itu, suatu wilayah sama sekali tidak suka dikuasai oleh wilayah lain. Baik di dalam bangunan Sriwijaya maupun dalam bangunan Majapahit tidak ada sedikitpun hakikat semangat Indonesia, yaitu kemauan untuk bersatu yang terdesak oleh kesadaran akan kepentingan dan cita-cita bersama.¹³

Semangat Indonesia yang sesungguhnya adalah semangat yang tidak hanya mempresentasikan satu golongan atau suku saja. Yang lebih menarik lagi, Sutan Takdir membagi periodisasi Sejarah Indonesia menjadi dua bagian: masa Pra-Indonesia, di mana munculnya berbagai negara kota yang perjuangannya masih bersifat primordial dan provinsional; dan periode Indonesia baru, yakni pada awal abad ke-20 di mana mulai muncul pergerakan yang mulai sadar akan semangat keindonesiaan. yang sesungguhnya—menurut Sutan Takdir—baru lahir pada awal tahu 1900-an. Saat itu telah muncul berbagai tokoh dan organisasi yang secara sadar berjuang atas nama Indonesia. Sutan Takdir dengan tegas menjelaskan periodisasi ini:

Sangat perlu dinyatakan dengan tegas, bahwa sejarah Indonesia dimulai pada abad kedua puluh, ketika lahir generasi baru di wilayah Nusantara ini, yang dengan sadar ingin menempuh jalan baru untuk bangsa dan negerinya. Zaman sebelum itu, zaman hingga akhir abad kesembilan belas, ialah zaman pra-Indonesia, zaman jahiliyah keindonesiaan, yang hanya mengenal sejarah Hindia Belanda atau Oost Indische Compagnie, sejarah Mataram, sejarah Aceh, sejarah Banjarmasin, dan lain-lain.

Zaman pra-Indonesia, zaman jahiliyah Indonesia, itu setinggi-tinggi hanya dapat menegaskan pandangan dan pengertian tentang lahirnya zaman Indonesia. Namun, zaman Indonesia sama sekali bukan kelanjutan atau terusan dari zaman sebelumnya. Sebab dalam isi dan bentuknya, keduanya berbeda: Indonesia yang dicita-citakan oleh generasi baru bukan kelanjutan Mataram, bukan kelanjutan kerajaan Banten, bukan kerajaan Minangkabau, atau Banjarmasin.¹⁴

Sutan Takdir sangat bersikukuh untuk memutus periode sejarah tersebut. Ia menambahkan bahwa kebudayaan Indonesia nantinya akan terbentuk bukan kebudayaan yang mepresentasikan kelanjutan dari satu golongan kebudayaan tertentu. Sutan Takdir sangat berorientasi kemajuan dan modernisasi. Ia mengkampanyakan pekerjaan bagi para generasi muda Indonesia yang hidup pada masanya, bahwa pekerjaan mereka bukan lagi merekonstruksi peradaban masa lalu dan kemudian mengikutinya. Hal itu merupakan sebuah kemunduran dan hanya akan menciptakan generasi yang pandai meniru dan mengulang. Generasi muda Indonesia harus secara sadar membuka mata dan telinga untuk melihat kemajuan zaman.

Sutan Takdir memang sangat berkeinginan memotong tali kebudayaan masa lalu yang kian berlumut. Jika Indonesia muda masih saja terperangkap dengan sejarah dan kebudayaan yang usang tersebut, menurutnya, hanya akan membuat Indonesia terjerembab dalam kejumudan dan kegelapan. Maka dari itu, Sutan Takdir selalu menegaskan agar Indonesia baru seharusnya terbebas dari belenggu dari sejarah dan kebudayaan masa lalu yang kebanyakan masih bersifat primordial. Sehingga, perlu adanya pemersatuan agar tidak hanya satu golongan yang pada nantinya melegitimasi sebagai kebudayaan Indonesia. Sutan Taakdir menulis:

Pada pikiran saya, pandu-pandu kebudayaan Indonesia harus bebas benar dari warisan kebudayaan zaman pra-Indonesia. Bebas bukan berarti tidak tahu seluk-beluknya. Bebas hanya berarti tidak terikat. Sebab siapa pun yang belum dapat melepaskan dirinya dari kebudayaan Jawa akan berusaha memasukkan semangat kejawaan ke dalam kebudayaan Indonesia. Yang belum terlepas dari kebudayaan Melayu akan berupaya memasukkan semangat kemelayuan ke dalam kebudayaan Indonesia dan demikian seterusnya. Bagi mereka yang berpikir demikian, kebudayaan Indonesia ialah kebudayaan Jawa atau kebudayaan Melayu yang sedikit baru.¹⁵

Namun, Sutan Takdir tidak mengelak bahwa terciptanya kebudayaan Indonesia yang baru tersebut tidak dapat melepaskan dari unsur-unsur kebudayaan yang bersifat kedaerahan; karena sangat tidak mungkin membuat kebudayaan baru yang orisinal tanpa berangkat dari kebudayaan yang telah berakar di sebuah bangsa. Hal ini memang terkesan menarik. Apa yang dikatan Sutan Takdir terkait pemaksaan kebudayaan golongan tertentu sebagai identitas nasional hanya akan menimbulkan perselisihan. Hal ini bisa kita lihat dari berbagai kasus negara yang memaksakan identitas nasional dari golongan tersebut, misalkan Thailand yang menjadikan etnis Thai sebagai identitas nasional, Kamboja yang memaksakan etnis Khmer sebagai identitas nasionalnya, dan Vietnam yang memaksakan etnis Viet sebagai identitas nasional mereka. Dan kenyataannya hal itu menimbulkan perselisihan di kemudian hari. dikarenakan tidak terakomodasinya etnis atau golongan lain dalam pembentukan identitas kebudayaan nasional.

Maka dari itu, pembentukan Identitas yang bersifat orignial dengan berdasarkan kompilasi kebudayaan sebelumnya memang perlu sebagai identitas nasional. Namun Sutan Takdir kemudian menawarkan Barat sebagai acuan kebudayaan Indonesia baru yang menurutnya ideal. Barat yang dinilainya maju dapat menjadi acuan bagi masyarakat kepulauan nusantara yang telah lama mati dan tidak produktif. Hal ini memang tidak aneh mengingat kala itu Barat tengah berhasil melewati masa-masa kelamnya dan mencapai puncak keemasannya. Seketika itu Barat menjadi penguasa di berbagai penjuru dunia. Maka dari itu lumrah rasanya jika sebagain besar negara termasuk Indonesia menjadikan Barat sebagai acuan kemajuan sebuah peradaban. Senada dengan ini Sutan Takdir menulis:

Sudah sewajarnya pula alat untuk menumbuhkan masyarakat yang dinamis terutama sekali kita cari di negeri yang dinamis pula susunan masyarakatnya. Bangsa kita perlu alat-alat yang telah menjadikan negeri-negeri yang berkuasa di dunia

dewasa ini mencapai kebudayaan yang tinggi seperti sekarang; Eropa, Amerika, dan Jepang.

Demikian saya meyakini bahwa dalam kebudayaan Indonesia yang sedang tumbuh sekarang ini akan terdapat sebagian besar unsur Barat, unsur yang dinamis. Hal ini bukan suatu kehinaan bagi sebuah bangsa. Bangsa kita pun bukan baru sekali ini mengambil unsur-unsur dari luar: kebudayaan Hindu, kebudayaan Arab.

Dan sekarang tiba waktunya mengarahkan pandangan kita ke Barat.¹⁶

Hal ini merupakan pernyataan tegas yang dikemukakan oleh Sutan Takdir terkait Barat sebagai acuan kebudayaan, yang bisa menumbuhkan sifat kedinamisan dan selanjutnya membuat Indonesia maju layaknya Barat. Menurutnya, masyarakat Indonesia cenderung mengalem diri dengan pernyataan-pernyataan yang sangat melankolis, seperti timur halus budinya dan barat egois, intelektualis, dan materialistik. Kebanyakan masyarakat Indonesia menganggap buruk segala tindak tanduk Barat, sehingga hanya menumbuhkan sentimen anti-barat. Hal ini sangat merugikan, karena masih banyak segala sesuatu yang dapat diambil dari Barat. Karena itu, meskipun pahit, Sutan Takdir harus menegaskan semboyan bahwa “kita harus belajar dari barat”.

Semangat kebangsaan Indonesia berasal dari Barat. Sutan Takdir dalam hal ini mengambil contoh pendirian Budi Utomo. Kebanyakan dari mereka yang berkecimpung dalam pergerakan adalah didikan Barat. Bahkan beberapa organisasi pergerakan serupa banyak di antara tokohnya adalah lulusan Barat. Hal ini menandakan bahwa sebenarnya pendidikan Barat telah memberikan sumbangsaih bagi tumbuhnya jiwa-jiwa nasionalime bangsa Indonesia. Apa yang kemudian oleh banyak orang dinamakan semangat kebangsaan, semangat kebangkitan, dan semangat perjuangan tidak bisa dilepaskan dari unsur-unsur kebaratan atau setidaknya melalui prantara Barat.

Oleh karena itu, Sutan Takdir bersikukuh bahwa Indonesia baru harus melepaskan diri dari benalu sejarah yang selalu menempel. Indonesia harus menyongsong kebudayaan baru, dan siap memasuki kemajuan zaman; suatu kebudayaan yang meliputi kompilasi kebudayaan lintas golongan atau suku. Sutan Takdir mengambil contoh dan menawarkan kebudayaan Barat yang dinamis dan bersifat intelektualisme, individualisme, egoisme, dan materialisme; gagasan yang telah membawa Barat pada kemajuan. Maka tidak ada salahnya apabila Indonesia yang sedang merumuskan identitas kebudayaan nasionalnya mengadopsi nilai-nilai Barat yang telah terbukti dapat membawa Barat pada masa keemasan.

Dalam polemik pertama ini Sutan Takdir mendapatkan respon dari Sanusi Pane dan Poerbatjaraka. Mereka berbeda pendapat mengenai pemisahan periode sejarah Indonesia yang oleh Sutan Takdir dibagi menjadi masa pra-Indonesia dan Indonesia. Sanusi Pane dalam *Suara Umum* nomor 276, 4 September 1935, memberikan jawabannya terkait pandangan Sutan Takdir tentang periodisasi sejarah Indonesia. Menurutnya, Sutan Takdir tidak dapat dengan kuat menunjukkan kenyataan bahwa sejarah adalah rangkaian waktu yang timbul dari zaman sebelumnya; manusia tidak mampu menciptakan kekinian yang baru sama sekali.¹⁷ Sanusi Pane juga berbeda pendapat dengan pernyataan Sutan Takdir yang mengatakan bahwa masa pra-sejarah Indonesia bukanlah kelanjutan dari sejarah baru Indonesia. Sanusi Pane menulis :

Tuan Sutan Takdir Alisjahbana menyebut bahwa dalam zaman Majapahit, Diponegoro, dan Teungku Umar, belum ada keindonesiaan.

Pikiran ini kurang benar menurut pendapat kami. Keindonesiaan pada waktu itu pun sudah ada, keindonesiaan dalam adat, dalam seni. Hanya bangsa Indonesia belum muncul, orang Indonesia belum sadar bahwa mereka sebangsa. Sungguh boleh disebut ada imperialisme Sriwijaya, Majapahit, Mataram, tetapi hal itu tidak bertentangan dengan keindonesiaan. Di Belanda pun ada pertentangan, ada hegemoni daerah (lebih) dulu, tetapi siapa dapat menyangkal bahwa kebangsaan Belanda yang sekarang pada waktu itu sudah ada dan hanya menanti pengakuan dan wujud?

Kebangsaan Indonesia sudah ada semenjak dulu kala. Sekarang dirasakan dan diwujudkan.

Dengan demikian, nyata kesalahan Tuan Sutan Takdir Alisjahbana dalam caranya mengemukakan masalah.

Sebaliknya, ia seharusnya berkata: Bagaimanakah kita harus memperbaiki kebudayaan kita sehingga sesuai dengan perasaan kebangsaan sekarang?¹⁸

Sutan Takdir masih dalam judul esai yang sama “Menuju Masyarakat dan Kebudayaan Baru” memberikan balasan terhadap respon yang diberikan Sanusi Pane, seraya memegang teguh pendapatnya. Sanusi Pane mengatakan bahwa Indonesia sudah ada dalam adat sebelum memasuki abad 20. Namun, menurut Sutan Takdir, keindonesiaan yang dimaksud Sanusi Pane adalah keindonesian yang tidak disadari.

Selain dari Sanusi Pane, tanggapan juga datang dari Poerbatjaraka dalam esainya yang berjudul “Sambungan Zaman”. Poerbatjaraka juga kontra dengan pendapat Sutan Takdir yang mengatakan bahwa zaman pra-sejarah Indonesia tidaklah berkaitan dengan zaman Indonesia abad ke-20. Poerbatjaraka menilai bahwa Sutan Takdir tidak konsisten dengan pendapatnya sendiri. Di satu sisi ia tidak menghendaki sambungan zaman Indonesia, namun disisi lain ia mengatakan bahwa sesungguhnya kebudayaan yang baru harus berakar dari kebudayaan yang sebelumnya. Poerbatjarakan mendukung bahwa pengalaman sejarah masa lalu Indonesia merupakan hal penting dan merupakan sambungan zaman Indonesia abad 20. Poerbatjaraka juga tidak menghendaki terlalu terpusat terhadap masa lalu, namun juga tidak harus kebarat-beratan. Poerbatjaraka menulis:

Menurut perasaan saya, yang bermanfaat bagi tanah air dan bangsa kita ini ialah mengetahui jalannya sejarah dari dulu sampai sekarang. Dengan pengetahuan ini kita sekuat tenaga berusaha mengatur hari yang akan datang. Sebab hanya dengan pengetahuan inilah orang dapat memilih mana yang baik, mana yang tidak baik buat tanah air dan bangsa kita kelak.

Adapun pendapat Tuan Sutan Takdir Alisjahbana bahwa apa yang kita lakukan sekarang tidak harus berakar pada zaman silam, tetapi pada zaman yang akan datang, itulah sepanjang pikiran saya, terbaik belaka. Ada juga yang menyebutnya waringin sungsang, yakni pohon yang akarnya tumbuh di tempat pupusnya mesti

keluar. Namun, istilah ini biasanya dipakai orang di dunia mistik: di sana keadaannya memang serba terbalik dengan keadaan hidup di dunia ini.

Pendek kata: janganlah mabuk kebudayaan kuno, tetapi jangan mabuk kebaratan juga. Ketahuilah dua-duanya, pilihlah mana yang baik dari keduanya itu, supaya kita bisa memakainya dengan selamat di hari yang akan datang kelak. Inilah tugas berat untuk penganjur kita yang mau memperhatikan nasib bangsa kita, bangsa Indonesia kelak.¹⁹

Polemik kembali terjadi. Polemik kedua ini tidak lagi terkait padangan tentang persoalan kebudayaan, tapi pada persoalan pendidikan. Polemik ini terjadi antara bulan Oktober 1935 sampai April 1936 dan melibatkan beberapa tokoh-tokoh pergerakan nasional, di antaranya, Dr. Soetomo, Tjindarbumi, Adinegoro, Dr. M. Amir, dan KH Dewantara. Seperti pada polemik sebelumnya, Sutan Takdir yang memulai terjadinya polemik ini, dengan esainya yang berjudul "Semboyan yang Tegak, Kritik terhadap Pre Advice National Onderwijs Congres". Sutan Takdir tidak puas dengan hasil Kongres Pendidikan Nasional yang diadakan pada tanggal 8-9 Juni 1935 di Solo. Meskipun mengapresiasi terjadinya kongres tersebut, ia juga memberikan kritik tajam terhadap hasil kongres tersebut yang dinilai anti-intelektualisme, anti-individualisme, anti-egoisme, dan anti-materialisme. Ia menilai para tokoh yang memberikan prasaran dalam kongres tersebut terlalu berhati-hati; maksudnya adalah ketidakberanian menerima gagasan Barat yakni intelektualisme, individualisme, egoisme, dan materialisme. Sutan Takdir Menulis:

Kehati-hatian yang saya maksud terkait dengan masalah ini ialah kecenderungan anti-intelektualisme, anti-individualisme, anti-egoisme, anti-materialisme yang mendominasi isi pidato sebagian besar dari pembicaraan itu, bahkan ada yang berlebihan. Tuan Drs. Sigit menunjukkan anggapan bahwa pengetahuan ialah kekuatan bahaya anarkis yang dilahirkan pikiran liberal, bahaya pendidikan yang individualistis, bahaya terlalu mengedepankan hak individu.

Ki Hajar Dewantara berkata, bahwa "kecerdasan pikiran dan ilmu pengetahuan itu selalu kuat berpengaruh atas pertumbuhan egoisme dan cinta kebendaan. Ia pun berkata bahwa mengasah

daya pikir delapan jam di sekolah melahirkan intelektualisme, tapi menyebabkan terpisahnya sekolah dari kehidupan keluarga, maka sia-sialah usaha pendidikan budi pekerti dan budi khalayak di ruang keluarga itu.”²⁰

Sutan Takdir menilai kongres tersebut tidak mendukung gagasan Barat tersebut. Padahal, jelas bahwa gagasan tersebut terbukti telah membuat Barat mencapai kemajuan. Dalam hal ini Sutan Takdir berpandangan liberal dalam merumuskan konsep pendidikan ideal untuk bangsa Indonesia. Sementara dalam kongres tersebut beberapa prasaran memilih mengajukan pola pendidikan tradisional khas Indonesia. Dr. Soetomo, misalnya, mengajukan konsep pendidikan pondok dan KH Dewantara mengajukan konsep Taman Siswa. Kedua pendidikan tersebut sesungguhnya banyak menekankan pada aspek keluhuran budi dan kehalusan dalam bersikap, selain mengasah kecerdasan. Namun prasaran yang diberikan para tokoh-tokoh tersebut mendapat kritikan tajam dari Sutan Takdir. Sutan Takdir beranggapan bahwa para prasaran telah anti terhadap gagasan Barat dan salah dalam menganalisa dan berfikir.

Menurut Sutan Takdir, terpuruknya bangsa Indonesia lebih dikarenakan bangsa Indonesia kurang memaksimalkan otaknya. Bangsa ini hidup laksana parasit yang menempel pada masa silam. Banyak sekali ikatan-ikatan yang menghambat dalam kecerdasan bangsa Indonesia, baik itu adat istiadat, takhayul, dan lain sebagainya. Berikut tulisan Sutan Takdir yang menyinggung masalah terkait :

Kalau kita kaji benar, persoalan bangsa kita bukannya soal intelektualisme, bukan soal egoisme, dan bukan pula soal materialisme. Kalau kita analisis masyarakat kita dan sebab-sebab kekalahan bangsa kita berlomba dengan bangsa-bangsa di dunia, nyatalah kepada kita bahwa mandeknya, matinya, tiada bersemangatnya masyarakat bangsa kita karena selama berabad-abad kurang memakai otaknya, kurang sifat egoismenya, (yang saya maksudkan dalam arti positif), kurang sifat materialismenya. Dalam hal kecerdasan berabad-abad bangsa kita menjadi parasit, hidup kita seperti benalu yang menempel ke masa silam. Bangsa kita tidak mau mengasah otak, tidak berpikir kreatif, hanya mengikuti arus kebiasaan.

Perasaan pribadi, kepribadian di dalam bangsa kita dimatikan. Karena dalam masyarakat kita yang lama, setiap orang terikat oleh bermacam-macam ikatan: adat istiadat, takhayul, pikiran, dan pandangan yang bukan-bukan.²¹

Sutan Takdir menganggap pemrasaran telah menutup mata terhadap konsep yang telah diterapkan Barat dan terbukti telah membawa mereka pada masa keemasan. Mereka lupa bahwa munculnya berbagai tokoh pergerakan nasional juga merupakan hasil didikan Barat. Selain itu, para pemrasaran juga tidak sadar bahwa diri mereka sampai menjadi seperti itu merupakan jasa dari pendidikan Barat. Sutan benar-benar sangat optimis terhadap gagasan yang dikampanyekannya tersebut. Ia percaya bahwa dengan mengadopsi konsep dan gagasan Barat, bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa yang dinamis. Barat menurutnya menjanjikan buah hasil pendidikan yang sangat bermanfaat. Ia menegaskan bahwa:

Berkat didikan Barat itu bangsa kita mulai memakai otaknya mulai mempertimbangkan sendiri semua masalah, mulai berontak sebagai manusia yang ikut arus kebiasaan. Terhadap semua masalah, masyarakat di kalangan bangsa kita mulai timbul pikiran baru, orientasi baru: dalam hal politik, sosial, kebudayaan, dan agama.

Dengan menerima didikan Barat, di kalangan bangsa kita mulai hidup individu, mulai lahir kepentingan pribadi. Bangsa kita mulai tahu hak-haknya sebagai manusia yang dianugerahi perasaan dan pikiran sendiri. Ia mulai berani melepaskan dan memutuskan semua ikatan adat, ikatan takhayul, ikatan kebiasaan, dan lain-lain. Ia mulai merasa dirinya sebagai manusia bebas.

Melalui didikan Barat ia mulai memikirkan dirinya sendiri. Tidak takut mengemukakan pendapat pribadi. Mulai sadar haknya sebagai manusia dan sebagai anggota bangsa. Ia mulai berjuang bagi kepentingan dirinya dan kepentingan bangsanya.

Berkat didikan Barat bangsa kita mulai tidak mau hanya asal sekedar hidup. Kaum yang mendapat didikan Barat yang materialistis itu tidak dapat dan tidak sudi hidup dengan uang

segobang sehari. Pakaiannya tidak cukup lagi hanya sehelai saja dan ia mulai berminat tinggal di rumah yang layak. Ia mulai menghargai uang dan harta, dan mulai bekerja keras untuk mengumpulkan uang dan harta, yang sebenarnya menjadi hak kewajiban tiap-tiap orang.²²

Esainya tersebut kemudian menimbulkan respon yang beragam. Hal yang paling menarik dapat dilihat dari perdebatan antara Sutan Takdir dengan Soetomo. Soetomo²³ sebagai salah satu dari pemrasaran dalam Kongres Perguruan Nasional tersebut, merasa terpanggil untuk memberikan jawaban atas kritikan yang diajukan Sutan Takdir. Berbeda dengan Sutan Takdir, Soetomo tidak begitu tertarik dengan gagasan Barat, meskipun ia juga lulusan dari pendidikan Barat. Soetomo masih bersikukuh dengan konsep pendidikan Pondok Pesantren yang ia ajukan. Menurutnya, selain biaya pendidikannya yang murah, di pesantren anak-anak dapat terawasi dengan baik. Selain itu anak-anak yang tumbuh dilingkungan pesantren lebih besar jiwa sosialnya, jika dibanding dengan anak-anak yang dididik dalam sekolah Barat yang cenderung individualis. Soetomo menganggap bahwa pendidikan yang diselenggarakan Indonesia kelak tidak hanya sebagai alat asah kecerdasan saja, namun dapat menjadi media untuk menumbuhkan moral anak.²⁴ Selain itu, Soetomo juga menepis tuduhan bahwa ia dan para pemrasaran Kongres bersikap antipati terhadap intelektualisme, individualisme, egoisme, dan materialisme.

Kemudian Sutan kembali memberikan jawaban atas pernyataan yang dikemukakan Soetomo dalam *Suara Umum*. Menurutnya, Soetomo tidak menjawab pertanyaan yang diajukan olehnya. Malahan kemudian ia menelanjangi segala kekurangan dalam pendidikan Barat. Menurut Sutan Takdir, untuk menyelenggarakan pendidikan Nasional, kita harus mengambil titik tolak dari kekurangan pola pendidikan yang diselenggarakan Barat. Yang pasti titik tolak tersebut harus merujuk pada kebutuhan yang diperlukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Bila kekurangannya dalam kecerdasan, maka harus diasah kecerdasannya setajam mungkin, bila kurang individualisnya maka hiduplah individu sehidup-hidupnya. Sutan Takdir sangat berkeyakinan bahwa jika ingin menyamai Barat, bangsa Indonesia harus merebut instrumen-instrumen yang telah berperan dalam memajukan Barat. Kemudian Sutan Takdir menutup esainya dengan sebuah semboyan positif :

Berdasarkan analisis ini, dengan tegas dikemukakan semboyan yang positif: Pendidikan harus bersifat aktif membangun daya pikir kreatif, membangun inisiatif dengan semangat bekerja dan berusaha sendiri.

Dalam susunan pikiran yang demikian, pengalaman tentang intelektualisme, individualisme, egoisme, dan materialisme yang hanya merajalela di Barat tak mungkin mendapat tempat, sebab pikiran itu secara langsung terutama tertuju bagi kebutuhan masyarakat kita.²⁵

Di tengah perdebatan yang cukup sengit antara Soetomo dan Sutan Takdir, masuklah Tjindabumi,²⁶ sebagai tokoh yang agak moderat namun cenderung pada pendapat Sutan Takdir. Tjindarbumi sangat mengapresiasi perdebatan yang terjadi antara Soetomo dan Sutan Takdir, yang menurutnya dilakukan dengan sangat santun. Selanjutnya, melalui surat kabar *Suara Umum* yang terbit pada 9 Juli 1935 Tjindarbumi mengiyakan pendapat Sutan Takdir, bahwa mengambil falsafah Barat cukup penting. Meniru tidak berarti mengecilkan sang peniru. Tjindarbumi mengambil contoh dari tindakan Jepang yang kemudian menjadi negara yang maju. Kemajuan Jepang tidak lain karena mereka dapat mengambil falsafah dari kemajuan barat. Menurutnya tiruan yang sempurna tidak harus mengurangi keaslian kebangsaan sendiri.²⁷ Menurut Tjindarbumi seyogyanya antara Barat dan Timu dapat mengisi segala kekurangan mereka. Ia mengatakan:

Sesungguhnya bangsa Timur dan bangsa Indonesia ini pada khususnya harus banyak meniru orang Barat di dalam beberapa bagian filsafatnya, misalnya di dalam mementingkan ilmu pengetahuan (etnik, kepandaian, dan lain-lain), energi dan seterusnya. Namun, jangan lupa bahwa bangsa Barat sendiri tidak mengenal kesabaran, tidak mengenal dan tidak tahu akan ketentreman hati.

Orang barat membawa ilmu pengetahuan, energi, kemajuan, dan kekuatan hati kepada bangsa Timur, tetapi orang Barat terang-terangan pula meminjam ilmu Timur dalam hal kesabaran, damai, dan ketentraman hati.²⁸

Pendapatnya menunjukkan bahwa betapa moderat dirinya. Di satu sisi Tjindarbumi mendukung gagasan Sutan Takdir terkait falsafah yang harus diambil bangsa Indonesia. Namun, di sisi lain falsafah Barat juga harus ditutupi kekurangannya dengan falsafah ketimuran yang dipegang teguh bangsa Indonesia. Tjindarbumi juga tidak melewatkan kritik terhadap pendapat yang dikemukakan Sutan Takdir terkait gagasan pola pendidikan Barat yang diajukannya. Menurut Tjindarbumi:

Satu hal yang hilang di dalam pandangan Tuan Sutan Takdir Alisjahbana, yaitu tidak diuraikannya kelanjutan bagaimana yang harus dilakukan di dalam pengajaran nasional. Tuan Takdir Alisjahbana membicarakan (mengkritik) bagaimana filsafat bangsa kita (Timur) dan mengemukakan kebaikan dan keuntungannya filsafat bangsa Barat di dalam perjuangan hidup. Namun, Tuan Sutan Takdir Alisjahbana sedikitpun tidak menyinggung urusan pengajaran nasional.

Ini yang kita rasa sebagai kekurangan di dalam pandangannya yang penting itu. Tuan Takdir Alisjahbana adalah seorang pengajar. Jadi, pandangannya di dalam perguruan mempunyai dasar yang bagus, mempunyai otoritas.²⁹

Selanjutnya Tjindarbumi menutup esainya dengan memuji gagasan Sutan Takdir yang dinilainya sangat berorientasi pada kemajuan.

Sutan Takdir Alisjahbana kembali menuliskan esai yang merupakan kelanjutan dari pernyataan Soetomo terkait pendidikan Pondok Pesantren yang dikampanyekannya. Dalam esainya yang berjudul "Didikan Barat dan Didikan Pesantren Menuju ke Masyarakat yang Dinamis", ia mencoba menugraikan perbandingan antara didikan Barat dan didikan pesantren. Esai ini diawali dengan kutipan perdebatan antara Dr. Satiman dengan Dr. Soetomo dalam Kongres Perguruan Nasional di hari ke-2. Dr. Satiman kala

itu meragukan mengenai konsep pendidikan pesantren yang diusung Soetomo. Ia kemudian mengambil contoh bahwa berbagai tokoh besar banyak yang dilahirkan dari sekolah-sekolah Barat, di antaranya Sukarno dan Cipto Mangoenkusumo. Soetomo kemudian menjawab bahwa Soekarno, Cipto Mangoenkusumo, dan Dr. Satiman hanya kebetulan lulusan pendidikan Barat. Menurut Soetomo mereka adalah lulusan pendidikan Barat yang keliru.

Sutan Takdir sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan perdebatan ini, karena dinialinya sebagai pertentangan pribadi antara Soetomo dan Dr. Satiman. Namun, dalam esai ini Sutan Takdir ingin memberikan penjelasan mengenai perbandingan antara didikan Barat dengan didikan pesantren. Soetomo sangat memuji semangat persatuan yang ditanamkan oleh didikan pesantren di mana sifat egaliter, persatuan, dan kelembutan sangat dijunjung tinggi. Namun, menurut Sutan Takdir, dalam pendidikan seperti ini siswa tidak dituntut untuk berfikir dinamis dan cenderung hanya bergantung pada pemikiran sang kiai, sehingga daya saing antara siswa sangatlah kurang. Sutan Takdir kemudian mengatakan bahwa :

Agaknya tidak berlebihan jika saya berkata bahwa semangat persatuan yang berpusat pada kiai dan pesantrenlah yang menyebabkan jatuhnya bangsa kita.

Ketika dari seberang lautan datang bangsa yang hidup individunya, yang biasa bekerja, berpikir, dan berjuang, maka bangsa kita tak mampu memperhatikannya.

Sebabnya semangat persatuan yang lemah lembut dan idealis itu hanya tidak berbahaya bagi suatu bangsa. Namun, apabila bangsa itu bertemu dengan bangsa yang anggotanya aktif, yang di antara sesamanya biasa mati-matian saling bersaing dan berjuang, akan celakalah nasib bangsa yang tampaknya amat indah persatuan masyarakatnya itu.³⁰

Lebih lanjut, menurut Sutan Takdir, persatuan yang diusung pesantren sangatlah lemah, karena hanya bertumpu pada satu tokoh sentral saja. Memang dengan didikan Barat tidak bisa sepenuhnya mengharapakan lulusannya dapat menjadi pahlawan atau pembaharu.

Namun corak pendidikan Barat setidaknya telah mengajarkan cara berfikir kritis. Sutan Takdir nampaknya setuju jika pesantren hanya dijadikan salah satu media pemberantas buta huruf di pedesaan. Pesantren dapat menjadi lembaga yang termudah dan tercepat dalam melaksanakan tugas ini. Dengan mulai pandainya masyarakat desa dalam membaca dan menulis, maka dengan cepat ilmu pengetahuan modern dapat diserap oleh mereka sehingga akan terbukalah mata masyarakat desa terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, yang selanjutnya akan berperan dalam mendobrak tradisi lama, robohnya pengkultusan seorang kiai, sampai lenyapnya sifat kekolotan.³¹

Selanjutnya esai Sutan Takdir dianggapi oleh Soetomo sebagai sebuah perbedaan pandangan hidup. Soetomo juga mengkritik esai Sutan Takdir yang cenderung mencampuradukan definisi antara pendidikan dan perguruan. Soetomo beranggapan bahwa yang diselenggarakan pendidikan Barat adalah pengajaran, bukan pendidikan. Soetomo juga memaparkan bahwa pendidikan barat tidaklah sepenuhnya sempurna, masih banyak kekurangan di sana-sini. Ia mengambil contoh HIS, yang dicela sekeras-kerasnya oleh Soetomo karena dianggap belum berhasil mengantarkan para lulusannya untuk melanjutkan studinya ke tingkat lanjutan. Soetomo menilai ini merupakan kegagalan yang nyata. Memang sejak awal Soetomo sangat bertentangan dengan Sutan Takdir. Soetomo menginginkan pendidikan yang berdasarkan pada nilai-nilai luhur kebudayaan bangsa Indonesia, yang dinilainya bukan hanya melakukan pengajaran tapi juga pendidikan. Mendidik yang dimaksud Soetomo lebih pada pendidikan dalam konteks akhlak dan moral ketimuran.

Selain itu, kritik Soetomo juga diarahkan pada pemikiran Sutan Takdir yang terlalu mengabaikan aspek sejarah. Padahal, Tjindarbumi telah mengatakan dalam esainya bahwa masyarakat Jepang dapat maju dengan meniru Barat tanpa harus menanggalkan identitas kebudayaannya. Soetomo juga memberikan jawaban atas kritik Sutan Takdir yang mengatakan bahwa terpusatnya pesantren kepada seorang kiai yang membuat bangsa ini mengalami kemunduran. Soetomo menyangkal argumen tersebut. Ia mengatakan bahwa :

Sejarah menunjukkan bahwa jatuhnya bangsa ini sesungguhnya karena sikap acuh tak acuh dengan keberadaan pesantren. Karena

sebelum agama Islam datang di negeri ini, masyarakat kita di Pulau Jawa sudah amat rusak keadaannya. Zaman Hayam Wuruk dan Gajah Mada sudah lampau. Sedangkan waktu itu dunia berada dalam keadaan terpecah belah, penuh ketegangan karena percekocokan dan peperangan antara sesama kita. Hal itu menyebabkan timbulnya kelemahan dan kehancuran kita.³²

Selanjutnya Soetomo menutup pertukaran pemikiran ini dengan permohonan maaf jika terdapat segala sesuatu yang dinilai janggal dan kurang baik. Esai Soetomo ini kemudian menjadi penutup dari pendapatnya dalam merespon pernyataan-pernyataan Sutan Takdir.

Sutan Takdir juga memberikan tanggapan yang terakhir terkait polemik yang timbul di antara keduanya. Sebenarnya ia agak menyayangkan karena Dr. Soetomo mengakhiri argumennya. Selain itu Sutan Takdir merasa bahwa Soetomo tidak sepenuhnya menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukannya. Ia lebih cenderung memberikan jawaban lain. Sutan Takdir menepis tudingan bahwa ia tidak bisa membedakan antara pengajaran dengan pendidikan seperti yang disangkakan oleh Soetomo. Terakit perbedaan antara pendidikan dan pengajaran Sutan Takdir menjelaskan:

Kembali kepada perbedaan antara pengajaran dan pendidikan. Menurut saya, kedua hal itu sama sekali tidak bertentangan. Malah, pengajaran tak lebih dan tak kurang adalah pendidikan yang sangat penting. Di mana orang mengajar di sana orang mendidik. Sebab arti mendidik ialah membangun jiwa, memberi kesempatan sebaik-baiknya kepada disposities yang baik yang terdapat dalam jiwa untuk berkembang. Setiap pengajaran ilmu tumbuh-tumbuhan dapat menimbulkan perasaan religius, pengajaran sejarah dapat membangun semangat kepahlawanan. Pengetahuan pun berpengaruh atas sikap keberanian. Seseorang yang tahu sikapnya lebih berani dari seorang yang tidak tahu.³³

Selain itu, Sutan Takdir juga menyangkal pendapat Soetomo yang menganggap bahwa sekolah Barat hanya melakukan pengajaran. Menurut

Sutan Takdir, jika ditanya apakah sekolah barat menyelenggarakan pendidikan, jawabannya adalah iya. Namun pendidikannya mungkin tidak selaras dengan apa yang dikehendaki oleh Soetomo. Namun sifat dari keuniversalan pendidikan sesungguhnya telah diselenggarakan oleh sekolah Barat. Pada sekolah Barat murid-murid juga dididik untuk menjauhi sifat jahat dan menyerukan apa yang baik. Murid-murid juga ditekankan agar jangan jadi penakut dan harus berani, melawan yang salah dan melindungi yang benar dan sebagainya. Hal itulah yang menurut Sutan Takdir sebagai sebuah penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh sekolah Barat. Ia berkesimpulan bahwa pendidikan dan pengajaran keduanya telah secara bersamaan diselenggarakan oleh sekolah Barat.

Perdebatan keduanya memang menjadi perdebatan yang cukup hangat dan menarik perhatian. Keduanya memiliki gagasan yang orisinal dalam merumuskan konsep pendidikan yang ideal untuk bangsa Indonesia. Meskipun agar terlihat berapi-api, perdebatan ini sangatlah akademis dan santun. Meskipun memiliki perbedaan yang sangat mendasar mengenai konsep pendidikan, sesungguhnya mereka telah memiliki tujuan yang sama, yakni memajukan pendidikan bangsa Indonesia.

Selanjutnya muncul tokoh Adinegoro,³⁴ yang juga merepon perdebatan sengit antara Sutan Takdir dan Soetomo. Adinegoro nampaknya berbeda pendapat dengan Sutan Takdir dalam hal gagasan Barat. Ia mengatakan bahwa sifat intelektualisme, individualisme, egoisme, dan materialisme bukan milik bangsa Indonesia. Namun, menurut Adinegoro, permasalahan sesungguhnya bukanlah di situ, karena segala hal tersebut sesungguhnya juga dirasakan oleh berbagai bangsa di seluruh dunia dan bersifat universal. Selain itu, Adinegoro juga menganggap bahwa Sutan Takdir sebenarnya menghendaki kemajuan sama halnya dengan para pemrasaran dalam Kongres Perguruan Nasional. Namun Adinegoro beranggapan bahwa kemajuan yang dimaksud oleh Sutan Takdir adalah peradaban, bukanlah kebudayaan. Adinegoro juga memaparkan mengenai persamaan pandangan Sutan Takdir dengan Cipto, begitupun antara Soetomo dan KH Dewantara. Lebih lanjut Adinegoro juga memberikan penjelasan mengenai perbedaan antara kebudayaan dan peradaban.³⁵

Sutan Takdir memberikan respon terhadap esai Adinegoro dalam *Pewarta Deli*. Ia nampaknya kecewa dengan apa yang dikemukakan Adinegoro. Kekecewaannya bukan karena Adinegoro tidak setuju dengan pendapatnya, namun lebih dikarenakan pernyataan Adinegoro yang

dinilainya tidak konsisten dalam mengemukakan pandangannya. Ia menganggap bahwa Adinegoro cenderung mengaburkan permasalahan yang menjadi fokus persoalan, terutama pada isu intelektualisme, individualisme, egoisme, dan materialisme yang dianggapnya sebagai masalah yang seharusnya menjadi perhatian utama.

Namun, yang menjadi sorotan Sutan Takdir terhadap tulisan Adinegoro adalah persoalan mengenai definisi peradaban dan kebudayaan. Adinegoro menganggap bahwa yang dipahami oleh Sutan Takdir adalah peradaban, bukan kebudayaan. Adinegoro memberikan penjelasan mengenai Jepang yang berhasil meniru peradaban Barat namun tetap memegang teguh kebudayaannya, karena kebudayaan dinilainya sebagai sebuah ekspresi kebangsaan yang tidak bisa diubah-ubah. Sedangkan peradaban berupa teknik dan ilmu pengetahuan nampak seperti pakaian atau alat yang dapat dipindah-pindah. Sutan Takdir menganggap definisi kebudayaan dan peradaban yang dikemukakan Adinegoro sangatlah tidak jelas. Sutan menganggap bahwa Adinegoro sesungguhnya tidak begitu memahami hakikat ilmu pengetahuan yang ada di Barat saat ini.

Menurut Sutan Takdir, teknik dan ilmu pengetahuan yang tumbuh di Barat adalah ekspresi dari kebudayaan Barat yang khas saat ini, sehingga secara tidak langsung peradaban yang diciptakan Barat merupakan sintesa dari kebudayaan Barat yang telah tumbuh di dalam pikiran, jiwa dan falsafah masyarakatnya. Kebudayaanlah yang kemudian menjadi prasarat kemajuan sebuah peradaban, dalam hal ini ilmu pengetahuan. Maka dari itu, ilmu pengetahuan kini identik sekali dengan Barat. Terkait hal ini Sutan Takdir menulis :

Mengapa ilmu pengetahuan dan teknik yang kita kagumi muncul dan tumbuhnya di Barat. Mengapa tidak di tepi Sungai Gangga?

Pertanyaan serupa membawa kita kepada inti masalah. Bukan kebetulan teknik dan ilmu pengetahuan lahir di Barat dan tidak di India dan Pulau Jawa. Sebabnya tidak lain dan tidak bukan, karena jiwa India dan bangsa kita tidak mampu, tidak cakap menghasilkan yang demikian, karena tidak cukup memiliki syarat yang diperlukan untuk melahirkan teknik dan ilmu pengetahuan yang serupa itu.

Ilmu pengetahuan dan teknik Barat itu sesuatu yang tak bisa dipisahkan dari jiwa, pendirian hidup, dari falsafah hidup ala Barat. Barat melepaskan dirinya dari alam dan diri yang terlepas dari alam ini ingin menguasai alam, ingin memakai alam untuk dirinya. Pendirian serupa ini berasal dari bangsa Semiet (agama Yahudi, Nasrani, dan Islam).³⁶

Perdebatan kebudayaan ini kemudian mejadi fokus pembicaraan. Mental kebudayaan bangsa Indonesia memang menjadi sasaran kritik tajam Sutan Takdir. Sutan Takdir sangat konsisten dengan dukungannya terhadap gagasan Barat. Sampai akhir karangannya dalam polemik kedua ini pendapatnya tidak berubah sedikitpun. Malahan Sutan Takdir selalu berapi-api dalam menanggapi berbagai esai yang ditujukan kepada dirinya. Selanjutnya esai terakhir Sutan takdir dalam polemik kedua ini ditanggapi oleh M. Amir yang kembali mengulas mengenai permasalahan seputar Kongres Pendidikan Nasional dan persoalan mengenai kebudayaan dan peradaban yang sebelumnya menjadi perbincangan hangat antara Sutan Takdir dengan Adinegoro. Polemik kedua ini ditutup dengan esai KH Dewantara yang berjudul “Pembaruan Adab: Pesan kepada Tuan-Tuan Sutan Takdir Alisjahbana, Dr. Sutomo, dan Sanusi Pane”.³⁷ KH Dewantara tidak lagi mengulas mengenai apa menjadi perdebatan. Ia lebih cenderung menengahkan dan menilai gagasan-gagasan yang dikemukakan.

Selanjutnya perdebatan kembali terjadi, yang kemudian disebut sebagai polemik ketiga, antara Sutan Takdir dengan Dr. M Amir³⁸ dalam *Pujangga Baru* dan *Suara Umum* pada Juni 1935. Kali ini perdebatan membicarakan persoalan mengenai pembangunan dan pendidikan. Seperti sebelum-sebelumnya, Sutan Takdir juga mengawali polemik ini. Ia menulis sebuah esai dalam *Pujangga Baru* yang berjudul “Pekerjaan Pembangunan Bangsa sebagai Pekerjaan Pendidikan”. Sutan Takdir mengawali esainya dengan menulis:

Kurangnya kecakapan bangsa kita dalam ilmu teknik dan berperang, berakibat bangsa kita dapat ditaklukan oleh bangsa Barat. Kekurangmampuan dan kekuranguletan di bidang ekonomi

menyebabkan kita dapat dikalahkan oleh bangsa Eropa dan bangsa Tionghoa. Kurangnya semangat meneliti dan mengetahui membuat bangsa kita tercecceh dalam ilmu pengetahuan.

Pengakuan dan kesadaran yang sedalam-dalamnya akan kurang kesanggupan, kecakapan, dan keuletan bangsa kita, selain akan memberi pijakan kepada kita untuk memperbaiki keadaan kita dalam perlombaan dan pertarungan bangsa.

Kesombongan yang menyanjung diri sendiri hanya mampu memuaskan hati kita sekejap saja, dengan panas hati kita menghasut diri dan orang lain yang melakukan sesuatu dengan mata gelap. Namun, siapa pun yang mau bergerak membangun bangsa dengan sungguh-sungguh, tentu akan mengakui bahwa kebesaran suatu bangsa tidak mungkin bertumpu pada dasar yang selemah dan serapuh itu. Sesungguhnya pekerjaan membangun bangsa menuntut syarat-syarat yang lebih penting: manusia itu sendiri satu persatu mesti tumbuh ke segala penjuru. Dan pekerjaan menumbuhkan manusia ialah melalui pendidikan, yang menghendaki analisis yang tidak memandang perhitungan yang sangat hati-hati dan teristimewa minat dan perasaan kasih sayang tiada terhingga.³⁹

Sutan Takdir beranggapan bahwa kita harus belajar melihat kehidupan bangsa sebagai satu kesatuan yang utuh. Pekerjaan membangun bangsa berarti pekerjaan membangun kebudayaan yang baru. Kebudayaan yang baru tersebut merupakan kebudayaan yang sebenar-benarnya baru dan bukan sekedar tambal sulam. Selain itu, kebudayaan yang akan dibangun pun hendaknya mengikuti dan menyesuaikan dengan kebudayaan internasional. Seperti sebelumnya, pernyataan Sutan Takdir cenderung radikal dan revolusioner. Ia sangat menginginkan sebuah kebudayaan dan generasi yang baru dengan segala ciptaan dan inovasi yang baru pula. Ia menulis :

Sesungguhnya tiap-tiap generasi yang benar-benar hidup, bukan penjiplak yang kerdil, harus memiliki daya cipta, harus merasakan dan melahirkan dari pokok-pokoknya, dari aslinya yang benar.

Terutama dalam zaman pancaroba seperti kita alami sekarang ini, di saat kita kehilangan tempat berpijak dan bergantung, sebab pandangan hidup yang lama tidak mampu mengusung kita melalui topan dan gelombang zaman, kita harus ada pada pandangan dan hidup yang baru, yang sesuai dengan zaman yang diperhitungkan, yang siap dan sanggup untuk berjuang dan bertarung di zaman modern. Dan dari pandangan hidup yang baru ini, sebagai inti, sebagai pusat, sebagai jiwa yang mempunyai strukturnya sendiri, harus tumbuh kebudayaan baru yang lengkap dan yang mempunyai bentuk sendiri pula.⁴⁰

Berbagai tantangan, menurut Sutan Takdir, harus mampu dijawab oleh generasi muda Indonesia. Sutan menambahkan bahwa untuk menjadi kebudayaan baru kita tidak harus seratus persen meniru Barat atau apapun peradaban yang telah maju. Indonesia harus tetap berpijak pada orisinalitas dalam menyongsong kebudayaan yang baru. Namun, ia tidak memungkiri bahwa perlunya mengambil nilai-nilai Barat seperti rasionalisme, individualisme, dan positivisme. Indonesia yang akan datang merupakan Indonesia yang baru dengan cita-cita dan harapan yang nyata. Selanjutnya ia menutup esainya dengan mengatakan :

Indonesia adalah nama manusia baru, yang menyadari kedudukannya sebagai makhluk yang terpilih oleh Tuhan, berhak dan wajib menguasai, memakai, dan mengatur alam sekelilingnya dan karena kecakapan berpikir yang menjadi kelebihanannya atas makhluk yang lain dapat membedakan dirinya menjadi subyek dan obyek dan dengan jalan demikian senantiasa dapat menimbang, menyelidiki, dan memuliakan dirinya dan perbuatannya, dan karena itu mungkin terjadi kepadanya kemajuan yang tak ada hentinya.

Indonesia adalah nama kebudayaan baru yang dilahirkan oleh manusia baru, berpadu dan bersatu melingkungi seluruh bidang kehidupan manusia dan yang dalam garis-garisnya yang besar bersama dengan kebudayaan internasional sekarang.

Indonesia ialah nama negeri tempat manusia Indonesia dan kebudayaan Indonesia, sebagai suatu tahap ke arah persekutuan dunia yang menjadi cita-cita semua orang yang besar-besar di segala zaman.⁴¹

Selanjutnya pandangan Sutan Takdir tersebut mendapat tanggapan dari Dr. M Amir melalui esainya yang berjudul “Menyambut Karangannya Sutan Takdir Alisjahbana”. Pembicaraan masih berfokus pada isu seputar kebudayaan dan pembangunan. Namun kali ini yang menjadi fokus adalah persoalan mengenai “roh” budaya apa yang kiranya harus dijadikan dasar pijakan dalam pembangunan. Karena itu di awal karangannya Dr. M. Amir mempertanyakan mengenai dasar “roh” apa yang sekiranya dijadikan pijakan untuk pembangunan. Apakah roh Budha, roh Islam, Barat dan lain sebagainya. Sebenarnya Sutan Takdir tidak merasa terlalu menarik dalam polemik ini. Ia mengagap bahwa perbincangan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat polemik, yakni konsistensi dari sang pembicara, karena Sutan sendiri menganggap bahwa Dr. M Amir tidak konsisten. Yang penting dari pembicaraan ini adalah penjelasan mengenai “roh” yang harus digunakan dalam menyongsong pembangunan. Pembangunan tidak hanya meniru, karena dari meniru inilah yang kemudian membuat sebuah bangsa malah terpuruk. Terkait hal ini Sutan Takdir menulis:

Siapa yang mengikuti karangan saya sejak awal, baginya akan jelas bahwa saya tidak pernah mempersoalkan tentang asimilasi atau meniru itu. Di mana-mana, sampai dalam roman Layar Terkembang, saya terang-terangan menyerang orang yang meniru. Di sini, sikap itu hendak saya jelaskan lagi: meniru senantiasa salah, malah meniru nenek moyang pun tidak kurang salahnya. Jatuhnya bangsa tidak lain disebabkan oleh semangat meniru itu. Saya kagum akan pepatah, paribahasa, kata adat Minangkabau, tetapi geli rasanya hati saya mendengar dan melihat orang yang tak puas-puasnya melahap semua isi pidato dan karangannya. Maka dari getaran jantung yang hidup sekalian buah kesusastraan yang permai itu menjadi kerenyotan bibir. Hal ini berlaku dalam ranah kebudayaan, orisinalitas, keaslian pikiran dan perasaan tidak ada serambutan sehingga dalam beratus-ratus tahun

kebudayaan kita hampir tidak kelihatan kemajuannya. Tradisi berpuasa, mematikan segala gerak, kata nenek moyang menjadi kata yang tak mungkin berubah lagi, manusia menjadi hamba.

Perdebatan yang nampaknya melelahkan tersebut akhirnya ditutup dengan esai Sutan Takdir dalam merespon tulisan Dr. M. Amir. Sutan Takdir telah benar-benar menempatkan dirinya selalu krisis. Hal ini terbukti dalam setiap esainya yang berisi gagasan-gagasan yang sangat kontroversial, radikal, dan revolusioner, sehingga selalu menimbulkan respon sangat antusias dari lawan bicaranya. Sutan Takdir sangat terlihat konsisten dengan gagasannya. Sejak awal ia mendukung gagasan Barat sebagai sebuah konsep dasar pemikiran yang dapat memajukan bangsa ini. Sampai akhir polemik ini ia tetap bersikukuh dalam pendiriannya.

Demikianlah, Sutan Takdir merupakan salah satu tokoh yang telah banyak menyumbangkan pemikirannya dalam segala bidang, terutama pendidikan dan kebudayaan. Ia banyak memunculkan gagasan-gagasan yang orisinal. Ia adalah orang yang selalu menempatkan diri dalam krisis, karena menurutnya “krisis adalah sisi lain dari harapan”. Maka ia tidak pernah ragu dalam menempatkan dirinya dalam sebuah krisis. Bahkan tidak jarang Sutan Takdir sendirilah yang sengaja menciptakan krisisnya dengan tradisi berpolemik yang ia ciptakan sendiri.



Dr. Soetomo, Lahir di Nganjuk, Jawa Timur 30 Juli 1888

(Sumber : Arsip Nasional Republik Indonesia-ANRI)

2.5. Dr. Soetomo dan Gagasan Pendidikan Pekerti Timur

Soetomo adalah salah seorang dari sekian banyak tokoh intelektual pribumi Jawa yang muncul pada masa pergerakan. Bahkan ia kerap digadang-gadang sebagai bapak pergerakan nasional. Meskipun berprofesi sebagai dokter, namun jiwa humanisnya telah menyeretnya ke dalam kancah pergerakan nasional. Ia sering disebut sebagai tokoh sentral pergerakan nasional yang ikut andil dalam membentuk corak kehidupan bangsa Indonesia.

Membahas kisah hidup dan peran Soetomo sering kali dikaitkan dengan Budi Utomo. Padahal, dirinya tidak lama mengabdikan diri dalam organisasi tersebut, dan tidak juga terlalu banyak bersumbangsih pemikiran. Perjalanan karir politiknya sebenarnya baru dimulai saat ia pulang dari Belanda dan mendirikan Studie Club di Surabaya pada tahun 1924. Selanjutnya, ia terus berkecimpung dalam dunia sosial-politik, di samping profesinya sebagai dokter. Tidak sampai di situ, Soetomo juga turut meramaikan kancah pendidikan dan kebudayaan pada tahun 1930-1935-an. Hal ini bisa kita lihat mengenai “perang pemikiran” antara Sutan Takdir Alisjahbana dengan Soetomo dalam surat kabar *Pujangga Baru* dan *Suara Umum*. Perang pemikiran menyangkut kebudayaan ini kemudian dikenal sebagai “polemik kebudayaan”.

Sebagaimana akan dibahas nanti, kiprah Soetomo telah memberikan corak baru bagi pertumbuhan semangat kebangsaan Indonesia dalam berbagai aspek. Beberapa gagasan mengenai dasar pembentukan bangsa telah dirumuskan oleh beberapa kalangan. Contohnya adalah Tjokroaminoto, yang menjadikan Islam sebagai gagasan utama dan dasar perjuangannya. Sementara nasionalisme Jawa-Madura diusung oleh para golongan tua di Budi Utomo. Begitupun dengan Soetomo yang mengusung nasionalisme-demokrat sebagai gagasannya. Maka, kala Budi Utomo masih sibuk hanya mengurus urusan Jawa dan Madura, Soetomo sudah mencoba merumuskan sebuah konsep kebangsaan yang lebih luas lebih dari sekedar Jawa dan Madura, yakni nasional. Selain itu, Gagasannya

mengenai bagaimana dan dengan apa bangsa ini harus dibentuk, menjadi satu aspek penting yang mendapat perhatian. Selain itu, tulisan ini juga memfokuskan kajian pada persoalan “polemik kebudayaan” di mana Soetomo juga menawarkan pemikirannya terkait konsep kebudayaan dan sistem pendidikan yang sekiranya cocok untuk bangsa Indonesia.

2.6. Riwayat Hidup

Soetomo lahir pada tanggal .⁴² Ia terlahir dari keluarga yang terbilang mapan. Masa kecilnya dikenal dengan nama Subroto. Masa kecil Soetomo banyak dihabiskan bersama neneknya, Singowidjojo di Ngapeh. Karena sewaktu kecil sang Ibu menyapihnya sampai dengan usia enam tahun. Hal ini yang kemudian membuatnya lebih dekat dengan nenek dan eyangnya daripada orang tuanya sendiri. Bahkan dalam otobiografinya ia mengatakan secara terang-terangan bahwa ia lebih menyayangi embah dan eyangnya, ia tidak begitu menaruh rasa sayang pada orang tuanya, melainkan hanya rasa hormat.⁴³ Di lingkungan neneknya, Soetomo kecil hidup dalam suasana kebatinan Jawa yang sangat kuat, meskipun hal tersebut nampaknya tidak terlalu mempengaruhi jiwa Soetomo.

Pada usia enam tahun Soetomo kemudian pindah mengikuti ayahnya ke Madiun. Namun tak lama di Madiun ia harus pindah lagi ke Bangil untuk sekolah di sekolah bumiputra Belanda. Di Bangil ia tinggal bersama Arjodipuro. Saat ingin memasuki sekolah Belanda di Bangil, Soetomo mengalami penolakan dari pihak sekolah. Hal ini dikarenakan ayahnya tidak dikenali oleh pihak sekolah. Keesokan harinya Arjodipuro datang kembali ke sekolah tersebut. Namun untuk mengakalinya, namanya diganti dari Subroto menjadi Soetomo. Meskipun sebenarnya ia lebih suka dengan nama Subroto, nama Soetomo telah memberikan peruntungan baginya. Dengan nama itu, Soetomo akhirnya bisa menempuh pendidikan rendah tersebut, yang kala itu tidak semua masyarakat pribumi dapat merasakannya.

Soetomo muda tumbuh pada masa pemerintah kolonial Belanda menerapkan sistem ekonomi liberal, yang membuka masuknya modal-modal asing ke Nusantara. Sistem tersebut kemudian terbukti hanya membuat masyarakat pribumi semakin menderita, karena kekayaan dan tenaga masyarakat terus dikuras. Penderitaan rakyat Jawa yang disebabkan sistem ekonomi tersebut menjadi pemandangan sehari-hari Soetomo muda. Secara perlahan situasi tersebutlah yang kemudian membentuk jiwa humanis Soetomo, yang berpengaruh dalam orientasi berpikir dan arah serta haluan pergerakan yang diambalnya.

Pada 10 Januari 1903 Soetomo mendaftarkan diri ke sekolah kedokteran STOVIA di Batavia. Soetomo masuk sekolah kedokteran karena ayahnya melarang dirinya untuk menjadi *ambtenaar* (pamong praja). Selain itu, sejak awal nampaknya Soetomo juga tidak begitu tertarik menjadi seorang pamong. Ia kemudian mengikuti jejak kakak angkatnya, Sahit. Di sekolah dokter Belanda inilah yang kemudian banyak memengaruhi perangnya. Sejak kecil Soetomo memang terkenal dengan kenakalannya, ia memiliki kebiasaan buruk, yakni suka mencuri uang orang tuanya dan suka membohongi orang tuanya. Hal ini diakuinya pula dalam otobiorafinya. Di STOVIA pada awalnya memang Soetomo terlihat sebagai seorang murid yang tidak begitu diperhitungkan. Dibandingkan dengan teman-temannya, ia nampaknya tertinggal jauh. Bahkan ia sendiri tidak yakin bahwa dirinya akan naik kelas. Namun siapa tahu dari seorang yang bengal kemudian dapat seketika menjelma menjadi pemuda yang cerdas. Perlahan sifatnya berubah dan menunjukkan kecerdasannya.⁴⁴

Di STOVIA Soetomo muda kemudian memulai kiprah politiknya melalui diskusi-diskusi dengan sesama temannya. Meskipun ia sebagai seorang yang menempuh pendidikan dokter, namun ia juga aktif dalam diskusi-diskusi yang membicarakan permasalahan ekonomi, sosial, dan pendidikan. Soetomo berhasil lulus dari STOVIA pada tahun 1911, dan kemudian ia diangkat menjadi dokter di kresidenan Semarang. Saat menjadi dokter inilah sebenarnya sisi humanis jiwa Soetomo semakin tergugah. Ia melihat

kondisi masyarakat kala itu yang sangat memprihatinkan. Dan baginya hal ini disebabkan karena sistem ekonomi kolonial, sehingga hal itu kemudian menggugah jiwa Soetomo untuk bercita-cita mengangkat martabat masyarakat pribumi.

Semasa Soetomo masih menjadi pelajar di STOVIA ia bersama-sama dengan temannya mendirikan sebuah organisasi pelajar bernama Budi Utomo pada tahun 1908. Ia dipilih sebagai ketua pertamanya. Di Budi Utomo inilah karir Soetomo dalam kancah pergerakan nasional Indonesia berawal.

2.7. Dalam Arus Pergerakan Nasional

Soetomo muda adalah seorang yang tidak hanya pintar dalam pendidikan, tapi juga dianal berjiwa sosial sanga tinggi. Di STOVIA ia banyak melakukan diskusi-diskusi dengan temannya membicarakan prihal kesengsaraan rakyat dan solusi-solusinya. Tentu ia bukan satu-satunya dan bukan pula yang pertama yang menunjukkan kepedulian atas nasib kaum pribumi. Mas Nagbehi Wahidin Sudirohusodo, yang kemudian menjadi sahabat dekat dan teman perjuangan Soetomo, telah lebih dulu bergerak dengan isu kepedulian sosial di atas. Ia adalah seorang dokter Jawa yang gencar mengkampanyekan isu-isu kesejahteraan dan pengangkatan martabat pribumi Jawa. Antara tahun 1906-1907, Wahidin gencar melakukan kampanye ke berbagai daerah di Jawa, walaupun sebenarnya hasilnya tidak seperti yang diharapkannya. Masih sangat sedikit sekali para priyai Jawa yang tertarik dengan gagasan-gagasannya tersebut.

Perjalanan Wahidin menemukan titik terang ketika ia bertemu dengan salah seorang pemuda cemerlang bernama Soetomo di Jakarta pada tahun 1907. Ketika itu Wahidin sedang memberikan ceramahnya di STOVIA, Soetomo muda kala itu tengah menempuh pendidikan dokter di STOVIA. Dalam pertemuannya di akhir tahun 1907 tersebut, mereka mulai mebicarakan mengenai kedudukan dan martabat masyarakat Jawa. Pada awalnya pembicaraan tersebut

hanya terkait dengan dana pelajar. Namun, melihat antusias Soetomo kepada ide-ide Wahidin, akhirnya Wahidin memperluas pembicaraan mereka pada permasalahan tentang kesejahteraan rakyat Jawa.

Pertemuan tersebut kemudian sangat mempengaruhi diri Soetomo muda. Sebenarnya ide-ide Wahidin terkait pengangkatan kedudukan dan martabat pribumi Jawa telah tertanam dalam diri para pelajar STOVIA kala itu. Selanjutnya Soetomo membagikan hasil diskusi tersebut kepada para teman-temannya di STOVIA, yang disambut dengan penuh antusias. Akhirnya, Soetomo memikirkan dengan matang-matang bersama beberapa temannya seperti, M. Soeradji, M. Soleh, Mas Soewarno, M. Sulaiman, Goenawan, dan Goemberg guna merumuskan organisasi yang akan dibentuknya kelak. Dan pada Rabu tanggal 20 Mei didirikanlah organisasi Budi Utomo di gedung STOVIA, Jakarta. Soetomo ditunjuk sebagai ketuanya. Pada masa awal, organisasi ini hanya diisi pra pelajar-pelajar STOVIA. Baru di kemudian hari organisasi ini terbuka untuk masyarakat umum dari kalangan orang-orang Jawa.

Di Budi Utomo inilah karier politik Soetomo dimulai. Budi Utomo menjadi salah satu organisasi pelajar yang bergerak di dalam bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan. Organisasi ini didirikan atas dasar untuk mengangkat martabat rakyat Jawa,⁴⁵ yang kala itu tengah tertindas karena sistem ekonomi kolonial.

Nama Soetomo selanjutnya banyak dikenal dan dikaitkan dengan organisasi ini. Hal ini bisa dilihat misalnya dalam buku Sejarah Nasional Indonesia. Buku tersebut seakan hanya mengaitkan peranan Soetomo dalam Budi Utomo saja. Padahal, kiprah Soetomo dalam Budi Utomo tidaklah lama. Budi Utomo hanyalah sebuah batu lompatan yang kemudian membawa dirinya menjadi salah satu dokter sekaligus intelektual sosial yang banyak mencetuskan ide-ide dalam rangka memajukan bangsa. Tidak lama setelah terpilih sebagai ketua, Soetomo harus beranjak dari Budi Utomo, karena dirinya perlahan tersingkir oleh kaum priyai tua yang mulai mendominasi organisasi tersebut.

Setelah secara perlahan Soetomo menarik diri dari Budi Utomo, kemudian pada tahun 1919 ia melanjutkan studinya ke negeri Belanda. Di sana ia bergabung dengan Perhimpunan Indonesia. Selama empat tahun Soetomo menempuh pendidikannya di negeri Belanda. Setelah itu ia kembali ke Indonesia dan memulai karier di bidang kedokterannya. Namun, hasrat berpolitik yang didasari jiwa sosialnya seakan tidak bisa dibendung. Ia selalu ingin turut andil dalam memikirkan rakyat Indonesia.

Pada 12 Juli 1924 ia mendirikan Indonesische Studie Club di Surabaya. Selanjutnya organisasi ini lebih dikenal dengan nama Studie Club. Soetomo nampaknya enggan untuk kembali berjuang bersama Budi Utomo, sebab asas kebangsaan Jawa masih dipegang kuat oleh para tokoh-tokoh priyai tua yang mendominasi organisasi tersebut. Soetomo menganggap bahwa asas perjuangan tersebut sudah tidak relevan dengan zaman. Perjuangan kebangsaan harus dipandang dalam konteks yang lebih luas, bukan hanya sekedar Jawa dan Madura saja atau bukan pada kalangan agama tertentu saja. Pendirian Studie Club ini juga sebenarnya merupakan respon dari kekecewaan golongan muda Budi Utomo terkait diangkatnya seorang Belanda sebagai pengurus harian di dalam Budi Utomo. Soetomo beranggapan bahwa jabatan tersebut seharusnya hanya diberikan kepada orang-orang Indonesia.

Maka dari itu, berawal dari rasa ketidakpuasan dengan kinerja Budi Utomo, kemudian ia mendirikan Studie Club di Surabaya.⁴⁶ Jika kita melihat penentangan Soetomo atas asas yang menjadi dasar perjuangan Budi Utomo, kita dapat melihat mulai terpatrynya jiwa nasionalisme lintas etnis, agama, dan wilayah dalam diri Soetomo. Meskipun ia berasal dari golongan elit Jawa rendahan, ia ingin asas yang diperjuangkan itu tidak hanya pada kalangan orang-orang Jawa. Maka tidak berlebihan nampaknya jika kita mengatakan bahwa Soetomo adalah seorang peletak dasar nasionalisme bangsa Indonesia dari kalangan elit Jawa kala itu. Pada awalnya Soetomo memang mendukung perhimpunan Budi Utomo yang hanya menghimpun orang-orang Madura, Jawa, dan Sunda saja. Ini bisa kita

lihat dalam pidato Soetomo ketika rapat pertama dalam merumuskan pendirian Budi Utomo.⁴⁷ Sehingga, memang agak aneh jika kemudian Soetomo sendiri kecewa atas asas yang sebenarnya ia rumuskan sendiri bersama teman-temannya. Namun inilah yang dinamakan perkembangan intelektual.

Di dalam Studie Club inilah sebenarnya karir politik Soetomo baru dimulai. Studie Club memang sejak awal dirancang untuk menjadi wadah bagi forum-forum diskusi para pelajar di Surabaya. Di organisasi inilah Soetomo aktif menuangkan pikiran-pikirannya dalam majalah *Suluh Indonesia* yang terbit bulanan. Di dalam Studie Club ini Soetomo bersama kawan-kawannya juga banyak melakukan aktivitas sosial, politik, dan ekonomi, semisal mendirikan rumah Pemandokan Perempuan, Sekolah Tenun, dan Bank Nasional.⁴⁸

Studie Club yang didirikan oleh Soetomo memiliki hubungan yang baik dengan beberapa organisasi pergerakan lain, terutama Sarekat Islam di bawah H.O.S Tjokroaminoto. Sarekat Islam sangat bersimpati dengan direkrutnya para intelektual setempat dalam Studie Club. Bagi Tjokroaminoto, Studie Club memiliki corak perjuangan yang relatif sama, yang enggan untuk bersikap kooperatif dengan pemerintah kolonial seperti yang dilakukan oleh Budi Utomo. Hal ini tercermin jelas pada saat ditawarkannya Tjokroaminoto dan Soetomo dalam Volksraad (Dewan Rakyat). Keduanya dengan tegas menolak. Mereka lebih memilih berjuang dengan tidak bekerjasama dengan pemerintah kolonial, sebab perjuangan yang sesungguhnya adalah berjuang demi bangsa dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Namun rasa simpati kedua organisasi pergerakan ini nampaknya tidak berlangsung lama. Sarekat Islam yang sebelumnya bersimpati terhadap Soetomo dengan cepat berubah menjadi perdebatan-perdebatan. Dalam wawancara sebuah surat kabar, Soetomo mengatakan bahwa seharusnya jabatan-jabatan pemerintahan diserahkan oleh polisi, tentara, dan kaum terpelajar saja.⁴⁹ Hal ini menuai tanggapan dari para tokoh SI. Para tokoh SI seperti Agus Salim, Wondosudirdjo, dan Sangaji menganggap bahwa

sebenarnya gerakan Studie Club yang dipimpin oleh Soetomo hanyalah bertujuan mencari muka pada pemerintah kolonial demi mendapatkan jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan. Lebih lanjut, para tokoh SI menganggap bahwa Studie Club tidaklah mempresentasikan kepentingan rakyat. Soetomo sendiri terkadang dengan mudah mengubah haluannya. Misalkan saja, Soetomo pernah menolak berikap kooperatif dengan pemerintah. Namun, pada situasi lain, ia tidak segan-segan untuk berkompromi dan bekerja sama dengan pemerintah. Perdebatan ini akhirnya menuai respon berupa penarikan anggota SI untuk bergabung bersama Studie Club. Padahal sebelumnya anggota SI diberikan keleluasaan untuk merangkap organisasi. Keputusan ini disepakati pada kongress SI tanggal 13-16 Januari 1927 di Pekalongan.⁵⁰

Soetomo juga memiliki kedekatan dengan organisasi-organisasi Islam lain seperti Muhammadiyah dan NU.⁵¹ Bahkan ia sempat diangkat menjadi penasihat Muhammadiyah. Selain itu, ia juga memiliki kedekatan dengan tokoh-tokoh Tionghoa, Arab, dan Belanda. Soetomo sendiri sebenarnya adalah tokoh yang fleksibel, dan disukai oleh tokoh-tokoh lintas kalangan.

Dalam rangka memperkuat pergerakan politik kaum pribumi, pada akhir tahun 1927 dilakukan fusi partai-partai, organisasi, dan beberapa Studie Club dalam sebuah wadah organisasi politik gabungan kaum pribumi. Di antaranya yang turut bergabung adalah, Partai Nasional Indonesia, Syarekat Islam, Sumatranen Bond, Serikat Kaum Betawi, Indonesesche Studi Club, dan Algemene Studie Club yang diketuai oleh Soekarno. Fusi tersebut dinamakan Majelis Permufakatan Perkumpulan-Perkumpulan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI). Soetomo ditunjuk sebagai ketua majelis dalam organisasi gabungan ini.

Pada tanggal 16 Oktober 1930 Soetomo mendirikan sebuah partai bernama Persatuan Bangsa Indonesia (PBI). Partai ini merupakan penjelmaan dari Indonesesche Studie Club di bawah Soetomo. Menurut Soetomo Studie Club ini sudah harus menjelma menjadi organisasi yang tidak hanya bergerak untuk kepentingan

pelajar saja, tapi lebih luas lagi. Partai ini harus bergerak atas nama sebuah bangsa dengan dasar nasionalisme bangsa Indonesia. Dalam organisasi ini Soetomo enggan untuk bersikap kooperatif dengan pemerintah kolonial. Ia lebih suka bergerak langsung bersentuhan dengan masyarakat dengan mendirikan koperasi rakyat, lembaga-lembaga kursus, dan poliklinik. Hal ini menurutnya lebih dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat.⁵²

Di dalam partai ini, Soetomo juga menyelenggarakan pembentukan surat kabar dengan bahasa Jawa dan Madura yang diberi nama *Suara Umum*. Memang, untuk gerakan tingkat nasional sekaliber PBI nampaknya agak kurang etis jikalau bahasa yang digunakan dalam surat kabar ini hanya menggunakan bahasa Jawa dan Madura, sedangkan apa yang dikenal sebagai bangsa Indonesia lebih dari hanya kedua pulau itu. Melalui surat kabar inilah Soetomo banyak menuangkan gagasan-gagasannya terkait permasalahan ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, dan pendidikan. Bahkan melalui surat kabar ini Soetomo juga pernah terlibat dalam perang pemikirang dengan Sutan Takdir Alisjahbana yang kita kenal sebagai "polemik kebudayaan" yang nanti akan penulis bahas pada bagian berikutnya.

Selanjutnya pada Desember tahun 1931 Soetomo memprakarsai penyelenggaraan Kongres Indonesia Raya yang pertama. Kongres ini bertujuan untuk mempererat persatuan di kalangan para intelektual zaman pergerakan. Pada bulan Desember 1935 Soetomo memprakarsai penggabungan antara partai yang dipimpinnya, PBI dan Budi Utomo. Fusi kedua partai ini selanjutnya diberi nama Partai Indonesia Raya atau disingkat Parindra. Soetomo terpilih menjadi ketua dari partai gabungan ini.

2.8. Terlibat dalam Polemik Kebudayaan

Bersamaan dengan kegiatannya di kancah politik, Soetomo pada dasarnya tidak pernah bisa melepaskan dari budaya asalnya sebagai seorang Jawa. Hal ini terutama tampak dalam "polemik

kebudayaan”, suatu istilah yang digunakan Achdiat K. Mihadja untuk menggambarkan kondisi perdebatan menyangkut strategi kebudayaan pada tahun 1930-an.⁵³ Di akhir Kongres Pendidikan Nasional pada 1938, Soetomo dan beberapa tokoh Budi Utomo—sangat mungkin karena pengaruh K.H. Dewantara, pendiri sekolah Taman Siswa—dengan suara bulat menyatakan penolakan terhadap “*onderwijs* Barat (pengajaran intelektual) dan menganjurkan *opvoeding* (pendidikan pekerti) Timur”. Bersamaan dengan itu, dia menekankan bahwa “Indonesia semestinya senantiasa berada dalam suasana sistem nilai dunia Timur yang bersadarkan pada kolektivisme, spiritualisme, dan anti-materialisme”.⁵⁴

Tidak lama berselang, pernyataan di atas segera mengundang reaksi keras dari Sutan Takdir Alisjahbana (1908-1994), yang kemudian melahirkakan apa yang disebut sebagai polemik kebudayaan, suatu perdebatan tentang budaya yang melibatkan cendekiawan dan intelektual pribumi yang kesemuanya adalah alumni dari pendidikan modern, di antaranya adalah Sutan Takdir Alisjahbana, Soetomo, Tjindarbumi, Adinegoro, M. Amir, dan Ki Hajar Dewantara. Perdebatan tersebut terbagi menjadi tiga polemik, yang kesemua polemiknya diawali dari *statement* Sutan Takdir dalam *Pujangga Baru*. Perdebatan tersebut sebenarnya merupakan langkah para tokoh intelektual dalam memaparkan gagasannya terkait dengan apa bangsa ini akan dibangun dan dipersatukan dan pola pendidikan apa yang ideal untuk Indonesia. Dalam tulisan ini penulis hanya akan memfokuskan pada perdebatan antar Sutan Takdir dengan Soetomo yang dimuat dalam surat kabar *Pujangga Baru* dan *Suara Umum*, dan sedikit mengutip pendapat-pendapat dari tokoh lain yang juga terlibat dalam polemik tersebut.

Perlu dijelaskan bahwa sebagai seorang tokoh yang sangat dihormati dan berpengaruh pada masa-masa pergerakan, Soetomo kerap kali dihadirkan dalam berbagai macam diskusi, kongres, maupun rapat. Soetomo dianggap sebagai tokoh yang dinilai lihai dalam menyelesaikan perselisihan-perselisihan serta gagasan-gagasannya yang kontributif. Soetomo pernah diundang dalam

Kongres Pendidikan Nasional yang diadakan di Solo pada 8-9 Juni 1938, di mana dia bertindak sebagai prasaran (*pre-advise*).

Seperti halnya K.H. Dewantara, Soetomo senantiasa menaruh perhatian besar pada dunia pendidikan. Jika melihat jejak rekam dalam karir keorganisasinya, dari semasa pendirian Budi Utomo sampai dengan memimpin Parindra, pendidikan menjadi salah satu program yang tak pernah luput dari cangangnya. Selain itu, ia juga sempat melanglang buana keberbagai belahan dunia seperti, Jepang, India, Mesir, Belanda, Inggris, Turki dan Palestina. Dalam perjalanannya tersebut ia banyak mengambil pelajaran dari sejarah dan kebudayaan masyarakat di negeri-negeri yang dikunjungi. Hal tersebut dilakukan guna mengkomparasikan antara Indonesia dengan negeri-negeri tersebut, sehingga bisa merumuskan apa sekiranya konsep bangsa dan pola pendidikan yang cocok untuk masyarakat Indonesia.

Kembali ke isu polemik kebudayaan, Sutan Takdir Alisjahbana adalah orang pertama yang bertanggung jawab terhadap munculnya perdebatan tentang bagaimana masa depan bangsa Indonesia dibangun. Sebagai seorang yang berorientasi ke Barat, Sutan Takdir tidak setuju dengan hasil Kongres Perguruan Indonesia tersebut, yang dinilainya anti-intektualisme, anti-egoisme, anti-individualisme, dan anti-materialisme yang merupakan peroduk Barat. Kala itu Barat memang tengah memasuki awal masa keemasannya, sehingga tidak jarang menjadi pesona dan acuan kemajuan peradaban bagi belahan dunia lain, termasuk Indonesia.

Dalam tulisannya yang berjudul “Menuju Masyarakat dan Kebudayaan Baru” dalam surat kabar *Pujangga Baru*,⁵⁵ Sutan Takdir mengatakan bahwa sejarah Indonesia sebenarnya dibagi menjadi dua fase. Fase yang pertama adalah fase jahiliyah Indonesia (Pra-Indonesia). Sutan Takdir membatasi tahun ini pada sebelum tahun 1900 atau sebelum abad 20, yakni pada masa berdirinya kerajaan feodal dan masa kolonialisme bercokol. Menurut Sutan Takdir, masa-masa tersebut merupakan masa saat masyarakat Indonesia belum mengenal arti sebuah bangsa yang bernama Indonesia. Perjuangan pada masa tersebut belum secara sadar mengatasmakan bangsa

Indonesia. Perjuangan para pendahulu seperti Diponegoro, Imam Bonjol dan lain sebagainya dianggap sebagai perjuangan yang bersifat primordial. Bukan didasari persatuan dan keutuhan sebuah bangsa. Karena itu, tidak relevan jika perjuangan mereka di atas namakan bangsa Indonesia, dan dicap sebagai basis dari perjuangan generasi berikutnya. Selain itu, pada masa tersebut nama Indonesia belum dirumuskan dengan baik, sehingga apa yang disebut Indonesia kala itu masih belum jelas.

Selanjutnya Sutan Takdir membagi periodisasi sejarah bangsa Indonesia, dan merumuskan periode setelah tahun 1900 sebagai masyarakat dan kebudayaan baru. Dia berargumen bahwa pada masa inilah sebagian para intelektual dan cendekiawan sudah mulai sadar akan makna sebuah bangsa dan persatuan. Dasar perjuangan mereka sudah mulai jelas. Mereka mengedepankan satu tujuan perjuangan, yaitu perjuangan untuk bangsa Indonesia. Maka dari itu, dengan tegas Sutan Takdir mengatakan bahwa sejarah Indonesia yang sebenarnya baru dimulai pada abad kedua puluh, ketika lahir generasi baru di wilayah Nusantara ini, yang dengan sadar menempuh jalan baru untuk bangsa dan negerinya.⁵⁶

Dari tulisan yang dimuatnya dalam surat kabar *Pujangga Baru* itu, yang paling mendapat respon dari kalangan cendekiawan dan intelektual lain adalah pernyataan kontroversial Sutan Takdir yang mengatakan bahwa “sekarang saatnya kita mengarahkan pandangan kita ke Barat”. Menengadahkan wajah ke Barat, menurut Sutan Takdir, bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Timur yang anggapnya statis harus belajar dari Barat yang bersifat dinamis. Dengan gencar Sutan Takdir mengkampanyekan jargon “kita harus belajar dari barat”. Lebih jauh lagi, Sutan Takdir mengatakan bahwa saatnya kita memutuskan tali masa lalu dengan tidak terlalu lama terjerembab dalam romantisme dan kebesaran sejarah masa lalu, sehingga kita tidak menjadi budak-budak masa lalu.

Pendapat-pendapat Sutan Takdir dalam surat kabar *Pujangga Baru* tersebut menunjukkan bahwa betapa dia sangat terpesonanya dengan kebudayaan Barat. Dia tampak begitu bersemangat untuk

memutus periode antara zaman lama dengan zaman baru dalam sejarah Indonesia. Dalam kebudayaan baru tersebut, Sutan Takdir menawarkan gagasan Barat sebagai gagasan yang harus digunakan oleh Indonesia jika ingin maju dan dinamis seperti Barat. Sutan Takdir menganggap bahwa kebudayaan Barat sebagai simbol kemajuan yang sangat ideal untuk kemajuan bangsa Indonesia. Untuk bisa maju, bangsa Indonesia harus menerapkan yang telah diterapkan di Barat. Pendapat ini seketika menuai tanggapan dari cendekiawan dan intelektual lain, dan salah satunya yang akan dibahas di bawah ini adalah Soetomo.

Melalui surat kabar *Suara Umum* yang dipimpinya, Soetomo tampil sebagai salah seorang tokoh terdepan yang menanggapi tulisan-tulisan Sutan Takdir. Bahkan perdebatan sengit terjadi di antara keduanya. Soetomo berbeda pendapat dengan Sutan Takdir mengenai dasar kebudayaan yang harus dijadikan acuan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Meskipun pernah mengenyam pendidikan Barat, bahkan ia sempat menjajaki dunia Barat, Soetomo tidak tertarik pada kebudayaan Barat yang dikampanyekan Sutan Takdir. Soetomo lebih memilih menjadikan kebudayaan lokal sebuah bangsa sebagai dasar pijakan dan acuan untuk merumuskan sistem kebangsaan dan pola pendidikan yang ideal. Pendidikan sesungguhnya bukan saja perkara menekankan pada ketajaman akal alias kecerdasan semata. Namun pendidikan juga berpengaruh terhadap pengembangan jiwa dan juga dapat memberikan manfaat bagi nusa dan bangsa. Mengambil pelajaran dari Barat memang perlu, tapi lebih baik jika mengawinkan pola kemajuan Barat dengan kebudayaan lokal.

Dalam hal ini, kunjungan Soetomo ke Jepang nampaknya telah menjadi pelajaran yang berarti tentang pentingnya nilai-nilai kebudayaan Timur. Ia mengambil pelajaran dari kemajuan Jepang. Di satu sisi, Jepang menjadi negara yang maju meniru Barat, dengan masyarakatnya yang giat bekerja, dan dengan cepat menguasai dunia. Namun, Jepang pada saat yang sama tetap memegang teguh nilai-nilai sejarah dan kebudayaan mereka.⁵⁷ Jepang tidak pernah

menginginkan lepas dari sejarahnya. Bahkan, karena sejarahnya itulah Jepang termotivasi untuk maju. Hal ini juga terjadi di beberapa wilayah seperti India dan negeri Sailand yang sempat ia kunjungi. Dalam hal ini, Soetomo menulis sebagai berikut:

“Tuan Tjindarbumi, dalam artikelnya yang seakan-akan mendukung pendirian Tuan Sutan Takdir Alisjahbana, rupanya lupa mengemukakan bahwa bangsa Jepang dapat berdiri teguh dan tegak itu, karena orang Jepang berjuang dengan memakai alat-alat Eropa, alat barat, intelek Kulonan, sedang mereka itu tetap menghidupkan budayanya. Inilah kekuatan Jepang yang harus ditiru.”⁵⁸

Perdebatan sengit antara Sutan Takdir dan Soetomo terjadi ketika Sutan Takdir mengomentari hasil Kongres Perguruan Indonesia yang diadakan di Solo. Sutan Takdir menganggap bahwa Kongres Perguruan Indonesia bersifat anti-intelektualisme, anti-individualisme, anti-egoisme, dan anti-materialisme. Hal yang kita ketahui bahwa gagasan-gagasan tersebut adalah produk Barat. Menurutnya untuk maju Indonesia harus mengadopsi unsur-unsur yang juga telah membuat barat menjadi maju. Kemandekan yang dialami oleh bangsa Indonesia selama berabad-abad, menurut Sutan Takdir, lebih dikarenakan keengganan masyarakat Indonesia dalam memaksimalkan otak, kurang sifat egoisnya, dan kurang sifat materialnya. Selama berabad-abad masyarakat Indonesia hanya hidup sebagai parasit benalu yang selalu menempel pada masa silam, tidak berfikir kreatif dan hanya mengikuti arus kebiasaan.⁵⁹

Pendapat Sutan Takdir di atas langsung ditanggapi Soetomo. Sebagai orang yang turut andil dalam Kongres tersebut, Soetomo menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh Sutan Takdir terkait kekecewaannya dalam kongres tersebut. Soetomo mengklarifikasi lebih lanjut terkait tuduhan Sutan Takdir tersebut. Dalam hal ini, Soetomo menegaskan bahwa anggapan Sutan Takdir tersebut sama

sekali tidak benar. Ia mengatakan bahwa ia dan para peserta Kongres tidaklah anti-intelektualisme, melainkan sangat mendukung penuh gagasan intelektualisme tersebut.⁶⁰ Hampir seluruhnya para peserta kongres adalah alumni dari pendidikan Barat. Maka, sifat intelektualisme atau tata cara mengelola kecerdasan menjadi hal yang patut dijunjung tinggi dan dihormati, sehingga tidak benar bahwa dirinya dalam kongres tersebut mendukung anti-intelektualisme yang merupakan produk Barat. Berikut kutipan pendapat Soetomo menanggapi tuduhan dari Sutan Takdir tersebut:

“Sutan Takdir Alisjahbana mengatakan bahwa kongres ini bersuara anti-intelektualisme. Itu kurang benar. Seluruh pemrasarana adalah orang yang mendapatkan didikan ala barat. Tidak satupun dari mereka yang tidak mengakui, menghormati atau merasa heran bagaimana cara “mengolah kecerdasan” seperti yang dilakukan sekolah barat itu. Dr. Radjiman mengatakan bahwa cara memelihara “akal” adalah ketelitian (*perfect*). Pujian yang kita akui sungguh pada tempatnya. Bagaimana mungkin ada yang berpendapat seolah-olah pemrasana cenderung anti-intelektualisme”.⁶¹

Selain itu, Soetomo berbeda dengan Sutan Takdir dalam menyikapi sejarah. Sebelumnya Sutan Takdir menganggap bahwa masyarakat Indonesia seperti benalu yang selalu tertempel pada masa silam, yang kemudian membuat masyarakat Indonesia selalu terjerembab dalam kehati-hatian dan takut dalam melangkah. Sebaliknya Soetomo beranggapan bahwa justru dari masa silam kita dapat belajar dan memotong fase evolusi. Sebagai misal, jika kita belajar dari kegetiran sejarah Barat dalam menempuh kecerdasan intelektual sangatlah pahit jika dibayangkan. Namun jika kita memahami esensi dari peristiwa tersebut, kita dapat memotong jalan atau memotong fase dalam mencapai kecerdasan intelktual. Dengan demikian, kita tidak perlu berjibaku dengan kegetiran yang dialami

Barat pada saat menuju jalan kecerdasan. Berikut pendapat Soetomo:

“...Jangan sampai kita juga ikut merasakan beberapa “kesedihan dan kesakitan” masyarakat seperti di Eropa, yang waktu itu sedang sibuk mencari jalan baru, untuk melenyapkan pengaruh intelektualisme, yang wujud dan akibatnya sungguh merusak. Di mata internasional kecerdasan kita masih terbelakang sekali. Hal ini dapat menguntungkan kita juga agar kita waspada dan bijak. Bukankah didalam evolusi kita dapat melompati beberapa fase tingkat kecerdasan itu, yang di barat dialami pahit dan getirnya? Seandainya kita sebagai bangsa sudah mampu membuat atau membeli kapal terbang, tentu kapal yang lebih modern akan menjadi pilihan kita. Sedangkan bahaya, kesulitan, dan kecelakaan akibat kapal terbang yang kuno tak akan menjadi pengalaman dan resiko kita”.⁶²

Begitu pula halnya dengan isu pendidikan. Menurut Soetomo, pendidikan Barat yang diselenggarakan di Indonesia oleh pemerintah kolonial sebenarnya sudah terlihat sejak awal kekurangan dan kesalahannya. Untuk itu, Soetomo mendukung gagasan Taman Siswa yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Menurutnya, menekankan gagasan pendidikan pada produk Barat seperti intelektualisme, individualisme, egoisme, dan materialisme memang penting. Namun, jika hanya aspek tersebut yang ditekankan, niscaya hanya akan menciptakan generasi bangsa yang hanya cakap berfikir tanpa diimbangi dengan nilai-nilai luhur sebuah bangsa. Dalam konteks inilah Soetomo mendukung konsep pendidikan Taman Siswa, karena sangat mengadopsi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Kekurangan dalam pendidikan Barat yang dimaksud Soetomo adalah tidak disertakannya nilai-nilai luhur atau kebudayaan lokal tersebut dalam proses mendidik. Penyertaan pelajaran-pelajaran yang diadopsi dari kearifan lokal, menurutnya, dapat dijadikan penutup dari kekurangan konsep pendidikan Barat. Ia mencatat antara lain

kecakapan murid dalam menunjukkan perasaan yang halus, yang jujur, berupa menyanyi dan menari yang merdu; semua hal yang bisa mendekatkan perasaan cinta tanah air dan bangsa. Hal tersebut yang juga secara tidak langsung membangun kemauan untuk bekerja dengan semangat, ikhlas, dan tulus hati untuk kemegahan nusa dan bangsa. Berikut pernyataan Soetomo:

“Maksud pemrasaran di dalam sarannya tidak lain hanya menghimbau kepada bangsa kita: Marilah Saudara, kita menyusun perguruan nasional yang lebih sempurna sifatnya daripada perguruan di benua Barat, yang berlangsung di negeri kita ini, yang oleh ahli-ahli pendidik bangsa eropa pun sudah diakui kekurangan dan kesalahannya. Guna memenuhi “kekurangan” itu, Taman Siswa menunjukkan salah satu ciri perguruan itu. Yang menunjukkan nilai tambah perguruan. Yaitu, kecakapan murid dalam menunjukkan perasaan yang halus, yang berwujud, berupa “menari” atau “menyanyi yang merdu”. Perasaan ini mendekatkan perasaan kita pada bangsa, sehingga tumbuh dengan sendirinya kecintaan kepada tanah air dan bangsa itu. Membangun kemauan untuk bekerja dengan semangat, ikhlas, tulus hati, untuk kemegahan nusa dan bangsa.⁶³

Menurut Soetomo, untuk memimpin bangsa ini tidak hanya diperlukan kecerdasan yang merupakan pisau akal. Manusia juga perlu mendapat pemeliharaan dan pendidikan yang dapat mengembangkan jiwanya. Sehingga orang itu dapat memakai kecerdasannya, perasannya, budinya, dan semua kemampuannya untuk keperluan dan keelokan bangsa. Kecerdasan yang tinggi tidaklah cukup untuk menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang maju. Hal yang paling penting adalah memiliki sifat “Manusia Indonesia” yang memiliki jiwa yang luhur. Hal tersebut menunjukkan bahwa Soetomo tidak ingin meninggalkan kebudayaan lokal yang

dianggapnya luhur dalam penyelenggaraan pendidikan. Soetomo menulis:

“...Tidak cukup kiranya, kalau penuntun bangsa itu, yaitu mereka yang menjadi tulang belakang masyarakat Indonesia, hidupnya hanya mempunyai “alat yang tajam” seperti kecerdasan. Sedangkan “manusianya”, orangnya, aku-nya sama sekali tidak mendapat pemeliharaan dan didikan yang dapat mengembangkan jiwanya yang memungkinkan orang itu, individu itu memakai kecerdasannya, perasaannya, budinya, dan semua kemampuannya guna keperluan dan keelokkan nusa dan bangsa. Kita memerlukan bangsa yang kaya bukan karena kecerdasannya saja, yang dipelihara sebaik-baiknya dan mencapai kecerdasan setinggi-tingginya. Namun, yang paling utama kita perlu memiliki “Manusia Indonesia”, yang memiliki semua sifat yang baik dan luhur, hingga “aku”-nya yang menjadi pemimpin mengolah semua kemampuan itu. Kita pun dapat bergerak sekuat-kuatnya, bekerja aktif seaktif-aktifnya, guna menyempurnakan masyarakat kita.”⁶⁴

Terdapat istilah menarik yang digunakan Soetomo untuk menyikapi gagasan egoisme yang merupakan produk barat yang dikampanyekan Sutan Takdir. Egoisme dianggap sebagai sebuah sifat yang membuat seorang bergerak dinamis untuk mengejar apa yang menjadi cita-citanya. Namun, sifat egoisme hanya akan menciptakan manusia-manusia yang bersifat individualistis, dan tidak peka terhadap keadaan sosial yang ada di lingkungan sekitar. Soetomo memang tidak menolak gagasan egoisme tersebut karena menurutnya sifat egois dan ingin maju sendiri merupakan fitrah manusia. Hal itu hanya perlu diarahkan dan tidak sepenuhnya dihilangkan. Namun ada hal lain yang tidak kalah penting untuk ditekankan di sini adalah sifat berkorban atau dalam gagasan Soetomo disebut *altruisme* (sifat

mendahulukan kepentingan orang lain). *Altruisme* ini sebenarnya menekankan pengabdian pada masyarakat dan bangsa, sehingga seorang intelektual yang terdidik tidak hanya dapat memuaskan dirinya sendiri, namun dapat menjadi pencerah bagi sekitarnya. Dengan demikian, dari sifat *altruisme* tersebut muncul keluhuran budi, kehalusan rasa, kemurahan hati di setiap intelektual yang terdidik⁶⁵. Terkait gagasannya mengenai altruisme Soetomo menulis:

“...Egoisme dan kecenderungan mencari aman untuk diri sendiri, adalah salah satu pondasi, kecenderungan dasar yang terdapat pada kita. Ini dasar kita sebagai individu, harus ditimbang dengan berkembangnya perasaan “aku” yang lebih luas, dengan berkembangnya altruisme, yaitu sifat yang mementingkan kebutuhan orang lain. Sedang egoisme itu seolah-olah bersifat merusak, karena menghalangi perkembangan “perdamaian: di dalam hubungan kita dengan kita. Oleh karena itu, di dalam pengajaran apa saja, di dalam ilmu filsafat, ilmu pendidikan dan juga di dalam agama, tidak ada aliran yang memajukan berkembangnya perasaan egoisme, “aku” yang sempit itu.”⁶⁶

Perdebatan di atas selanjutnya membawa perbedaan pendapat di antara keduanya terkait apa yang disebut sebagai “perguruan” dan “pendidikan”. Soetomo menganggap bahwa Sutan Takdir tidak bisa membedakan apa yang dinamakan antara perguruan dan pendidikan; dia mencampur adukan definisi keduanya, seperti dalam artikelnya yang berjudul “Didikan Barat dan Didikan Pesantren Menuju Masyarakat Dinamis”.⁶⁷ Menurut Soetomo, Sutan Takdir cenderung mencampuradukan keduanya dan tidak paham definis keduanya secara mendasar. Menurutnya, yang diselenggarakan Belanda di Indonesia adalah perguruan, bukan pendidikan. Pendidikan yang sesungguhnya adalah kecerdasan yang dapat membuat seorang intelektual peduli dan berkorban untuk bangsanya,

bukan hanya sifat kepintaran yang semata menumbuhkan ambisi individu. Berikut pernyataan Soetomo terkait terminologi antara “perguruan” dan “pendidikan” :

“Nyata lagi, ketidakmampuan Tuan Sutan Takdir Alisjahbana membedakan arti kata “didikan” dan “perguruan”, kita kutip catatan karangannya itu, yang berbunyi demikian:

Dr. Satiman tidak percaya, bahwa pesantren akan memajukan bangsa Indonesia; kalau pesantren bisa tentu keadaan Bangsa Indonesia tidak seperti sekarang ini. Pemimpin seperti Dr. Sutomo, Cipto, dan lain-lain bukan keluaran pesantren, tetapi keluaran perguruan Barat yang dicemooh itu.

Dr. Sutomo dengan mudah menjawab, bahwa pemimpin, seperti Ir. Sukarno, Cipto, dan Dr. Satiman itu kebetulan keluaran didikan Barat yang keliru. Mereka lahir di Indonesia meskipun lulusan perguruan Barat.

Nyata di atas itu bahwa artinya kata “didikan” dan “perguruan” dicampuradukan saja. Dikatakan bahwa Dr. Cipto dan sebagainya hasil didikan Barat, padahal mestinya: hasil perguruan Barat. Kita akui bahwa kita keluaran perguruan Barat.

Oleh karena itu, terasa sungguh-sungguh kekurangannya, yaitu pendidikan yang perlu sekali bagi kecerdasan manusia. Ketiadaan pendidikan inilah yang menyebabkan kurang semangatnya kaum intelektual kita mengabdikan dirinya untuk nusa dan bangsanya. Kekurangan ini, telah diakui oleh siapa pun di antara kita yang berjuang di kalangan rakyat, pun oleh kaum akademik sendiri yang menyatakan kekecewaannya terhadap kaum intelektual kita itu.

Kekurangan ini akan lenyap dengan sendirinya kalau kaum intelektual kita dapat didikan di dalam perguruan sehingga diperoleh orang-orang Indonesia yang cinta pada nusa dan

bangsanya, orang-orang aktif, yang giat bekerja dengan senang, rela, dan gembira, serta berbudi luhur pula untuk memperbaiki wujud masyarakat kita, sebagaimana telah saya terangkan pula dalam karangan saya yang berjudul "Pergerakan yang Hidup".⁶⁸

Dalam kongres Perguruan tersebut Soetomo juga mendukung sistem pendidikan yang berorientasi pada pondok pesantren, yang dianggap oleh Sutan Takdir sebagai sebuah kekolotan. Dukungan Soetomo terhadap sistem pondok bukan karena dirinya yang cenderung pada Islam. Soetomo sendiri tidak begitu taat dalam hal agama ia sendiri tidak terlalu tertarik pada pergerakan yang berorientasi pada asas keagamaan. Namun ia juga bukan merupakan tokoh yang antiagama. Hal ini senada dengan apa yang pernah ia katakan dalam rapat pendirian PPAI. Soetomo mengatakan:

"Pergerakan kita tidak berdasarkan pada agama ini bukan berarti bahwa kita tiada setudju dengan agama dan melarang anggota kita memeluk agama, sekali-kali tidak. Malah kita andjurkan mereka jang kita berikan kemerdekaan memeluk agamanya masing-masing itu menetapi akan kewajibannya dengan sungguh-sungguh dan mengerjdjakan perintah dengan perbuantannya."⁶⁹

Selain itu, Soetomo juga pernah beranggapan bahwa Islam akan mengurangi sentimen nasionalistis yang sejati.⁷⁰ Namun, Soetomo merasa ada sesuatu yang penting yang dapat dipelajari dari sistem pendidikan tradisional khas Indonesia ini. Dalam hal ini, dia beranggapan bahwa sistem pondok lebih merupakan sistem pendidikan yang ringan biaya. Penyelenggaraannya juga berasaskan pengorbanan, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat menimba ilmu di sana tanpa harus berkeberatan dengan dana pendidikan.

Selain itu, Soetomo mendukung sistem pendidikan pondok sebagai sistem pendidikan di mana siswa dapat terpelihara dan dapat terawasi. Maka dari itu, dia secara terang-terangan mengkampanyekan pendirian pondok di beberapa kota besar di Indonesia. Soetomo menganggap anak-anak yang sekolah di sekolah Belanda seperti di HIS, AMS, dan MULO tidak terawasi oleh orang tua mereka. Mereka menjadi pribadi yang tidak dekat dengan sosok orang tua, dan tidak memiliki rasa hormat terhadap orang tua. Mungkin hal ini juga yang dirasakan Soetomo yang pernah menempuh pendidikan di Barat. Soetomo menulis:

“... pun bukan itu saja kepentingannya. Malah kepentingan pondokan itu jangan terlampaui diletakkan pada mahal atau murahnya biaya, karena itu tergantung pada yang memakainya. Yang terpenting ialah pengaruhnya atas pendidikan anak-anak kita.

Dalam pondok, bukan hanya pengajaran anak-anak itu terpelihara, tapi juga kehidupan sehari-harinya akan mendapat tuntunan dan pengawasan, dan seterusnya...”⁷¹

Soetomo juga memberikan beberapa gambaran cukup rinci menyangkut konsep pendidikan pesantren. Dia mencatat bahwa banyak orang tua takut untuk menempatkan anak-anaknya di pesantren. Mereka tidak yakin bahwa konsep pendidikan pesantren akan memberikan kemajuan bagi anak mereka. Namun, Soetomo tidak melihat pesantren dari sisi konten dan konsep pengajarannya saja. Ia juga menilai dari sudut pandang yang berbeda. Menurunnya, meskipun tradisional, pesantren telah terbukti dapat menghasilkan lulusan-lulusan yang bisa menyeimbangkan antara intelektual dan spiritual. Selain itu ia beranggapan bahwa pesantren menghapuskan segala bentuk stratifikasi masyarakat. Di sana semua anak tidak ada yang dibedakan. Mereka berbaur menjadi satu, tidak peduli anak petani, pedagang, maupun bangsawan. Hasilnya lulusan pesantren

menjadi pribadi yang luhur dan memiliki jiwa yang sesuai dengan kebudayaan Indonesia.

Sebaliknya, Soetomo dengan terang-terangan mencela model pendidikan Barat seperti HIS, yang dinilainya belum berhasil menyelenggarakan pendidikan. HIS gagal mengirim lulusan-lulusannya ke tingkat berikutnya. Hanya sekitar 30 persen dari lulusan HIS yang berhasil melanjutkan studinya ke jenjang lebih tinggi. Inilah yang membuat pendidikan model Belanda mengalami kegagalan total dalam menyelenggarakan pendidikan untuk masyarakat Indonesia, sehingga tidak elok jika harus sepenuhnya menjadikan pendidikan model Belanda sebagai acuan untuk penyelenggaraan pendidikan yang cocok untuk bangsa Indonesia. Soetomo mengatakan:

“HIS Saya cela sekakas-kerasnya. Saya umpamakan racun bagi anak Indonesia. Pencelaan ini oleh Tuan Sutan Takdir Alisjahbana dikaitkan dengan pendapat saya terhadap pesantren kita. Hubungan ini adalah keliru karena Tuan Sutan Takdir Alisjahbana mangambil saya di luar ikatannya.

Adapun HIS yang saya cela itu, karena dia sebagai perguruan sekolah dasar tidak mampu mengirimkan lulusannya ke sekolah menengah dan selanjutnya. Hanya 30 persen saja yang dapat meneruskan pelajarannya. Inilah suatu kegagalan yang nyata!”⁷²

Meskipun Soetomo mengenyam pendidikan Barat, hal tersebut tidak lantas membuatnya terpesona terhadap Barat. Ia tidak membuang apa yang dianggapnya sebagai gagasan yang membawa kemajuan. Namun, ia ingin lebih menyelaraskan antara gagasan Barat berupa intelektualisme, individualisme, egoisme, dan materialisme dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur yang ada di Indonesia dianggap dapat menjadi penutup kekurangan perguruan Barat yang nampaknya hanya menekankan pada aspek kecerdasan

belaka, dan lebih cenderung menghasilkan manusia-manusia pintar yang tak beradab. Nilai-nilai kearifan lokal yang ada dalam bangsa Indonesia setidaknya dapat dimaksimalkan dalam membentuk bangsa yang tidak hanya cerdas dalam akal, namun luhur dalam adab.

Perdebatan ini sebenarnya dipuji oleh berbagai tokoh lintas kalangan, karena dilakukan dengan sopan meskipun kelihatannya sangat berapi-api. Walaupun pada akhirnya perdebatan ini akhirnya menimbulkan silang pendapat yang tegas antara Sutan Takdir dan Soetomo. Atau terlebih lagi menimbulkan sentimen di antara keduanya dan akhirnya berbicara tidak pada konteks dan lebih cenderung menyerang keperibadian satu sama lain.⁷³ Namun jelas pada masa ini berbagai tokoh pergerakan kita telah sadar akan rumusan penyelenggaraan pendidikan dan kebangsaan yang sesuai dengan bangsa Indonesia. Mereka tanpa lelah mencoba meramu rumus-rumus guna mencerdaskan bangsa dan mencari solusi yang terbaik untuk bangsa. Sutan Takdir dengan pendidikan ala baratnya, Soetomo dengan sistem pendidikan budaya Timur, dan Ki Hajar Dewantara dengan Taman Siswanya. Terlepas dari segala perselisihan dan silang pendapat yang timbul, perdebatan tersebut menunjukkan bahwa para tokoh-tokoh masa awal pergerakan telah dengan sepenuh hati menunjukkan pengabdinya dan mencurahkan segala fikirannya untuk kemajuan bangsa, khususnya dalam bidang kebudayaan.

2.9. Penutup

Pada bulan April 1938 Soetomo jatuh sakit, dan pada tanggal 30 Mei 1938 Soetomo menghembuskan nafas terakhirnya. Kepergian Soetomo merupakan sebuah kehilangan besar bagi sebuah bangsa yang kala itu tengah dengan giat mengusahakan kemerdekaannya. Meskipun ia tidak sempat merasakan hingar-bingarnya kemerdekaan, namun perjuangannya dalam merumuskan sebuah dasar kebangsaan telah sangat berpengaruh pada masa berikutnya.

Soetomo bukan saja seorang dokter, namun lebih dari itu, ia adalah putra bangsa yang telah memberikan perhartian besar pada berbagai aspek seperti pendidikan, kebudayaan, ekonomi, dan kesehatan. Tidak berlebihan nampaknya sandangan sebagai bapak pergerakan yang diberikan kepadanya. Di saat sebagian besar tokoh pergerakan masih berkuat pada asas perjuangan yang bersifat primordial, Soetomo menghadirkan konsep kebangsaan dengan dasar kebangsaan lintas golongan.

Tidak sampai di situ, Soetomo juga bersumbangsih besar memikirkan konsep pendidikan yang ideal untuk bangsa ini. Meskipun ia adalah didikan Barat, hal itu tidak membuatnya begitu terpesona terhadap Barat. Ia mengakui bahwa Barat dan sistem pendidikannya telah menghasilkan lulusan-lulusan yang cerdas. Konsep intelektualisme, individualisme, egoisme, dan materialisme adalah perодук Barat yang sangat berpengaruh. Namun, di saat sebagian besar orang menengadahkan wajahnya ke Barat, Soetomo tetap konsisten berpegang teguh pada nilai-nilai luhur kebudayaan bangsa Indonesia. Hal ini bisa kita saksikan dalam perang argumen antara Soetomo dan Sutan Takdir Alisjahbana, sebagaimana telah dibahas di atas.

Soetomo yang menempuh pendidikannya melalui pendidikan barat merasakan ada yang tidak sempurna dari konsep pendidikan Barat yang diterapkan di Indonesia. Barat dengan konsep intelektualisme, individualisme, egoisme, dan materialisme hanya menciptakan manusia-manusia cerdas tanpa memiliki sifat ingin berkorban atau apa yang ia sebut dengan *altruisme*. Selain itu, ia juga melihat kebobrokan-kebobrokan para lulusan sekolah dasar Belanda yang tidak mampu mengirim para lulusannya ke tingkat berikutnya. Mengambil pelajaran dari Barat memang perlu. Soetomo juga tidak menolak secara mentah-mentah konsep pendidikan Barat. Ia dapat berkiprah sejauh ini adalah jasa dari didikan Barat. Dan ia juga tidak ingin menutup mata bagi konsep yang ditawarkan barat. Hanya saja, Soetomo beranggapan bahwa konsep Barat harus dipadukan dengan akar kebudayaan luhur bangsa ini.

Ia banyak mengambil contoh dari keberhasilan Jepang, yang dengan sangat cepat menjadi negara yang mampu meniru Barat dalam berbagai hal. Ia juga melihat orang-orang Jepang begitu cerdas dan giat bekerja. Namun, di balik keterpesonaan Jepang terhadap Barat, Jepang tidak lantas meninggalkan kebudayaan luhur mereka. Mereka tetap bisa maju mengikuti Barat, dengan segala kemajuan yang ditawarkan oleh Barat tanpa meninggalkan akar budayanya. Soetomo beranggapan bahwa Indonesiapun bisa demikian. Indonesia tetap harus mengambil konsep-konsep Barat yang telah membuat mereka maju. Namun, di sisi lain Indonesia juga harus berangkat dari akar budayanya. Soetomo menganggap bahwa budaya dan sejarah merupakan sisi yang tidak dapat dipisahkan dari kemajuan sebuah bangsa.

Sebagai implemntasi dari corak pemikirannya yang memadukan antara pendidikan barat dengan kebudayaan Indonesia, ia mendukung konsep pendidikan yang ditawarkan Ki Hajar Dewantara dengan Taman Siswanya. Menurutnya, dengan memadukan antara pola pendidikan ala barat dengan sistem pendidikan lokal, tidak hanya menjadikan seorang anak menjadi cerdas, namun perlahan tumbuh rasa keikhlasan dan kecintaan di hati mereka terhadap bangsanya. Soetomo sendiri juga mengajukan konsep pendidikan pondok dan mendukung sistem pendidikan pesantren.



Muhammad Yamin, Lahir di Sawahlunto, Sumatera Barat 23 Agustus 1903
(Sumber : Arsip Nasional Republik Indonesia – ANRI)

2.10. Muhammad Yamin: Kebudayaan untuk Persatuan Indonesia

Masih di bidang kebudayaan, tokoh berikutnya yang perlu dibahas di sini adalah Muhamad Yamin. Sebagaimana dua tokoh sebelumnya, Muhammad Yamin terlibat secara intensif dalam pembicaraan dan bahkan perdebatan tentang isu-isu strategis terkait bahasa, sastra, dan sejarah. Juga termasuk dalam perhatiannya adalah pemikiran tentang pendidikan dan pengajaran. Dan karir intelektual Muhammad Yamin ini dijalani sejalan dengan peran penting yang diembannya dalam dunia politik. Dengan cara demikian, dan tentu saja dengan coraknya sendiri, Muhammad Yamin telah memberi kontribusi sangat berarti dalam usaha membangun karakter bangsa.

Talawi, sebuah nagari di Sawahlunto, Sumatra Barat, adalah tempat asal tokoh yang di waktu kecil namanya ditulis Moh. Jamin. Lahir pada 23 Agustus 1903, Muhammad Yamin berasal dari keluarga terpandang. Ayahnya, bernama Usman dengan gelar Bagindo Khatib, adalah seorang pegawai mantri kopi (*koffiepakhuismeester*), di samping sebagai seorang ulama yang banyak memberikan ceramah keagamaan untuk masyarakat sekitar. Namun, Yamin tidak lama hidup di bawah asuhan orang tuanya. Mereka meninggal saat Yamin masih kecil. Setelah itu, Yamin hidup di bawah asuhan kakanya, Muhammad Yaman, seorang yang berprofesi sebagai guru di Padang Panjang dan kemudian di Lahat, Sumatra Selatan.⁷⁴

Muhammad Yamin memperoleh pendidikan dasarnya di HIS (*Hollandsche-Inlandsche School*) di Lahat pada 1918. Sekolah ini telah memberi Yamin kemampuan bahasa Belanda dan Melayu, sehingga bisa dengan mudah melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Maka, setamat di HIS, dia memulai pengembaraannya ke tanah rantau di Jawa. Pertama terdaftar sebagai pelajar di Sekolah Dokter Hewan di Bogor, tapi tidak lama setelah itu—karena tidak tertarik belajar ilmu hewan—dia pindah ke Sekolah Pertanian, masih di kota yang sama. Dia berhasil menamatkan pendidikannya di sekolah ini,

meskipun lagi-lagi dia tidak tertarik untuk berkarir di bidang yang baru selesai dipelajarinya. Dia memilih untuk lebih berkonsentrasi di bidang sastra, budaya dan politik.

Untuk itu, tidak lama setelah menamatkan pendidikannya di Bogor, Yamin segera pindah ke Surakarta, saat dia mendaftar sebagai pelajar di AMS (*Algemene Middelhare School*). Di AMS ini dia mengambil jurusan yang sesuai dengan minatnya, yakni Sastra Timur (*Oostersch Letterkundige*). Di samping itu, selama belajar di AMS ini pula Yamin mempelajari secara mendalam bahasa dan budaya Jawa. Pada 1927, saat berusia 24 tahun, Yamin berhasil tamat di AMS. Dari situ, dia pindah ke Jakarta untuk melanjutkan pendidikannya di Sekolah Tinggi Hukum (*Rechts Hoog School*). Selama menjadi mahasiswa, Yamin tinggal di Indonesisch Clubgebouw (IC) di Kramat Raya, bersama mahasiswa-mahasiswa lain seperti Sumanang, Amir Syarifuddin dan Abu Hanifah. Setelah lima tahun belajar, pada 1932 Yamin menyelesaikan studinya dan berhak memakai gelar Mr. (Meester in de Rechten) di depan namanya, menjadi Mr. Muhammad Yamin.

2.11. Karir Politik

Di tengah kesibukannya sebagai pelajar, Muhammad Yamin mulai terjun ke dunia aktifis. Dia menjadi anggota dari suatu perkumpulan daerah yang saat itu memang tengah menjamur di kota-kota pelajar, *Jong Sumatranen Bond* (JSB). Yamin mulai tampil ke permukaan ketika dia berpidato pada lustrum pertama JSB pada 1923 di Jakarta. Pidato Yamin—berjudul "*De Maleische Taal in het verleden, heden and in de toekomst*" (Bahasa Melayu di Masa Lampau, Kini dan Mendatang)—tepat mengenai isu yang saat memang hangat dibicarakan di tengah wacana publik, khususnya kalangan pelajar Indonesia. Perlu ditegaskan, sejalan dengan mulai menguatnya hasrat untuk menciptakan "kemajuan" (*progress*) bagi dan oleh rakyat pribumi, maka bahasa mulai muncul sebagai penanda dari arus besar pergaulatan pemikiran ke arah pembentukan sebuah

bangsa.⁷⁵ Dan Yamin dalam pidatonya melontarkan gagasan tentang perlunya membuat sebuah majalah kebudayaan yang diberi nama “Malaya”, sehingga dapat merangkul mereka yang berada di bawah kolonialisme Inggris.⁷⁶

Karena itu, Meski menimbulkan perdebatan, pidato Yamin telah meletakkan landasan kuat bagi lajunya proses sejarah di mana bahasa Indonesia, melalui kongres Pemuda 1928, dideklarasikan sebagai bahasa dari sebuah bangsa yang dibayangkan atau dicitakan. Hal ini terjadi setelah melalui sebuah proses di mana organisasi kedaerahan itu secara perlahan melebur ke dalam satu organisasi pemuda lintas etnis dan agama, Indonesia Muda. Dan Muhammad Yamin terlibat sangat intensif dalam proses peleburan tersebut.

Proses ini bermula ketika para Pemuda, yang sebelumnya tergabung dalam berbagai organisasi kedaerahan mereka masing-masing, mulai terdorong untuk menciptakan persatuan yang lebih luas. Maka pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 1926 berlangsung satu kerapatan besar, yang kemudian terkena sebagai Kongres Pemuda pertama di Jakarta. Di bawah pimpinan M. Tabrani dari PPPI (Perhimpunan Peajar-Pelajar Indonesia), kongres tersebut dirancang untuk mencapai jalan membina perkumpulan pemuda yang tunggal, yaitu membentuk satu badan sentral dengan maksud memajukan paham persatuan kebangsaan dan mempererat hubungan antara semua perkumpulan-perkumpulan pemuda kebangsaan. Muhammad Yamin, yang memiliki hubungan erat dengan persitiwa Kongres, diberi kesempatan menyampaikan pidato berjudul “Kemungkinan-kemungkinan untuk Bahasa dan Sastra di Kemudian Hari”. Dia menegaskan dalam pidatonya bahwa bahasa Melayu—selain bahasa Jawa—mengandung “harapan untuk menjadi bahasa persatuan. Bahasa Melayu akan berkembang secara perlahan menjadi bahasa pergaulan atau bahasa persatuan bagi rakyat Indonesia”.⁷⁷

Pandangan Yamin tentang bahasa tersebut selanjutnya disampaikan lagi pada Kongres Pemuda II yang berlangsung di Weltreveden pada 27-28 Oktober 1928. Bertindak sekaligus sebagai

sekretaris Kongres, Yamin menyampaikan pidatonya berjudul “Persatuan dan kebangsaan Indonesia”. Terkait dengan bahasa, Yamin menegaskan kembali bahwa bahasa Melayu dalam kongres tersebut telah menjelma menjadi bahasa Indonesia. Lebih dari itu, dalam kapasitasnya sebagai sekretaris, Yamin selama rapat berlangsung memberikan resolusi dari kerapatan pemuda; dia memberikan secarik kertas kepada pimpinan sidang Seogondo Djojopoespito (PPPI), yang berisi rumusan fusi dari berbagai organisasi pemuda yang ada—suatu ide yang sebelumnya ditentang keras oleh Yamin. Hasil rumusan tersebut akhirnya disepakati dalam rapat pemuda dengan sebutan “Ikrar Pemuda”, yang kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda sebagaimana kita sebut hingga saat ini.⁷⁸

Kita akan kembali lagi ke isu bahasa nanti. Hal penting untuk dijelaskan di sini adalah keterlibatan dan kontribusi Yamin dalam Kongres Pemuda ini telah membuka jalan bagi karirnya di masa depan dalam pentas politik nasional. Karir politik Yamin dimulai ketika dia memutuskan mengambil haluan kooperatif dengan pemerintah kolonial Belanda, setelah sekian lama menjadi seorang aktifis yang bersikap kritis dan bahkan berseberangan dengan pemerintah. Langkah kooperatif ini dilakukan Yamin dengan menjadi anggota Volksraad, lembaga dewan rakyat buatan Belanda. Bagi Yamin, yang sejak 1937 bergabung dalam Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo), langkah kooperatif perlu diambil dalam rangka mencapai tujuan yang sama dengan mereka yang tetap bersikap non-kooperatif; keduanya sama-sama bertujuan untuk menghidupkan pergerakan nasional.⁷⁹

Lepas dari berbagai pandangan menyangkut peran Yamin di Volksraad—ia pernah dijuluki sebagai biang keladi perpecahan dalam Fraksi Nasional—pengalamannya ini telah menghantarkan dia memasuki panggung politik yang lebih sentral dan strategis. Demikianlah, di akhir masa pendudukan Jepang, Yamin termasuk seorang yang ikut terlibat dalam Badan persiapan Kemerdekaan Indonesia (BUPKI). Bahkan, dalam sidang pertama BPUPKI pada 28

Mei hingga 2 Juni 1945, Yamin—bersama delapan orang lain sesama anggota BPUPKI—diangkat menjadi salah seorang yang bertugas merumuskan kembali pokok-pokok pidato Sukarno, yang disampaikan pada 1 Juni 1945. Dan istilah “sila” yang dikemukakannya dalam pidato tersebut, yang kemudian menjadi tanggal lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, diberikan oleh Yamin, yang saat itu disebut Sukarno sebagai ahi bahasa.⁸⁰

Keterlibatan Yamin di BPUPKI memang tidak berlanjut. Namun, pengalaman tersebut telah membuatnya memiliki hubungan dekat dengan Sukarno. Karena itu, meski sempat di luar pemerintahan dan bergabung dengan kelompok berhaluan keras di bawah pimpinan Tan Malaka—bahkan sempat dipenjarakan dengan tuduhan gerakan makar—Yamin pada akhirnya dipercaya Sukarno untuk mengemban tugas penting. Pada 1948, Yamin diangkat sebagai perwakilan RI dalam Perundingan Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda, ketika dia duduk sebagai pantia bidang ketatanegaraan dan kebudayaan. Tugas ini telah memberi dampak besar bagi karir Yamin, yang Sukarno semakin memberi kesempatan untuk terlibat dalam urusan pemerintahan.⁸¹

Hubungan Yamin dengan Sukarno ini terus berlanjut. Juga berkat kontribusinya yang besar dalam KMB, maka kehadirannya di pentas politik nasional semakin kuat. Karena itu, saat pembentukan Kabinet Sukiman-Suwirjo (27 April 1951-3 April 1952), Yamin diangkat sebagai Menteri Kehakiman. Jabatan menteri juga didudukinya masa Kabinet Kabinet Ali Sastroamidjyo (1953-1955) di mana Yamin menjadi Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan.⁸² Posisi kementerian terus dijabat Yamin ketika Indonesia memasuki Demokrasi Terpimpin. Bahkan, Yamin menduduki posisi penting dalam Dewan Nasional pimpinan Sukarno, yang bertugas memberi nasehat kepada kabinet. Dengan posisi ini, Yamin menjadi salah seorang utama pendukung Sukarno dalam melaksanakan Demokrasi Terpimpin.

Demikianlah, pada saat Kabinet Kerja I dibentuk, Yamin diangkat sebagai Menteri Urusan Sosial dan Budaya (1959-1960),

kemudian sebagai Ketua Dewan Perancang Nasional (1962) pada Kabinet Kerja II dan berlanjut pada Kabinet Kerja III. Bahkan, dalam masa Kabinet Kerja III ini (Maret 1962 sampai November 1963), Yamin menempati tiga posisi penting dalam kabinet, yakni Wakil Menteri Pertama sebagai Koordinator, Menteri Penerangan, dan Ketua Depernas.⁸³

2.12. Politik Bahasa

Seagaimana telah disinggung sebelumnya, bahasa menjadi satu isu penting yang mendapat perhatian Muhammad Yamin. Bagi Yamin, bahasa memiliki peran sentral dalam menciptakan persatuan rakyat Hindia-Belanda. Yamin dalam hal ini mengacu pada bahasa Melayu, yang sejak berabad-abad menjadi bahasa antarpulau di kepulauan Hindia, bahasa yang paling banyak dipergunakan dalam perdagangan, politik, keagamaan, dan komunikasi sehari-hari, sebagai *lingua franca* orang-orang Nusantara dan Asia Tenggara. Bahkan, ada juga dokumen yang membawa kita pada kesimpulan bahwa sejak abad keenam bahasa Melayu adalah bahasa kerajaan Majapahit yang mahabesar yang meliputi hampir seluruh bagian tenggara benua Asia.⁸⁴

Atas dasar itu, bahasa Melayu memiliki kemungkinan berkembang lebih besar dari bahasa lain di Indonesia, seperti bahasa Jawa. Dilihat dari wilayah territorial, penggunaan bahasa Melayu lebih banyak digunakan. Selain itu, dari segi tata bahasa dan unsur penerimaan dari luar, bahasa Melayu lebih mudah menyerap, hal yang tidak dimiliki bahasa Jawa atau bahasa etnis lain. Tentang kemungkinan bahasa Jawa, Muhammad Yamin mengatakan sebagai berikut:

....bahasa Jawa kita nilai sangat tinggi, tidak hanya dalam arti kemasyarakatan, melainkan juga dalam arti kebudayaan, ada satu kenyataan yang harus kita akui disampingnya, yaitu bahwa bahasa Jawa untuk orang bukan Jawa tidak mudah

dipelajari, ya bahkan para cendekiawan pun dengan pengetahuan teori mereka, tidak sanggup menguasainya lebih baik. Memang, pada bahasa-bahasa lain kadar tingkat kesopanan dan hormat terutama diungkapkan dengan misalnya penggunaan kata ganti orang yang berbeda sedangkan dalam bahasa Jawa ini terjadi pada penggunaan hampir semua jenis kata. Kenyataan ini ditambah lagi dengan faktor-faktor lain baik faktor sejarah maupun faktor dalam bahasa itu sendiri, tidak sedikit menambah ketidakmungkinan menjadikan bahwa Jawa sebagai bahasa persatuan Hindia. Mungkin, dan sejarah akan membuktikan bahwa bahasa Jawa akan mengalami perubahan yang penting, tetapi sepanjang yang saya dapat lihat dan ramalkan, suatu bahasa lain akan lebih cepat mengambil tempat itu, jadi walaupun bahasa Jawa bagi orang Indonesia merupakan bahasa yang akan tetap menduduki tempat yang penting dalam perkembangan sejarah kebudayaan, bahasa Melayu mempunyai kedudukan lain,....⁸⁵

Dalam kaitan ini, Yamin memprediksikan bahwa bahasa Melayu lambat laun menjadi bahasa percakapan dan bahasa kesatuan bangsa Indonesia dan bahwa kebudayaan Indonesia di waktu yang akan datang akan menyatakan keberadaannya dengan bahasa itu. Dengan demikian, Yamin sudah sejak awal telah memikirkan adanya suatu bahasa untuk menyatukan konsep-konsep perjuangan yang ada. Karena itu, tidak mengherankan pada Kongres Pemuda II bahasa Melayu telah menjelma menjadi bahasa Indonesia, yang berpengaruh pada persatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa dengan ratusan bahasa daerah. Maka persatuan bangsa Indonesia jelas memerlukan bahasa persatuan. Dan bahasa Indonesia adalah bahasa yang sudah berurat akar dalam pergaulan dan peradaban Indonesia. Bahasa Indonesia telah ada sejak di Indonesia bukan buatan baru, tetapi bahasa Indonesia dipergunakan oleh Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit.

Uraian Yamin di atas, yang dituangkan dalam deklarasi Sumpah Pemuda, telah berjasa mejadikan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa penghubung semakin kuat. Orang-orang Jawa, Sunda, Madura, Minangkabau, Ambon, dan lain-lain berusaha untuk mengungkapkan pikiran mereka dengan bahasa Indonesia, baik dalam rapat-rapat maupun majalah/surat kabar. Di bidang pendidikan, Taman Siswa yang dalam kegiatannya untuk melindungi kebudayaan Jawa, pada tahun 1930 mulai memberikan prioritas bagi kepentingan bahasa Indonesia. Di bidang pers, majalah *Poejangga Baroe* pada tahun 1933 telah menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi modern. Di bidang politik, pada tahun 1938, Moh. Husni Thamrin pada sidang Volksraad untuk pertama kalinya menggunakan bahasa Indonesia dalam pidato-pidatonya. Hal ini kemudian diikuti anggota Fraksi Nasional lainnya.⁸⁶

Sejaan dengan itu, usaha perbaikan atau standarisasi bahasa Indonesia juga mulai dilakukan, karena bahasa Indonesia yang digunakan saat itu masih tidak beraturan. Pada 1938 diadakan Kongres Bahasa Indonesia I di kota Solo, yang sala satunya membahas Dalam standar dan ejaan bahasa Indonesia. Sekilas kongres Bahasa Indonesia yang pertama ini lebih sebagai sebuah ajang akademik ketimbang sebuah acara dengan kepentingan politik tertentu. Komisi penyelenggaraan diketuai Dr. Hoessein Djajadiningrat dengan Prof. Poerbotjaraka sebagai komisaris aktif. Banyak makalah yang dipresentasikan di kongres menyentuh hal-hal teknis atas proses standardisasi dan penginstitutionan penggunaan bahasa nasional. Meskipun, kalangan tokoh pergerakan tetap menjadi bagian penting dari Kongres. Mereka antar lain Amir Sjarifuddin dan Moh. Tabrani, yang menyampaikan makalah untuk mendorong penyebaran bahasa Indonesia, seraya memberi argumen bahwa bangsa Indonesia tidak beroposisi terhadap bahasa-bahasa lokal tetapi merepresentasikan realisasi dari sumpah pemuda.⁸⁷

Sementara itu Muhammad Yamin pada kongres tersebut menyampaikan makalah tentang “Bahasa Indonesia sebagai bahasa Persatuan dan Bahasa Kebudayaan”. Dalam hal ini, Yamin kembali

kembali memberikan arahan bahwa bahasa Indonesia telah digunakan sejak lama dan telah menjadi bahasa penghubung sebagian besar penduduk Indonesia.⁸⁸ Menurutnya, Bahasa Indonesia telah lama berperan sebagai bahasa persatuan dari Sabang Sampai Merauke. Yamin juga menambahkan perlunya penjelasan mengapa Medan dipilih sebagai tempat penyelenggaraan kongres dan 28 Oktober sebagai tanggalnya. Medan dipilih karena merupakan pusat wilayah di mana bahasa Indonesia digunakan dan diucapkan dengan baik, dan tanggal 28 Oktober 1928 adalah tanggal di mana Indonesia Raya dilahirkan, juga pada saat di mana frase bahasa Indonesia pertama kali digunakan dalam sebuah kongres pemuda yang diselenggarakan di Jakarta.⁸⁹

Dalam konteks ini Muhammad Yamin—seperti halnya Sukarno—tengah membangun sebuah simbol yang menjadi bagian dari susunan ideologi sebuah negara-bangsa. Yamin mengaitkan peristiwa pada 28 Oktober pada visi utama dari Indonesia yang lebih besar, yang berakar dalam sejarah berabad-abad lalu. Pada tahun 1955, ia misalnya menerbitkan selebarannya berjudul “Sumpah Pemuda Raja”, saat dia mengklaim bahwa Sumpah Pemuda 1928 tidak hanya merepresentasikan sebuah reinkarnasi atas bahasa Indonesia yang sudah lama hidup di bumi Indonesia. Melainkan, Yamin secara yakin menempatkan Sumpah Pemuda 1928 sejajar dengan tulisan kuno bertanggal 683 di kerajaan Sriwijaya dan 1331 di Majapahit sebagai tiga peristiwa dalam sejarah Nusantara yang secara mutlak memberi jalan terbentuknya suatu negara dan komunitas yang baru disadari oleh kebanyakan orang pada proklamasi.⁹⁰

Menurut Yamin, sejarah Indonesia telah mengenal tiga kali persumpahan yang berakibat besar bagi perubahan besar di tanah air. Sumpah pertama berlangsung pada tahun 683 di kaki Bukit Siguntang di kota Palembang, yang menjadi ibu kota Negara Kesatuan Sriwijaya. Proklamasi membentuk negara Sriwijaya dituliskan di atas batu seperti digariskan dalam tulisan Kedukan Bukit pada tahun 683. Pada tahun itu juga telah digariskan garis-garis besar aturan

ketatanegaraan Sriwijaya naik turun sejak abad ke-4 sampai permulaan abad ke-15; jadi selama 1000 tahun negara nasional itu tegak berdiri dan jaya karena sesuai dengan kepribadian Indonesia. Sumpah kedua diucapkan oleh Patih Gajah Mada di kaki gunung Penanggungan di Keraton Majapahit pada tahun 1331 dengan dihadiri diplomat negarawan Adityawarman, ketika Negara Keprabuan Majapahit sedang meningkatkan kekuasaannya di bawah lindungan Perabu Wanta Tribuana dan Kepala Negara Hayam Wuruk, sesuai dengan rancangan Werda Menteri Negerawan Adityawarman di benua Asia. Sumpah ketiga adalah Sumpah Pemuda yang diucapkan pada Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 di Jakarta.⁹¹ Demikianlah, Yamin telah menggunakan simbol-simbol tersebut untuk membangkitkan semangat persatuan dalam rangka pembentukan *nation building* dari negara-bangsa Indonesia.

2.13. Menggagas Kebudayaan Nasional

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kebudayaan telah menjadi satu isu sentral dalam sejarah pemikiran Indonesia. Hal ini terutama bisa dilihat dari perdebatan atau lebih dikenal dengan polemik kebudayaan. Meski tidak terlibat secara langsung dalam polemik, seperti halnya Dr. Soetomo dan Sutan Takdir Alisjahbana yang telah dibahas di atas, pemikiran Yamin tentang kebudayaan telah memberi kontribusi berarti dalam perkembangan wacana untuk penguatan karakter bangsa.

Seperti halnya bahasa, pemikiran Yamin tentang kebudayaan bertolak dari atau sangat terkait dengan suatu pandangan yang disebutnya sebagai persatuan Indonesia. Seraya memberi apresiasi adanya usaha yang sangat besar dari kalangan masyarakat untuk mengembangkan kebudayaan—dia mencatat misalnya lembaga-lembaga kebudayaan seperti Taman Siswa di Yogyakarta oleh Ki Hajar Dewantara dan di Surakarta oleh Purbatjaraka—Yamin menyatakan bawa pergerakan kebudayaan Indonesia adalah sebagai bagian dari kebangunan bangsa dan kesadaran rakyat. Untuk mengembangkan

kebudayan Indonesia yang telah berkembang sejak dulu, perlu dicari motor penggerak kebudayaan Indonesia yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan dalam arti luas, yaitu persatuan yang tercantum dalam batang tubuh rakyat, oleh kemauan untuk menguatkan persatuan menuju suatu *natie* yang berarti di atas dunia.⁹²

Menurut Yamin, persatuan yang mendapat bagian dalam pergerakan kebudayaan Indonesia adalah persatuan yang bulat dan utuh; persatuan yang menjadi tangga kelahiran persatuan semangat menuju bangsa yang satu dan terus kepada *natie* yang hidup dalam persatuan. Kebudayaan sangat luas, tidak hanya terbatas pada bagian-bagian kecil seperti seni, tari, dan lain. Untuk itu, dibutuhkan waktu lama untuk mendorong tumbuhnya kebudayaan persatuan. Meski demikian, Yamin sangat menekankan Bangsa Indonesia harus segera mengembangkan kebudayaan yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Untuk itu Yamin mengatakan:

...waktoe dan semangat memang sedang baik oentoek mendjiwakan pergerakan keboedajaan. Persediaan bangsa Indonesia memang soedah loemajan. Soedah ada pergoeroean kebangsaan soedah ada bahasa persatoean, soedah ada kaoem terpelajar. Rakjat soedah menghargakan apa goenanja keboedajaan, kaoem agama dan golongan nasionalis menolong dan toeroet beroesaha, sehingga bolehlah dikatakan tanah soedah soeboer oentoek menanti bibit jang baik. Bibit jang sedemikian soedah toemboeh dengan soeboernja tanah India, Tiongkok, Djepang, Toerki, Mesir dan Filipina. Mengapakah Indonesia akan ketinggalan dalam Kebangoenan Asia?...Pengaroeih keboedajaan menjala tidak sadja dahoeloe, sekarang atau nanti, melainkan sampai kemana-mana. Tidak ada batasnja mempengaruhi doenia batin dan lahir, baik jang kelihatan atau jang gaib. Pergerakan keboedajaan ialah kelahiran perasaan bangsa Indonesia Raja. Keboedajaan Indonesia Raja dalam zaman kebangoenan.⁹³

Dengan demikian, selain membangkitkan dan menumbuhkan semangat untuk mengembangkan kebudayaan, Yamin pada saat yang sama menekankan bahwa pengembangan kebudayaan harus diarahkan untuk mewujudkan persatuan Indonesia, dan pada akhirnya untuk mewujudkan suatu bangsa yang besar yang dapat bersaing dengan negara-negara lain di Asia.

Setelah Indonesia merdeka, peletakan dasar terhadap perkembangan kebudayaan menjadi hal yang sangat penting. Para *founding fathers* Indonesia telah meletakkan dasar pengembangan kebudayaan dalam satu pasal UUD 1945, yaitu suatu pasal yang menetapkan bahwa pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Dalam penjelasan diuraikan juga bahwa kebudayaan bangsa adalah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budi rakyat Indonesia seluruhnya, termasuk kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Untuk itu, usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

Beranjak dari rumusan Pasal UUD 1945, maka para pendiri bangsa berusaha untuk mengembangkan kebudayaan nasional yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia sendiri. Dalam menyerap kebudayaan pada prinsipnya tidak boleh membeda-bedakan bangsa yang satu dengan yang lain. Untuk itu perlu diperiksa bahan-bahan kebudayaan dari seluruh negeri yang berkebudayaan tinggi, serta membanding-bandingkannya, dengan tidak mengikat pada kebudayaan bangsa tertentu.

Berdasarkan hal itu, maka persetujuan kebudayaan antara Belanda dan Indonesia di KMB—di mana Yamin terlibat dalam perundingan tersebut—memberikan kewajiban bagi pengembangan kebudayaan Indonesia harus sesuai dengan kebudayaan Belanda sangat bertentangan dengan asas kebebasan dan kesukarelaan dalam pengembangan kebudayaan sebagai bangsa yang merdeka. Untuk itu, tanggapan Yamin terhadap isi persetujuan KMB di bidang

kebudayaan ini, menganjurkan agar Uni Indonesia Belanda harus dibubarkan karena akan mengikat dalam perkembangan kebudayaan Indonesia. Dalam perjanjian kebudayaan Indonesia Belanda ini Yamin menekankan bahwa dasar persetujuan kebudayaan adalah kerjasama yang saling menguntungkan dan kebebasan sempurna, sehingga masalah kebudayaan tidak perlu diatur dalam ikatan Uni Indonesia Belanda.

Untuk itu, Yamin menyarankan agar segala kepentingan kebudayaan seperti kebutuhan guru-besar, buku bacaan, buku-buku pelajaran dan penuntutan benda kebudayaan akan lebih lancar apabila diurus sendiri oleh bangsa Indonesia dan berjalan di luar ikatan uni Indonesia Belanda. Untuk masalah-masalah itu cukup diatur secara insidental dan sesuai kebutuhan saja.

Sebagai tindak lanjut dari peletakan dasar-dasar pengembangan kebudayaan tersebut, maka dilaksanakan sejumlah kongres kebudayaan di beberapa tempat di Indonesia, yakni Kongres Kebudayaan tahun 1948 di Magelang, Konferensi Kebudayaan tahun 1950 di Jakarta, Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951 dan kongres Kebudayaan di Solo tahun 1954. Kongres pertama di Magelang tahun 1948, berhasil meletakkan dasar-dasar kebudayaan nasional. Kongres kedua tahun 1951 mempersoalkan sekitar kesusasteraan, hak cipta dan film, kritik seni, organisasi kebudayaan, dan kongres ketiga tahun 1954 adalah menepohong masalah-masalah pendidikan kebudayaan bagi pelajar, masyarakat kota, buruh, dan tani.⁹⁴

Lepas dari berbagai pendapat tentang kebudayaan nasional, beberapa pemikiran yang muncul menunjukkan bahwa pada masa awal proklamasi, pemikiran tentang kebudayaan nasional pada intinya adalah pengembangan kebudayaan yang mencerminkan karakteristik budaya Indonesia. Namun, terhadap kehidupan kebudayaan yang beraneka macam ini harus diberikan keleluasaan untuk hidup secara bebas dan terdesentralisasi, sehingga negara tidak berhak membunuh pertumbuhan kebudayaan daerah. Dalam kaitan ini, Yamin dalam Kongres Kebudayaan II menegaskan bahwa— dengan memperhatikan syarat-syarat peradaban nasional serta

memperhitungkan pengaruh internasional dan taraf kemajuan—pemeliharaan kebudayaan dalam Negara Republik Indonesia sebaiknya diselenggarakan atas tiga bentukan organisasi, yaitu pemerintah, partikuler dengan bantuan negara atau organisasi campuran antara masyarakat dan negeri yang seluruhnya bekerja dengan mengadakan koordinasi sebaik-baiknya.⁹⁵

Organisasi-organisasi Lembaga Kebudayaan atas inisiatif rakyat atau masyarakat hendaknya ditingkatkan mutunya dan dikecilkan jumlahnya. Organisasi kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah harus dipencarkan ke seluruh Indonesia, terutama pada pusat-pusat propinsi atau kesatuan otonomi dengan menjalankan koordinasi sebaik-baiknya dan berdaya memilih nilai-nilai Indonesia pada kebudayaan lokal serta mempertinggi tenaga kreatif pada segala lapangan kesenian, terutama pada pribadi yang nyata mempunyai bakat dengan bantuan masyarakat atau pernerintah. Pemeliharaan kebudayaan di daerah dipertanggung-jawabkan kepada dewan-dewan perwakilan lokal. Pengiriman tenaga Indonesia ke luar negeri diperbesar, dan memperbanyak kunjungan ilmuwan ke Indonesia antara lain ahli filsafat, sejarah, seniman yang terkenal di dunia.⁹⁶

Untuk kelangsungan hidup organisasi kebudayaan, maka pembinaannya harus dilaksanakan oleh Dewan Kebudayaan Indonesia, yang dilengkapi dengan tenaga ahli yang mempunyai otoritas untuk mengembangkan kebudayaan. Dewan Kebudayaan Indonesia harus mempunyai dasar nasional luas dan mempunyai pengertian dan kesediaan menerima pengaruh internasional dan keagamaan dengan memperkaya watak Indonesia dengan tujuan supaya kerohanian bangsa bertambah tinggi dan agar terbentuk perimbangan yang harmonis antara kemajuan kerohanian dan kejasmanian pada perseorangan dan dalam masyarakat melalui taraf-taraf kemajuan peradaban Indonesia di hari depan untuk kebesaran dan kemegahan nusa dan bangsa.⁹⁷

Demikianlah, pada Kongres Kebudayaan ke-3, yang diselenggarakan di Surakarta pada 18-23 September 1954, pelaksana kongres tidak lagi pemerintah langsung, tapi sebuah lembaga yang

disebut Badan Musyawarat Kebudayaan Nasional. Lembaga ini merupakan realisasi dari gagasan yang muncul pada Kongres Kebudayaan ke-2, di mana Yamin waktu itu menekankan perlunya sebuah lembaga untuk mewadahi berbagai aktifitas kebudayaan. Dalam Kongres Kebudayaan ke-3 ini, Yamin memberi penekanan bahwa setiap warga negara harus menjadi tenaga kebudayaan, dengan tujuan agar dapat terwujud suatu bangsa yang memiliki pikiran budaya dengan cita-cita kebangsaan; yaitu “kebesaran bangsa dan negara di Nusantara menuju kemampuan bangsa Indonesia untuk mendukung kejayaan negara, yang berwujud negara kesatuan budaya, kesatupaduan semangat budi dan daya, tidak mengenal kepentingan golongan atau daerah akan tetapi mengarahkan segenap usahanya kepada kebesaran nusantara sebagai keseluruhan”.⁹⁸

Pemikiran Yamin ini sangat dipengaruhi oleh kondisi pada waktu itu ketika ide persatuan sangat dominan. Hal ini tidak terlepas dari pemikiran Yamin untuk menyatukan Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia. Selain itu, hal tersebut juga tidak terlepas dari kondisi politik Indonesia menjelang terbentuknya Demokrasi Terpimpin yang menempatkan Sukarno sebagai simbol persatuan dan kesatuan. Yamin menyarankan agar kebudayaan nasional didasarkan pada Pancasila, demi mengembangkan kebudayaan nasional seluruh rakyat Indonesia harus bersatu padu.

Dasar bagi kesatupaduan adalah perwujudan bangsa dan negara budaya sudah ada dan mulai tertanam dalam sanubari setiap warga negara. Sendi daripada ketatanegaraan itu adalah Pancasila. Maka sesungguhnya Pancasila itu adalah suatu pikiran-budaya dan pendirian hidup nasional yang sesuai dengan sifat-sifat kebangsaan, yang dapat menjadi pedoman, baik bagi mereka yang berpendirian teguh atas keagamaan, maupun bagi golongan-golongan yang njata-njata tidak berpegangan teguh pada keagamaan...⁹⁹

Dengan dasar itu, Yamin berkesimpulan bahwa Pancasila adalah suatu pikiran budaya dan pendirian hidup nasional yang sesuai dengan sifat-sifat kebangsaan, yang dapat menjadi pedoman bagi semua golongan masyarakat, untuk itu perlu disiapkan generasi baru melalui pendidikan nasional dengan didasarkan pada kebudayaan nasional yang tinggi.

Dalam rangka mewujudkan persatuan Indonesia melalui bidang kebudayaan, Muhammad Yamin telah merintisnya sejak Indonesia belum merdeka. Yamin selalu konsisten dalam mewujudkan persatuan kebudayaan untuk menuju kebudayaan nasional Indonesia yang tangguh dengan mendasarkan pada budaya-budaya local yang ada. Muhammad Yamin juga tidak anti terhadap budaya Barat, tetapi budaya dari luar seharusnya dijadikan untuk memperkaya budaya nasional dengan dasar budaya luar tersebut tidak bertentangan dengan budaya asli bangsa Indonesia.

Untuk mewujudkan persatuan Indonesia, Yamin tidak hanya melihat kebudayaan yang berupa materi semata, tetapi dalam rangka pembentukan *nation building*, Yamin juga menyentuh kepada hal-hal yang dapat membentuk identitas diri suatu bangsa melalui sejarah. Dia menggunakan sejarah sebagai alat untuk mendidik bangsa dalam rangka membangkitkan semangat bangsa Indonesia untuk mewujudkan persatuan Indonesia.

2.14. Sejarah sebagai Ideologi Persatuan

Dalam seminar sejarah pertama tahun 1957 di Yogyakarta, Yamin menulis bahwa “sejarah Indonesia baru menjadi bersih murni sebagai sejarah nasional, apabila penulis sejarah nasional Indonesia sesudah Proklamasi mencukupi syarat susila yang mutlak, yaitu ternyata tegas-teguh kepada adanya kemerdekaan nasional bagi bangsa Indonesia”.¹⁰⁰ Bagi Yamin seperti dicatat Taufik Abdullah, sejarah bukan hanya rekonstruksi peristiwa di masa lampau, tapi sekaligus sebagai landasan legitimasi untuk langkah kini demi masa depan. “Sejarah-sebagai-sejarah yang hanya berkisah tentang masa

lalu tanah air tanpa perasaan patriotisme dan nasionalisme tidak ada artinya".¹⁰¹

Karena itu, bagi Yamin, Bangsa Indonesia mempunyai sejarah nasional, selama langkah-langkah sejarah itu berpusat kepada penumpukan tenaga untuk mencapai, menyusun atau memelihara kemerdekaan. Maka, pusat dan motor sejarah nasional Indonesia ialah pembentukan bangsa atau *nation building*. Filsafah sejarah nasional bertugas mencari pembentukan sejarah, pengertian sejarah dan persatuan dalam makna perhubungan umum dari kejadian-kejadian yang telah berlaku dalam masyarakat. Pembentukan sejarah nasional Indonesia memberi jawaban kepada pertanyaan, bagaimana sejarah nasional Indonesia harus dibagi dalam beberapa babak dengan memberi dasar nasional kepada pembabakan yang dibutuhkan. Atas dasar itu, Yamin membuat periodisasi atau pembabakan sejarah Indonesia ke dalam lima babakan sebagai berikut:

1. Babak pertama adalah pra-Sejarah Indonesia; yakni sejak berdirinya manusia Indonesia sampai kepada permulaan tarikh Masehi, pada ketika masyarakat manusia Indonesia sudah tersusun menurut rangka rohani dan jasmani.
2. Babak kedua, pangkal sejarah Indonesia dari permulaan tarikh masehi sampai kepada akhir abad ke-6, ketika bahan-bahan tertulis sudah mulai ditemui di tanah Indonesia atau berasal dari tanah asing, walaupun jumlahnya belum seberapa.
3. Babak ketiga bernama babakan kebangsaan, karena di atas dan di sebelah beberapa negara semua berkuasa hampir kurang lebih diseluruh Kepulauan Nusantara, yaitu kesatuan Sriwijaya dan Keperabuan Majapahit, sejak abad ke 7 sampai tahun 1525.
4. Babak keempat, bernama babak antarbangsa di Indonesia, karena sejak permulaan bangsa Indonesia bertemu dengan bangsa-bangsa Eropa di tanah airnya sendiri. Pertemuan pertama berlangsung pada tahun 1521 di

tanah Maluku Utara antara orang Indonesia dengan bangsa Spanyol dan Portugis. Babak keempat berakhir ketika babak kelima bermula pada permulaan abad ke-20.

5. Babak kelima ialah abad proklamasi, yang berisi semenjak permulaan abad ke-20, gelora perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia yang memuncak pada 17 Agustus 1945 dengan berdirinya negara ketiga Republik Indonesia.

Dengan demikian, dari pembabakan di atas, kemerdekaan dan persatuan Indonesia bukan produk kolonial, dan bukan pula hasil bentukan dari proses sejarah belakangan pada awal abad ke-20. Kemerdekaan dan persatuan Indonesia adalah puncak dari perjalanan sejarah Indonesia, yang akar-akar persatuan dan kemerdekaan sudah ada jauh sebelum Indonesia memproklamkan diri sebagai negara-bangsa yang merdeka. Dalam konteks ini, Yamin memberi perhatian besar pada dua kerajaan besar dalam sejarah Indonesia, yang telah memberi inspirasi bagi persatuan dan kemerdekaan Indonesia, yakni kerajaan Majapahit dengan Patih Gajah Mada dan kerajaan Sriwijaya.

Bagi Yamin, Patih Gajah Mada adalah sumber inspirasi bagi gagasannya tentang persatuan nasional, yang menjadi titik tolak pemikirannya baik tentang budaya dan sosial-politik. Yamin bahkan menulis khusus tentang tokoh yang dikaguminya ini, *Gajah Mada*, di mana Yamin pada salah satu bagiannya berkata:

Gajah Mada selalu tertarik oleh tenaga mau mempersatukan Nusantara. Dia tak dapat berfikir diluar persatuan. Kesetiaannya kepada persatuan negara atjap kali menyalahkan dengan segera segala kelakuan jang menurut lahirnya melanggar kesetiaan itu. Dia dengan segera bertindak keras, dan dalam tindakan itu dia kadang-kadang meninggalkan garis kebidjaksanaan dengan melakukan kekerasan. Gajah Mada lupa, bahwa rasa persatuan dan rasa kesetiaan itu pada orang lain tidaklah setinggi rasa dalam dadanya sendiri. Selain dari pada itu makan-minumnya dan tidur-bangunnya selalu tertuju kepada politik persatuan. Tidak ada waktunya jang

terluang, selain dari pada melajani siasat politik jang memang djelas dan tinggi.¹⁰²

Dalam konteks ini, Yamin memaknai pemikiran dan praktik politik Gajah Mada sebagai politik kebangsaan Indonesia; suatu profil yang hendak melayani suatu negara merdeka yang meliputi segala tumpah darah nusantara. Politik itu sebagian besar berhasil dan sampai kepada puncak politik nasional. Karena itu, Yamin membandingkan Gajah Mada dengan Otto von Bismark dari Jerman. Gajah Mada menjalankan politik lautan dan kepulauan nusantara untuk dihubungkan dengan benua Asia. Geopolitik Gajah Mada meliputi pulau dan benua, lautan dan daratan, sedangkan Bismark tertuju kepada tanah Eropa yang hanya meliputi satu daerah Jerman. Gajah Mada juga dianggap setingkat dengan Machiavelli; keduanya setia kepada negara, dan semua yang dilakukan untuk kepentingan negara itu adalah selalu baik. Kesetiaan dan dedikasi pada negara menjadi ukuran untuk menentukan nilai dan makna suatu tindakan.¹⁰³ Dengan ilustrasi ini, Yamin mengdepankan suatu pandangan bahwa Gajah Mada telah tampil sebagai tokoh yang patut untuk dicontoh, terutama dalam tindakan rnempersatukan nusantara.

Hasrat untuk mengembalikan kejayaan Majapahit ini telah mendorong Yamin melakukan penelitian tentang sejarah tata negara Majapahit, dan akhirnya melahirkan satu karya monumental yang paling lengkap dalam sejarah Indonesia tentang Majapahit. Dalam penelitian ini, Yamin mendasarkan pada sumber-sumber yang dikumpulkan oleh N.J. Kroom, *Hindoe-Javaansdie Geschiedenis* dan buku R.C. Majumdar *The Vedic Age*. Selain itu, Yamin juga menggunakan naskah-naskah yang terbit masa Majapahit, seperti *Negarakertagama* dan *Pararaton*. Selain itu, penelitian Yamin tentang Majapahit ini juga didasarkan bacaan kritis atas karya-karya sebelumnya, yang dinilainya gagal karena kekurangtahuan peneliti tentang peradaban Indonesia.¹⁰⁴

Dalam penulisannya ini, Yamin membagi bukunya menjadi 7 jilid. Jilid I berisi tentang Sejarah Majapahit, jilid II berisi pasang surut

Majapahit dari 1309 sampai tenggelamnya Majapahit, jilid III berisi tentang Tinjauan hukum NegaraMajapahit, jilid IV tentang perumusan negara Majapahit yang berisi sistem pemerintahan dan kehidupan penduduknya, jilid V berisi tentang Susunan Putjuk pemerintahan atau birokrasi pemerintahan, jilid VI berisi pelaksanaan pemerintahan daerah dan daerah-daerah di sekitar Majapahit, dan jilid terakhir, ke-VII, berisi peta dan gambar yang mendukung data-data sebelumnya.¹⁰⁵ Sebagai sebuah karya sejarah, tulisan Yamin tentang Majapahit ini bisa dikatakan luar biasa. Karya besar itu diselesaikannya sendiri, demi untuk melaksanakan cita-citanya memahami kembali tentang Majapahit.

Tidak hanya Majapahit, Yamin juga memberi perhatian besar terhadap kerajaan Sriwijaya. Setelah mengikuti seminar sejarah di Yogyakarta, Yamin juga terdorong untuk mengadakan penelitian tentang Sriwijaya. Yamin merasa terpanggil untuk mengungkap kembali sejarah Sriwijaya karena penelitian sebelumnya tidak mempergunakan ilmu pengetahuan geografi, ekonomi, hukum adat, dan tidak bersandar pada tinjauan sejarah nasional yang *Indonesia-centric*, di samping terlampaui banyak berteori tanpa melihat bahan yang baru. Dilihat dari pendekatan sejarah, Yamin sebenarnya ingin menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif, yaitu dengan menggunakan ilmu bantu sejarah, suatu hal baru dalam sejarah pada waktu itu. Dalam penulisan tentang Sriwijaya ini, Yamin sampai pada kesimpulan bahwa Sriwijaya—seperti halnya Majapahit—adalah negara yang telah mendasari munculnya negara Indonesia modern. Maka, penulisan kembali sejarah Sriwijaya akan memberi pedoman yang lebih sempurna bagi usaha penulisan sejarah nasional Indonesia. Dalam hal ini Yamin menulis:

Dengan demikian, dapatlah kini buku sejarah Indonesia yang menuliskan zaman Sriwijaya dan zaman Majapahit sebagai dua negara Indonesia jang pertama dan kedua di mandala Asia Tenggara, yang mengisi ruangan waktu sejak abad IV sampai 1525, dijelaskan pula disebelahnja sedjarah perkembangan negara-negara Indonesia jang berkuasa di

pulau-pulau kita nusa demi nusa, seperti Melayu, Mataram Medang, Airlangga, Padjajaran dan lain-lainnja, sampai ke Republik Indonesia, negara Indonesia jang ketiga dalam abad proklamasi.¹⁰⁶

Pernyataan Yamin tentang Sriwijaya dan Majapahit sebagai negara Indonesia tentu harus diletakkan pada konteks waktu itu, ketika adanya keinginan kembali ke zaman keemasan pada masa lalu menjadi simbol untuk membangkitkan kembali semangat rakyat untuk melawan kolonialisme. Jadi, pada masa itu, simbol-simbol itu memang diperlukan oleh bangsa Indonesia.

Selain karya-karya di atas, Muhammad Yamin juga mengadakan penelitian tentang bendera merah putih. Yamin telah menerbitkan bukunya dengan judul *6000 Tahun Sang Merah Putih* dengan mendasarkan pada penelitiannya lebih lanjut dari kajian sebelumnya oleh Panitia Sang Merah Putih yang diketuai Ki Hajar Dewantara dan telah menyelesaikannya pekerjaannya pada 15 Nopember 1944. Penyelidikan panitia itu ditinjau kembali dan dilanjutkan dengan memakai bahan baru. Tujuan Yamin menerbitkan buku ini adalah untuk memberi penjelasan—yang bersandar kepada kajian komprehensif—agar warga negara Republik memelihara kemerdekaan Indonesia dan kedaulatan rakyat Indonesia. Kecintaan kepada tanah air dan bangsa akan bertambah jika rasa cinta tersebut didasarkan pada ilmu pengetahuan. Tujuan penelitian ini ialah untuk memelihara ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia.¹⁰⁷ Dalam penelitiannya ini, Yamin berkesimpulan bahwa sang merah putih telah digunakan oleh bangsa Indonesia sejak enam ribu tahun lalu, dan warna merah putih telah digunakan sebagai warna penghormatan oleh bangsa Indonesia. Untuk ini Yamin mengatakan sebagai berikut:

Dengan ringkas dapatlah kesimpulan jang masuk akal dan dapat dipertanggung djawabkan, serta sedjajar pula dengan hasil penjelidikan sedjarah praehistoria, bahwa umur kehormatan jang sama di kepulauan Austronesia itu tak kurang daripada 4000 tahun. Tegalah pendapat kita diatas,

bahwa penghormatan Merah Putih itu dua tingkatnya: berupa aditiatjandera berusia 6000 tahun, sedangkan berupa warna zat hidup berusia 4000 tahun. Dan peristiwa ini memberi kenjataan yang lebih tegas lagi, karena kira-kira pada ketika 4000 tahun dahulu itulah manusia Indonesia pertama kalinya berkumpul dalam bentukan bangsa turunan, dan pada waktu itu pulalah bangsa Indonesia memilih dan membatasi sebagaimana permukaan bumi Austronesia menjadi tumpah darah Indonesia menurut hak Ilahi dan sebagai hak mutlak.¹⁰⁸

Dengan pendapat ini, Yamin telah menggunakan sejarah sebagai alat untuk memperkuat ideologinya, khususnya menggunakan mitos tentang asal mula warna merah putih. Hal ini yang banyak ditentang oleh sejarawan akademis yang tidak cocok untuk menggunakan mitos-mitos dalam penulisan sejarah. Dugaan Yamin mendasarkan pada angka 6000 tahun yang disandarkan pada perpindahan orang purba Indonesia dari Asia Tenggara melalui Semenanjung Sumatera dan Filipina Sulawesi. Menurut Yamin, orang-orang purba tersebut menghormati warna merah matahari dan putih rembulan. Dari dugaan ini Yamin berkesimpulan bahwa penghormatan *Aditia-tjandera* (matahari dan rembulan) di kepulauan Austronesia dan di nusa Indonesia sudah ada sejak dini. Jadi merah putih telah digunakan sejak dahulu, sehingga penggunaan bendera merah putih sebagai bendera nasional sangatlah menjunjung tinggi kebudayaan nenek moyang dan bersandar pada budaya asli Indonesia.

Dengan karya-karya ini, sebenarnya Yamin ingin menampilkan suatu pesan kepada pembacanya bahwa persatuan Indonesia sudah ada sejak dahulu kala. Sehingga, pada masa sekarang ini persatuan Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Untuk mewujudkan cita-cita ini, Yamin menggunakan simbol dan mitos yang dapat membangkitkan emosi dan ingatan kolektif bangsa.

2.15. Menggagas Filsafat Sejarah Nasional

Bersamaan dengan pemikirannya tentang sejarah, sebagaimana telah dijelaskan di atas, Yamin pada saat beramaan juga mengetengahkan gagasan tentang filsafat sejarah nasional. Mengacu pada pemikiran Ibnu Khaldun tentang sejarah, Yamin berpandangan bahwa sejarah tidak semata-mata keterangan tentang peristiwa-peristiwa politik, negara-negara dan kejadian-kejadian masa lampau. Dalam sejarah terkandung usaha mencari kebenaran dengan membuat tafsiran secara sintesis kejadian-kejadian dalam perjalanan sejarah, termasuk dalam konteks ini perjalanan sejarah Indonesia dalam ruangan hidup rohani dan jasmani bangsa Indonesia.¹⁰⁹ Perlu ditegaskan bahwa menurut Ibnu Khaldun, dalam hakikat sejarah terkandung pengertian observasi dan usaha mencari kebenaran, keterangan yang mendalam tentang sebab dan asal benda wujud, serta pengertian dan pengetahuan tentang substansi, esensi dan sebab-sebab terjadinya peristiwa. Dengan demikian sejarah benar-benar terhunjam berakar dalam filsafat dan patut dianggap sebagai salah satu cabang filsafat.¹¹⁰ Dasar inilah rupanya yang menjadikan dasar Yamin, bahwa sejarah Indonesia harus didasarkan pada filsafah Indonesia.

Dalam pemikiran Yamin, filsafat sejarah nasional dibangun berdasarkan empat pilar, dan karenanya disebut *Catursila Khalduniah*. Istilah Khalduniah sengaja digunakan untuk memuliakan seorang tokoh Muslim, Ibnu Khaldun, yang telah berjasa dalam perkembangan pemikiran filsafat dan penulisan sejarah. Berikut ini adalah empat sila sebagaimana diuraikan Yamin.¹¹¹

1. Sila pertama: kebenaran.

Tujuan akhir yang dijadikan tugas bagi tiap-tiap ilmu filsafat ialah mencari kebenaran yang sesungguhnya, dengan seganja disebutkan mencari kebenaran, dan tidak disebutkan mendapatkan kebenaran yang juga dapat dikatakan mempunyai atau memiliki kebenaran. Filsafat sejarah mempunyai dinamika yang aktif, sedangkan filosof sejarah adalah seorang musafir yang merantau mendekati tujuan menuju kebenaran yang belum jatuh ke dalam genggamannya, melainkan selalu kian waktu kian dekat

dirasakan oleh pemikir yang sedang menjalankan usaha dengan menggerakkan alat hikmahnya yang bernama pikiran. Namun demikian, kebenaran itu tidak dimiliki oleh ahli pemikir sejarah, tetapi dengan meninjau atau menafsirkan segala kejadian itu, dia telah dan selalu berkeyakinan secara subyektif, bahwa tafsirannya ialah kesungguhan dari kebenaran secara obyektif.

2. Sila kedua: Sejarah Indonesia.

Yang menjadi objek filsafat sejarah atau yang ditafsirkannya ialah sejarah Indonesia. Dalam hal ini maka sejarah ialah ilmu pengetahuan yang dipahamkan dan telah dirumuskan secara ilmiah dengan bernama demikian. Oleh karena objek itulah Filsafat menjadi Filsafat –Sejarah, sehingga kejadian-kejadian sebagai kelahiran masyarakat di zaman yang lampau membatasi Filsafat itu menjadi Filsafat khusus, sedangkan cara menafsirkan dan hubungan kejadian itu adalah dalam taraf yang umum dan *universeel*.

3. Sila ketiga adalah tafsiran sintesa.

Ilmu sejarah menyusun segala peristiwa di zaman yang lampau, dan filsafat sejarah memusatkan tinjauan dalam hubungan keseluruhan tafsiran yang meliputi segala tafsiran di atas dalam hubungan keseluruhan tafsiran yang meliputi segala tafsiran di atas di dalam suatu kumpulan tafsiran yang dinamai tafsiran sintesa. Tafsiran sintesa menjamin penulisan sejarah yang sempurna dan historiografi Indonesia yang baik dapat dipertanggungjawabkan bagi penulis buku sejarah yang berisi uraian panjang apalagi sebagai buku pelajaran di sekolah dan untuk dibaca oleh rakyat di luar dinding gedung perguruan. Sehingga filsafat Pancasila membangun negara Republik Indonesia dan filsafat sejarah membentuk kerangka dan menyusun isi sejarah Indonesia

4. Sila keempat, adalah nasionalisme Indonesia.

Obyek tafsirannya adalah sejarah nasional Indonesia, yang berbeda dan cara menulis sejarah Indonesia sebelum proklamasi, karena yang menjadi dasar penulisan sejarah Indonesia sesudah tahun 1945 ialah adanya kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemerdekaan itu menimbulkan kesempatan suci untuk mendapatkan

kebebasan berpikir yang menjadi syarat mutlak ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh hikmah manusia bebas. Selanjutnya untuk menafsirkan kejadian sejarah harus sesuai dengan jalan pikiran bangsa Indonesia yang telah bebas merdeka, dan tidak terikat oleh rasa rendah atau pandangan sempit di dalam ruangan pikiran yang terbatas. Artinya dalam menafsirkan kejadian sejarah harus terbebas dari pengaruh manapun dan tidak dilakukan sendiri oleh bangsa Indonesia yang telah merdeka.

Penulisan sejarah Indonesia menurut Yamin, harus sesuai dengan susila perjuangan kemerdekaan, memenuhi syarat susila pada karangan penulisan sejarah dan memenuhi syarat ilmu jiwa dan pendidikan bagi si pembaca dan si pendengar. Dengan begini rasa nasionalisme Indonesia merdeka yang menjadi kebanggaan bangsa tidak tersinggung. Sejarah Indonesia harus dijadikan sebagai sumber inspirasi dan ilmu pengetahuan untuk kehidupan bangsa yang ingin berohani besar dan luas. Yamin memberikan penekanan lagi bahwa sejarah nasional:

...berhubungan dengan kelahiran dari pada perjuangan kemerdekaan, sehingga penulis buku pelajaran sejarah nasional Indonesia yang pernah dalam hidupnya hidayatnya menyeberang ke pihak Belanda, atau bimbang kepada tercapainya kemerdekaan hendaklah menghindarkan diri daripada pekerjaan nasional itu. Menulis sejarah Indonesia harus memenuhi syarat percaya kepada perjuangan kemerdekaan. Karena jika penulis sejarah Indonesia pernah menyeberang ke pihak Belanda maka akan meruntuhkan nilai-nilai sejarah nasional Indonesia. Konsepsi sejarah nasional akan bernilai dan bersifat rohani murni, apabila ditempatkan dalam kalbu dan telapak tangan penulis buku pelajaran sejarah nasional Indonesia yang bersikap rohani jernih kepada perputaran roda sejarah nasional di Asia Tenggara.¹¹²

Pembagian Yamin ke dalam *catur sila* ini mungkin didasari pada pembagian Ibn Khaldun yang membagi bukunya dalam sebuah

pengantar (*muqadimah*), dalam pengantar ini diuraikan manfaat ilmu sejarah, mengemukakan pengertian (*tahqiq*), segala bentuk metode historiografi dan secara sepintas menyebutkan kesalahan para sejarawan. Selanjutnya buku pertama menguraikan peradaban (*'umran*) dan ciri-cirinya yang hakiki. Yakni kekuasaan, pemerintahan, mata pencaharian (*kasab*), penghidupan (*ma'asy*), keahlian-keahlian, dan ilmu pengetahuan dengan segala sebab dan alasannya. *Buku kedua* menguraikan sejarah, generasi dan negara orang-orang Arab, sejak terciptanya alam hingga kini. Buku ini juga mengandung ulasan sekilas tentang bangsa-bangsa terkenal dan negara-negara yang sezaman dengan mereka, seperti bangsa Nabti, Siryani, Persia, Israel, Qibti, Yunani, Runiawi, Turki, dan Eropa. *Buku ketiga* menguraikan sejarah bangsa Barbar dan Zanatah yang merupakan bagian dari mereka, khususnya kerajaan dan negara-negara Maghribi. Dengan demikian buku ini berisi sejarah dunia yang lengkap. Ternyata buku ini menjadi bejana bagi filsafat dan wadah bagi sejarah.¹¹³ Rupanya Yamin, membagi pemikiran tentang sejarah Indonesia kedalam empat (*catur*) pedoman (*silo*) sedangkan Ibn Khaldun membagi buku menjadi tiga buku ditambah *muqodimmahnya*.

Pendapat Yamin tentang filsafat sejarah ini, yang diketengahkan dalam Kongres Sejarah, bertentangan dengan pandangan Soedjatmoko, yang menjadi pemrasaran lain dalam seminar sejarah tersebut. Menurut Soedjatmoko apa yang dinamakan filsafah sejarah nasional itu tidak ada. Dengan mengajukan filsafah sejarah nasional, dia berargumen, sebenarnya kita telah meninggalkan bidang ilmu sejarah sebagai ilmu dan telah menginjak suatu lapangan lain yaitu lapangan ideologi, lapangan penggunaan sejarah untuk keperluan politik yang akhirnya bisa menjurus ke arah demagogie.¹¹⁴

Ilmu sejarah sebagai salah satu disiplin ilmu pengetahuan bukannya abdi dan tidak dapat menjadi abadinya sesuatu ideologi, selama ia setia pada sifatnya sebagai ilmu pengetahuan dan meskipun mau tak mau ideologi politik si ahli sejarah dalam batas-batas tertentu, turut mempengaruhi cara dan hasil penyelidikannya itu. Kita sendiri telah melihat bahwa ilmu sejarah, sebagai hasil daripada penyelidikan yang terus menerus, senantiasa meruntuhkan mitos-mitos itu sering didukung dan dilindungi oleh kekuasaan politik

yang kebetulan memerintah. Oleh sebab itu tak perlulah penyelidikan serta pengajaran sejarah diikat pada ketentuan-ketentuan yang menekankan sifat nasional. Penyelidikan ilmiah harus bebas, apabila hendak memberi hasil yang berarti, penulisan sejarah harus mempunyai kemerdekaan untuk merumuskan dan menyiarkan pendapat serta kesimpulan yang mungkin berlainan atau bertentangan dengan ideologi politik yang berkuasa atau dengan mitos dan pendapat yang umum diterima pada suatu waktu. Hanya dengan terjaminnya kebebasan itu, ilmu sejarah dapat berfaedah untuk bangsa ini. Hanya dengan jalan itu sejarah dapat terus menerus memperkaya kebudayaan, meluaskan kesadaran tentang diri kita sendiri dan terus menerus membawa bahan-bahan baru yang dapat menambah pengertian kita mengenai waktu sekarang kita, sehingga akan bertambah pula kesanggupan kita untuk menghadapi hari depan kita.

Penyelidikan ilmu sejarah akan memberi pelajaran kepada kita, bahwa yang mengikat kita sebagai bangsa memang suatu kelampauan bersama, betapapun beragam-ragamnya kelampauan. Masa lampau akan menyadarkan kita, bahwa kita terikat menjadi satu bangsa oleh persoalan-persoalan sama yang dihadapi pada waktu sekarang, persoalan-persoalan yang terjadi sebagai akibat kewajiban kita untuk menyusun suatu masyarakat yang baru sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh abad ke-20. Akan tetapi disamping itu, ia juga akan menyadarkan kita, bahwa yang menggabungkan kita lebih dari pada kelampauan serta persoalan hari sekarang yang sama, ialah kemauan kita akan keakuan bersama.¹¹⁵

Dengan melihat konsepsi pemikiran antara Yamin dan Soedjatmoko ini, terang bahwa Soedjatmoko ingin menempatkan sejarah sebagai ilmu pengetahuan yang terbebas dari muatan politik apapun. Sementara itu, Yamin lebih menekankan sejarah sebagai falsafah atau pegangan dalam penulisan sejarah Indonesia. Sehingga, aspek ideologi menjadi penting ketika sejarah digunakan sebagai tempat untuk menentukan suatu persamaan persepsi politik bangsa, yaitu penghapusan terhadap bentuk penjajahan di bumi Indonesia. Muatan politik dan ideologis dari pemikiran Yamin ini dapat dilihat dari karya-karyanya, yang banyak mengandung mitos dan kerap kali menggunakan bahasa-bahasa yang bombastis untuk menggugah

kesadaran dan oada akhirnya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme para pembacanya.

2.16. Pengajaran dan Pendidikan

Muhammad Yamin sangat peduli dengan pendidikan nasional. Dia menekankan bahwa di suatu negara Indonesia merdeka, undang-undang kewajiban belajar atau peraturan lain mutlak diperlukan. Untuk itu, Yamin menyampaikan usulan tentang pendidikan, di antaranya yang terpenting adalah tentang garis-garis besar pendidikan dan pengajaran. Menurutnya, pendidikan harus didasarkan pada pengajaran yang bersendikan agama dan kebudayaan bangsa serta menuju kearah keselamatan dan kebahagiaan Indonesia. Pendidikan perlu diarahkan untuk mendukung adanya kebudayaan bangsa yang timbul sebagai buah usaha budidaya rakyat seluruhnya, sehingga pendirian lembaga-lembaga pendidikan harus diperluas dengan melibatkan warga masyarakat untuk mendirikan sekolah-sekolah partikelir. Sementara untuk masyarakat yang tidak mampu, menurut Yamin, perlu diadakan pembebasan uang belajar.

Pemikiran kedua adalah tentang susunan sekolah. Menurutnya, susunan sekolah diatur dari tingkatan Sekolah Rakyat sampai tingkatan Sekolah Menengah Tinggi, dan diadakan sekolah pengetahuan umum dan sekolah kepandaian khusus. Untuk mewadahi siswa yang orangtuanya tidak mampu, maka di tiap Sekolah Rakyat diadakan kelas sambungan, yaitu kelas masyarakat untuk mengajarkan permulaan kepandaian khusus yang sesuai dengan alam dan masyarakat ditempat kedudukan sekolah masing-masing. Melihat perkembangan siswa yang ada maka di sekolah menengah dan tinggi, maka sekolah menengah dibagi menjadi bagian A (dari Alam) dan bagian B (dari Budaya), untuk menyesuaikan pengajaran dengan pembawaan anak-anak murid.

Selain itu, untuk mendapatkan tenaga-tenaga yang terampil perlu didirikan pula sekolah kepandaian antara lain sekolah pertanian, pertukangan, teknik, musik, kesehatan, perikanan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa untuk perluasan pendidikan maka perlu didirikan sekolah-sekolah untuk mendidik

guru-guru baik untuk guru biasa, pendidikan secara kilat, dan juga pendidikan tinggi atau universitas.¹¹⁶

Demikianlah, selama menjadi Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Yamin telah memberikan dasar-dasar pengembangan pendidikan yang sangat besar. Pada masanya UU No. 12 tahun 1954 yang menetapkan bahwa UU No. 4 tahun 1950 RI dahulu telah berlaku di seluruh Indonesia, hal ini untuk keseragaman di lapangan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan. Di samping itu, suatu rencana undang-undang pokok pendidikan yang baru sedang disusun untuk dapat mencukupi kebutuhan yang nyata dalam dunia pendidikan.¹¹⁷ Juga pada masa itu telah ditetapkan rencana 10 tahunan (1950-1960) dengan tujuan menyelesaikan pondasi bagi pembangunan yang dinamakan "Kewajiban Belajar".¹¹⁸

Untuk memenuhi tenaga guru sebanyak itu, maka dibuka program kursus pengantar kewajiban belajar (KPKB), yang sejak 1953 diubah menjadi Sekolah Guru B 4 tahun, yang jumlahnya meningkat dari 180 menjadi 500. Mulai 1956 sekolah guru ini diharapkan akan menghasilkan tamatan sebanyak 30.000 guru setiap tahun. Selain itu, juga dibuka kursus-kursus BI dan BII yang menyiapkan tenaga guru Sekolah Lanjutan Pertama dan Atas. Untuk mempertahankan mutu pendidikan di perguruan tinggi, para pengajar pada sekolah lanjutan bagian atas harus mendapat pendidikan yang bersifat universitas. Untuk itu, disiapkan pendirian Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) dan selama tahun 1954 telah dibangun 3 buah PTPG, yaitu di Malang, Bandung dan Batusangkar.¹¹⁹ Selanjutnya didirikan PTPG di setiap propinsi sebagai kunci mengembangkan sekolah lanjutan atas dan memperbaiki mutu mahasiswa yang akan memasuki Perguruan tinggi.¹²⁰

Pembangunan pendidikan tinggi juga mendapat perhatian khusus Muhammad Yamin. Pada tahun 1954 urusan perguruan tinggi telah dipegang oleh Jawatan Perguruan Tinggi. Pada waktu ini terdapat 2 Universitas negeri yaitu Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada. Selain itu juga terdapat lembaga-lembaga pendidikan jasmani, Guru Gambar, di Bandung, Kedokteran Gigi di Surabaya. Untuk memenuhi kekurangan tenaga dosen maka mendatangkan tenaga dosen dari luar negeri. Untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha-usaha pendidikan pada

perguruan tinggi, maka akan disusun Undang-undang Perguruan Tinggi yang dalam waktu singkat diajukan ke parlemen.¹²¹

Di bidang kebudayaan, usaha diarahkan pada pengembangan kesenian, bahasa Indonesia dan daerah, urusan purbakala, serta dokumentasi sejarah. Pada masanya dilakukan pembangunan kembali candi Siwa di kompleks Prambanan, candi Plaosan Lor dan juga di pemugaran di Gianyar Bali. Dalam bidang seni dilakukan pentas seni ke luar negeri antara lain Eropa dan Amerika. Selain itu juga dilakukan penempatan atase kebudayaan di negara lain dan juga pengiriman tenaga guru, mahasiswa dan dosen ke luar negeri.¹²²

Dalam bidang bahasa dan kebudayaan, Yamin juga menyarankan agar Bahasa Indonesia diajarkan di segala sekolah di seluruh Indonesia dan dipakai sebagai bahasa perantar, di Sekolah Rakyat dan Sekolah Tinggi, Bagi daerah yang mempunyai bahasa sendiri diwajibkan untuk mengajarkan bahasa persatuan mulai dari kelas 3 pada sekolah pertama, dengan jaminan akan cukup pandai dalam bahasa Indonesia bila mereka tamat belajar di sekolah-sekolah rakyat. Bahasa asing diajarkan sejak sekolah menengah.

2.17. Penutup

Lengkaplah sudah buah karya dan pemikiran Yamin sebagai anak bangsa, yang telah menikirkan sebuah kerangka besar yaitu persatuan Indonesia. Gagasan persatuan oleh Yamin dibangun melalui kebudayaan, yang meliputi sejarah, sastra dan pendidikan. Kerangka besar pemikiran persatuan dari Yamin ini sampai sekarang masih terus bergulir terutama di bidang pelajaran sejarah.

Demikianlah, dengan caranya dan di bidang yang digelutinya, Yamin telah memberi kontribusi sangat besar dalam penguatan karakter bangsa Indonesia. Gagasan Yamin telah menjadi sumber inspirasi generasi berikutnya untuk terlibat dalam perumusan pemikiran menyangkut isu-isu strategis bagi perkembangan Indonesia. Yamin meninggal pada 17 Oktober 1962. Di akhir hayatnya, dia berpesan untuk dimakamkan di kampung halamannya. Atas persetujuan Presiden Sukarno, Yamin dimakamkan di Pemakaman Puding Sawah Tapani, Talawi, pada 20 Oktober 1962 dengan upacara kenegaraan.

Catatan Akhir :

- ¹ Lihat misalnya Takashi Shiraishi. *An Age in Motion: Popular Radicalism in Java, 1912-1926*. London: Cornell University Press, 1990.
- ² Robert van Niel. *The Emergence of the Modern Indonesian Elite*. Leiden: Foris Publication, 1984. hal. 46-72.
- ³ Lihat M.C. Ricklefs. *A History of Modern Indonesia since c. 1300*, Basingstoke: Palgrave. 2001. hal. 199-200.
- ⁴ *Ibid.* hal. 201.
- ⁵ Heather Sutherland. *The Making of a Bureaucratic Elite: The Colonial Transformation of the Javanese Priyayi*. Singapore: Heinemann Educational Book. 1979. hal. 57.
- ⁶ Rahmat bin Adam. *The Vernacular Press and the Emergence of Modern Indonesian Consciousness (1855-1913)*. Ithaca: Southeast Asian Program Cornell University. 1995. hal. 98-107.
- ⁷ Lihat Taufik Abdullah, "Dari 'Hasrat Kemajuan' ke Pembentukan Bangsa", dalam Taufik Abdullah dan A.B. Lopian (ed.). *Indonesia dalam Arus Sejarah*, Jilid 5. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2012. hal. 65-72.
- ⁸ Achdiat K. Mihardja. *Polemik Kebudayaan*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1997.
- ⁹ Ignas Kleden, dkk. *Kebudayaan sebagai Perjuangan: Perkenalan dengan Pemikir S. Takdir Alisjahbana*. Jakarta: PT Dian Rakyat, 1998. hlm: 26-27.
- ¹⁰ Maman S Mahayana, "Perkembangan Teori dan Kritik Sastra Indonesia," *Jurnal Kritik*, No. 2, 2012. hlm: 93—121.
- ¹¹ Aji Rosidi. *Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya, 2013. hlm: 44.
- ¹² Maman S Mahayana, "Monumen Pujangga Baru," dalam *Sembilan Jawaban Sastra Indonesia*, Jakarta: Bening Publishing, 2005.
- ¹³ Sutan Takdir Alisjahbana, "Menuju Masyarakat dan Kebudayaan Baru Indonesia-Prae-Indonesia", dalam Achdiat K. Mihardja, *Polemik Kebudayaan*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1977. hlm: 14.
- ¹⁴ *Ibid.*, hlm: 15-16
- ¹⁵ *Ibid.*, hlm: 116.
- ¹⁶ *Ibid.*, hlm: 18-19.
- ¹⁷ Sanusi Pane, "Persatuan Indonesia", dalam Achdiat K. Mihardja, *Polemik Kebudayaan*, hlm: 22
- ¹⁸ *Ibid.*, hlm: 23
- ¹⁹ Poerbatjaraka, "Sambungan Zaman", dalam Achdiat K. Mihardja, *Polemik Kebudayaan*, hlm: 31-32.
- ²⁰ Sutan Takdir Alisjahbana, "Semboyan yang Tegas", dalam Achdiat K. Mihardja, *Polemik Kebudayaan*, hlm: 37.

- ²¹ *Ibid.*, hlm: 39.
- ²² *Ibid.*, hlm: 40
- ²³ Dr. Soetomo merupakan salah satu pendiri Budi Utomo pada tahun 1908. Ia merupakan ketua pertama dalam perhimpunan tersebut. Ia merupakan lulusan sekolah kedokteran Belanda di Jakarta, STOVIA. Selanjutnya Soetomo banyak dikenal melalui organisasi yang dipimpinnya, diantaranya adalah Indonesische Studie club dan PBI.
- ²⁴ Dr. Soetomo. "Kongres Pendidikan Nasional". dalam Achdiat K. Mihardja, *Polemik Kebudayaan*, hlm: 45-46.
- ²⁵ Sutan Takdir Alisjahbana, "Sekali lagi Semboyan yang Tegas", dalam Achdiat K. Mihardja, *Polemik Kebudayaan*, hlm: 54-55
- ²⁶ Tjindarbumi merupakan salah satu tokoh lulusan STOVIA. Ia banyak mencurahkan pemikirannya pada dunia jurnalistik. Ia juga sempat menjabat selama beberapa tahun sebagai pemimpin redaksi Suara Umum di Surabaya.
- ²⁷ Tjindarbumi, "Mencari Perbandingan (Verhouding)", dalam Achdiat K. Mihardja, *Polemik Kebudayaan*, hlm: 57.
- ²⁸ *Ibid.*, hlm: 56.
- ²⁹ *Ibid.*, hlm: 57-58.
- ³⁰ Sutan Takdir Alisjahbana, "Didikan Barat dan Didikan Pesantren Menuju Masyarakat yang Dinamis", dalam Achdiat K. Mihardja, *Polemik Kebudayaan*, hlm: 63-64.
- ³¹ *Ibid.*, hlm: 65.
- ³² Dr. Soetomo, "Perbedaan Pandangan Hidup (Levensvisie)", dalam Achdiat K. Mihardja, *Polemik Kebudayaan*, hlm: 72.
- ³³ Sutan Takdir Alisjahbana, "Kata Penutup Kepada Tuan Dr. Soetomo", dalam Achdiat K. Mihardja, *Polemik Kebudayaan*, hlm: 76.
- ³⁴ Adinegoro merupakan sarjana Jurnalistik lulusan Jerman. Ia menjabat sebagai pimpinan redaksi harian *Pewarta Deli*, Medan. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Jawatan Penerangan Sumatera. Dan pernah juga menjadi salah satu pimpinan redaksi mingguan *Mimbar Indonesia*.
- ³⁵ Lebih jauh lihat esai Adinegoro, "Kritik atas Kritik", dalam Achdiat K. Mihardja, *Polemik Kebudayaan*, hlm: 81-87.
- ³⁶ Sutan Takdir Alisjahbana, "Syntese Antara "Barat dan "Timur" Menjawab Tuan Adinegoro, Jiwa di Belakang Teknik Barat, Jiwa Indonesia dan Jiwa Jepang, Semboyan Lepas dari India", dalam Achdiat K. Mihardja, *Polemik Kebudayaan*, hlm: 91.
- ³⁷ Lebih lanjut lihat esai KH. Dewantara, "Pembaharuan Adab Opedragen Kepada Tuan-tuan STA., dr Soetomo dan Sanusi Pane", dalam Achdiat K. Mihardja, *Polemik Kebudayaan*, hlm: 115-118.
- ³⁸ Dr. M. Amir adalah salah seorang pelajar lulusan STOVIA. Pada tahun 1928 ia mendapat gelar doctor obat-obatan dari Eropa. Ia juga banyak dikenal sebagai

- psikiater. Selain itu ia juga aktif dalam dunia jurnalis. Ia banyak mencurahkan pikirannya pada dunia kesehatan, pendidikan, kebudayaan, politik, dan sosial.
- ³⁹ Sutan Takdir Alisjahbana, "Pekerjaan Pembangunan Bangsa sebagai Pekerjaan Pendidikan" dalam Achdiat K. Mihardja, *Polemik Kebudayaan*, hlm: 121-122.
- ⁴⁰ Sutan Takdir Alisjahbana, "Pekerjaan Pembangunan Bangsa sebagai Pekerjaan Pendidikan", dalam Achdiat K. Mihardja, *Polemik Kebudayaan*, hlm: 124-125.
- ⁴¹ Sutan Takdir Alisjahbana, "Pekerjaan Pembangunan Bangsa sebagai Pekerjaan Pendidikan", dalam Achdiat K. Mihardja, *Polemik Kebudayaan*, hlm: 130.
- ⁴² Imam Supardi, *Dr Soetomo Riwayat Hidup dan Perjuangannya*. Jakarta: Penerbit Djambatan, 1951. hlm: 1.
- ⁴³ William H. Fredrick dan Soeeri Soeroto, *Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi*. Jakarta: LP3ES, 2005. hlm: 152-153.
- ⁴⁴ Lihat kutipan otobiografi Soetomo "Kenang-kenangan Dr Soetomo" dalam William H. Fredrick dan Sueri Soeroto, *Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi*. Jakarta: LP3ES, 2005. hlm: 152-172.
- ⁴⁵ Marwati Djoned Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia V*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984. hlm: 177.
- ⁴⁶ *Ibid.*, hlm: 181.
- ⁴⁷ Mengenai pidato Soetomo dalam suatu rapat perumusan pendirian Budi Utomo lihat: William H. Fredrick dan Sueri Soeroto, *Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi*. Jakarta: LP3ES, 2005. hlm: 140.
- ⁴⁸ Imam Supardi, *op.cit.*, hlm: 56.
- ⁴⁹ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1996. hlm: 269.
- ⁵⁰ *Ibid.*, hlm: 269-270.
- ⁵¹ Imam Supardi, *op.cit.*, hlm: 40.
- ⁵² Sartono Kartodirjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme Jilid 2*. Jakarta: Gramedia, 1990. hlm: 166.
- ⁵³ Mengenai perdebatan sengit para pemikir kebudayaan lihat buku Achdiat K. Mihardja, *Polemik Kebudayaan*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1986.
- ⁵⁴ Taufik Abdullah "Dari Hasrat 'Kemajuan' ke pembentukan Bangsa", dalam Taufik Abdullah dan A.B. Lopian (ed.), *Indonensia dalam Arus Sejarah*, Jilid 5. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2012. hal. 89.
- ⁵⁵ Sutan Takdir Alisjahbana, "Menuju Masyarakat dan Kebudayaan Baru", dalam Achdiat K. Mihardja, *Polemik Kebudayaan*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1986. hlm 13-21.
- ⁵⁶ *Ibid.*, hlm: 16.
- ⁵⁷ Imam Supardi, *op.cit.*, hlm: 6.
- ⁵⁸ Dr Soetomo, "Pembedaan Pandangan Hidup (*Levensvisie*)", dalam Achdiat K. Mihardja, *Polemik Kebudayaan*. hlm: 71.

- ⁵⁹ Sutan Takdir Alisjahbana, "Semboyan yang Tegas Kritik terhadap Beberapa Prasarana Kongres Permusyawaratan Perguruan Indonesia", dalam Achdiat K. Mihardja, *Polemik Kebudayaan*, hlm: 37-42.
- ⁶⁰ Dr Soetomo, *op.cit.*, hlm: 67.
- ⁶¹ R. Soetomo, "National Onderwijs Congres Menyambut Pandangan Sutan Takdir Alisjahbana". Dalam Achdiat K. Mihardja, *Polemik Kebudayaan*, hlm: 44.
- ⁶² *Ibid.*, hlm: 44-45
- ⁶³ *Ibid.*, hlm: 43-47.
- ⁶⁴ *Ibid.*, hlm: 45-46
- ⁶⁵ Dr Soetomo, *op.cit.*, hlm: 50.
- ⁶⁶ R. Soetomo, *op.cit.*, hlm: 50.
- ⁶⁷ Sutan Takdir Alisjahbana, "Didikan Barat dan Didikan Pesantren Menuju Masyarakat yang Dinamis", dalam Achdiat K. Mihardja, *Polemik Kebudayaan*, hlm: 60-66.
- ⁶⁸ Dr. Soetomo, *op.cit.*, hlm: 68-69.
- ⁶⁹ Imam Supardi, *op.cit.*, hlm: 68.
- ⁷⁰ M.C Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: Serambi, 2010. hlm: 392.
- ⁷¹ R. Soetomo, *op.cit.*, hlm: 47.
- ⁷² Dr. Soetomo, *op.cit.*, hlm: 69
- ⁷³ Sutan Takdir Alisjahbana, "Kata Penutup Kepada Dr. Soetomo", dalam Achdiat K. Mihardja, *Polemik Kebudayaan*, hlm: 75-79.
- ⁷⁴ Untuk biografi Muhammad Yamin, lihat antara lain Welmar, *Mengenang Maha Putra Prof. Mr. Muhammad Yaimn Pahlawan Nasional RI*. Bukittinggi: Kristal Media, 1997; Tjiptoning, *Apa dan Siapa*, Djogjakarta: Kedaulatan Rakyat, 1951; RestuGunawan, *Muhammad Yamin dan Cita-Cita Persatuan*. Yogyakarta: Ombak, 2005. hlm: 7-15. Kisah hidup dalam artikel ini sepenuhnya didasarkan pada tiga karya tersebut, lebih khususnya karya Restu Gunawan.
- ⁷⁵ Taufik Abdullah, "Dari Hasrat 'Kemajuan' Ke Pembentukan Bangsa", dalam Taufik Abdullah dan A.B. Lopian (ed.), *Indonesia dalam Arus Sejarah*, vol. 5. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2012.
- ⁷⁶ Lihat RestuGunawan, *Muhammad Yamin*, hlm: 18; juga Mardanas Safwan, *Prof. Dr. BahderDjohan: Karya dan Pengabdiannya*. Jakarta: Proyek ISDN, 1985. hlm: 42.
- ⁷⁷ Lihat Tim Penulis, *Sejarah Pemikiran Indonesia Modern*. Jakarta: Kemendikbud, 2015), hal. 91- 92.
- ⁷⁸ *Ibid.*, hlm: 98-99.
- ⁷⁹ Muhammad Yamin, "Perdjoeangan Menoedjoe Parlemen", dalam *Madjalah Partai Persatoean Indonesia*, no. 1, Desember 1939; lihat juga Restu Gunawan, *op.cit.*, hlm: 38.

- ⁸⁰ Restu Gunawan, *op.cit.*, hal. 50; lihat juga Lembaga Soekarno-Hatta, *Sejarah Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila*, Jakarta: Inti Idayu Press, 1984. hlm: 96.
- ⁸¹ Restu Gunawan, *op.cit.*, hlm: 74-75.
- ⁸² Lihat Departemen Penerangan, *Susunan Kabinet Republik Indonesia, 1945-1970*. Djakarta: Pradnja Paramita, 1970. hlm: 14.
- ⁸³ Lihat Restu Gunawan, *op.cit.*, hlm: 88-89.
- ⁸⁴ Muhammad Yamin, Kemungkinan perkembangan Bahasa-bahasa dan Kesusasteraan Indonesia di masa Mendatang, ceramah pada Kongres Pemuda I, 2 Mei 1926, dalam Ottoman Mochtar, *dkk., op. cit.*, hlm: 58.
- ⁸⁵ *Ibid.*, hlm.: 57.
- ⁸⁶ RZ. Leirissa, *dkk., Sejarah Pemikiran tentang Sumpah Pemuda*. Jakarta: Depdikbud, 1989. hlm: 42.
- ⁸⁷ Keith Foulcher, *Sumpah Pemuda: Makna dan Proses Penciptaan atas sebuah Simbol Kebangsaan Indonesia*. Jakarta: Komuitas Bambu, 2000. hlm: 24.
- ⁸⁸ Welmar, *Mengenang Mahaputra Prof. H. Muhammad Yamin Pahlawan Nasional RI*, Cetakanke III. Bukit Tinggi: CV. Kristal Multimedia, 1997. hlm: 32.
- ⁸⁹ *Harian Merdeka* 1954.
- ⁹⁰ Muhammad Yamin, *Sumpah Indonesia Raya*. Bukit Tinggi, Djakarta, Medan: NV. Nusantara, 1955. hlm 41.
- ⁹¹ Muhammad Yamin, "Mendjadilah Persatuan Bangsa Indonesia", Pidato dalam rangka Nation Building dan Character Building, 28 Oktober 1964.
- ⁹² Mr. Muhammad Yamin, "Pergerakan Keboedajaan Indonesia", dalam *Surat Kabar Kebangoenan*, tanggal 4 Juni 1936.
- ⁹³ *Ibid.*
- ⁹⁴ Tjatanan Redaksi: Kongres Kebudajaan Indonesia, Majalah bulanan Kebudajaan diterbitkan Djawatan Kebudajaan Kementrian PPK, No. 9/10 September/Oktober 1954, tahun ke III.
- ⁹⁵ Muhammad Yamin, tentang Organisasi Kebudajaan, *Preadvis* dalam Kongres Kebudajaan II, Bandung: 1951.
- ⁹⁶ *Ibid.*
- ⁹⁷ *Ibid.*
- ⁹⁸ Muh.Yamin, *Perkembangan Kebudajaan, Sambutan dalam Kongres Kebudajaan III* selaku Menteri P.P dan K, Kutipandari Madjalah Bulanan Kebudajaan, Jogjakarta: Djawatan Kebudajaan Kementrian PPK, No. 9/10, September/Oktober 1951, tahun ke III.
- ⁹⁹ *Ibid.*
- ¹⁰⁰ "Menggapai Sejarah Nasional: Muhammad Yamin", dalam *Pemahaman Sejarah Indonesia*, dedit oleh William H. Frederick dan Soeri Soeroto. Jakarta: LP3ES, 1982. hal. 54-55.
- ¹⁰¹ Taufik Abdullah, "Kata Pengantar" untuk Restu Gunawan, *Muhammad Yamin*, hlm: xxi.
- ¹⁰² Muhammad Yamin, *Gajah Mada*. Djakarta: Balai Pustaka, tahun 1971. hlm: 95.

- ¹⁰³ *Ibid.*, hlm:101.
- ¹⁰⁴ Muhammad Yamin, *Tata Negara Majapahit Sapta Parwa:Risalah Sapta Parwa berisi 7djilid atau parwa, hasil penelitian Ketatanegaraan, Indonesia tentang dasar dan bentuk Negara Nusantara bernama Madjapahit, 1293-1525*. Djakarta: Prapanca, tanpa tahun. hlm: 59.
- ¹⁰⁵ *Ibid.* hlm: 11-19.
- ¹⁰⁶ Muhammad Yamin, *Penjelidikan Sedjarah Tentang Negara Seriwidjaja dan Radjakula Sjailendera Dalam Kerangka Kesatuan Ketatanegaraan Indonesia*. Tanpa penerbit, tanpa tahun. hlm: 147.
- ¹⁰⁷ Muhammad Yamin, *6000 tahun Sang Merah Putih*. Tanpa penerbit, 1951. hlm: ii.
- ¹⁰⁸ *Ibid.* hlm: 24.
- ¹⁰⁹ "Menggapai Filsafat Sejarah", hlm: 55.
- ¹¹⁰ Ahmadie Thoha (Penerjemah), *Muqoddimah Ibn Khaldun*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000. hlm 3.
- ¹¹¹ Muhammad Yamin, "Tjatur Sila Chalduniyah", *Makalah* disampaikan dalam Seminar Sejarah I tahun 1957 di Yogyakarta, dalam Kumpulan makalah Seminar Sejarah Nasional pertama, 14-18 Desember 1957.
- ¹¹² *Ibid.*, hlm: 222.
- ¹¹³ AhmadiThoha (Penerjemah), *MuqoddimahIbnKhaldun*. hal8.
- ¹¹⁴ Soedjatmoko, Merintis Masa Hari Depan, makalah dalam seminar sejarah I di Yogyakarta, dalam kumpulan Makalah Seminar Sejarah Nasional Pertama 14-18 Desember 1957. hlm: 192.
- ¹¹⁵ Soedjatmoko, *op.cit.*, hlm: 200.
- ¹¹⁶ Muhammad Yamin, Rantjangan Soal Pendidikan dan Pengadjaran dalam Muhammad Yamin, Lampiran VI, *op.cit*, hlm: 750.
- ¹¹⁷ Mr. Muhammad Yamin, Pidato Menteri Pendidikan dan Pengadjaran dan Kebudajaan tentang Usaha-usaha Pendidikan dan Pengajaran Kebudajaan dalam Konperensi Dinas Kementrian Penerangan Pada Tanggal 12 Oktober 1954, naskah stensilan, tersimpan di Perpustakaan Nasional, hlm: 12.
- ¹¹⁸ *Ibid.*, hlm: 15.
- ¹¹⁹ Muh.Yamin Pidato yang diucapkan pada malam resepsi Kongres VII PGRI di kota Semarang pada tanggal 24 November 1954, "Kebaktian Guru Mendidik Bangsa", tanpa tahun, tersimpan di Perpustakaan Nasional, hlm: 6.
- ¹²⁰ Muhammad Yamin, "Minang Membentuk Universitas", pada perajaan Peresmian Fakultas Kedokteeran dan FIPIA di Bukit Tinggi pada tanggal 17 September 1955.
- ¹²¹ *Ibid.*, hlm: 18-19
- ¹²² *Ibid.*, hlm: 24-25.

BAB III

Pendidikan dan Penguatan Karakter Bangsa: Sketsa Pemikiran dan Gerakan Tokoh Pendidikan di Indonesia

Jajat Burhanudin
Setyadi Sulaiman

3.1. Pendahuluan

Sejarah pendidikan berjalan seiring dengan sejarah masyarakat itu sendiri. Bagaimana sebuah konteks sosial-kemasyarakatan bergerak, ke arah itu pulalah pendidikan bertransformasi. Pun sebaliknya, dinamika pemikiran pendidikan menjadi bagian yang sangat penting dalam mengarahkan progresivitas masyarakat. Pendidikan melahirkan generasi yang menjadi pionir penggerak kemajuan. Keduanya saling menunjang.

Kita bisa lihat bahwa dalam konteks masyarakat yang semakin demokratis, pendidikan juga menunjukkan wajahnya yang demikian. Dalam konteks masyarakat Barat misalnya, sejarah perkembangannya bergerak dari masyarakat agraris, industri dan pascaindustri. Pada masyarakat agraris, model pendidikan yang cenderung otoritarian mendapatkan resistensi, dan digeser oleh model pendidikan progresif. Jean Jasques Rousseau, Johan Pestalozzi, Freiderich Froebel adalah di antara nama-nama tokoh inspiratornya. Dengan tanpa henti, dinamika dalam dunia pendidikan menunjukkan kombinasi warna yang berbeda sesuai perubahan arah kuas sosial masyarakat.

Dalam konteks yang teraktual, pertengahan kedua abad ke-20, kita bisa melihat kemunculan Paulo Freire (1968) dengan konsep pendidikan sebagai praktek pembebasan,¹ serta bagaimana Ivan Illich (1972) mengajukan kritikan tajam terhadap konsep pendidikan yang ada, melalui "*deschooling society*"-nya.² Melalui kedua tokoh tersebut, setidaknya dapat kita saksikan betapa pendidikan merupakan energi dinamis yang terus bergerak, mendampingi dinamika peradaban umat manusia.

Dalam gerakannya yang begitu dinamis, peradaban umat manusia harus menghadapi serangkaian tantangan. Globalisasi dalam hal ini menjadi salah satu tantangan nyata yang harus dihadapi. Secara teoritis, globalisasi adalah suatu proses, bukan suatu pengertian yang statis. Globalisasi bukan juga sesuatu yang terjadi secara spontan. Ia lahir dari perilaku manusia dan gagasan-gagasan yang lahir dari berbagai interaksi antarmanusia, antarmasyarakat, dan antarnegara, yang pada abad kedua puluh yang lalu dimulai dari bidang ekonomi.³

Globalisasi adalah momentum sekaligus fenomena. Sebagai momentum, globalisasi merupakan bagian garis periodik perjalanan peradaban manusia. Pada satu sisi, globalisasi tidak bisa dilihat secara parsial, terpisah dari runutan sejarahnya. Namun pada saat yang sama, globalisasi juga menegaskan domain perbedaannya, atau lebih tepatnya kekhasannya, dibanding periode sebelumnya.

Sedangkan sebagai sebuah fenomena, globalisasi menawarkan sebuah rona dimensi kehidupan yang berbeda. Visi, konsep, dan orientasi dalam menjalani kehidupan yang ditawarkan oleh globalisasi, berbeda dengan era sebelumnya. Perbedaan-perbedaan tersebut kemudian membuat era globalisasi diwarnai dengan "peristiwa" yang tidak sama dengan "peristiwa" di era sebelumnya. Secara umum, sebagai sebuah momentum, globalisasi menawarkan peluang dan kesempatan. Dan sebagai fenomena, globalisasi menghadirkan tantangan dan hambatan.

Dalam pengertian yang lebih praktis, globalisasi bisa dipahami sebagai “perubahan-perubahan struktural dalam seluruh kehidupan bangsa dan negara yang mempengaruhi fundamen-fundamen dasar pengaturan hubungan antarmanusia, organisasi-organisasi sosial dan pandangan-pandangan dunia. Perubahan-perubahan terjadi pada bidang ekonomi dan teknologi, yang berimbas pada aspek sosial, budaya, dan politik.”⁴ Jadi, globalisasi menghadirkan perubahan yang cukup luas dan mendasar yang pada akhirnya menghasilkan corak baru dalam sistem dan tata kehidupan manusia.

Pada tingkat yang teknis, teknologi, informasi, dan ekonomi menjadi varian paling penting yang menentukan terbangunnya pola globalisasi ini. Dari sana, varian-varian lainnya kemudian terimbas, seperti politik, sosial dan budaya, pendidikan, dan agama. Perubahan-perubahan yang dihasilkan globalisasi meliputi beberapa hal. *Pertama*, pertumbuhan cepat dalam perdagangan internasional dan keuangan. *Kedua*, peningkatan utang dan ketergantungan negara berkembang. *Ketiga*, meningkatnya peranan lembaga keuangan dan perdagangan internasional. *Keempat*, pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi. *Kelima*, bangkitnya demokrasi liberal.⁵ Demikian revolusionernya progresivitas teknologi informasi dan komunikasi yang ditawarkan globalisasi, hingga membuat dunia menjadi sebuah “dusun global”. Luasnya bumi tempat manusia berpijak di derivasi ke dalam mungilnya perangkat komunikasi dan sistem informasi. Pada puncaknya, globalisasi menyebabkan terjadinya ketegangan-ketegangan informasi di kota dan di desa, kaya dan miskin, konsumeris, kekurangan dan sebagainya.

Demikianlah, secara umum globalisasi memberikan peluang sekaligus tantangan bagi masa depan umat manusia. Bagaimana memanfaatkan peluang yang sangat besar dan mengantisipasi efek negatifnya, itulah yang harus dilakukan. Salah satunya adalah dengan mengkonstruksi sebuah paradigma dan konsep pendidikan yang diarahkan untuk menjadi solusi terhadap efek negatif tersebut. Jadi idealnya, pendidikan bias memberikan dua manfaat sekaligus: membantu untuk memaksimalkan potensi globalisasi, sekaligus pada saat yang sama mengarahkan untuk mengantisipasi implikasi negatifnya.

3.2. Pendidikan sebagai Pilar Pembentukan Karakter Bangsa: Pergumulan Awal

Dalam alur perjalanan sejarah Indonesia, pendidikan menempati posisi sentral sebagai salah satu pembentuk karakter bangsa. Pendidikan, dalam banyak hal menjadi media paling efektif untuk merespon perkembangan globalisasi yang begitu dinamis dan menysaikan ragam dampak, baik positif maupun negatif. Khusus dampak negatif dari globalisasi, sejarah mencatat bahwa perkembangan globalisasi dalam banyak kasus turut mempengaruhi sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Globalisasi dengan kekuatannya berhasil menyerang dimensi karakter bangsa yang sejatinya perlu terus dijaga.

Hal inilah yang dalam perkembangannya coba direspons oleh tokoh-tokoh pendidikan di masa lalu yang mengabdikan sepenuh hidupnya demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Dasarnya jelas, pendidikan memiliki peran besar dalam membentuk karakter bangsa. Bagi para tokoh-tokoh pendidikan tersebut, pendidikan harus bersifat dinamis, terbuka dan selalu berupaya menyesuaikan kondisi zaman, bukan justru terkungkung dalam arus tradisional yang hanya difungsikan sebagai medium transformasi budaya masa lalu yang tertutup. Pendidikan harus ditempatkan sebagai system terbuka (*open system*) yang bersifat reflektif nan progresif serta mampu membentuk karakter bangsa.

Cita-cita menjadikan pendidikan sebagai pilar penting pembentuk karakter bangsa menemukan momentum yang tepat pada pertengahan abad ke-19. Jika sebelumnya pengetahuan dan institusi pendidikan di Hindia masih cenderung disubordinasikan pada yang sakral, di mana agama menjadi dasar alasan, tujuan dan isi dari pendidikan, memasuki abad ke-19 dan khususnya di pertengahan abad, terjadi perubahan signifikan seiring diperkenalkannya sistem pendidikan sekuler yang disponsori oleh pemerintah kolonial Belanda.⁶

Tepatnya tahun 1863 hingga 1864, pemerintah kolonial mulai menjalankan politik pengajaran liberal. Tujuan sekolah saat itu bukan lagi hanya mendidik calon-calon pegawai, tetapi juga mendidik rakyat secara luas. Politik pengajaran liberal ini menghadirkan dampak positif bagi kelompok pribumi, terutama terbukanya kesempatan bagi anak-anak Indonesia untuk memasuki sekolah-sekolah Belanda.⁷

Tidak hanya berhenti di situ, pada tahun 1867 pemerintah kolonial mendirikan Departemen Pendidikan. Kebijakan ini disinyalir sebagai program lanjutan dari pihak kolonial yang sebelumnya telah menyusun undang-undang yang berisi keharusan pemerintah kolonial untuk menyelenggarakan pendidikan bagi kaum pribumi. Undang-undang itu sendiri sejatinya telah dikeluarkan tahun 1854 ketika pemerintah kolonial memulai kebijakan liberal di dunia pendidikan.⁸

Memasuki abad ke-20, perkembangan semakin menarik. Adalah Ratu Wilhelmina yang pada bulan September 1901 di hadapan dewan Parlemen mengemukakan tentang 'hutang budi' dan tanggung jawab etis negeri Belanda kepada rakyat Hindia. Pemerintah Belanda, menurutnya, memiliki "kewajiban yang luhur dan tanggung jawab moral untuk rakyat di Hindia Belanda."⁹ Kebijakan "politik hutang budi" saat itu ditampilkan sebagai bentuk keprihatinan atas kesejahteraan bangsa Indonesia, sekaligus untuk menggantikan kebijakan sebelumnya yang sangat eksploitatif.

Orientasi baru dalam perlakuan kolonial terhadap rakyat Hindia inilah yang kemudian dikenal sebagai 'Politik Etis'. Di bawah Politik Etis, *educatie* (pendidikan), *irrigatie* (irigasi) dan *ëmigratie* (transmigrasi) menjadi prioritas dari program kesejahteraan pihak kolonial. Dari ketiga program itu, pendidikan ternyata dianggap sebagai hal yang paling esensial. Sejak itu, pendidikan mulai menempati posisi penting dalam proses perubahan sosial masyarakat Hindia Belanda, khususnya sebagai sebuah sarana untuk memperbaiki kesejahteraan kaum Pribumi dalam kerangka peradaban yang terinspirasi Barat.¹⁰

Pada perjalanannya, penerapan Politik Etis oleh pemerintah kolonial Belanda pada periode tersebut telah melahirkan kelompok sosial baru yang disebut sebagai “elit Indonesia modern yang sangat akrab dengan unsur-unsur modernitas. Mereka adalah didikan sekolah Barat modern, berbasis di perkotaan, dan secara sadar menyuatkan hasrat untuk kemajuan melalui media modern.

Selain kelahiran elit Indonesia modern, penerapan Politik Etis juga diwarnai dengan pembangunan institusi pendidikan modern. Hal ini antara lain bisa dilihat dari restrukturisasi terhadap tiga sekolah kepala (*Hoofden Scholen*)—saat itu berada di Bandung, Magelang dan Probolinggo—menjadi sekolah yang dirancang untuk menghasilkan pegawai pemerintan kolonial, OSVIA (*Opleidingscholen voor Inlandsche ambtenaren*), yang terbuka bagi semua orang Indonesia yang telah menyelesaikan sekolah rendah Eropa.¹¹

Di samping itu, pada 1900-1902, sekolah ‘Dokter-Jawa’ diganti menjadi sekolah untuk latihan dokter-dokter pribumi, STOVIA (*School to opleiding van Inlandsche artisan*). Dalam kerangka itu, sejak tahun 1981 pemerintah Belanda menjadikan sekolah-sekolah rendah Eropa, yang menjadi prasyarat untuk memasuki OSVIA dan STOVIA, terbuka bagi bangsa Indonesia.¹²

Pada tahun 1907, sistem pendidikan model sekolah mulai masuk di daerah-daerah pedesaan di Jawa, ketika pemerintah kolonial Belanda mendirikan *Volkschool*. Bagi murid yang mampu menamatkannya, ia diperkenankan untuk melanjutkan ke jenjang *Vervolgschool*, yang terletak di kota distrik atau kabupaten selama dua tahun. Pada tahun tahun 1914, pemerintah kolonial Belanda mendirikan sekolah baru, yaitu *Holland Sch-Inlandsche School* (HIS), sebagai bagian dari komitmen untuk memperluas kebijakan politik etis bagi warga pribumi, bukan semata-mata keturunan bangsawan atau priyayi. Pendidikan di HIS memakan waktu selama tujuh tahun dengan kurikulum yang sama dengan sekolah-sekolah dasar untuk anak-anak Belanda. Meski memang masih dinikmati segelintir pribumi, HIS menyediakan pendidikan yang secara resmi menjadi bagian dari sistem sekolah Eropa di Indonesia. Dan melalui HIS itulah,

sejumlah orang Indoneia kemudian bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, tepatnya MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*) sejak 1914, AMS (*Algemeene Middelbare School*) sejak 1919, dan kemudian HBS (*Hoogere Burger School*), yang bisa menghantarkan mereka memasuki jenjang perguruan tinggi di Belanda.¹³

Demikianlah, pembaruan kebijakan pemerintah kolonial bidang pendidikan ini menjadi satu sarana penting---di samping sejumlah perbaikan lain dalam kerangka politik etis--- bagi lahirnya masyarakat Indonesia terdidik. Data statistik menunjukkan tingkat peningkatan yang berarti mereka yang memperoleh pendidikan formal setingkat sekolah dasar. Pada 1900, hanya 265.940 anak Indonesia yang tercatat mengenyam pendidikan di sekolah swasta dan pemerintah. Pada 1930-an, angka itu meningkat menjadi 1, 66 juta orang. Jumlah orang Indonesia yang belajar dalam sistem sekolah Eropa di bawah tingkat universitas berkisar 84, 609 orang, sementara di tingkat perguruan tinggi tercatat hanya sekitar 178 orang.¹⁴ Angka tersebut tentu saja tidak berarti banyak bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia saat itu ---sekitar 2,8 persen untuk tingkat dasar, 0,14 persen untuk tingkat lanjutan sebelum universitas, dan hanya 3/1.000.000 orang untuk tingkat perguruan tinggi. Namun demikian, justru mereka itulah yang kemudian menjadi elit Indonesia, yang memiliki kontribusi sangat berarti dalam sejarah Indonesia kemudian. Oleh karena itu, pendidikan kemudian menjadi satu sarana paling efektif bagi proses mobilitas vertikal masyarakat Indonesia di tengah suasana baru modern yang diperkenalkan kolonial. Lembaga pendidikan, tepatnya pendidikan modern, telah meratakan jalan bagi tumbuhnya kelompok elit yang secara kultural sangat akrab dengan gagasan-gagasan modern.¹⁵

Hal tersebut merupakan fenomena baru dalam dunia pendidikan di Indonesia secara umum. Dan selanjutnya, kalangan terpelajar itulah yang memainkan peran penting dalam mewarnai perubahan pendidikan Indonesia di era selanjutnya. Dengan

bermodal pengetahuan dan pengalaman selama menimba ilmu di sekolah-sekolah Belanda, kalangan terpelajar tersebut berupaya menarik pendidikan ke tengah arus perubahan sosial masyarakat.

Beberapa tokoh yang akan dijelaskan di bawah ini pada gilirannya berupaya menjadikan pendidikan sebagai basis pergerakan demi mencapai satu tujuan utama, mencerdaskan kehidupan bangsa. Mereka adalah Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional yang pernah berjuang melalui Tawan Siswa yang didirikannya. Tokoh berikutnya adalah Rahmah el-Yunusiah, yang mendirikan lembaga pendidikan khusus untuk kaum perempuan, yakni Diniyah Puteri Padang Panjang. Karena itu, Rahmah kerap kali disebut sebagai “Kartini” untuk konteks masyarakat Minangkabau, yang telah bekerja secara konkrit dalam usaha meningkatkan pendidikan dan pada akhirnya status sosial kaum perempuan. Tokoh berikutnya yang dibahas di sini adalah Mohamad Sjafei. Dia adalah seorang yang, seperti dua tokoh pertama yang disebut di atas, mendedikasikan dirinya untuk bergerak di bidang pendidikan. Setelah Ki Hajar Dewantara mendirikan Tamansiswa (1922), empat tahun kemudian (1926), Mohamad Sjafei menyusul mendirikan Indische Nationale School (INS) Kayutanam.



Ki Hajar Dewantara, Lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889

(Sumber : Arsip Nasional Republik Indonesia – ANRI)

3.3. Ki Hadjar Dewantara: Bapak Pendidikan Nasional

Menjelang akhir masa penjajahannya, Belanda mulai memberikan perhatian terhadap pendidikan bangsa Indonesia. Namun, perhatian pendidikan yang Belanda berikan belumlah memadai karena masih bersifat kolonialis karena diupayakan untuk suatu tujuan yaitu menjadikan bangsa Indonesia sebagai budak penjajah dan kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia.

Kondisi yang demikian telah mendorong Ki Hajar untuk meresponnya. Dialah tokoh yang menggagas agar pendidikan yang diberikan kepada bangsa Indonesia adalah pendidikan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia sendiri dan didasarkan pada semangat nasionalisme, patriotisme, serta membangun jati diri bangsa sebagai manusia yang merdeka, bebas, bermartabat, dan dihormati oleh bangsa lain. Berbagai aspek yang terkait dengan pendidikan seperti visi, misi, tujuan, kurikulum, dan tahapan pendidikan harus dirumuskan berdasarkan kemauan bangsa Indonesia sendiri.

Gagasan dan pemikiran Ki Hajar Dewantara inilah yang kemudian menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan nasional hingga sekarang. Dialah bapak pendidikan nasional Indonesia. Prinsip pendidikan yang sangat demokratis yang berbunyi *ing ngarso sing tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani*, adalah berasal dari Ki Hajar Dewantara. Demikian pula gagasan pendidikan yang bersifat global dengan cara mengharuskan para siswa menguasai pengetahuan agama dan umum serta menguasai bahasa asing telah dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, jauh sebelum bangsa Indonesia mengenal apa yang disebut era globalisasi.

3.4. Riwayat Hidup

Ki Hajar Dewantara yang nama aslinya Suwardi Suryaningrat lahir pada 2 Mei 1889, bertepatan dengan 1303 H, di Yogyakarta dan wafat dan wafat pada 26 April 1959, bertepatan dengan 1376 H, pada

usia 70 tahun. Suwardi adalah seorang putera keturunan bangsawan sebagai cucu dari Sri Paku Alam III, anak dari Pangeran Suryaningrat, putera sulung dari permaisuri dan Sri Paku Alam III. Sedangkan putera kedua dari permaisuri dan Sri Paku Alam III adalah Pangeran Sastraningrat, ayah dari RA Sutartinah yang kemudian dikenal dengan nama Nyi Hajar Dewantara.¹⁶

Sebagai keluarga ningrat, Ki Hajar termasuk beruntung karena memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Pendidikan dasarnya ia peroleh dari sekolah rendah Belanda (*Europeesche Lagere School*, ELS). Setelah itu ia melanjutkan ke Sekolah Guru (*Kweek School*), tetapi sebelum sempat menyelesaikannya, ia pindah STOVIA (*School tot Opleiding van Indische Arten*). Namun di sekolah ini pun, ia tidak menyelesaikan pendidikannya dikarenakan ayahnya mengalami kesulitan ekonomi.¹⁷

Selama di Batavia (Jakarta) itulah ia mendapatkan gemblengan mental dan jiwa yang mendalam. Setelah meninggalkan STOVIA, ia lalu bekerja pada pabrik gula Kali Bogor di Banyumas dan menjadi apoteker pada Rathkamp di Yogyakarta. Karena pekerjaan yang bersifat rutin kurang cocok dengan jiwanya, ia lalu terjun ke bidang jurnalistik, suatu bidang yang kelak memunculkan semangat juangnya dalam bidang sosial politik mulai berkobar dan dimana bakat jurnalistiknya berkembang pesat.¹⁸

Saat masih bekerja di Apotek Rathkamp Yogyakarta, Ki Hajar muda sudah aktif menulis di berbagai surat kabar. Media perjuangannya mulai ia gagas lewat berbagai tulisan. Rumusan sikap patriotiknya tersebar di berbagai media massa ternama waktu itu seperti *Sedya Tama*, *Midden Java*, *Oetoesan Hindia*, *Kaoem Moeda*, *De Express*, *Tjahaya Timoer*, dan *Poesara*.¹⁹

Pada 1908, saat berusia 19 tahun, Ki Hajar sudah aktif dalam perjuangan pergerakan nasional. Ia aktif di Budi Utomo dalam visi propaganda. Pada 1911, ia menjadi anggota redaksi harian *De Express* Bandung yang dipimpin Douwes Dekker dan Ciptomangunkusumo. Tanggal 6 September 1912, bersama dengan

Douwes Dekker dan Ciptomangunkusumo, ia mendirikan *Indische Partij*, partai politik pertama yang secara radikal menyerukan kemerdekaan Indonesia dari Belanda.

Terkait upaya meraih kemerdekaan tersebut, dalam sebuah kesempatan, Ki Hajar pernah mengatakan,

“Kebangsaan Hindia itulah semboyan perjuangan kita bersama, yang dapat mempersatukan semua kaum nasionalis Indonesia dalam suatu kelompok. Itulah pernyataan cinta kita bersama pada kesatuan tanah air, yang pada waktu ini masih bernama Hindia Belanda. Kebangsaan Hindia adalah kata yang sama-sama kita insafi maknanya dan kita jadikan tanda persaudaraan kita. Orang dari Sumatra, Ambon, Jawa dan dari daerah jajahan lainnya berdiri berdampingan, siap berjuang untuk kesejahteraan kita bersama, untuk cita-cita kita bersama. Kebangsaan Hindia alangkah luhurnya—sungguh satu-satunya senjata kita yang harus dapat membatalkan politik pecah-belah. Tanpa ini, tanah air kita Hindia adalah kelompok daerah-daerah lemah yang tidak berdaya apa-apa. Baik pulau yang besar maupun pulau yang kecil tidak ada yang mampu melawan serangan dari luar betapapun kecilnya serangan itu. Akan tetapi, berkat ikatan kebangsaan Hindia ini maka kita merupakan bangsa, yang kekuatannya mungkin lebih besar daripada kita sendiri.”²⁰

Sosok Ki Hajar seketika menjadi topik perbincangan, baik pemerintah Hindia Belanda maupun masyarakat umum. Sebabnya adalah rencana pemerintah Hindia Belanda yang berniat mengumpulkan sumbangan dari warga, termasuk pribumi, untuk perayaan kemerdekaan Belanda dari Perancis pada tahun 1913. Atas rencana tersebut, Ki Hajar, saat itu masih dikenal dengan nama Soewardi Soeryaningrat, menulis surat terbuka dalam bahasa Belanda dengan judul *“Als ik een Nederlander Was”* (Seandainya Aku

Seorang Belanda) dan dimuat dalam *De Expres*, 13 Juli 1913. Berikut isi surat tersebut.²¹

**Kalau Saya Seorang Belanda
(*Als ik eens Nederlander was.....*)**

Oleh: Soewardi Soerjaningrat

“Dalam berbagai karangan di surat-surat kabar banyak sekali dipropagandakan untuk mengadakan suatu pesta besar disini, di Hindia: pesta perayaan 100 tahun kemerdekaan Nederland. Penduduk negeri ini tidak boleh lengah saja, bahwa pada bulan November yang akan datang genaplah seratus tahun, bahwa Nederland menjadi suatu kerajaan dan tanah Nederland menjadi suatu negara yang merdeka, sekalipun dengan begitu ia di belakang sekali dalam barisan negara-negara.

Ditinjau dari segi yang patut sudah sepantasnya kejadian nasional yang bersejarah itu dirayakan dengan sebuah pesta. Bukankah itu menandakan kecintaan orang Belanda kepada tanah airnya, tanda setianya kepada tanah yang pernah dihiasi oleh nenek-moyangnya dengan perbuatan-perbuatan pahlawan? perayaan itu akan menggambarkan perasaan bangga mereka, bahwa seratus tahun yang lalu Nederland berhasil melemparkan tekanan penjajahan dari bahunya dan ia sendiri menjadi suatu bangsa yang merdeka.

Saya mudah menangkap rasa gembira yang keluar dari hati patriot Belanda masa sekarang, yang dapat merayakan jubileum semacam itu. Karena saya juga seorang patriot, dan seperti juga dengan orang Belanda yang benar-benar mencintai tanah airnya, begitu pula saya cinta pada tanah air saya, lebih dari yang dapat saya katakan.

Alangkah gembiranya, alangkah senangnya, dapat merayakan suatu hari nasional yang begitu besar artinya. Saya ingin, dapat kiranya sebentar menjadi seorang Belanda, bukan seorang “Staatsblad-Nederlander”, tetapi seorang putra Nederland Besar yang tulen, sama sekali bebas dari cacat-cacat asing. Alangkah gembiranya aku, apabila nanti di bulan November datang hari yang

sebegitu lama ditunggu-tunggu, hari perayaan kemerdekaan. Kegembiraan hatiku akan meluap-luap melihat bendera Belanda berkibar sesenang-senangnya dengan secarik Oranje di atasnya. Suaraku akan parau ikut serta menyanyikan lagu “wilhelmus” dan “wien Neerlands Bloed”, apabila nanti musik mulai berbunyi. Saya akan menjadi sombong karena segala pernyataan itu, saya akan memuji Tuhan dalam gereja Kristen bagi segala kebaikan-Nya, saya akan meminta, memohon ke langit yang tinggi supaya Nederland kekal kekuasaannya, juga ditanah jajahan ini, supaya mungkin bagi kita mempertahankan kebesaran kita dengan kekuasaan yang besar ini di belakang kita. Saya akan meminta bantuan uang kepada semua orang Belanda di Insulinda ini, bukan saja untuk perayaan, tetapi juga untuk biaya rencana kapal perang Clijn, yang berusaha segiat-giatnya guna mempertahankan kemerdekaan Nederland, saya akan.....ya saya tak tahu lagi apa yang akan saya perbuat seterusnya, jika saya seorang Belanda, karena saya akan sanggup berbuat apa saja, dugaan saya.

Tetapi tidak, sungguh tidak! Apabila saya seorang Belanda, saya tidak akan sanggup berbuat segala-galanya. memang saya berkehendak supaya pesta kemerdekaan yang akan datang itu diorganisasi seluas-seluasnya, tetapi saya tidak mau kalau bumiputra negeri ini ikut serta merayakan, saya akan melarang mereka ikut riang gembira pada pesta-pesta itu, malahan saya ingin sekali memagari tempat-tempat keramaian itu, supaya tak ada seorang bumiputra pun dapat melihat kegembiraan kita yang meluap-luap pada peringatan hari kemerdekaan itu.

Di situlah terletak, menurut saya, suatu hal yang tidak pantas, satu perbuatan yang tidak tahu malu, tidak senonoh, apabila kita—saya masih seorang Belanda umpamanya—orang-orang bumiputra disuruh ikut bergembira dalam merayakan kemerdekaan kita. Kita, pertama, akan melukai perasaan kehormatan mereka, karena kita disini di atas tanah air mereka yang kita kuasai memperingati kemerdekaan kita sendiri. Kita sekarang beriang-riang gembira, karena seratus tahun yang lalu kita terlepas dari kekuasaan asing; dan semuanya ini akan terjadi di bawah pandangan mereka yang masih berdiri di bawah kekuasaan kita. Apakah kita tidak harus memikirkan, bahwa budak-budak yang sial itu juga ingin mencapai

suatu ketika, yang mereka seperti kita sekarang dapat mengadakan suatu pesta yang serupa? Atau apakah kita menyangka, bahwa kita dengan politik kita yang lama terus-menerus menindas semangat yang hidup sudah membunuh segala perasaan kemanusiaan dalam jiwa bumputera? Kalau begitu kita akan menipu diri sendiri, karena bangsa-bangsa yang sebiadab-biadabnya pun menyumpahi tiap-tiap bentuk penjajahan. Apabila saya seorang Belanda, saya tidak akan mengadakan pesta kemerdekaan dalam suatu negeri sedangkan kita menahan kemerdekaan bangsanya.

Sejalan dengan pendapat ini bukan saja tidak adil melainkan juga tidak pantas apabila bumiputra disuruh menyumbangkan uang untuk keperluan dana pesta itu. Sudahlah mereka dihina dengan maksud mengadakan perayaan kemerdekaan Nederland itu, sekarang dompet mereka dikosongkan pula. Itulah suatu penghinaan moril dan pemerasan uang!

Apakah yang akan dicapai dengan pesta perayaan itu disini, di Hindia? Apabila itu maksudnya menyatakan kegembiraan nasional maka tidak bijaksana perayaan itu diadakan disini, di negeri yang terjajah. Orang akan menyakiti hati rakyatnya. Atau apakah dengan itu maksudnya mempertunjukkan kebesaran dalam arti politik? Terutama dalam masa sekarang ini, masa bangsa Hindia sedang membentuk diri sendiri dan masih berada pada permulaan bangun tidur, adalah suatu kesalahan sikap memberi contoh kepada bangsa itu, bagaimana kiranya ia harus merayakan kemerdekaannya. Orang menusuk dengan cara begitu hawa nafsunya, dengan tidak sengaja dibangunkan perasaan kemerdekaannya, harapannya akan kemerdekaan yang akan datang dengan tidak sengaja disorakkan kepada bangsa itu: "Kau manusia lihatlah betapa kami merayakan kemerdekaan kami; cintailah kemerdekaan, karena senang sekali perasaan menjadi suatu bangsa yang merdeka, bebas dari segala penjajahan."

Apabila bulan November tahun ini telah lewat, kaum penjajah Belanda telah membuat suatu percobaan politik yang berbahaya. Resiko ada pada mereka. Saya tak mau memikul tanggung jawab itu, sekalipun saya seorang Belanda.

Kalau saya seorang Belanda, sekarang pada saat ini, saya akan memprotes tentang maksud perayaan itu. Saya akan menulis dalam segala surat kabar bahwa itu salah, saya akan menasihati sesama kaum penjajah, bahwa berbahaya di waktu sekarang mengadakan pesta kemerdekaan, saya akan mendesak kepada segala orang Belanda supaya jangan melukai perasaan bangsa Hindia Belanda yang mulai bangun dan sadar itu agar supaya ia jangan sampai naik darah. Sungguh, saya akan memprotes dengan segala tenaga yang ada pada saya

Tetapi.....saya ini bukan orang Belanda, saya cuma putra negeri tropika ini yang berkulit warna sawo, seorang bumiputra jajahan Belanda ini, dan karena itu saya tidak akan memprotes. Karena, kalau saya memprotes, orang akan marah pada saya. Saya akan dipersalahkan menghasut bangsa Belanda, yang memerintah disini di negeri saya dan menjauhkan mereka itu dari saya. Dan itu saya tidak mau, itu tidak boleh saya perbuat. Apabila saya orang Belanda, bukankah saya tidak mau menghina bangsa bumiputra? Juga orang akan menuduh saya kurang ajar terhadap Sri Ratu, raja kita yang dihormati, dan itu tidak dapat diampuni, sebab saya rakyatnya yang selalu harus setia kepada beliau. Dan karena itu saya tidak memprotes! Sebaliknya, saya akan ikut merayakan.

Apabila nanti diadakan pemungutan biaya, saya akan memberi sumbangan, sekalipun karena itu saya akan mengurangi belanja rumah tangga sampai separo. Kewajiban saya sebagai seorang bumiputra jajahan Belanda ini, ialah untuk ikut serta menyemarakkan hari kemerdekaan Nederland, negeri tuan kita. Saya akan meminta kepada orang-orang sebangsa saya, orang-orang sesama rakyat kerajaan Nederland, untuk ikut serta dalam pesta itu, sebab sekalipun pesta ini semata-mata berarti bagi Nederland, kita akan mendapat di situ kesempatan yang sebaik-baiknya untuk menyatakan kesetiaan kita dan kehormatan kita kepada Nederland. Dengan begitu kita akan mengadakan "demonstrasi kesetiaan." Syukurlah, saya bukan seorang Belanda.

Sekarang, lepas dari segala ironi.

Seperti telah saya katakan pada permulaan karangan ini, perayaan 100 tahun kemerdekaan Nederland tersebut menunjukkan

besarnya kesetiaan kepada tanah air, dalam hal ini dari pihak orang Belanda. Bolehlah mereka gembira pada perayaan nasional mereka itu. Yang menjadi keberatan bagi saya dan banyak lagi orang yang setanah air dengan saya ialah terutama bahwa sekarang bumiputra lagi yang akan membayar bagi suatu hal yang bukan hal mereka. Apakah yang akan dibawakan oleh pesta yang kami ikuti menyelenggarakan? Tidak sedikit juga, kecuali peringatan bagi kami, bahwa kami bukan suatu bangsa yang merdeka dan bahwa "Nederland tidak akan menganugerahi kami dengan kemerdekaan"—pendek kata tidak selama Tuan Idenburg menjadi walinegara, dan lagi-ganjil benar—ajaran yang kita peroleh dari pesta-pesta itu, bahwa merupakan kewajiban bagi tiap-tiap orang untuk mewakili bangsanya sebaik-baiknya pada hari perayaan kemerdekaan.

Saya pun lebih setuju dengan pendapat yang baru-baru ini untuk pertama kali dibentangkan dalam surat kabar bumiputra "Kaoem Moeda" dan dalam "De Express" untuk membentuk di Bandung, tempat datangnya bermula cita-cita mengadakan perayaan dan tempat duduk pusat komite, suatu komisi terdiri dari beberapa orang bumiputra yang terpelajar; pada hari perayaan itu badan tersebut akan mengirimkan kawat ucapan selamat kepada Ratu, yang di dalamnya juga dianjurkan mencabut pasal 111 R.R dan segera mengadakan suatu Parlemen Hindia.

Hasil dari permohonan itu—apalagi bagian yang kemudian—saya tidak perbincangkan disini; artinya itu saja sudah merupakan suatu nilai yang besar bagi kita. Bukankah permintaan itu saja sudah mengandung suatu proses, bahwa kita tidak diberi hak dan tetap tidak diperkenankan untuk membicarakan hal-hal politik, bahwa dengan perkataan lain kita dalam daerah ini tidak diberi kebebasan sama sekali? Suatu bangsa yang cinta merdeka seperti bangsa Belanda yang sekarang akan merayakan kemerdekaannya, tentu akan mengabulkan permintaan itu.

Tentang mengadakan parlemen, di situ tersimpul sejelasmungkinnya keinginan yang besar untuk tidak boleh tidak ikut serta mengeluarkan suara. Itu sangat perlu. Dimana ternyata sejelasmungkinnya dari cara bangunannya bangsa Hindia, bahwa emansipasi—proses kemerdekaan—itu cepat sekali jalannya, disitu dapat dipikirkan kemungkinan bahwa bangsa ini, yang sekarang terjajah,

suatu masa akan lebih besar dari tuannya. Bagaimana nanti, apabila 40 juta manusia yang benar-benar bangun menuntut pertanggungjawaban kepada seratus orang yang duduk dalam De tweede kamer yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat? Apakah orang pada akhirnya akan menyerah, kalau krisis sudah ada?

Rasanya janggal terdengar, bahwa komite tersebut akan meminta suatu parlemen. Selagi pemerintah hanya perlahan-lahan bekerja untuk mengadakan suatu perwakilan kolonial, di mana paling bagus beberapa orang saja diangkat oleh pemerintah sebagai apa yang dikatakan wakil kita di dalam apa yang disebut koloniale raad itu—lihat misalnya gemeenteraden—disana datang komite berlari-lari kencang dengan suatu usul yang hebat, tidak lebih dan tidak kurang suatu Parlemen Hindia.

Tampaknya maksud komite hanya memajukan protes di dalam suatu permintaan yang sekarang tidak dapat diperkenankan, dan tidak mengharapakan hasilnya. Ajaib memang adanya, bahwa tepat pada hari orang Belanda merayakan kemerdekaannya, komite datang kepada Ratu dengan permohonan untuk melenyapkan kekuasaan absolut Belanda atas suatu bangsa yang 40 juta orang jumlahnya.

Lihatlah, sekarang sudah, betapa pengaruh cita-cita perayaan itu. Tidak, sekali-kali tidak, kalau saya seorang Belanda, saya tidak akan merayakan jubileum seperti itu disini dalam suatu negeri yang kita jajah. Beri dahulu bangsa yang terjajah itu kemerdekaannya, barulah merayakan kemerdekaan itu sendiri.”

Melihat isi surat tersebut, terlihat bahwa Ki Hajar yang kala itu baru berusia 24 tahun begitu keras mengkritik pemerintah Hindia Belanda. Namun beberapa pejabat Belanda menyangsikan tulisan ini asli dibuat oleh Ki Hajar sendiri karena gaya bahasanya yang berbeda dari tulisan-tulisannya sebelumnya. Kalaupun benar ia yang menulis, mereka menganggap Douwes Dekker berperan dalam memanas-manasi Ki Hajar untuk menulis dengan gaya demikian.

Akibat tulisan tersebut ia ditangkap atas persetujuan Gubernur Jenderal Idenburg dan akan diasingkan ke Pulau Bangka

(atas permintaan sendiri). Namun demikian kedua rekannya, Douwes Dekker dan Tjipto Mangoenkoesoemo, memprotes dan akhirnya mereka bertiga diasingkan ke Belanda (1913).

Dalam pengasingan di Belanda, Ki Hajar aktif dalam organisasi para pelajar asal Indonesia, *Indische Vereeniging* (Perhimpunan Hindia). Di sinilah ia kemudian merintis cita-citanya memajukan kaum pribumi dengan belajar ilmu pendidikan hingga memperoleh *Europeesche Akte*, suatu ijazah pendidikan yang bergengsi yang kelak menjadi pijakan dalam mendirikan lembaga pendidikan yang didirikannya.

Dalam studinya ini Ki Hajar terpikat pada ide-ide sejumlah tokoh pendidikan Barat, seperti Froebel dan Montessori, serta pergerakan pendidikan India, *Santiniketan*, oleh keluarga Tagore. Pengaruh-pengaruh inilah yang mendasarinya dalam mengembangkan sistem pendidikannya sendiri.

Setelah selesai mendalami ilmu pendidikan dan meraih akta guru Eropa, Ki Hajar membelokkan arah perjuangannya ke bidang pendidikan. Setelah cukup menimba ilmu sebagai guru di *Adhi Dharmo* yang didirikan oleh kakaknya, RM Soerjopranoto, saat berusia 33 tahun, ia mendirikan sekolahnya sendiri pada 3 Juli 1922. Perguruan yang dirintisnya tersebut dikenal dengan nama Perguruan Nasional Taman Siswa (*Ondrwijs Instituut Taman Siswa*).²²

3.5. Cita-Cita Pendidikan Ki Hajar

Dalam pandangan Ki Hajar, pendidikan (termasuk pengajaran) bagi tiap-tiap bangsa berarti pemeliharaan guna mengembangkan anak cucu bangsa supaya dapat berkembang baik lahir maupun batin. Untuk itu, manusia-individu harus dikembangkan jiwa raganya dengan mempergunakan semua alat pendidikan yang berdasarkan adat Istiadat.

Pendidikan nasional bagi Ki Hajar adalah suatu sistem pendidikan baru yang berdasarkan atas kebudayaan kita sendiri dan

mengutamakan kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, intelektualisme harus di jauhi dan harus dipraktekkan sistem mengajar yang dinamakan sistem among yang mendukung kodrat alamiah anak didik, bukan dengan perintah-paksaan, tetapi dengan tuntunan, agar berkembang hidup lahir dan batin anak berdasarkan kodrat alamiahnya sendiri. Sistem pendidikan among tersebut memerlukan dua syarat utama: a) kemerdekaan sebagai syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir batin hingga dapat hidup merdeka; b) kodrat alam sebagai syarat untuk menghidupkan dan mencapai kemajuan dengan secepatnya dan sebaik-baiknya.²³

Ki Hajar mengatakan bahwa pendidikan nasional sebagaimana dianut oleh Taman Siswa adalah pendidikan yang beralaskan garis hidup dari bangsanya dan ditujukan untuk keperluan perikehidupan yang dapat mengangkat derajat negara dan rakyatnya agar dapat bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain untuk kemuliaan segenap manusia di seluruh dunia. Pada bagian lain, Ki Hajar mengatakan bahwa pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Lebih lanjut, Ki Hajar mengemukakan bahwa pendidikan yang dilakukan dengan keinsyafan, ditujukan ke arah keselamatan dan kebahagiaan manusia, tidak hanya bersifat laku pembangunan, tetapi sering merupakan perjuangan pula. Pendidikan berarti memelihara hidup tumbuh ke arah kemajuan, tak boleh melanjutkan keadaan kemarin menurut alam kemarin. Pendidikan adalah usaha kebudayaan, berasaskan peradaban, yakni memajukan hidup agar mempertinggi derajat kemanusiaan.²⁴

Menurut Ki Hajar, pendidikan kolonial yang diberikan Belanda pada saat itu tidak sesuai dengan cita-cita dan semangat pendidikannya. Menurutnya, pendidikan kolonial tidak sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia dan hanya ditujukan untuk kepentingan kolonial saja. Ki hajar menganggap bahwa pendidikan kolonial tidak dapat mewujudkan peri kehidupan bersama, dan hanya akan

menyebabkan bangsa Indonesia semakin bergantung kepada penjajah. Pendidikan yang demikian tidak akan dapat menjadikan bangsa Indonesia sebagai manusia merdeka, dan keadaan tersebut tidak akan bisa hilang jika hanya dilawan dengan pergerakan politik saja, tetapi juga harus dipentingkan pembangan hidup mereka dengan cara jalan pengajaran dan memberikan pendidikan secara nasional.²⁵

Untuk dapat melaksanakan pendidikan nasional tersebut haruslah ada kemerdekaan yang seluas-luasnya. Karenanya, kata Ki Hajar, janganlah suka menerima bantuan yang dapat mengikat kebebasan diri, dan untuk dapat berdiri sendiri haruslah dijalankan dengan cara “berbelanja sendiri” dengan bertumpu pada “kekuatan sendiri”. Selain itu, pengajaran harus tersebar kepada seluruh rakyat, jangan hanya diberikan kepada lapisan masyarakat tertinggi saja. Kekuatan bangsa tidak akan berkembang jika hanya kaum elite saja yang dapat menikmati pendidikan dan menjadi terpelajar.²⁶ Inilah yang disebut dengan prinsip demokrasi dalam pendidikan.

Rasa kemerdekaan, penghargaan kodrat anak, dan berdiri di atas kaki sendiri menjadi semangat dan tema pokok pandangan pendidikan Ki Hajar. Sementara itu, nada-nada perjuangan dalam pemikirannya muncul dari kekecewaannya atas sistem pendidikan yang diberikan Belanda saat itu. Memang pada masa Ki Hajar, pemerintah kolonial telah mulai memberikan sedikit kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mendapatkan pendidikan. Namun, menurut Ki Hajar, pendidikan yang diberikan pemerintah Belanda tersebut tidak lepas dari tujuan kolonialismenya dan bukan untuk mengangkat harkat martabat bangsa Indonesia.

“Pengajaran pada zaman sekarang tidak dapat memberi kepuasan kepada rakyat kita. Pengajaran gubernemen yang seolah-olah dijadikan contoh dan umumnya dianggap sebagai usaha untuk menjunjung derajat kita, ternyata tak dapat memberi penghidupan pada kita, yang sepadan dengan cita-cita kita sebagai rakyat yang

berusaha akan mendapatkan keselamatan. Hingga kini nasib kita semata-mata hanya member manfaat kepada bangsa lain.”²⁷

Oleh karenanya, menurut Ki Hajar, diperlukan landasan budaya dan peradaban bangsa sendiri yang menjiwai pendidikan bagi bangsa Indonesia sebagaimana terlihat pada Taman Siswa. Hal ini dikarenakan pendidikan yang diberikan oleh kolonial Belanda kepada bangsa Indonesia menyebabkan bangsa kita kehilangan kepercayaan diri, sehingga budaya kita sangat bergantung kepada masyarakat Eropa. Dalam kaitan ini, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa usaha dari perguruan kebangsaan untuk membelokkan aliran kolonial ke arah aliran nasional dengan mengadakan cara dan pengajaran sendiri, seringkali hanya dapat persetujuan dalam kata, tidak dengan tenaga, disebabkan karena umumnya orang masih mengharap dapat tempat di dalam masyarakat Hindia Belanda, sehingga seringkali aliran prinsipil nasional terdesak oleh pengaruh Eropa.²⁸

3.6. Mendirikan Perguruan Taman Siswa

Untuk mewujudkan cita-cita pendidikannya, Ki Hajar mendirikan Perguruan Kebangsaan Taman Siswa di Yogyakarta pada 3 Juli 1922. Di perguruan Taman Siswa, jenjang pendidikan terdiri atas: (1) Taman Indriya (Taman Kanak-Kanak Taman Siswa) yang ditujukan bagi anak yang berusia 5-6 tahun; (2) Taman Anak (Kelas 1-3 SD) untuk anak-anak berumur 6-7 tahun sampai dengan 9-10 tahun; (3) Taman Muda (Kelas IV-VI SD) bagi anak-anak yang berumur 10/11 tahun sampai 12/13 tahun; (4) Taman Dewasa (SMP); (5) Taman Madya (SMA); (6) Taman Guru. Taman guru tersebut juga terdiri atas beberapa tingkatan: (a) Taman Guru B I yaitu sekolah guru untuk menyiapkan calon guru Taman Anak dan Taman Muda, 1 tahun sesudah Taman Dewasa; (b) Taman Guru B II, 1 tahun setelah Taman Guru B I; (c) Taman Guru B III, 1 tahun sesudah Taman Guru B II,

menyiapkan calon guru Taman Dewasa. Pada Taman Guru B III tersebut di adakan pembedaan lagi, yaitu I Bagian A (ilmu alam/pasti) yaitu untuk mereka yang akan mengajar mata pelajaran ilmu pasti dan, II Bagian B (ilmu budaya) yaitu untuk para guru yang akan memberian pelajaran bahasa, sejarah, dan ilmu budaya lainnya; (d) Taman Guru Indriya, yaitu siswi-siswi tamatan Taman Dewasa atau sekolah lanjutan lainnya (SMP/SKP) yang ingin menjadi guru pada bagian Taman Indriya, lama pelajaran 2 tahun.²⁹

Pada akhir zaman penjajahan Belanda, Taman Siswa mempunyai 199 cabang dengan 207 perguruan yang tersebar di seluruh Indonesia dengan lebih kurang 20.000 murid dan 650 guru. Sementara itu, sesuai dengan sifat pendidikannya (kultural-nasional), maka Taman Siswa sebagai organisasi pendidikan dijalankan dalam bentuk perguruan dan asrama. Perguruan terdiri atas tempat murid belajar dan tempat kediaman guru. Dengan demikian gedung perguruan tak hanya digunakan untuk keperluan mengajar, melainkan juga tempat anak-anak berkumpul dengan gurunya sehabis pelajaran. Dengan hal itu hubungan batin antara guru dengan siswa menjadi erat dan rasa kekeluargaan menjadi terjalin.

Pada umumnya rumah Taman Siswa dipergunakan untuk pertemuan dan sebagainya. Ruangan-ruangannya dibuat praktis: dinding-dinding antara kelas yang satu dengan yang lain dibuat supaya mudah diangkat, dan bila perlu, terdapat ruangan yang luas dan dapat dipergunakan untuk keperluan lain seperti untuk rapat perayaan, dan penginapan.

Sementara itu, selain guru-guru, murid-murid yang berasal dari tempat lain akan ditempatkan di asrama. Asrama ini menjadi salah satu alat pendidikan di Taman Siswa untuk menanamkan rasa kekeluargaan. Asrama untuk anak laki-laki disebut Wisma Priya dan untuk anak-anak perempuan disebut Wisma Rini. Asrama tersebut selalu berada di bawah pengawasan para guru. Dalam Wisma rini diperhatikan juga soal-soal keputerian seperti penyelenggaraan rumah tangga, menjahit, memasak, memelihara kebun, dan olahraga. Sifat-sifat ketimuran selalu dijaga di asrama ini. Menurut Ki Hajar

Dewantara, dengan sistem pengajaran seperti inilah penyelenggaraan pendidikan akan lebih berhasil.³⁰

3.7. Kurikulum/Isi Rencana Pelajaran Taman Siwa

Sebagai seorang pemikir dan praktisi pendidikan, Ki Hajar tidak banyak memberikan definisi kurikulum seperti sebagaimana definisi kurikulum di masa sekarang.³¹ Dalam hal ini ia mengartikan kurikulum sebagai sejumlah pelajaran yang perlu diajarkan kepada para siswanya. Mengenai kurikulum, Ki Hajar mengatakan bahwa,

“Pelajaran yang diberikan kepada anak-anak boleh dibagi menjadi dua. Pertama, mata pelajaran yang selain member pengetahuan atau kepandaian juag berpengaruh pada kemajuan batin, dalam arti memasak (mematangkan) pikiran, rasa, dan kemauan. Sedangkan yang kedua adalah mata pelajaran yang akan memberi bekal pada anak-anak untuk hidupnya kelak dalam dunia pergaulan umum, yaitu mata pelajaran yang meliputi lapangan kultural dan kemasyarakatan.”³²

Isi rencana pelajaran Taman Siswa menunjukkan sifat kultural nasional. Tiap-tiap mata pelajaran diberikan sebagai bagian dari peradaban bangsa yaitu diperlukan kemauan memperbaiki semua keadaan untuk disesuaikan dengan zaman. Pemuda-pemuda tidak boleh lagi terkekang oleh ikatan tradisi dan konvensi-konvensi yang dapat menghambat pesatnya kemajuan bangsa. Semua pelajaran harus dapat perasaan cinta tanah air dan bangsa. Untuk itu, nyanyian-nyanyian nasional, cerita-cerita tentang pahlawan bangsa, mengenal keindahan alam tanah air dengan jalan dharma wisata, dan sebagainya. Menurut Ki Hajar, pelajaran tidak boleh hanya pendidikan kecerdasan, tetapi juga harus diarahkan untuk penjiwaan

dan latihan kemanusiaan, kesusilaan, dan kebudayaan yang bersifat kebangsaan.

Di Taman Siswa, para siswa mempelajari berbagai kesenian, seperti melukis, bermusik, menari, menabuh gamelan, dan kesenian lain sesuai dengan karakter kepribadian masing-masing. Menurut Ki Hajar, kesenian kebangsaan dapat diajarkan dalam kelas atau kepada masyarakat dan perlu untuk menghaluskan kesusilaan dan meneguhkan semangat kebangsaan.

Sementara itu, pelajaran bahasa Indonesia diwajibkan sebagai bahasa persatuan dan bahasa pengantar. Begitu juga dengan bahasa daerah, penting diajarkan secukupnya di daerah masing-masing. Bahasa asing diberikan untuk keperluan melanjutkan pelajaran dan untuk meningkatkan hubungan dengan luar negeri. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa semua bahasa asing hendaklah diajarkan di sekolah “untuk bahasa asing”, maksudnya adalah bahwa pada waktu memberikan pelajaran bahasa Inggris harus diupayakan supaya jangan sampai nanti murid-murid menjadi keinggris-ingrisan atau kebarat-baratan. Sedangkan untuk sejarah dan ilmu bumi tanah air sangat dipentingkan, karena mengandung banyak hal yang dapat dipakai untuk membangkitkan rasa kebangsaan.³³

3.8. Panca Dharma dan Pesan Pendidikan dari Taman Siswa

Dasar dari segala upaya Taman Siswa, baik yang mengenai pendidikan dan pengajaran, maupun yang berhubungan dengan organisasi ataupun adat istiadat dalam kehidupan Perguruan Taman Siswa adalah Panca Dharma Taman Siswa yang isinya: kemerdekaan, kodrat alam, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan.

Dengan asas kemerdekaan, diartikan disiplin pada diri sendiri, oleh diri sendiri, atas dasar nilai hidup yang tinggi, baik hidup sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan azas kodrat alam artinya bahwa pada hakikatnya manusia sebagai makhluk adalah satu dengan kodrat alam. Ia tidak bisa lepas dari kehendaknya, tetapi akan mengalami bahagia jika bisa menyatukan

diri dengan kodrat alam yang mengandung kemajuan. Karenanya, hendaklah setiap murid dapat berkembang dengan sewajarnya.

Dengan azas kebudayaan tidak berarti asal memelihara kebudayaan kebangsaan, tetapi pertama-tama membawa kebudayaan kebangsaan itu ke arah kemajuan yang sesuai dengan kecerdasan zaman, kemajuan dunia dan kepentingan hidup rakyat lahir batin pada tiap-tiap zaman dan keadaan. Sementara itu, dengan azas kebangsaan, berarti tidak boleh bertentangan dengan kemanusiaan, malah justru harus menjadi bentuk dan perbuatan kemanusiaan yang nyata dan oleh karena itu tidak mengandung arti bermusuhan dengan bangsa lain, melainkan mengandung rasa bersatu dengan bangsa sendiri, satu dalam suka cita, dalam kehendak menuju kepada kebangkitan dan kebahagiaan hidup lahir dan batin seluruh bangsa.³⁴

Untuk menyempurnakan penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam Panca Dharma tersebut, Taman Siswa mengutamakan semboyan-semboyan serta lambang-lambang dalam kegiatan pembelajaran. Hal tersebut dianggap perlu untuk mengembangkan kepribadian peserta didik, bukan saja pikirannya melainkan juga perasaannya. Semboyan-semboyan tersebut diberikan dalam bentuk sastra dan berupa lukisan atau wujud kesenian lainnya, agar anak-anak didik mudah mengingatnya. Di antara semboyan tersebut adalah: (1) *lawan sastra ngesti mulia*, yaitu semboyan yang pertama dan menjelaskan maksud berdirinya Taman Siswa. Terjemahannya adalah 'dengan kecerdasan jiwa menuju ke arah kesejahteraan; (2) *suci tata ngesti tunggal*, artinya 'dengan kesucian batin dan teraturnya hidup lahiriah, kita mengejar hidup kesempurnaan. Semboyan ini menjelaskan persatuan Taman Siswa; (3) *tut wuri handayani*, artinya 'mengikuti di belakang sambil memberi pengaruh'. Maksudnya adalah jangan menarik-narik anak dari depan. Biarlah mereka mencari jalan sendiri. Tugas guru sebagai pamong boleh ikut campur apabila anak didik salah jalan. Kemajuan yang sejati hanya dapat diperoleh dengan perkembangan kodrati siswa. Tidak perlu menggunakan perintah, paksaan, atau hukuman

dalam mendidik siswa; (4) *kita berhamba kepada sang anak*, maksudnya adalah pendidik harus ikhlas dan tidak terikat oleh apapun dan juga harus mendekati anak didik untuk mengorbankan diri kepadanya. Jadi bukan murid untuk guru, tetapi guru untuk murid; dan (5) *rawe-rawe rantas malang-malang putung*, artinya 'segala yang menghalangi akan hancur'. Semboyan ini dipakai untuk memperteguh kemauan.³⁵

3.9. Pengabdian pada Masa Indonesia merdeka

Dalam kabinet pertama Republik Indonesia, KHD diangkat menjadi Menteri Pengajaran Indonesia (Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan) yang pertama. Pada tahun 1957 ia mendapat gelar doktor kehormatan (doctor honoris causa, Dr.H.C.) dari universitas tertua Indonesia, Universitas Gadjah Mada. Atas jasanya dalam merintis pendidikan umum, ia dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia dan hari kelahirannya dijadikan Hari Pendidikan Nasional (Surat Keputusan Presiden RI no. 305 tahun 1959, tanggal 28 November 1959). Ia meninggal dunia di Yogyakarta tanggal 26 April 1959 dan dimakamkan di Taman Wijaya Brata.

Ia juga dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang ke-2 oleh Presiden RI, Soekarno, pada 28 November 1959 (Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 305 Tahun 1959, tanggal 28 November 1959). Bagian dari semboyan ciptaannya, *tut wuri handayani*, menjadi slogan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namanya diabadikan sebagai salah sebuah nama kapal perang Indonesia, KRI Ki Hajar Dewantara. Potret dirinya diabadikan pada uang kertas pecahan 20.000 rupiah tahun emisi 1998.



Muhammad Sjafei, Lahir di Ketapang, Kalimantan Barat, Tahun 1899
(Sumber : Arsip Nasional Republik Indonesia – ANRI)

3.10. Mohammad Sjafei : Tokoh Pendidikan dari Sumatera Barat

Selain Ki Hajar, tokoh pemikir besar di bidang pendidikan lain yang perlu dicatat adalah Mohamad Sjafei. Seperti juga Ki Hajar, Mohamad Sjafei juga mengabdikan hidupnya untuk membangun pendidikan dengan penekanan pada penguatan karakter bangsa. "Pendidikan yang memerdekakan" adalah slogan yang dijadikan acuan gerak dan pikir Mohamad Sjafei dalam menghadapi dominasi kolonial.

Setelah Ki Hajar Dewantara mendirikan Tamansiswa (1922), empat tahun kemudian (1926), Mohamad Sjafei menyusul langkah Ki Hajar mendirikan Indische Nationale School (INS) Kayutanam. Jika ditelisik lebih mendalam, keduanya bertalian erat dengan kesadaran politik identitas yang tercerahkan lewat bangku pendidikan. Interaksi personal kedua tokoh ini merupakan ilustrasi yang baik untuk menunjukkan betapa hubungan antara sekolah dan politik di lingkaran kaum pergerakan nasional sudah berlangsung sedemikian rupa. Bahwa terdapat hubungan signifikan antara politik dan lembaga pendidikan dalam menumbuhkan kesadaran nasional di lingkaran kaum pergerakan di zaman penjajahan. Dalam *setting* inilah sosok Mohamad Sjafei dapat diletakkan dalam peta sejarah Indonesia.

3.11. Riwayat Hidup dan Pendidikan

Muhammad Sjafei lahir di Ketapang, Kalimantan Barat, pada tahun 1899.³⁶ Meskipun berdarah Jawa asal Kediri, ia dianggap sebagai tokoh masyarakat di Sumatera Barat. Hal ini tidak lepas dari peran ayah angkatnya, Ibrahim Marah Soetan (1860-1954), seorang tokoh pendidik dan pengarang pada awal abad ke-20 yang *notabene* merupakan putra Minangkabau asal Kayutanam, tamatan *Kweekschool* (atau Sekolah Raja) Bukittinggi, yaitu sekolah guru yang paling bergengsi dan satu-satunya di Sumatera.

Setelah tamat (1890) Marah Soetan menjadi guru sekolah negeri yang berpindah tugas ke beberapa tempat di Sumatera, kemudian juga ke Pontianak, Kalimantan Barat. Ketika bertugas di Pontianak itulah ia bertemu dengan Mohammad Sjafei, yang sehari-hari bekerja sebagai penjaja makanan di sekolah tempat Marah Soetan mengajar. Karena miskin dan yatim, Mohammad Sjafei tak mampu bersekolah. Namun disela-sela berjualan ia rajin mengikuti pelajaran dari balik jendela sekolah. Perbuatan itu dilakukannya hampir setiap hari. Sang guru di dalam kelas rupanya memperhatikan kejadian ini dan suatu waktu mendekatinya dan menawarkan dirinya untuk menjadi bapak angkatnya agar ia bisa mendaftar di sekolah tersebut. Ini tentu setelah mendapat restu dari ibu kandungnya, Sjafiah. Prestasi sekolah Sjafei kecil rupanya sangat membanggakan sang ayah, sehingga setelah menamatkan sekolah rakyat di sana ia dikirim ke Sekolah Raja Bukittinggi, di mana Marah Soetan pernah bersekolah. Setelah tamat dari Sekolah Guru di Bukit Tinggi, Sjafei bekerja sebagai guru pada Sekolah Kartini di Jakarta selama 6 tahun.³⁷

Seperti telah dijelaskan di atas, Sjafei seperti juga Ki Hajar, termasuk sosok yang berupaya mengawinkan sekolah dan politik. Perkenalannya dengan dunia politik telah dimulai ketika ia bersama ayah angkatnya, Marah Soetan, tinggal di Betawi (Jakarta). Bertemu dengan banyak tokoh pergerakan yang berkunjung ke rumah mereka, termasuk dengan Ki Hajar, "tokoh tiga serangkai" yang baru keluar dari penjara, membuat Sjafei muda berkenalan dengan politik. Banyak tokoh pergerakan datang ke rumah mereka, termasuk Haji Agus Salim, Samaun dan lain-lain.

Sejak itulah, Sjafei menjadi anggota partai ayahnya, *Insulinde*, dan ia juga menyediakan waktunya untuk mengajar di Tamansiswa. Ia pun sangat menghayati cita-cita ayahnya, yang ingin mendirikan sekolah sendiri yang berada di luar sistem kolonial, sebuah sekolah yang memerdekakan jiwa dan kreativitas anak-anak di luar pakem pendidikan kolonial. Tentang ini, pendidikan di sekolah pemerintah dalam pandangan Mara Sutan tidak akan pernah menumbuhkan watak

bangsa yang "merdeka", rajin, giat, dan produktif untuk mengubah nasib rakyat. Pendidikan pemerintah hanya menumbuhkan semangat budak dan tidak memiliki solidaritas. Ia memberikan contoh semangat budak itu di sekolah. Misalnya, jika seorang murid menumpahkan tinta di mejanya, serta merta murid yang lain akan cepat-cepat mengadukannya kepada guru. Tentu dengan maksud agar temannya itu kena marah atau dapat hukuman. Tidak ada seorang pun yang menolong membersihkannya.

Sebagai guru nasionalis yang sudah bertugas demikian lama agaknya Marah Soetan menyaksikan banyak hal yang membuat dirinya tertekan atau bertentangan dengan hati nuraninya. Ia percaya hanya melalui pendidikan di luar sistem kolonial bangsa Indonesia dapat maju dan mampu mengangkat harkat dirinya sebagai bangsa yang merdeka. Meskipun demikian Marah Soetan tidak anti ilmu pendidikan Belanda. Hanya saja karena paradigma kolonial itulah yang membuat hatinya memberontak dan ingin mendirikan sekolah sendiri sesuai dengan filosofi pendidikan yang dibangunnya sendiri.

Sebagai bukti pengakuannya terhadap ketinggian ilmu paedagogi di Belanda ia pun tetap becita-cita menyekolahkan Sjafei ke Belanda. Tidak dengan beasiswa pemerintah atau lembaga Belanda, tetapi dengan biaya sendiri, walaupun dengan susah payah dan hidup berhemat. Cita-cita ini baru tercapai ketika Sjafei dalam usia 29 tahun berangkat pada tanggal 31 Mei 1922, satu tahun lebih kemudian dari Muhamad Hatta yang berangkat ke Belanda lewat Teluk Bayur bulan Juni 1921.

Dengan berbekal keyakinan akan pentingnya pendidikan, Sjafei saat berpamitan dengan sang ayah, Mara Sutan mendapat pesan khusus: "Coba kamu pelajari kenapa bangsa Belanda yang itu dapat berlama-lama menjajah Indonesia yang besar [banyak] itu". Suatu motivasi tambahan baginya untuk belajar mendalami ilmu di Negeri Belanda, di samping menjalin pergaulannya dengan mahasiwa Indonesia yang menjadi aktivis pergerakan di sana, seperti Hatta, Sjahrir dan lain-lain yang jauh lebih muda dari dirinya.³⁸

Dari negeri Belanda, Sjafei memperoleh empat ijazah: ijazah-ijazah guru Eropa, menggambar, pekerjaan tangan, dan musik. Penting dicatat, ketika Sjafei di Belanda, ekonomi dunia dilanda krisis, yang di Indonesia terkenal dengan istilah "malaise" atau oleh rakyat disebut "zaman beras mahal." Walau ekonomi krisis, selama di Belanda Sjafei menyempatkan diri mengunjungi hampir seluruh sentra industri dan sekolah kerajinan untuk keperluan studinya, untuk praktik pendidikan, dia dapat izin mengajar pada sekolah rendah Mookhoek, Rotterdam. Dan pada waktu senggang beliau sempat menulis banyak buku pelajaran membaca Arab dan Latin untuk sekolah rendah dan semua buku ini diterbitkan JB Worlter, Jakarta.³⁹

Disamping itu ia ikut aktif dalam organisasi pelajar yang didirikan oleh Mohammad Hatta yaitu "Indonesisch Vereeniging" dan menjadi redaktur rubrik pendidikan pada organisasi itu. Kebiasaan lain yang diherankan oleh Moh. Hatta yang lebih dahulu sampai ke Belanda karena Sjafei tekun dengan kerajinan tangan, baginya pelajaran kerajinan tangan dan pendidikan kerajinan tangan ada bedanya. Pelajaran kerajinan tangan dapat diberikan melalui kursus atau pelatihan, yang fungsinya untuk keterampilan tenaga kerja, sedangkan pendidikan kerajinan tangan fungsinya untuk membangkitkan minat kerajinan dan kemauan bekerja.⁴⁰

Setelah sering berdiskusi, Hatta dan Sjafei menemukan pandangan yang sama bahwa Bangsa yang merdeka adalah Bangsa yang terdidik, bukan hanya oleh semangatnya saja, tetapi oleh kadar intelektual dan kemampuan menjadi bangsa yang mandiri di bidang ekonomi, dan ekonomi bangsa dapat tegak jika kita mempunyai industri.⁴¹

Setibanya di tanah air, pada 31 Oktober 1926 Sjafei diberi tugas untuk memimpin sekolah di Kayutanam, sebuah kota kecil yang memiliki alam yang indah dan hawa gunung Singgalang yang sejuk. Pada akhirnya, sekolah ini tidak hanya dipimpin, tapi juga diserahkan sepenuhnya kepadanya sehingga melalui sekolah tersebut Sjafei dapat mewujudkan cita-citanya.⁴²

Demikianlah, Syafei dikenang sebagai tokoh pendidikan yang dalam perjalanan hidupnya selalu menerapkan ajaran dan prinsip “berdiri sendiri” yang dicontohkan oleh Ki Hajar Dewantara, termasuk dalam mengelola lembaga pendidikan yang ia kelola, Indische Nationale School (INS) Kayutanam. Dalam memimpin sekolahnya, ia akan menolak secara keras bantuan dari luar, terutama bila bantuan tersebut bersifat mengikat dan tidak memberinya kebebasan. Semua bangunan dan fasilitas sekolah adalah hasil buah karya dan kemandirian murid-muridnya sendiri.⁴³

Setelah Jepang menduduki Indonesia, Syafei masuk politik. Pada 1946 ia diangkat menjadi menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (PP dan K) dalam Kabinet Syahrir yang kedua menggantikan Todung Sutan Gunung Mulia. Kemudian ia menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung, dan pada 1950 menjadi anggota parlemen. Ia pernah mendapatkan gelar *Doctor Honoris Causa* dari IKIP Padang pada tahun 1968. Syafei meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 1969.

3.12. Cita-Cita dan Pandangan Syafei tentang Pendidikan

Sebagai tokoh pendidikan, falsafah pendidikan Syafei banyak dipengaruhi oleh pandangan Kerschensteiner dan John Dewey (aliran Sekolah Kerja). Dalam pandangan Syafei, anak-anak didik perlu belajar bekerja, agar mereka pandai dan cakap mempergunakan tangannya selain memakai otaknya. Peserta didik harus diajarkan suatu pekerjaan yang sesuai dengan pembawaan dan kemauannya demi hidupnya di masa depan. Pandangan Syafei tersebut merupakan reaksi terhadap sekolah kolonial yang mempersiapkan murid untuk menjadi buruh pada kantor-kantor pemerintah atau perusahaan-perusahaan milik orang asing. Sebagaimana KH Dewantara, Syafei menentang intelektualisme yang hanya mementingkan aspek akal (pengetahuan) saja. Menurutnya, manusia sebagai kesatuan jiwa raga, kesatuan individu, dan anggota masyarakat seharusnya diperhatikan perkembangannya. Pendidikan,

bagi Syafei, harus ditujukan untuk mencapai kepribadian yang selaras.⁴⁴

Untuk mencapai tujuan tersebut, prinsip pertama yang dipegang teguh oleh Engku Mohammad Syafei dalam pendidikannya adalah "belajar, bekerja, dan berbuat". Apabila murid hanya mendengarkan saja ilmu pengetahuan yang diajarkan guru melalui kata-kata yang kadang-kadang tidak dimengerti, tidak akan berguna bagi murid karena mereka tidak tahu dan tidak akan pandai mempergunakan pengetahuan tersebut dalam kehidupannya atau untuk memperbaiki tingkat kehidupannya kelak di kemudian hari sesudah tamat belajar.

Menurut Engku Mohammad Syafei pada setiap manusia terdapat tiga hal pokok yang dapat dikembangkan untuk mendidik manusia itu ke arah yang dikehendaki, yaitu: melihat (45%), mendengar (25%) dan bergerak (35%). Apabila melihat saja yang dilatih selama masa pendidikan, murid akan merupakan orang yang tidak berdaya dalam kehidupan masyarakat di kemudian hari, karena mereka tidak akan dapat berbuat. Begitu juga dengan mendengar saja, akan membentuk manusia peniru yang baik tanpa kesadaran. Dengan sistem yang demikian, Engku Mohammad Syafei berusaha menanamkan watak yang teguh dan pendirian yang kuat terhadap murid-muridnya serta merupakan pekerja yang ulet dan pantang menyerah.

Dengan pengalaman demikian, murid bukan saja mendapat pengetahuan teori dan praktik, tetapi juga tentang bagaimana merawat dan memelihara alat yang dipergunakan. Murid dibiasakan membuat rencana, mengetahui pelaksanaannya, dan dapat merawat sesuatu yang mereka kerjakan secara efisien dan praktis. Apabila pengalaman yang demikian sudah menjadi kebiasaan dan mendarah daging dalam kehidupan murid sehari-hari akan sangat membantunya nanti dalam menghadapi kehidupan masyarakat yang sesungguhnya.

Kebiasaan yang demikian juga menimbulkan cara berpikir yang teratur pula. Pada prinsipnya adalah pendidikan harus diberikan melalui pengalaman sendiri, dan melalui pengalaman itu akan terbentuk kebiasaan yang akan membentuk kepribadian murid yang berwatak teguh dan berpendirian kuat. Kebiasaan itu juga akan membentuk cara berpikir yang terpola. Hal itu semua paling tepat diberikan melalui mata pelajaran pekerjaan tangan dengan bekerja sambil belajar.⁴⁵ Pandangan pendidikan seperti inilah yang diterapkannya pada INS Kayutanam.

3.13. Mendirikan Ruang Pendidik INS Kayutanam

Salah satu warisan kelembagaan yang ditinggalkan oleh Sjafei adalah *Indische Nationale School* (INS) Kayutanam. Didirikan pada tahun 1926, INS mulanya merupakan singkatan dari *Indisch National School* (Sekolah Nasional Hindia-Belanda), dan di masa Jepang singkatan INS berubah menjadi "*Indonesia Nippon Sekolah*" dan setelah proklamasi, disesuaikan dengan *Indonesia Nationale School* (INS).

Terletak di atas lahan *erfpacht* seluas 18 ha, kompleks INS mulanya sangat sederhana. Saat pertama kali dibuka, Minggu 31 Oktober 1926, yakni satu tahun setelah Sjafei pulang dari pendidikan di Belanda, bangunan sekolah itu masih menggunakan rumah penduduk yang disewa, terletak di tengah-tengah Nagari Kayutanam, tidak jauh dari stasiun kereta api. Murid angkatan pertama berjumlah 79 orang. Mereka datang dari berbagai daerah. Karena gurunya hanya Sjafei seorang, murid dibagi dalam 2 kelas, belajar berganti hari. Waktu itu belum punya bangku dan meja dalam ruangan. Para murid belajar di lantai beralas tikar, sedangkan papan tulis disandarkan pada kursi. Selama sepuluh tahun pertama, atau sebelum pindah ke kompleks bangunan megah yang sekarang, suasana sekolah sebuah lembaga pendidikan menengah swasta yang bercorak khusus di Kayu Tanam, Padang Pariaman, yang banyak melahirkan tokoh masyarakat di kemudian hari.⁴⁶

INS Kayutanam mengalami pasang surut di dalam kemajuan dan pengembangannya. Namun, tidak disangkal oleh sejarah bahwa "Ruh" pendidikan INS Kayutanam yang diilhami Engku Mohammad Syafei masih tetap hidup, sebagai upaya dalam tujuannya untuk membentuk karakter bangsa yang semakin hari semakin jauh dari nilai-nilai dan bangsa yang bermartabat.

Penting pula dicatat, INS Kayutanam didirikan sebagai reaksi terhadap sistem pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Reaksi yang demikian, di Sumatera Barat juga menunjukkan aksi masyarakat yang nyata dalam berbagai gerakan. INS Kayutanam adalah salah satu bentuk gerakan tersebut, yang lahir sebagai reaksi bangsa Indonesia di Sumatera Barat.

Nama INS ini dipertahankan terus sampai sekarang. Waktu Jepang menduduki Indonesia nama INS tetap bertahan walaupun dengan mengalami perubahan seperti "*Indonesia Nippon Sekolah*". Di zaman kemerdekaan Indonesia kepanjangannya berubah lagi dengan "*Indonesia Nationale School*" dengan singkatannya INS. Sekarang ini orang lebih mengenal nama singkatan dari nama lengkapnya dengan menambahkan kata Kayutanam di belakangnya, yaitu INS Kayutanam, walaupun INS lain tidak ada lagi di Indonesia.

Engku Mohammad Syafei mempunyai pandangan bahwa Pergerakan Nasional Indonesia hanya akan berhasil mencapai tujuannya dengan cepat dan tepat, karena kemerdekaan tidak mungkin diperoleh dengan beberapa orang pemimpin saja, tetapi harus didukung oleh seluruh rakyat. Oleh karena itu, rakyat juga harus ikut berjuang dan supaya perjuangan dapat mencapai tujuan, maka rakyat perlu ditingkatkan kecerdasannya.

Untuk meningkatkan kecerdasan rakyat, pendidikan harus ditingkatkan pula yaitu pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan perjuangan mencapai Indonesia Merdeka. Tujuan pertama dari INS yaitu mendidik rakyat ke arah kemerdekaan, juga sekaligus merupakan landasan keyakinan Engku Mohammad Syafei untuk mendirikan INS. Apabila rakyat Indonesia telah mengerti arti

kemerdekaan dan dapat melihat kehidupan rakyat terjajah, maka mereka akan ikut secara sadar dalam setiap gerakan mencapai Indonesia Merdeka. Melalui pendidikan, rakyat dapat mempunyai ideologi politik dan dapat mengetahui sasaran untuk diperjuangkan. Pendidikan kemerdekaan yang diberikan Engku Mohammad Syafei melalui INS adalah kemerdekaan dalam arti yang luas, yaitu kemerdekaan berpikir, berbuat, menentukan pilihan, dan berpikir berdasarkan kenyataan.

INS juga memberikan pendidikan yang sesuai dengan masyarakat, yang bertentangan dengan tujuan pendidikan pemerintah Hindia Belanda yang hanya ingin mendapatkan tenaga terdidik yang murah untuk kepentingan mereka. Engku Mohammad Syafei menyadari, walaupun jumlah sekolah banyak didirikan Belanda, tetapi pada hakikatnya adalah untuk kepentingan mereka.

Cara tradisional dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan intelektualistis semata, tidaklah sesuai dengan perkembangan jiwa anak Indonesia. Sistem tersebut hanya akan mendidik anak Indonesia menjadi robot pemerintah Hindia Belanda yang melaksanakan kepentingan Belanda di Indonesia. Otak anak didik hanya diisi dengan bermacam pengetahuan yang kegunaannya bagi kehidupan masyarakat Indonesia belum tentu bermanfaat. Dasar pendidikan tersebut jauh berbeda dengan kenyataan hidup masyarakat Indonesia, pendidikan yang diselenggarakan Belanda tidak sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia.

Perjuangan Syafei membangun Ruang Pendidik Kayutanam dilakukan secara bertahap. Saat ruang pendidik tersebut mulai dipimpinnya, semua alat-alat dan keperluan pelajaran sangatlah sederhana dan penuh kekurangan. Murid-muridnya yang pertama, sebanyak 110 orang, tidak duduk di bangku, melainkan di atas tikar. Keadaan seperti itu berlangsung selama 9 bulan. Setelah itu, secara bergotong royong, murid-murid mendirikan sebuah bangsal yang sederhana di tengah-tengah kebun kopi. Bangsal tersebut dijadikan 4 kelas dimana saat itu muridnya sudah bertambah menjadi 200 orang. Murid-murid INS kemudian berhasil membuat bangku-bangku yang

sederhana: berkaki satu dan ditancapkan ke tanah. Semua bahan-bahan yang dipergunakan diambil dari lingkungan sekitar seperti bambu dan daun rumbia.⁴⁷

Usaha dan kerja keras Syafei dan murid-muridnya menuai hasil karena sekolahnya semakin maju dan murid-muridnya semakin bertambah. Pada tahun 1929, INS Kayutanam dipindahkan ke sebidang tanah, dengan luas 3 bau⁴⁸, yang berasal dari hutan belukar yang kemudian ditebang, dan dijadikan lahan belajar; murid-muridnya mengumpulkan bambu dan batu dari sungai. Dengan kemauan yang kuat, maka mulailah dibangun: *pertama*, lima bangunan sekolah sebagai tempat mereka belajar, masing-masing berukuran 7 x 35 meter. Bangunan ini masih sangat sederhana, tiangnya dari kayu, dinding dari bamboo, dan atapnya dari daun rumbia; *kedua*, sebuah pondok yang didirikan dekat bangunan sekolah yang disediakan sebagai tempat kediaman pemimpin sekolah; *ketiga*, bangunan tempat belajar bertukang kayu, mengerjakan besi, kaleng, menganyam, membuat barang-barang keramik, dan membuat patung dari tanah. Semua bangunan tersebut dikerjakan sendiri oleh murid-murid dengan bantuan dan petunjuk dari dua orang tukang.

Pada tahap selanjutnya, sekolah yang dimulai dengan usaha yang sangat bersahaja tersebut pada akhirnya menjadi sangat luas dan mempunyai tempat-tempat untuk membuat kerajinan, bermain sandiwara, berolahraga, serta mempunyai kolam renang, lading pertanian, dan toko koperasi. Upaya perluasan tersebut dimulai sejak 1932, setelah pemerintah membelikan sebidang tanah dengan 15 bau yang terletak di desa Pelabihan, 2 km dari Kayutanam. Pada awalnya tanah tersebut masih berupa hutan belukar yang berawarawa dan berbukit-bukit. Setelah murid-murid Ruang Pendidik selesai merambah belukar dan menimbun rawa-rawa, maka dimulailah usaha-usaha mengumpulkan bahan-bahan untuk gedung sekolah yang baru. murid-murid giat mengumpulkan uang dengan cara mengadakan pertunjukan sandiwara dan pameran hasil-hasil pekerjaan tangan. Hasil dari upaya tersebut digunakan untuk

membeli keperluan yang tidak dapat dibuat sendiri dengan dibantu sumbangan dari beberapa dermawan.⁴⁹

Dari perjuangan tersebut, maka berdirilah bangunan-bangunan baru yang lebih kokoh dan rapi berupa gedung-gedung sekolah, rumah-rumah guru, pesanggrahan dan asrama yang dapat menampung 300 orang murid, ruang makan dengan dapurnya, tempat bekerja, gedung kesenian, tempat bermain tenis, tempat bermain bola, tempat berenang, dan taman bacaan. Setelah semuanya rampung, maka pada 1939, semua kegiatan pembelajaran INS Kayutanam dipindah ke tempat belajar yang baru dibangun tersebut. INS Kayutanam yang ketika itu mempunyai sekitar 600 orang murid, merupakan sebuah masyarakat kecil yang senantiasa sibuk dan membangun.⁵⁰ Syafei, dalam hal ini, telah mencontohkan kepada murid-muridnya sebuah model pendidikan yang tidak hanya mementingkan intelektulitas, melainkan merangsang peserta didiknya untuk menerapkan pengetahuannya dalam sebuah proses kerja yang kreatif dan penuh pengabdian.

Pada zaman Belanda, Ruang Pendidik INS dibagi ke dalam dua tingkatan ruangan, yakni ruang bawah dan ruang atas. Ruang bawah difungsikan untuk sekolah rendah (sekolah dasar) dengan lama belajar 7 tahun. Di ruang ini pelajaran terbagi ke dalam dua kelompok: pelajaran teori dengan jam pelajaran lebih banyak (75%) dan pelajaran praktek (25%). Pelajaran diberikan pada pagi dan sore hari. Sementara ruang atas berfungsi sebagai sekolah menengah dengan lama belajar 6 tahun. Di ruang ini, pelajaran di ruang bawah diperdalam dan diperluas dimana jam pelajaran praktek diberikan lebih lama (50%). Selesai belajar di ruang ini murid-murid diberikan kesempatan langsung untuk mengabdikan ilmunya kepada masyarakat.⁵¹

3.14. Tujuan Sekolah Menurut Syafei

Melihat pandangan Syafei tentang pendidikan dapat diarahkan dengan melihat pandangannya tentang tujuan Syafei.

Adapun tujuan sekolah yang diselenggarakan oleh Mohammad Syafei adalah: (1) mendidik anak-anak agar mampu berpikir secara rasional, (2) mendidik anak-anak agar mampu bekerja secara teratur dan bersungguh-sungguh, (3) mendidik anak-anak agar menjadi manusia yang berwatak baik, (4) menanamkan rasa persatuan.⁵²

Tujuan yang *pertama*, yaitu mendidik anak didik agar berpikir rasional. Menurut Syafei, dengan tujuan ini, ia ingin mengarahkan anak didiknya kepada hal-hal yang praktis agar mereka nantinya dapat memegang peranan tertentu yang menguntungkan masyarakat. Untuk itu anak-anak didik sebagai calon anggota masyarakat harus memiliki kecakapan dan keterampilan praktis. Karena itu itulah ia mengikuti aliran Sekolah Kerja-nya John Dewey. Untuk tujuan yang *kedua*, yaitu mendidik anak-anak agar bekerja teratur dan bersungguh-sungguh, pandangan Syafei berkenaan dengan hubungan antara berpikir dan berbuat. Ia berpendapat bahwa kemiskinan dan kesengsaraan sebagian besar disebabkan rakyat kurang mampu menggunakan otaknya. Dengan pertimbangan tersebut, setiap hari anak didik INS Kayutanam dilatih pikirannya dan dibiasakan untuk bekerja secara sistematis, beraturan, dan efisien.

Demi terciptanya mental peserta didik yang dapat bekerja teratur dan bersungguh-sungguh, maka keterampilan tangan dijadikan mata pelajaran yang sangat penting. Anak-anak di tiap kelas mendapat pekerjaan tangan satu setengah sampai 3 jam sehari. Pekerjaan tersebut diberikan seluas-luasnya, dari yang seringannya seperti membuat alat-alat pelajaran dari kayu, bambu, rotan, tanah liat, bercocok tanam, beternak dan keterampilan lain, hingga kepada pekerjaan yang tergolong besar seperti mendirikan ruangan untuk belajar, tempat kediaman murid dan guru, tempat bermain sandiwara, bahkan membuat lapangan olahraga. Dengan kegiatan tersebut, sekolah menutupi sendiri biaya yang diperlukan. Di sini, pendidikan bagi Syafei benar-benar dipersiapkan supaya peserta didik dapat mandiri dan disiplin dalam bekerja.

Tujuan kedua di atas kemudian berkaitan dengan tujuan yang *ketiga* yaitu membentuk pribadi-pribadi peserta didik yang memiliki

watak yang baik. Sependapat dengan Dewey, Syafei beranggapan bahwa sistem belajar dengan jalan bekerja itulah yang dapat membentuk watak peserta didik. Sementara tujuan yang keempat, yaitu menanamkan rasa persatuan dan kesatuan, dengan segala upaya Syafei ingin menanamkan rasa persatuan dan perasaan bekerja sama antara murid-muridnya. Dengan mendirikan ruangan belajar, membuat lapangan olahraga, mengangkut batu dari sungai, dan sebagainya, perasaan persatuan akan muncul dengan sendirinya. Juga dalam berbagai permainan sandiwara, musik, olahraga, perasaan bersatu dan bekerjasama tersebut akan berlangsung secara memuaskan. Untuk lebih mempererat perasaan bersatu, maka di kalangan murid-murid didirikan koperasi. Usaha ini dapat dianggap sebagai latihan bekerja sama dalam lapangan ekonomi.⁵³

Demikianlah tujuan-tujuan pendidikan Syafei yang diterapkan di ruang pendidik INS Kayutanam yang sarat dengan upaya pembentukan nilai-nilai dan karakter siswa. Untuk keperluan tulisan ini, berikut akan diperinci lagi bagaimana prinsip-prinsip atau konsep pendidikan INS Kayutanam yang dibangun Syafei. Semua prinsip yang akan dijelaskan berikut sepenuhnya dikutip dan ringkas dari buku *Perubahan Sosial dan Pendidikan* karangan Prof. HAR Tilaar. Menurut catatan Tilaar, ada lima prinsip atau pengertian atau konsep Ruang Pendidik INS Kayutanam: *pertama*, pendidikan terjadi di dalam ruang pendidik. Dengan mengacu pandangan Habermas mengenai ruang hidup (*Lebenswelt*), Tilaar mengatakan bahwa perkembangan pribadi manusia tidak terjadi di ruang hampa, tetapi di dalam suatu ruang yang nyata, yang terus menerus berkembang. Di dalam ruang tersebut terdapat alam sekitar yang memberikan rangsangan terhadap perkembangan individu. Di dalam ruangan itu pula berisi kekayaan alam sekitar, kekayaan alam Indonesia yang perlu dimanfaatkan oleh manusia Indonesia yang ada di dalamnya. Dalam hal ini, Syafei menngisi betapa kekayaan alam Indonesia tidak dinikmati oleh rakyatnya sendiri oleh karena ketidaktahuan atau ketiadaan keterampilan untuk mengolahnya. Oleh karenanya, Syafei menjadikan Ruang Pendidik INS Kayutanam sebagai ruang tempat

peserta didik berdialog dengan para pendidik dan berdialog dengan alam sekitarnya. Untuk tugas tersebut peserta didik mengembangkan potensi sebagai pemain di dalam dialog dengan alam sekitarnya. Tidak mengherankan apabila kampus INS Kayutanam bukannya hanya berisi ruang-ruang kelas yang kaku, tetapi juga bengkel-bengkel kerja, area pertanian dan perikanan, sarana olah raga, sarana beribadah dan juga berbagai sarana untuk berbagai kegiatan dimana masyarakat sekitar ikut serta di dalamnya.

Tujuan pendidikan Ruang Pendidikan INS Kayutanam adalah untuk mengembangkan sifat kemanusiaan yang tinggi, aktivitas yang besar, mengembangkan daya kreativitas bahkan mencipta sesuatu yang baru dan meniru bebas, tatacara hidup yang demokratis, jasmani yang sehat, keuletan, ketajaman berpikir secara logis dan perasaan yang halus serta peka. Inilah gambaran seorang arif yang bukan saja pandai tetapi juga berbudi luhur. Oleh sebab itu pula, sistem pendidikan Ruang Pendidik INS Kayutanam mempunyai asrama sebagai arena pembentukan watak peserta didiknya.

Kedua, adalah seni. Pada umumnya, di dalam kurikulum modern, seni merupakan pelajaran yang kurang penting, sekedar pengisi waktu dan dianggap tidak begitu bermanfaat, apalagi di dalam program untuk mengejar dan memperoleh ijazah formal. Di dalam Ruang Pendidik INS Kayutanam, seni merupakan bagian integral dalam pembentukan kepribadian peserta didik. Seni adalah bagian kehidupan manusia. Intelektualisme yang merupakan ciri pendidikan kolonial pada waktu itu diimbangi dengan pendidikan seni yang sangat penting dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mengembangkan manusia yang berwatak dan berbudi pekerti yang halus. Program-program kesenian merupakan program yang tak terpisahkan dalam kurikulum INS Kayutanam seperti menggambar, melukis, seni suara, dan berbagai jenis kesenian lainnya. Ternyata jauh sebelum lahirnya konsep-konsep *Emotional Quotient* (EQ), perkembangan antara otak kiri dan otak kanan, Moh. Syafei telah mengantisipasi suatu pendidikan yang lebih sempurna dari sekedar pengembangan intelektual manusia.

Begitu juga halnya dengan seni pekerjaan tangan yang dianggap mata pelajaran yang rendah dan hanya bermanfaat bagi orang-orang dungu, ternyata mempunyai manfaat yang besar, bukan saja di dalam pengembangan seni budaya, melainkan juga tetapi juga memberikan hasil produktif dalam memperbaiki tingkat ekonomi seseorang. Visi Ruang Pendidik Kayutanam yang sangat menghargai makna pelajaran keterampilan atau pekerjaan tangan membuktikan betapa pelajaran tersebut telah memberikan manfaat yang sangat besar bagi pemilikinya.

Ketiga, lembaga Ruang Pendidik INS Kayutanam sebagai pusat pengembangan sosial budaya. Sesuai dengan prinsip pendidikan berbasis masyarakat, maka Ruang Pendidik INS Kayutanam telah memberikan suatu model yang hidup bagaimana suatu lembaga pendidikan merupakan pusat pengembangan sosial budaya lokal. Lembaga pendidikan bukanlah semata-mata sebagai pabrik ijazah tetapi merupakan lembaga sosial (*social institution*) sebagai agen perubahan sosial. Ruang Pendidik Kayutanam memang tidak melarang bahwa peserta didiknya yang cerdas akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Program pendidikan INS Kayutanam, sebagaimana telah digariskan oleh Syafei, ialah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi semua peserta didik untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya agar bermanfaat bagi dirinya, masyarakat lokal bahkan nasional. Karenanya, nilai-nilai intrinsik Ruang Pendidik INS Kayutanam sesuai dengan otonomisasi pendidikan tidak dapat diubah sekedar untuk mengikuti arus. Keunikan lembaga INS Kayutanam justru terletak antara lain di dalam fungsi sosial budayanya, yaitu sebagai agen penggerak perubahan sosial bagi masyarakat sekitarnya.⁵⁴

Pandangan Syafei tentang pendidikan bahkan telah melampaui zamannya mengenai peranan pendidikan dasar bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Ia, Syafei, dalam sebuah tulisannya puluhan tahun yang lalu, seperti dicatat Tilaar, telah mengemukakan kondisi pendidikan dasar Indonesia yang perlu ditingkatkan antara lain:⁵⁵ *pertama*, negara kita masih terbelakang.

Oleh sebab itu, yang kita perlukan adalah kecerdasan praktis, kemauan kerja keras, kemauan untuk berjuang, keluwesan pergaulan, dan kejujuran; *kedua*, alam Indonesia kaya raya. Namun demikian, menurut Syafei, bangsa Indonesia belum sepenuhnya menikmati kekayaan alamnya karena kita tidak mempunyai kemampuan untuk mengolah kekayaan sendiri, sehingga dengan demikian bangsa lain yang menikmatinya. Oleh sebab itu, pendidikan kita harus belajar dari hal-hal yang telah dialami bangsa lain sehingga kita dapat memperkecil kesenjangan (*gap*) dengan bangsa-bangsa yang telah maju.

Ketiga, letak negara Indonesia yang sangat strategis. Hal ini meminta kepada bangsa Indonesia betapa pentingnya untuk mempunyai kemampuan yang dapat bersaing agar tidak menjadi serbuan dominasi bangsa-bangsa asing yang kuat. *Keempat*, dominasi pengaruh asing. Dalam hal ini, Syafei pernah mengatakan bahwa kita tidak usah malu mempelajari dari bangsa lain hal-hal yang terbaik, sedangkan yang ada dalam diri sendiri jangan dipandang rendah dan tidak bermutu. Ini artinya, kita kehilangan kepercayaan akan identitas diri kita sendiri. Juga yang merupakan kekhawatiran kita ialah sikap mental bangsa asing yang mau bekerja keras. Inilah yang perlu diteladani dari Syafei. *Kelima*, faktor-faktor sosiologis. Menurut pengamatan Syafei, bangsa Indonesia cenderung menyerah pada takdir. Kemelaratan dianggap sebagai takdir. Sikap ini perlu diubah. Kita mencari yang lebih dari yang kita perlukan, supaya kelebihanannya dapat digunakan untuk menolong orang lain. Selain itu, hubungan yang terlalu menggantungkan diri kepada orang lain seperti kepada hubungan kekeluargaan yang cenderung menghalangi kemajuan orang lain. Oleh sebab itu, bangsa kita harus dididik pada sikap kemandirian dan tidak malas dan menggantungkan diri kepada keluarga. Pandangan hidup pemurah dan memberi perlu ditingkatkan, sedangkan mudah meminta bantuan sebelum bekerja keras perlu diubah sejak kecil. *Keenam*, bangsa dan negara kita harus mengurangi ketertinggalan. Pandangan ini sangat melihat ke depan, apalagi dunia yang mengglobal dewasa ini dengan adanya persaingan

yang ketat antarnegara. Oleh sebab itu, kita harus terus menerus berusaha untuk mengurangi ketertinggalan.

Demikianlah beberapa pandangan dan prinsip pendidikan Mohammad Syafei lebih kurang setengah abad yang lalu yang tetap relevan dengan masa sekarang. Hal inilah yang ingin Syafei wujudkan dalam Ruang Pendidik INS Kayutanam untuk menghasilkan manusia-manusia yang percaya diri, mandiri, punya harga diri, suka bekerja keras untuk kesejahteraan diri dan bangsanya. Prinsip-prinsip pendidikan Syafei tersebut sungguh sangat layak diteladani oleh generasi pendidik dan anak didik di era sekarang dalam rangka mengembangkan dan menguatkan karakter dan mental bangsa.

3.15. Pemikiran Pendidikan Mohammad Sjafei

Pendidikan untuk apa? Itulah pertanyaan filosofis yang paling mendasar tentang hakekat pendidikan yang digagas Mohammad Sjafei. Kalau pertanyaan ini diajukan ke kasus pendidikan kolonial: "pendidikan untuk apa", maka jawabannya sudah jelas, yakni—sesuai dengan paradigma pendidikan kolonial—untuk memelihara *status quo* kekuasaan kolonial. Pendidikan dalam paradigma kolonial tidak lain dimaksudkan sebagai alat atau tempat latihan bagi anak-anak bumiputra terpilih untuk kemudian menjadi perpanjangan tangan kekuasaan Belanda.

Namun apabila pertanyaan itu diajukan Mohammad Sjafei dengan "Ruang Pendidik INS", maka kita akan menemukan semacam *paradigma* pendidikan yang sama sekali lain dan bahkan bertentangan dengan paradigma pendidikan kolonial. Bagaimana filosofi pendidikan INS dikonstruksikan akan terlihat dari paradigma pendidikan yang dirumuskannya. Ia terdiri dari sejumlah unsur pemikiran yang satu sama lain bertalian menjadi suatu sistem, yakni sistem berfikir tentang (1) tujuan pendidikan; mengapa tujuan itu harus dirumuskan seperti itu; apa latar belakang atau asumsinya; (2) bagaimana misinya untuk mencapai tujuan itu dirumuskan (4) bagaimana pendidikan itu dikelola; (5) apa instrumennya dan apa saja

kurikulumnya; (6) siapa saja yang dilibatkan di dalamnya dan mengapa dan seberapa jauh pelibatan mereka di dalamnya? Jawaban pertanyaan ini pada gilirannya menjawab *hakekat* tujuan pendidikan itu sendiri. Dalam bahasa teknis filsafat tujuan tertinggi (*ultimate goal*) yang ingin dicapai disebut *teleologis*, yaitu suatu titik akhir di mana sebuah proses akhirnya mencapai tujuan apabila ia memiliki makna bagi penciptanya.

Terkait hal tersebut, Mestika Zed memetakan beberapa pemikiran Mohammad Sjafei, sebagai berikut.⁵⁶

- *Hakekat Tujuan Pendidikan*

Moh. Sjafei merumuskan dua tingkat tujuan pendidikan, yakni (i) tujuan yang bersifat tetap (permanen), atau *ultiamate goal*, dan (ii) tujuan yang bisa berubah sesuai dengan tuntutan zaman dan/atau arah atau tahap tertentu sebagaimana yang diinginkan dalam konteks waktu dan kebutuhan berbeda-beda. Dalam merumuskan tujuan asasi pendidikan Moh. Sjafei muda menyatakan bahwa: “ Dalam sekolah mereka diajar mengasah otak, dalam asrama mengasah budi, tenaga dan bakat. Dengan cara begini kita barulah kita dapat mencapai kemajuan bagi bangsa yang mampu mengurus bumi dan tanah air.” (Sjafei, 1926).

Selanjutnya ia secara gamblang ia menyatakan tujuan pendidikan yang sebaik-baiknya bagi Indonesia – sebagaimana yang difikirkannya untuk INS Kayutanam ialah – pendidikan yang memerdekakan, yaitu membebaskan alam fikiran murid dari sekat-sekat alam dan manusia untuk mencapai “gilang-gemilang lahir dan bathin” (Sjafei 1956: 6).

Mengapa Moh. Sjafei merumuskan tujuan seperti itu dan apa latar belakang atau asumsinya? Ini jelas berkait erat dengan konsepsinya tentang alam dan manusia. Konsepsi itu bersifat historis, dalam arti hasil interaksi dirinya dengan lingkungannya dalam perjalanan waktu, baik itu di lingkungan rumah tangga, maupun di lingkungan masyarakat kolonial dalam arti luas dan lingkaran kaum pergerakan khususnya.

- *Konsepsi tentang Alam dan Manusia*

Konsepsi filsafat pendidikan Moh. Sjafei bertolak dari pemahaman tentang alam dan manusia sebagai dunia kehidupan organis yang penuh arti. Alam adalah “mahaguru kita di sekeliling kita” ungkapnya. Jika diperhatikan dengan “sepuh hati,” demikian Sjafei, “maka tampak dengan jelas ke arah mana pun juga mata ditunjukkan selalu bertemu dengan keaktifan. Kata “keaktifan” mengandung “gerak” atau dinamika yang tak pernah berhenti. Ia memberi contoh dengan kehidupan tumbuh-tumbuhan, hewan, cakrawala perairan, angin dan sebagainya. Tanpa mencari-cari siapa yang mengadakan itu – ia tidak menyatakannya, tetapi jelas maksudnya ialah Allah swt. Sesuai dengan keyakinan agamanya, Islam – maka orang harus mengakui bahwa alam bersisi jiwa keaktifan.

- *Alam Berkembang Jadi Guru*

”Jikalau sekiranya keaktifan di alam semesta ini berhenti maka musnahlah sekaliannya.” Sjafei lalu mengambil contoh dengan pengandaian bahwa sekiranya pada tanggal tertentu, katakanlah, pukul 12 tengah hari seluruh keaktifan di alam semesta berhenti, apakah yang akan kita alami? Oleh karena bumi tidak berputar lagi, jadi hanja diam pada tempatnya maka urat-urat kaju tidak mengambil makanannya dari dalam tanah, daun-daun tidak memasak makanannya, hewan-hewan tinggal diam sadja, angin tidak berhembus, hujan tidak turun. Maka di segala lapisan alam semesta keaktifan terhenti, diganti dengan kepasipan. Apakah jang akan terdjadi? Jawabnya ialah kemusnahan jang akan terjadi di seluruh alam semesta ini.”

- *Manusia: Makhluk Berkeaktifan*

Demikian juga halnya dengan alam manusia. Ia memisahkan manusia dalam dua kategori: manusia individual (perorangan) dan

manusia sebagai kesatuan dalam masyarakat. Pertama, berkenaan dengan keaktifan yang ada di dalam tubuh manusia seperti yang terlihat dari anatomi organ tubuh: jantung, urat-urat sjaraf, darah, ginjal dan sebagainya. Semua bagian tubuh itu bekerja terus, sebab itulah maka manusia hidup, meskipun mata kita tidak melihat itu semuanya. Tetapi kita harus mengakui keadaan tersebut. Kedua berkenaan dengan keaktifan yang ditimbulkan oleh masyarakat manusia.

Dalam hal ini, Sjafei melihat perkembangan masyarakat dalam hukum tiga taraf. Mirip dengan "hukum tiga tahap" dari Comte, yang menggambarkan tiga tahap perkembangan kebudayaan manusia dalam tiga zaman berbeda dalam taraf hidup masing-masingnya, Sjafei juga menggambarkan perkembangan kebudayaan melalui tingkat "keaktifan" masyarakat dalam "tiga taraf": Pertama, taraf hidup sederhana, di mana keaktifan manusia menurutnya masih sangat rendah. Manusia hidup bersahaja sekedar memenuhi syarat kebutuhan hidup yang rendah dengan ciri bergantung pada alam. Mereka "tidak berumah, tidak berpakaian menurut pengertian kita." Pada taraf ini sedikit sekali "keaktifan" manusia, kecuali hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sangat sederhana.

Kedua, taraf hidup sudah agak lebih maju, di mana keaktifan masyarakat manusia sudah lebih tinggi dari taraf I. Masyarakat pada taraf ini tidak puas lagi dengan apa yang dicapai oleh masyarakat pada taraf I, baik dalam soal makanan, pakaian, perumahan maupun dalam banyak hal mutunya pun sudah bertambah tinggi tingkatannya. Keaktifan di masyarakat taraf II ini sudah jauh lebih besar dari keaktifan dalam masyarakat I. Ciri utamanya ialah perhubungan dengan masyarakat luar masih terbatas, sebagian besar keperluan diadakan sendiri (subsistensi) dan segala sesuatu dikerjakan dengan manual. Meskipun demikian keaktifan dalam masyarakat pada tahap ini sudah cukup tinggi, mereka bahkan mampu mentjiptakan "proyek-proyek besar" yang sampai sekarang masih dikagumi oleh manusia zaman sekarang. Dalam hal ini Sjafei tidak memberikan contoh apa yang dimaksudkannya dengan karya

besar manusia pada tahap ini kecuali menyebutkan "penggalian-penggalian di berbagai muka bumi kita menimbulkan kekaguman umat zaman sekarang. Ini maksudnya mungkin berkenaan dengan penemuan peninggalan besar di masa lalu seperti piramid di Mesir atau candi Borobudur di Jawa atau peradaban tua lainnya di sekitar Mesopotamia, yang pernah berkembang pada abad-abad sebelum Masehi dan sesudahnya.

Ketiga, taraf hidup lebih tinggi, yang tingkat keaktifan juga lebih besar pula. Sjafei mengacu pada belahan bumi berhawa sedang seperti di Eropa, sebagian dari Asia, sebagian dari Amerika, Afrika Selatan, Australia dan Nieuw Zeeland. Sebagian besar kawasan itu diduduki oleh bangsa Eropa. Sekarang orang-orang daerah sedang itulah yang termadju mempunyai keaktifan yang sangat besar. Mereka aktif menyelidiki alam dan temuan-temuan mereka tidak hanya untuk dipakai sendiri, melainkan juga untuk orang lain dengan tujuan menguntungkan dia pula. Mereka ini sangat taat mengambil contoh pada alam semesta. Mula-mula, kata Sjafei, diselidikinya segala sifat alam. Sesudah itu dalil-dalil yang terdapat itu diwujudkan penciptaan benda-benda lain. Dengan jalan demikian mereka dapat menciptakan yang baru berdasarkan yang sudah ada. Keaktifan mereka itu, menurut Sjafei terletak dalam menyelidiki, meniru dan mengadakan yang baru dengan hukum yang telah diperolehnja. Dalam terminologi sekarang ialah riset, improvement dan inovasi.

Tesis utama Sjafei dalam melihat perkembangan kebudayaan ialah apa yang disebutnya "keaktifan", suatu konsep mengenai gerak hidup yang berdinamika. Semua ini dimungkinkan bagi manusia yang bekerja keras terus-menerus. Mereka tidak pernah berhenti sesudah mendapat suatu temuan baru. Di samping mencari sesuatu yang baru, yang sudah dapat sebelumnya diperbaiki pula. Safei memberi contoh pada teknolgi penerangan. Mula-mula gemuk binatang dijadikan bahan penerangan, kemudian lilin, lalu lampu minyak tanah kemudian lampu gasolin, kemudian lampu listrik. Demikianlah pertumbuhan lampu penerangan, ber-tambah lama bertambah sempurna yang menghendaki keaktifan yang bersambung-sambung!

Sebaliknya, mustahil mencapai kemajuan kalau tidak ada "keaktifan".

- *Konteks Historis Pemikiran Pendidikan INS*

Menurut Moh. Sjafei, pertumbuhan ilmu dalam sejarah Timur dan Barat memiliki perbedaan nyata. Orang Timur banyak mempergunakan waktunya untuk ilmu kebatinan, sedangkan orang Barat banyak melakukan usaha untuk memperdalam ilmu keduniaan (sekuler). Keduanya memiliki konsekuensi yang berbeda pula. Di Timur berkuasa ilmu gaib atau metafisika, Barat menguasai ilmu bendawi (fisika). Sebenarnya, baik di Timur, maupun di Barat pada mulanya sama-sama mengenal ilmu kebatinan. Ini misalnya terlihat dari hukum tiga tahap Comte, yaitu apa yang disebutnya "fase metafisis". Pada tahap tertentu Timur pernah lebih maju daripada Barat. Hanya saja Barat melakukan loncatan peradaban ketika mereka menambah programnya dengan ilmu keduniawian. Dalam sejarah Barat (Eropa) ini dapat dikembalikan ke zaman "Renaissance" abad ke-13, ketika manusia mulai membebaskan diri mereka dari kuasa alam gaib. Kekuatan penggerak perubahan itu menurut Comte ditentukan oleh kemajuan nalar atau otak manusia. Maka dalam sejarah Barat ada suatu zaman yang dijuluki dengan istilah "*the Age of Reason*" (era nalar) sebagai kelanjutan dari zaman *renaissance*. Inilah zaman permulaan zaman modern Barat. Sejumlah bangsa-bangsa di Timur yang sedang bergerak ke arah ini, menurut Sjafei ialah Jepang, Tiongkok dan India. (Dewasa ini ketiga negara yang disebut Sjafei menjadi saingan global yang cukup mencemaskan Barat).

Sementara itu Indonesia masih terbenam dengan alam kebatinan. Meskipun demikian, Moh. Sjafei melihat peluang untuk mencapai kemajuan seperti Barat, tetapi baginya kekuatan yang menentukan itu bukan "nalar" semata seperti yang diidentifikasi Comte, dan juga bukan kekuatan "jiwa" atau "roh Tuhan" di dunia seperti yang ditemukan dalam filsafat Hegel. Bagi Sjafei kekuatan

yang menentukan itu ialah apa yang disebutnya energi "keaktifan", yaitu kekuatan gerak yang muncul dari kombinasi semangat jiwa dan penalaran ilmu dan kecekatan: otak, hati dan tangan.

Jadi, sebagaimana diketahui, konsep pendidikan Sjafei tak sekedar mendidik nalar menjadi pintar, melainkan harus ditambahkan kekuatan jiwa, antara lain kebangsaan. Pertolongan untuk keluar dari keaktifan yang rendah itu ialah pendidikan dan pengajaran yang efektif. Artinya pendidikan dan pengajaran yang mengandeng sekalian inti-inti dari tjita-tjita bangsa Indonesia! Inti-inti dari cita-cita kebanggaan itu terdiri dari sejumlah sistem nilai yang menjiwai suasana bathin dan perilaku anakbangsa seperti kemandirian, dalam arti percaya diri, siap menjadi diri sendiri, berani berdiri di atas kaki sendiri dalam arti tidak tergantung pada orang lain. Dalam bahasa Belandanya ialah *op zijn eigen benen kunnen staan*; aktif-kreatif dan inisiatif, berkecakapan untuk mencipta dan bukan menjadi "pak tiru" bulat-bulat, "berperasaan" tanggung djawab akan keselamatan negara dan bangsa Indonesia dan kemanusiaan; berkeyakinan demokrasi dalam hak dan kewadajiban berjasmani sehat, ulet tajam berpikir serta logis, berperasaan halus dan tajam.

Tampak bahwa unsur kebangsaan amat kuat dalam pemikiran Moh. Sjafei. Di sini kita berjumpa dengan semangat zaman yang menjiwai pemikiran pendidikannya, yaitu semangat nasionalisme anti-kolonial. Semua ini tercermin dari paradigma pendidikan yang dikembangkannya, yang kesemuanya diarahkan untuk memperkuat karakter bangsa.



Rahmah el-Yunusiah, Lahir di Bukit Surungan Padang Panjang 20 Desember 1900

(Sumber : Arsip Nasional Republik Indonesia – ANRI)

3.16. Rahmah el-Yunusiah: Pejuang Pertama bagi Pendidikan Kaum Wanita

Jika Ki Hajar Dewantara dan Mohammad Syafei bergerak dalam lokus pendidikan nasional, Rahmah el-Yunusiah lebih terekam sebagai tokoh yang bergerak dalam penguatan pendidikan Islam, terkhusus bagi kelompok perempuan di Indonesia.

Dalam arus perkembangan sejarah Indonesia, kemunculan tokoh Rahmah el-Yunusiah tidak bisa dilihat terpisah dari gerakan pembaharuan Islam yang secara intensif berlangsung di Indonesia pada awal abad ke-20. Sebagaimana dibahas secara singkat di atas, kebijakan politik etis kolonial pada awal abad ke-20 telah melahirkan masyarakat Muslim baru, berbasis di wilayah perkotaan, yang sangat akrab dengan pranata sosial-budaya dan pemikiran modern. Corak masyarakat Muslim inilah yang kemudian tampil menjadi aktor utama dalam gerakan pembaharuan Islam. Di samping seruan untuk kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah, mereka pada saat yang sama juga mendirikan lembaga-lembaga sosial-keagamaan dan pendidikan yang mengadopsi unsur-unsur modern. Seruan kagamaan tersebut memang dikemukakan dalam rangka menjadikan Islam terintegrasi ke dalam kehidupan modern, yang mengemban cita-cita kemajuan bagi pemeluknya.

Ada beberapa faktor pendorong timbulnya ide-ide pembaharuan tersebut: *Pertama*, adanya kecenderungan umat Islam untuk kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadits. Kecenderungan itu dijadikan titik tolak dalam menilai kebiasaan agama dan kebudayaan yang ada. Ide pokok dari keinginan kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadits ini dalam rangka menolak taklid. *Kedua*, timbulnya dorongan perlawanan nasional terhadap penguasa kolonial Belanda. *Ketiga*, usaha yang kuat dari orang-orang Islam untuk memperkuat organisasinya di bidang sosial ekonomi, baik untuk kepentingan mereka sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat. *Keempat*, dorongan berikutnya berasal dari pembaharuan pendidikan Islam.

Karena cukup banyak orang dan organisasi Islam yang tidak puas dengan metode tradisional dalam mempelajari Al-Quran dan studi agama. Pribadi-pribadi dan organisasi Islam pada awal abad ke-20 berusaha untuk memperbaiki pendidikan Islam baik dari segi metode maupun isi.

Sejarah membuktikan bahwa setiap pemikiran akan berkembang dalam masyarakat bila didukung oleh beberapa faktor: *Pertama*, ketokohan orang yang membawa ide; *kedua*, kekuatan ide yang dikembangkan bersifat rasional dan argumentatif; *ketiga*, momentum sejarah yang memberi peluang bagi berkembangnya ide tersebut, atau dengan kata lain ide tersebut sesuai dengan kebutuhan zaman; *keempat*, literatur yang memuat ide-ide yang dipasarkan secara meluas; *kelima*, para pengikut atau murid si pembawa ide yang banyak berguru dengannya, yang secara langsung atau tidak langsung turut mengembangkan ide tersebut; *keenam*, ide yang dimunculkan bersifat baru dan aktual sehingga menarik untuk dijadikan bahan kajian; *ketujuh*, berkembangnya sebuah ide tidak lepas dari forum-forum ilmiah seperti forum-forum seminar, kajian-kajian, dan studi ilmiah lainnya. Juga yang paling berpengaruh pada abad informasi sekarang ini adanya media publikasi dan media massa yang turut memperluas jaringan transformasi ide.

Dalam konteks ini, pembaharuan adalah upaya atau aktivitas untuk mengubah kehidupan dari keadaan-keadaan yang sedang berlangsung kepada keadaan baru yang hendak diwujudkan. Harun Nasution menyebutkan kata pembaharuan sama dengan modernisasi. Pembaharuan dalam Islam pada tingkat doktrin, sumber-sumber pokok ajaran Islam, khususnya Al-Quran, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada umat untuk mengembangkan berbagai konsep dalam kehidupan. Selanjutnya dilakukan reinterpretasi dan rekonstektualisasi secara terus menerus sesuai dengan perubahan sosial dan tantangan zaman. Lazimnya sebuah proses sejarah, pembaharuan dalam Islam diarahkan pada upaya-upaya pembangkitan masyarakat muslim dalam proses ortodoksi ajaran-ajaran Islam.⁵⁷

Dalam gelombang perjalanan gerakan pembaharuan Islam, penting dicatat keberadaan Sumatera Barat. Melalui beberapa tokohnya, wilayah ini memiliki kedudukan penting dalam skema gerakan pembaharuan Islam, khususnya jika dikaitkan dengan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Sejalan dengan perannya sebagai akar gerakan pembaruan Islam di Indonesia pada awal abad ke-20, Sumatera Barat pada gilirannya termasuk wilayah pertama di Indonesia yang mengalami proses modernisasi pendidikan Islam. Dan Rahmah el-Yunusiah pada sejarahnya menjadi tokoh yang berperan penting dalam proses tersebut.

3.17. Latar Belakang Keluarga

Rahmah el-Yunusiah adalah anak bungsu dari lima bersaudara. Ia lahir dari pasangan Rafi'ah dan Muhammad Yunus bin Imanudin. Ia lahir pada Jumat pagi pada 20 Desember 1900/1 Rajab 1318 di negeri Bukit Surungan Padang Panjang. Nenek moyangnya dari pihak ibu berasal dari negeri IV Angkat, Bukittinggi, Kabupaten Agam, yang turun ke Padang Panjang di negeri bukit Surungan sekitar abad ke-18. Secara genetis ia berasal dari suku *Sikumbang* dengan kepala suku bergelar Datuk Bagindo Maha rajo.⁵⁸ Umni Rafi'ah masih berdarah keturunan ulama, empat tingkat di atasnya masih ada hubungan dengan *mamak* Haji Miskin, sang pembaharu gerakan Paderi. Umni Rafi'ah yang bersuku Sikumbang adalah anak keempat dari lima bersaudara. Ia menikah dengan Syekh Muhammad Yunus saat berusia 16 tahun, sedangkan Syekh Muhammad Yunus berusia 42 tahun.

Sedangkan Ayah Rahmah el-Yunusiyah, Syekh Muhammad Yunus, adalah seorang ulama besar di zamannya. Syekh Muhammad Yunus (1846-1906 M) menjabat sebagai seorang *Qadli* di negeri Pandai Sikat dan pimpinan Tarekat Naqsabandiyah al-Khalidiyah.⁵⁹ Selain itu Syekh Muhammad Yunus juga ahli ilmu *falak* dan *hisab*. Ia pernah menuntut ilmu di tanah suci Mekkah selama 4 tahun. Ulama

yang masih ada darah keturunan dengan pembaharu Islam yang juga seorang tokoh Paderi Tuanku Nan Pulang di Rao.

Dari silsilah keturunan, Rahmah el-Yunusiyah berasal dari keturunan ulama. Dalam usia enam belas tahun ia menikah dengan seorang alim dan mubaligh bernama Haji Bahauddin Lathif dari Sumpur Padang Panjang. Perkawinan ini tidak berlangsung lama, hanya enam tahun, pada tahun 1922 keduanya bercerai atas kehendak kedua belah pihak dan selanjutnya menganggap sebagai dua orang bersaudara. Dari perkawinan ini Rahmah tidak mempunyai anak. Sejak perceraian tersebut, ia tidak bersuami lagi. Rupanya hal ini memberi faedah kepadanya sendiri, sehingga ia dapat menempatkan seluruh hidupnya kepada perguruan yang didirikannya.

Rahmah berpulang ke rahmatullah pada hari Rabu tanggal 9 Zulhijjah 1388 Hijriah atau tanggal 26 Februari 1969 pada pukul 19.30 di rumahnya sendiri di Padang Panjang.⁶⁰ Jenazahnya dikuburkan di perkuburan keluarga di samping rumahnya yang juga di samping perguruan yang ia dirikan. Setiap orang yang melewati rumah dan perguruanannya akan dapat melihat nisan kuburannya di pinggir jalan Lubuk Mata Kucing.

3.18. Riwayat Pendidikan

Pendidikan dasar dan pembentukan kepribadian Rahmah sesungguhnya terbentuk dari keluarganya sendiri. Rahmah el-Yunusiyah berasal dari keluarga taat dalam masalah keagamaan. Kondisi inilah nantinya yang akan berpengaruh pada pembentukan pribadi Rahmah. Ia menjadi orang yang cinta mendalami ajaran-ajaran agama serta memiliki perhatian sangat besar terhadap kondisi masyarakat pada masanya khususnya kalangan kaum wanita. Karena itu pendidikan yang diperoleh Rahmah pada prinsipnya banyak dari keluarganya sendiri yang memang sangat menaruh perhatian pada masalah-masalah keagamaan.

Riwayat pendidikan Rahmah dimulai dari belajar pada ayahnya. Namun hal tersebut hanya berlangsung sebentar, karena ayahnya meninggal pada saat usianya masih muda.⁶¹ Syekh Haji Muhammad Yunus, ayah Rahmah, meninggal dunia pada tahun 1906 M, ketika Rahmah masih kanak-kanak. Selanjutnya, ia dibesarkan oleh ibu dan diasuh oleh kakaknya yang telah berumah tangga. Zainudin Labay, kakak sulung Rahmah, adalah gurunya yang banyak memberikan bimbingan dan dorongan yang sangat berarti bagi perkembangan intelektual Rahmah. Penguasaan Labay atas beberapa bahasa asing (Inggris, Arab, Belanda) sangat membantunya dalam mengakses berbagai literatur asing,⁶² khususnya yang berkaitan dengan ide-ide pembaharuan, yang pada akhirnya nanti sangat berpengaruh pada pandangannya yang berpikiran maju.

Sejak kecil, Rahmah tidak pernah bersekolah di Sekolah Dasar (Sekolah Desa, Sekolah Gubernemen) yang memang telah ada juga di Minangkabau pada masa kanak-kanaknya dulu.⁶³ Meskipun begitu, ia banyak belajar dari lingkungannya. Pada usia enam tahun beliau mulai belajar membaca Qur'an kepada Engku Uzair gelar Malim Batuah, salah seorang dari murid Syekh Haji Muhammad Yunus. Ketika usianya delapan tahun, Rahmah dituntun tulis-baca huruf latin oleh kakaknya Zainuddin Labay dan Muhammad Rasyad yang pernah belajar di Sekolah Desa. Umi Rafi'ah, ibunya, juga ikut mengajari Rahmah berhitung dengan angka-angka Arab (angka Melayu).⁶⁴ Kepandaian membaca dan menulis ini, kemudian hari sangat menolongnya dalam menambah ilmu pengetahuannya, karena ia termasuk salah seorang anak yang senang membaca.

Setelah Diniyah School yang didirikan kakaknya pada tanggal 10 Oktober 1915 berdiri, ia ikut belajar di perguruan ini. Ia banyak memperoleh pengetahuan praktis yang berkenaan dengan pergaulan, terutama pergaulan antara murid-murid perempuan dan laki-laki serta watak manusia yang berbagai ragam. Dahulunya ia jarang atau tidak diperkenankan bergaul dengan anak-anak laki-laki, tapi setelah ia bersekolah di perguruan ini, ia dapat bergaul dengan murid laki-laki. Ia dapat bertukar pikiran dengan mereka baik mengenai hukum

Islam, sosial, budaya dan pergaulan (*muamalah*). Dari pengenalan berbagai macam watak manusia ini ia mulai menyadari dirinya dan keadaan masyarakat lingkungannya, terutama masyarakat wanita, yaitu mereka yang tidak memperoleh kesempatan menuntut ilmu sebagaimana yang dialaminya.

Dengan kecerdasan dan kegemarannya membaca, Rahmah tumbuh menjadi pribadi yang kritis, tidak lekas puas, dan selalu mencari yang baru. Ketika tidak puas dengan sistem koedukasi pada sistem Diniyah School yang kurang memberikan penjelasan secara terbuka kepada siswa puteri mengenai persoalan khusus perempuan, misalnya, ia merasa perlu memperdalam pelajaran agamanya di sore hari dengan berguru kepada Haji Rasul (Haji Abdul Karim Amrullah), ayah Buya Hamka, di surau Jembatan Besi, Padang Panjang. Tiga orang kawan yang ikut yang ikut belajar bersama Rahmah adalah Rasuna Said dari Maninjau, yang di kemudian hari namanya diabadikan sebagai Pahlawan Nasional, Nanisah dari Bulaan Gadang Banuhampu, dan Jawana Basyir (Upik Jepang) dari Lubuk Alung.⁶⁵

Setelah runtuhnya Surau Jembatan Besi akibat gempa bumi (28 Juni 1926) yang menyapu Padang Panjang dan sekitarnya, Haji Rasul kembali ke kampungnya di Sungai Batang, Maninjau. Karenanya, Rahmah melanjutkan pelajaran agamanya kepada Tuanku Mudo Abdul Hakim, Syekh Abdul Latif Rasyidi, Syekh Muhammad Jamil Djambek, dan Syekh Daud Rasyidi.⁶⁶

Semangat Rahmah dalam mempelajari ilmu selain agama dan bahasa Arab, terus berkobar. Sekitar tahun 1931-1935, ia mengikuti kursus ilmu kebidanan di RSU Kayutanam dan mendapat izin praktek/ijazah bidan dari dokter. Dalam bidang kebidanan ini ia juga mendapat bimbingan yang mula-mula diberikan dari kakak ibunya Kudi Urai, seorang bidan yang menolong kelahiran dirinya dan Sutan Syahrir (Mantan Perdana Menteri RI). Selain itu, ia belajar ilmu kesehatan dan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) dari enam orang dokter yang juga gurunya dalam kebidanan: dokter Sofyan Rasyad dan dokter Tazar di rumah sakit umum Kayu Tanam (mendapat izin praktek dan ijazah dengan kedua dokter ini), dokter A.

Saleh di RSUD Bukit Tinggi, dokter Arifin dari Payakumbuh, dan dokter Rasjidin dan dokter A. Sani di Padang Panjang.⁶⁷ Untuk mendalami praktek kebidanan dan ilmu kesehatan ini ia belajar sambil praktek di RSUD Kayu Tanam.

Rahmah juga belajar gimnastik (olahraga dan senam) dari seorang guru pada Meisjes. Normal-School (sebuah pendidikan guru) di Guguk Malintang yaitu Mej. Oliver (nona Olivier).⁶⁸ Kemudian ia juga mempelajari cara bertenun tradisional, yakni: bertenun dengan menggunakan alat tenun bukan mesin yang pada masa itu banyak dilakukan oleh masyarakat Minangkabau. Ia mendatangi beberapa pusat pertenunan rakyat seperti Pandai Sikat, Bukittinggi dan Silungkang. Ilmu bertenun ini ia lengkapi dengan belajar jahit-menjahit. Kedua ilmu ini yakni: bertenun dan jahit-menjahit dimasukkannya kedalam kurikulum perguruannya. Mengenai ilmu-ilmu umum seperti ilmu hayat, ilmu alam, ilmu bumi dan lainnya, ia pelajari sendiri dari buku. Kemudian semua ilmu yang ia peroleh dengan kursus atau belajar sendiri ini ia ajarkan kepada murid-muridnya, kelak setelah ia mendirikan sekolah Diniyah Puteri tahun 1923.⁶⁹

Tempaan pengalaman kehidupan telah membentuk kepribadian Rahmah menjadi seorang yang tabah, penuh toleransi dan teguh pendirian, serta berkeimanan yang kuat, akidah yang tangguh dan ketakwaan yang kokoh. Untuk mewujudkan cita-citanya dan bila menghadapi kesulitan, dia semakin ber-*taqarrub* dan meningkatkan ketakwaan diri kepada Allah dengan melakukan Sholat Tahajjud dan bermunajat di kesunyian malam.⁷⁰ Demikianlah dilihat dari usaha Rahmah menuntut ilmu, nampak bahwa hal tersebut merupakan manifestasi dari ketidakpuasannya terhadap pengetahuan yang diperolehnya dalam masalah perempuan. Ia juga merasa kecewa melihat kaumnya tidak bisa memperoleh pendidikan yang memadai sebagaimana yang dialaminya. Padahal Rahmah meyakini pentingnya peranan pendidikan sebagai salah satu jalan untuk mengangkat derajat kaum perempuan.

3.19. Pandangan Rahmah tentang Perempuan

Rahmah adalah sosok pembaharu yang dalam sejarah dikenal sebagai pejuang yang begitu peduli perempuan. Perempuan, dalam pandangan Rahmah el-Yunusiyah, mempunyai peran penting dalam kehidupan. Perempuan adalah pendidik anak yang akan mengendalikan jalur kehidupan mereka selanjutnya.⁷¹ Atas dasar itu, untuk meningkatkan kualitas dan memperbaiki kedudukan perempuan diperlukan pendidikan khusus kaum perempuan yang diajarkan oleh kaum perempuan sendiri. Dalam hal ini perlu adanya upaya untuk meningkatkan kemampuan kaum perempuan, baik di bidang intelektual, kepribadian ataupun keterampilan.

Seperti halnya Kartini di Jawa, Rahmah el-Yunusiyah, menyadari bahwa kaum perempuan telah lama hidup di alam keterbelakangan, bahkan dibanding laki-laki. Oleh karena itu, seperti juga Kartini, Rahmah melihat faktor pendidikan menjadi satu sarana utama bagi peningkatan posisi perempuan. Dalam kaitan inilah Rahmah mengabdikan hidupnya untuk membangun dan mengembangkan pendidikan Islam untuk kaum perempuan. Baginya, masalah keterbelakangan kaum perempuan berakar pada persoalan pendidikan.⁷²

Rahmah el-Yunusiyah tumbuh di lingkungan sosial yang tengah mengalami perubahan. Padang Panjang, dan Sumatra Barat pada umumnya, pada awal abad ke-20 berkembang menjadi salah satu wilayah yang mengalami proses modernisasi yang intensif. Dalam kerangka pembaharuan Islam, masyarakat Minangkabau menyaksikan tidak saja berdirinya lembaga-lembaga pendidikan modern ---menggantikan lembaga pendidikan tradisional sistem surau---tapi secara bersamaan juga tampilnya sejumlah ulama yang menengahkan pemikiran keagamaan baru yang dilandasi semangat perubahan dan modernisasi.

Dengan demikian, selain Sekolah Adabiyah di Padang pada 1909 dan Sumatra Thawalib di Padang Panjang ---dan selanjutnya di beberapa kota lain di Sumatra Barat---arus pembaharuan juga

diperkuat kepulauan sejumlah ulama dari Timur Tengah setelah mereka berguru kepada Akhmad Khatib, bapak kaum pembaharu Islam Indonesia. Lebih dari itu, penyebaran gagasan pembaharuan Islam juga dilakukan melalui jurnal *al-Munir* (terbit 1911-1916), menggantikan *al-Imam* yang sebelumnya terbit di Singapura (1906-1908). Jelasnya, Sumatra Barat telah memegang peran demikian sentral dalam gerakan pembaharuan Islam di Indonesia, sebagai daerah pertama yang menyangga proses transmisi gagasan pembaharuan dari Timur Tengah ke Indonesia.⁷³

Kondisi sosial sebagaimana dijelaskan di atas itulah yang mendasari gerakan kemajuan untuk kaum perempuan oleh Rahmah. Dia berusaha menjadikan perempuan bisa terlibat dalam arus perubahan tersebut; menjadikan kaum perempuan terbebas dari kebodohan yang telah menghalangi mereka sama-sama menempuh jalan kemajuan bersama kaum laki-laki. Cita-cita Rahmah adalah mencerdaskan kaumnya yang “masih tercecceh dalam bidang pendidikan dan pengetahuan”. Dan perubahan sosial-budaya di Sumara Barat semakin mendorongnya untuk berbuat secara konkrit bagi kemajuan perempuan. Bagi Rahmah, pendidikan merupakan kebutuhan yan tidak lagi bisa ditawar bagi perbaikan nasib perempuan. Dia menulis sebagai berikut:

*Kalau saya tidak mulai dari sekarang, maka kaum saya akan tetap terbelakang. Saya harus mulai, dan saya yakin akan banyak pengorbanan dituntut dari diri saya.*⁷⁴

Ungkapan tersebut tidak saja menandai tekad kuat Rahmah untuk membangun lembaga pendidikan bagi kaum perempuan, tapi sekaligus merefleksikan kebangkitan seorang Rahmah el-Yunusiah untuk berjuang menentukan kaumnya yang masih tercecceh dari ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, seperti halnya Kartini di tanah Jawa, Rahmah menyadari nasib yang telah diderita kaumnya yang senantiasa berada jauh di belakang kaum laki-laki. Hanya saja, pilihan

sosial-budaya yang dimiliki Rahmah lebih mengarahkannya untuk merumuskan gerakannya dalam bentuk lembaga pendidikan Islam. Maka, seperti telah disebutkan di atas, Rahmah merintis pendirian sejumlah lembaga pendidikan khusus untuk kemajuan kaum perempuan. Oleh karena itu, Rahmah kerap disebut sebagai “Kartini perguruan Islam”; lembaga pendidikan Islam, yang menjadi orientasi perjuangan Rahmah, didasari semangat yang sama dengan Kartini tentang kemajuan kaum perempuan.⁷⁵

Ketika ia mendirikan gedung perguruan pada tahun 1927 dan mengalami kekurangan biaya penyelesaian gedung tersebut, ia menolak bantuan yang diulurkan kepadanya dengan halus dan bijaksana. Ia ingin memperlihatkan kepada kaum laki-laki bahwa wanita yang selama ini dipandang lemah dan rendah derajatnya dapat berbuat sebagaimana laki-laki, bahkan bisa melebihinya. Maka secara diplomatis Rahmah, sebagaimana dikutip Hamroni, mengatakan:

Usul ini sangat dihargakan oleh pengurus dan guru-guru sekaliannya, akan tetapi buat sementara golongan perempuan (puteri) akan mencoba melayarkan sendiri pencalanginya sampai ke tanah tepi dan mana kala tenaga putri tidak sanggup lagi menyelamatkan pencalang itu, maka dengan sepenuh hati pengharapan guru-guru dan pengurus akan memohonkan kembali usul-usul engku-engku sekarang, kepada engku-engku yang menurut kami patut kami menyerahkan pengharapan kami itu.⁷⁶

Mengapa Rahmah begitu memberikan perhatian kepada perempuan? Mengapa pula pendidikan yang dipilih sebagai jalur perjuangan? Seperti ditulis Junaidatul Munawaroh, kepedulian Rahmah kepada perempuan ini muncul dari kesadaran akan adanya ketidakadilan yang dialami kaum perempuan di lingkungannya ketika itu, di samping ketimpangan sosial dalam masyarakatnya. Dia melihat

kaumnya jauh tertinggal dari laki-laki. Kaum perempuan berada dalam kejahilan dan kepasrahan kepada keadaan; sehingga masyarakat pada umumnya, termasuk perempuan, menganggap diri mereka makhluk yang lemah dan terbatas.

Hal tersebut di atas dialaminya sendiri bersama ketiga kawannya yang turut aktif belajar di surau, dimana di majelis ini hanya dihadiri oleh kaum lelaki. Begitu pula ketika ia menghimpun ibu-ibu muda untuk belajar di sekolah yang baru ia dirikan, ia tidak luput dari cemoohan orang: “mana pula perempuan akan mengajar, akan menjadi guru...mengepit buku...tidak ke dapur. Daripada mengepit-gepit buku, membuang-buang waktu...akhirnya akan ke dapur juga, lebih baik dari kini ke dapur.”⁷⁷

Bagi Rahmah, ketidaksetaraan kepandaian perempuan dengan laki-laki disebabkan karena mereka tidak mendapatkan kesempatan belajar yang sama dengan laki-laki. Hal ini ia rasakan ketika belajar di Diniyah School dengan sistem koedukasi; murid perempuan kurang mendapatkan penjelasan agama secara mendalam tentang persoalan yang berkaitan dengan perempuan. Guru-guru laki-laki tidak berterus terang mengupas pelajaran agama, di sisi lain, murid perempuan pun enggan bertanya padahal perempuan memiliki persoalan yang kompleks dan rumit.⁷⁸

Dalam arti yang lain, dapat dikatakan bahwa cita-cita dan gagasan Rahmah el-Yunusiyah tentang pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan mungkin lebih dipengaruhi faktor individualitasnya dimana ia memperoleh pengalaman dan capaian pendidikannya dengan usahanya sendiri. Meskipun Rahmah hanya sempat mengecap pendidikan dasar di Padang Panjang, studinya yang mendalam terhadap agama adalah sesuatu yang tidak lazim bagi seorang perempuan pada awal abad kedua puluh di Minangkabau. Ia memperoleh pendidikan melalui pengaturan khusus dengan beberapa ulama modemis yang terkemuka, dalam pola kaum muda di zamannya. Selain itu, Rahmah belajar kerumahtanggaan dengan seorang bibi maternal, dan mempelajari soal kesehatan dan pemberian pertolongan pertama di bawah bimbingan enam orang

dokter kelahiran India. Ia belajar senam dengan seorang guru Belanda di Sekolah Menengah Putri di Padang Panjang. Dengan kata lain, Rahmah memperoleh pendidikan atas inisiatifnya sendiri, pada saat pendidikan formal bagi kaum perempuan hanya tersedia bagi segelintir orang.⁷⁹

Menurut Rahmah, perempuan mempunyai peran penting dalam kehidupan. Perempuan adalah pendidik anak yang akan mengendalikan jalur kehidupan mereka selanjutnya. Rahmah menggambarkan bahwa rumah tangga adalah tiang masyarakat, sedang masyarakat adalah tiang negara. Melalui rumah tangga inilah masyarakat dan negara dapat menjadi baik.

3.20. Diniyah School Putri: Perwujudan Cita-Cita Pendidikan Rahmah

Rahmah mempunyai cita-cita mulia dalam hal pendidikan bagi perempuan. Ia, Rahmah, *“sangat ingin melihat kaum wanita Indonesia memperoleh kesempatan penuh menuntut ilmu pengetahuan yang sesuai dengan fitrah wanita sehingga dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan mendidik mereka sanggup berdiri sendiri di atas kekuatan kaki sendiri, yaitu menjadi ibu pendidik yang cakap dan aktifserta bertanggungjawab kepada kesejahteraan bangsa dan tanah air, dimana kehidupan agama mendapat tempat yang layak.”*⁸⁰

Dalam pandangan Rahmah, untuk meningkatkan kualitas dan memperbaiki kedudukan perempuan diperlukan pendidikan khusus kaum perempuan sendiri. Rahmah merasa bahwa pendidikan bersama (campuran) membatasi kemampuan kaum perempuan untuk menerima pendidikan yang cocok dengan kebutuhan mereka. Rahmah ingin menawarkan kepada anak-anak perempuan pendidikan sekuler dan agama yang setara dengan pendidikan yang tersedia bagi kaum laki-laki, lengkap dengan program pelatihan

dalam hal keterampilan yang berguna sehingga kaum perempuan dapat menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Anak-anak perempuan dan perempuan dewasa mungkin saja mendapat dorongan untuk mengaji al-Quran dan salat; tetapi tidak seperti kaum laki-laki, mereka memiliki sedikit peluang untuk dapat melek aksara Melayu yang menjadi bahasa nasional Indonesia, atau bahasa Belanda sebagai bahasa pendidikan modern. Rahmah el-Yunusiyah percaya bahwa kaum perempuan membutuhkan model pendidikan tersendiri yang terpisah dari laki-laki, karena ajaran Islam memberikan perhatian khusus kepada watak dan peran kaum perempuan dan mereka membutuhkan lingkungan pendidikan tersendiri di mana topik-topik tentang perempuan bisa dibicarakan secara bebas.⁸¹ Dan untuk meningkatkan kualitas serta memperbaiki kedudukan perempuan tersebut, diperlukan pendidikan khusus perempuan yang diajarkan oleh kaum perempuan sendiri.⁸²

Dengan cita-cita mulia, kemauan dan tekad yang kuat, serta dukungan kakaknya, Labay,⁸³ Rahmah pun merundingkan gagasannya untuk mendirikan pendidikan bagi perempuan dengan teman-teman perempuannya di Persatuan Murid-Murid Diniyah School (PMDS), yang kemudian mendukung gagasan Rahmah tersebut. Maka, pada tanggal 1 November 1923, Rahmah mendirikan Madrasah Diniyah khusus puteri dengan nama awal Madrasah Diniyah li al-Banat, dan dipimpin oleh Rangkayo Rahmah el Yunusiyah yang biasa dipanggil oleh murid-muridnya dengan sebutan “Kak Amah”.

Pada awalnya, murid madrasah tersebut berjumlah 71 orang yang terdiri dari kaum ibu muda, dimana mereka belajar dengan menggunakan Masjid Pasar Usang sebagai tempat belajar. Pada saat itu, proses belajar berjalan dengan sistem *halaqoh*, dengan hanya mempelajari ilmu-ilmu agama dan gramatika bahasa Arab. Dalam perkembangan selanjutnya, sekolah ini menerapkan sistem pendidikan modern yang mengintegrasikan pengajaran ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum secara klasikal, serta memberikan pelajaran keterampilan. Meskipun demikian, ilmu-ilmu agama tetap menjadi pelajaran pokok dan merupakan kekhususan sekolah ini dan

karenanya dapat dibedakan dengan sekolah Dewi Sartika dan Maria Walanda yang menitikberatkan pada pelajaran kejuruan dan keputerian.⁸⁴

Demikianlah, pada akhirnya, kemauan yang keras, pendirian yang teguh dan sikap kepedulian Rahmah pada perempuan telah mengantarkan pribadinya pada cita-cita pendidikan yang telah tertanam pada dirinya. Selanjutnya cita-cita pendidikannya ini ia rumuskan menjadi tujuan perguruan Diniyah Putri yang didirikannya, yaitu: *“Melaksanakan pendidikan dan pengajaran berdasarkan ajaran Islam dengan tujuan membentuk putri yang berjiwa Islam dan Ibu Pendidik yang cakap, aktif serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air dalam pengabdian kepada Allah subhanahu wa Ta’ala.”*⁸⁵

3.21. Sekolah-Sekolah yang Didirikan: Pengabdian pada Pendidikan

Zainuddin Labay, kakak Rahmah yang selalu mendukung perjuangan Rahmah, begitu singkat mendampingi Rahmah dalam mengelola Diniyah School Putri. Dia wafat pada 10 Juli 1924, ketika usia sekolah itu belum genap 9 bulan. Banyak pihak yang menyangka setelah Labay wafat sekolah itu tidak akan berusia lama. Namun sebaliknya, Rahmah mampu memimpin dan mengembangkannya secara mandiri dengan semangat pembaharuan pendidikan yang diletakkan Labay. Karenanya Deliar Noer, seperti dikutip Junaidatul Munawaroh, memandang Rahmah sebagai penerus cita-cita Labay. Secara bertahap Rahmah membenahi sistem pengajaran Diniyah School Putri, baik dari segi kurikulum maupun metode. Di samping itu dengan segala kekuatan yang dimiliki ia mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikannya.⁸⁶ Dalam sebuah kesempatan, ia menuturkan,

“Diniyah School Puteri ini selalu akan mengikhtiarkan penerangan agama dan meluaskan kemajuannya kepada perempuan-perempuan yang selama ini susah mendapatkan penerangan agama Islam dengan secukupnya daripada kaum

*lelaki. ...inilah yang menyebabkan terjauhnya perempuan Islam daripada penerangan agamanya sehingga menjadikan kaum perempuan itu rendam karam ke dalam kejahilan.*⁸⁷

Pada tahun 1925, ia merencanakan membangun gedung sendiri yang dapat menampung seluruh murid. Sebelum rencana tersebut dapat terlaksana, Padang Panjang dan sekitarnya ditimpa gempa bumi (28 Juni 1926) yang menghancurkan bangunan-bangunan termasuk gedung sekolah dan asramanya. Namun musibah tersebut tidak mematahkan tekad Rahmah dan teman-temannya untuk memulai kembali usahanya. Setelah 45 hari sesudah gempa ia bersama-sama dengan majelis guru dan dibantu oleh murid-murid Thawalib School Padang Panjang, kembali secara gotong royong mendirikan beberapa rumah bambu di atas sebidang tanah wakaf dari ibunya, Ummi Rafi'ah, dengan atap daun rumbia berlantaikan tanah. Setelah rumah bambu ini berdiri, kemudian dijadikan rumah darurat untuk memulai kembali kegiatan perguruannya.⁸⁸

Pengumuman disebar ke seluruh daerah asal murid, bahwa perguruan Diniyah Putri akan memulai kembali dan kepada orang tua dipersilahkan untuk menyerahkan kembali anak-anaknya untuk dididik. Sambil pelajaran dimulai perguruan darurat ini terus membenahi dirinya menurut kemampuan yang ada. Oleh para orang tua murid didirikanlah satu komite penyelamat perguruan ini untuk mencari dana guna membangun kembali gedung yang telah runtuh itu.⁸⁹

Di samping mendirikan Diniyah School Putri, ia pun mendirikan *Menyesal School*, yaitu sekolah pemberantasan buta huruf di kalangan ibu-ibu rumah tangga. Sekolah ini didirikan pada tahun 1925 dan berlangsung selama tujuh tahun yaitu sampai tahun 1932. Kemudian sekolah ini tidak dilanjutkan. Untuk menyebarluaskan cita-cita pendidikannya, ia mengadakan perjalanan berkeliling ke daerah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi dan Semenanjung Malaya (tahun 1928 dan tahun 1934).⁹⁰

Pada tahun 1935 ia mendirikan tiga buah perguruan putri di Batavia (Jakarta), yaitu di Kwitang, Jatinegara, dan di Tanah Abang. Pada masa pendudukan Jepang, perguruan tersebut tidak dapat di teruskan. Menjelang berakhirnya penjajahan Belanda di Indonesia, Rahmah sempat pula mendirikan empat buah lembaga pendidikan putri baru lainnya sebagai pengganti lembaga pendidikan terdahulu. Pada tahun 1938 ia mendirikan Yunior Institut Putri, sebuah sekolah umum setingkat dengan Sekolah Rakyat pada masa penjajahan Belanda atau *Vervolgschool*, *Islamitisch Hollandse School* (HIS) setingkat dengan HIS (*Hollandsch Inlandse Schoof*), yaitu sekolah dasar dengan bahasa pengantar bahasa Belanda, sekolah DAMAI (Sekolah Dasar Masyarakat Indonesia) dan *Kulliyatul Mu'allimin Ellslamiyah* (KMI), sekolah Guru Agama Putra pada tahun 1940. KMI Putera ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat guru-guru agama putera yang banyak didirikan oleh masyarakat di Sumatera Barat. Pada zaman Jepang keempat lembaga pendidikan putri tersebut tidak dapat diteruskan.

Pada tahun 1947 ia kembali mendirikan empat buah lembaga pendidikan agama putri dalam bentuk lain, yaitu Diniyah Rendah Putri (SDR) lama pendidikannya tujuh tahun, setingkat dengan Sekolah Dasar enam tahun yang didirikan oleh pemerintah, Sekolah Diniyah Menengah Pertama Putri Bagian ATiga Tahun (DMP Bagian A), Sekolah Diniyah Menengah Pertama Bagian B Lima Tahun (DMP Bagian B), dan Sekolah Diniyah Menengah Pertama Bagian C Dua Tahun (DMP Bagian C). Tiga buah sekolah yang disebut terakhir setingkat dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan bidang studi agama dan bahasa Arab menjadi mata pelajaran pokok.⁹¹

Selain sekolah-sekolah tersebut di atas pada tahun 1964, Rahmah juga mendirikan Akademi Diniyah Putri yang lama pendidikannya tiga tahun. Tanggal 22 November 1967 Akademi ini dijadikan Fakultas Dirasat Islamiyah dan merupakan fakultas dari Perguruan Tinggi Diniyah Putri. Fakultas ini "diakui" sama dengan Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) untuk tingkat Sarjana Muda.

3.22. Pandangannya tentang Sekolah: Sebuah Independensi

Rahmah merupakan sosok seorang pendidik yang teguh pendirian dan memiliki kemauan keras. Rasa cintanya kepada pendidikan, dipadu dengan karakternya yang pantang menyerah, telah melahirkan suatu sifat sekaligus sikap lain yang melekat pada dirinya: independensi.

Kecintaan Rahmah pada pendidikan melebihi kecintaannya pada kepentingan yang lain. Karenanya, ketika di kemudian hari ia juga terlibat di dunia politik, ia tetap menjaga independensi sekolahnya, bebas dari afiliasi dengan organisasi masyarakat dan organisasi politik manapun. Setahun sebelum Muhammadiyah memasuki Minangkabau, Diniyah School Putri diajak bergabung dengan organisasi sosial keagamaan dan disarankan agar namanya diganti dengan Aisyiyah School atau Fatimiyah School, namun saran tersebut tidak diterima oleh para guru Diniyah School Putri.⁹²

Keteguhan hati Rahmah kembali diuji ketika Rasuna Said hendak mengajarkan politik di sekolah tersebut pada 1930. Rahmah menentang keras sikap Rasuna Said karena dianggap menempatkan Diniyah School Putri di bawah naungan partai politik yang saat itu justru sangat membahayakan kelangsungan sekolah. Menurut Rahmah, politik untuk murid adalah kecintaan mereka pada tanah air didasari iman yang kuat. Kalau iman tidak ada, politik dapat menjadi bumerang yang akan menghancurkan agama. Sementara itu, Rasuna Said berpandangan bahwa murid-murid perlu berpolitik dan mengambil bagian di dalamnya. Perbedaan sudut pandang kedua sahabat dan tokoh perjuangan tersebut pada akhirnya mempengaruhi corak perjuangan keduanya. Karenanya, Rasuna Said akhirnya memutuskan pindah mengajar ke Padang yang lebih memberinya kesempatan untuk mengembangkan pandangan politiknya.

Independensi sekolah ini juga ditunjukkan saat diselenggarakan permusyawaratan besar guru-guru agama Islam se-Minangkabau yang ada di bawah Permi di Padang panjang pada

tahun 1931. Wakil dari guru Diniyah School Putra maupun Putri yang datang sebagai pendengar dan tidak memberi respons; tidak ada seorang pun dari guru-guru sekolah ini yang duduk di Dewan Pengajaran Permi yang bertugas untuk menyatukan pelajaran sekolah-sekolah Islam. Sebagai pemimpin Permi, Mukhtar Lutfi mempertanyakan hal tersebut. Rahmah pun mengemukakan pendapatnya,

“Biarkan perguruan ini terasing selama-lamanya dari partai politik, dan tinggalkanlah ia menjadi urusan dan tanggungan orang banyak (umum), sekalipun umum itu dalam aliran politiknya bermacam warna dan ragam, tapi untuk perguruan dan penanggung jawab atasnya haruslah mereka itu satu adanya⁹³ .

Lebih jauh, independensi sekolah ini juga ditunjukkan Rahmah ketika dia menolak upaya penggabungan sekolah-sekolah Islam di Minangkabau oleh Mahmud Yunus. Seperti diketahui, pada tahun 1930-an ini pembaharuan sekolah agama berkembang pesat, namun tidak ada keseragaman program atau buku standar yang digunakan. Melihat keadan ini Mahmud Yunus alumni Universitas Kairo yang saat itu menjadi Direktur Worma/Scrtoo, ingin menerapkan konsep pembaharuan pendidikannya dan memprakarsai pembentukan *Panitia Islah al-Madaris al-Islamiyah* Sumatera Barat. Namun Rahmah tetap teguh pada pendirian independensi sekolahnya, maka ia menolak keras ide itu.⁹⁴

Menurutnya, lebih baik memelihara satu sekolah saja tapi terawat daripada bergabung tapi porak-poranda. Diniyah School pun tidak akan terikat dengan keputusan permusyawaratan itu. Kondisi sekolah sekolah agama tersebut masih seperti semula hingga 1936, yakni setelah konferensi seluruh organisasi berhasil dalam standarisasi sekolah-sekolah agama kaum muda.⁹⁵ Berhadapan

dengan politik kolonialisme pemerintahan Belanda, Rahmah memilih sikap nonkooperatif dalam memperjuangkan kelangsungan sekolah yang dipimpinnya. Atas dasar sikap ini, ia menolak bekerja sama dengan Belanda termasuk dalam hal pemberian subsidi yang berulang kali ditawarkan. Subsidi pemerintah kolonial akan membuat dirinya terikat, dan mengakibatkan keleluasan pemerintah kolonial mempengaruhi pengelolaan program pendidikan Diniyah School Putri ini. Kondisi seperti itu telah di alami Adabiyah School yang pada tahun 1915 menerima subsidi pemerintah kolonial.⁹⁶

Dengan tegas dan bijaksana Rahmah menyatakan bahwa perguruannya akan berusaha dengan kekuatan sendiri menanggulangi berbagai kesulitan yang dihadapi. Independensi sekolah ini sangat dikhawatirkan oleh pemerintah kalau di kemudian hari akan melahirkan tokoh-tokoh pejuang yang militan, sebagaimana yang pernah dilakukan surau-surau dalam mencetak tokoh-tokoh pembaharu dan pejuang perang paderi. Sikap independen dan nonkooperatif tersebut, di samping menggambarkan ciri khas kepribadiannya yang gigih, juga merupakan respons terhadap situasi politik saat itu demi kelangsungan visi sekolahnya. Begitu pula organisasi kependidikan dan gerakan yang diprakarsainya, praktis visi yang sama: seperti Perikatan Guru-Guru Agama Putri Islam (PGAPI) yang didirikan pada tahun 1933 untuk menghimpun guru-guru yang tidak bergabung dengan Dewan Pengajaran Permi. Kemudian Komite Penolakan Ordonansi Sekolah Liar (1933) didirikan untuk menentang kebijaksanaan pemerintah kolonial yang memberlakukan *Ordonansi Sekolah Liar* (1932) di Sumatera Barat.⁹⁷

3.23. Memperjuangkan Kemerdekaan: Pendidikan Politik Rahmah

Rasa tanggungjawab yang besar, penuh toleransi, dan kasih sayang, membuat tokoh pendidikan perempuan ini begitu peka terhadap persoalan-persoalan yang muncul di sekitarnya. Rahmah, dalam konteks ini, dan masih terkait dengan pendidikan perempuan, selalu terlibat dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Pada 1933,

dia pernah mengetuai Rapat Umum Kaum Ibu di Padang Panjang yang membuatnya dituduh membicarakan persoalan politik, sehingga ia didenda 100 gulden. Untuk mendidik kaum perempuan, ia juga melibatkan diri sebagai anggota pengurus Serikat Kaum Ibu Sumatera (SKIS) yang berjuang melalui penerbitan majalah bulanan perempuan. Rahmah pun pernah mengetuai *Kutub Khannah* (taman bacaan) masyarakat Padang Panjang pada 1935. Pada tahun tersebut dia bersama Ratna Sari mewakili Kaum Ibu Sumatera Tengah ke Kongres Perempuan di Jakarta. Dalam kongres ini ia memperjuangkan ide tentang busana perempuan Indonesia ketika ia berpendapat bahwa muslimah hendaknya memakai selendang (kerudung). Ide ini mencerminkan pandangan hidupnya yang religius.⁹⁸

Dalam konteks pendidikan politik, dan masih terkait perempuan, pada masa Jepang Rahmah memasuki organisasi “Anggota Daerah Ibu” (ADI) yang didirikan oleh Kaum Ibu Sumatera Tengah. Bersama kaum ibu ia menentang Jepang yang menggunakan perempuan Indonesia, khususnya Sumatera Tengah, sebagai *noni-noni* penghibur tentara Jepang di Rumah-Rumah Kuning (*Yellow House*) dan menuntut Jepang agar menutup semua rumah maksiat tersebut karena tidak sesuai dengan agama dan budaya masyarakat setempat. Karena protes tersebut, pemerintah Jepang mendatangkan perempuan penghibur dari Singapura dan Korea.⁹⁹

Rahmah juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial politik dalam upaya perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dalam hal ini ia mempunyai pandangan tentang perlunya bekerjasama dengan Jepang untuk memperjuangkan kemerdekaan. Oleh karenanya, pada masa penjajahan Jepang, ia memasuki lembaga militer, politik, maupun sosial yang didirikan pemerintah kolonial Jepang yang digunakan sebagai wadah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia seperti *Gyu Gun Ko En Kai* (Laskar Rakyat), *Haha no Kai* (Organisasi Perempuan) di Padang Panjang. Ia juga pernah dua kali menjadikan sekolah Diniyah Puteri sebagai rumah sakit darurat untuk menampung korban kecelakaan kereta api yang terjadi di Bintuhan

Padang Panjang (1944) dan di Lembah Anai (1945). Atas peristiwa tersebut, ia mendapat penghargaan dari pemerintah Jepang.¹⁰⁰

Pendidikan politik yang paling dikenal dalam sejarah adalah ketika Rahmah menerima berita proklamasi kemerdekaan dari Engku Syafe'i (ketua *Chuo Sangi In* dimana Rahmah menjadi anggotanya). Saat itu, semangat Juang Rahmah seketika muncul dan langsung mengibarkan bendera merah putih di halaman depan Perguruan Diniyah Puteri. Konon dialah orang pertama yang mengibarkan bendera merah putih di Sumatera Barat, karena pada waktu itu jaringan komunikasi masih dikuasai Jepang sehingga siaran beritapun tidak mudah sampai. Tindakan Rahmah tersebut segera tersebar ke seluruh pelosok kecamatan Batipuh X Koto. Kemudian pada hari itu juga terjadi pengibaran bendera merah putih di kantor-kantor oleh massa dan tentara Jepang tidak bereaksi atas tindakan tersebut. Dari sini Nampak sekali sosok Rahmah sebagai pendidik tidak hanya memberikan keteladanan dalam hal pendidikan perempuan saja, melainkan juga pendidikan politik khususnya ia telah mencontohkan bagaimana cara memelihara rasa nasionalisme dan menerapkannya dalam tindakan nyata. Meski ia menolak murid-muridnya untuk tidak berpolitik, namun Rahmah mencontohkan keteladanan pada dirinya bagaimana mencintai bangsanya dengan cara-cara tersebut di atas.

3.24. Penghargaan Masyarakat

Perjuangan Rahmah sebagai pejuang pendidikan, khususnya pendidikan bagi perempuan, telah mencapai keberhasilannya terutama dalam mendirikan dan mengembangkan Diniyah School Puteri. Dalam sejarah, obsesi besar Rahmah telah mendorong lahirnya santri Diniyah Puteri yang menjadi pejuang wanita Muslim Sumatera Barat. Masyarakat juga sangat berminat pada lulusan sekolah ini untuk memenuhi kebutuhan guru agama, baik di sekitar Sumatera, Jakarta, maupun di negeri-negeri Semenanjung Melayu dan Singapura.¹⁰¹ Selain Rahmah el-Yunusiah, lembaga pendidikan ini telah melahirkan wanita pejuang seperti Rasuna Said. Diniyah Puteri juga telah melahirkan tokoh-tokoh wanita nasional seperti Aisyah

Amini (politisi PPP), Suryani Taher (istri pimpinan Perguruan Tinggi Atthahiriyah Jakarta, Nurhayati Supangat (pendiri dan pemilik alat-alat kosmetik merk “wardah”, Zahrah, Istri beberapa pejabat Negara (misalnya ibunda Yusuf Kalla dan nyonya Azwar Anas), dan istri beberapa gubernur dan wakil gubernur.¹⁰²

Dari awal hingga sekarang, Diniyah Puteri tetap konsisten dengan usaha mempersiapkan para wanita menjadi seorang ibu untuk “mencerdaskan generasi Muslim”. Untuk itu, kepada siswanya diajarkan ilmu-ilmu kependidikan, seperti metode pembelajaran, psikologi pendidikan dan perkembangan. Tidak hanya itu, melalui pelajaran fikih, murid-muridnya dibekali nilai-nilai kesederajatan antara pria dan wanita; wanita juga diperbolehkan bekerja di luar rumah jika memang ada tuntutan untuk itu; dan juga diajari secara detail tentang masalah-masalah kewanitaan.¹⁰³

Sejak tahun 2000, konsentrasi Diniyah Puteri sudah mulai melebar, misalnya dengan menjadikan muridnya kelak siap menjadi panutan, tidak saja panutan bagi rumah tangga tetapi juga ibu bagi lingkungan masyarakatnya. Menurut Fauziyah el-Muhammady—pimpinan perguruan ini, seperti dikutip Dina Afrianty, ada tiga hal penting yang harus dipertimbangkan untuk membentuk figur seorang ibu yang demikian: *pertama*, seorang ibu dituntut mendidik anaknya agar menjadi pribadi yang tangguh dan unggul; *kedua*, mereka juga didorong menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat; dan *ketiga*, didorong terlibat dalam perkembangan dan pembangunan nasional. Untuk tiga tantangan besar tersebut dibutuhkan kader-kader wanita Muslim yang berkualitas.¹⁰⁴ karena itu, jika selama ini telah dibekali berbagai keterampilan seperti memasak, menjahit, dan menenun, ke depan mereka harus dibekali berbagai keterampilan sarat teknologi tinggi: computer, internet, dan alat komunikasi lain. Hal ini sesuai dengan cita-cita Diniyah Puteri: “mempersiapkan wanita, mendidik sebuah generasi”.¹⁰⁵

Keberhasilan Rahmah dalam mengelola Perguruan Diniyah Puteri telah menarik perhatian Rektor Universitas al-Azhar Kairo, Dr. Syaikh Abdurrahman Taj. Maka pada 1955, dia mengadakan

kunjungan khusus ke perguruan ini. Di kemudian hari ia mengambil sistem pendidikan Diniyah Puteri untuk mahasiswanya. Pada saat itu, al-Azhar Kairo belum memiliki lembaga pendidikan khusus untuk perempuan. Tak lama setelah itu berdirilah *Kulliyat al-Banat*, sebagai bagian dari Universitas al-Azhar, Cairo. Sebagai penghargaan, Rahmah diundang berkunjung ke universitas tersebut. Dalam kunjungan balasannya (1957) yang dilakukan sepulang ibadah haji, Rahmah dianugerahi gelar *Syaikhah* oleh al-Azhar Kairo. Dengan gelar tersebut, kedudukan Rahmah setara dengan Syeikh Mahmoud Syaltout, mantan Rektor al-Azhar yang pernah berkunjung ke Indonesia tahun 1961. Hamka, yang mengaku sebagai adiknya, sangat mengaguminya dan mengatakan bahwa gelar tersebut biasanya dikenakan bagi laki-laki pakar ilmu agama (*syekh*). Sepengetahuannya, selama beberapa ratus tahun ini, hanya Rahma yang memperoleh gelar tersebut di dunia Islam.¹⁰⁶

Atas jasa besar Rahmah dalam mendidik kaum perempuan dan perjuangannya memimpin masyarakat, orang-orang terkemuka pada zamannya telah member Rahmah gelar “Kartini dari Perguruan Islam” dan “Kartini Gerakan Islam”. Bahkan, menurut keterangan Aisyah Aminy, Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) telah memasukkan nama Rahmah el-Yunusiah dalam deretan Pahlawan Nasional yang telah diakui secara resmi oleh pemerintah.¹⁰⁷

Demikianlah, dengan apa yang telah dilakukannya, Rahmah mungkin bisa disebut sebagai perempuan Muslim pertama di awal abad ke-20 yang secara tegas menyuarakan perlunya kemajuan untuk kaum perempuan, khususnya di Sumatra Barat. Lebih dari itu, Rahmah bisa menyaksikan bagaimana cita-cita kemajuan tersebut diwujudkan dalam bentuk lembaga pendidikan yang didirikannya khusus untuk kaum perempuan. Baik Diniyah School Putri (*Madrasah Diniyah li al-Banat*) maupun lembaga pendidikan lain yang di bangun semua menjadi wujud perjuangan Rahmah untuk memberi pendidikan, dan selanjutnya meningkatkan derajat kaum perempuan di Indonesia.

Catatan Akhir :

- ¹ Lihat Paulo Freire. *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Herder and Herder, 1970). Di Indonesia, karya Freire telah diterjemahkan oleh beberapa penerbit. Lihat Paulo Freire, *Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan*, (Jakarta: Gramedia, 1984); Paulo Freire, *Politik Pendidikan Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).
- ² Lihat Ivan Illich. *Deschooling Society*. New York: Harper and Row, 1971. Lihat pula terjemahan Indonesia buku ini, *Bebaskan Masyarakat dari Belenggu Sekolah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000.
- ³ Benny H. Hoed. *Semiotika dan Dinamika Sosial Budaya*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2008. hal 101.
- ⁴ Azyumardi Azra. "Pendidikan Islam Indonesia dan Tantangan Globalisasi: Perspektif Sosio-Historis," dalam Jajat Burhanuddin dan Dina Afrianty, (ed.), *Mencetak Muslim Modern: Peta Pendidikan Islam Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006. hlm: 6.
- ⁵ *Ibid.*, hlm: 7-10.
- ⁶ Lihat Yudi Latif. *Inteligensia Muslim dan Kuasa: Geneologi Inteligensia Muslim Indonesia Abad ke-20*. Bandung: Mizan, 2005. hlm: 85.
- ⁷ Djumhur & Danasuparta. *Sejarah Pendidikan*. Bandung: CV Ilmu, 1959. hlm: 127.
- ⁸ Lihat Yudi Latif, *op.cit.*, hlm: 89.
- ⁹ Robert Van Niel. *Munculnya Elit Modern Indonesia*, (terj. Zahara Deliar Noer), Cet. 2. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 2009. hlm: 55.
- ¹⁰ Lihat, Yudi Latif, *op.cit.*, hlm: 81-82.
- ¹¹ Van Niel, *op.cit.*, hlm: 77.
- ¹² M.C. Ricklefs. *Sejarah Indonesian Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998. hlm: 236-237.
- ¹³ M.C. Ricklefs, "Sejarah Indonesia", hlm: 239, seperti dikutip Jajat Burhanudin & Oman Fathurahman (Ed.), *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004. hlm: 3.
- ¹⁴ M.C. Ricklefs, *op.cit.*, hlm: 241-142.

-
- ¹⁵ Burhanudin & Fathurahman (Ed.), *op.cit.*, hlm: 4.
- ¹⁶ H.A.H. Harahap dan B.S. Dewantara. *Ki Hajar Dewantara dan Kawan-Kawan Ditangkap, Dipenjarakan dan Diasingkan*. Jakarta: Gunung Agung, 1980. hlm: 3.
- ¹⁷ Abudin Nata, *Tokoh-Tokoh Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005. hlm: 129.
- ¹⁸ H.A.H. Harahap dan B.S. Dewantara, *loc.cit.*
- ¹⁹ Floriberta Aning S. *Seratus Tokoh yang Mengubah Indonesia: Biografis Singkat Seratus Tokoh yang Paling Berpengaruh dalam Sejarah Indonesia di Abad 20*. Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2007. Cet. 3, hlm: 109.
- ²⁰ Slamet Muljana. *Kesadaran Nasional: Dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan, Jilid I*. Yogyakarta: LKIS, 2008. hlm: 80.
- ²¹ *Ibid.*, hlm: 89-93.
- ²² Floriberta Aning S. *Seratus Tokoh yang Mengubah Indonesia: Biografis Singkat Seratus Tokoh yang Paling Berpengaruh dalam Sejarah Indonesia di Abad 20*. Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2007. Cet. 3, hlm: 109-110.
- ²³ I. Djumhur dan Danasuparta. *Sejarah Pendidikan*. Bandung: CV ILMU, 1976. hlm: 173-174.
- ²⁴ Karya Ki Hajar Dewantara. *Bagian Pertama Pendidikan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1962. hlm: 15.
- ²⁵ Djumhur dan Danasuparta. *op.cit.*, hlm: 174
- ²⁶ *Ibid.*
- ²⁷ Karya Ki Hajar Dewantara. *op.cit.*, hlm: 103.
- ²⁸ *Ibid.*, hlm: 111.
- ²⁹ Djumhur dan Danasuparta. *op.cit.*, hlm:178.
- ³⁰ *Ibid.*, hlm:178-179.
- ³¹ Dalam pengertian yang lebih modern, kurikulum tidak hanya menyangkut sejumlah pelajaran tertentu yang diajarkan kepada siswa, melainkan semua yang secara nyata terjadi dalam proses pendidikan di sekolah. pandangan ini bertolak dari sesuatu yang aktual, yang nyata, yaitu yang aktual terjadi di

sekolah dalam proses belajar. Lihat, Ahmad Tafsir. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994. hlm: 53.

- ³² Karya Ki Hajar Dewantara. *op.cit.*, hlm: 80.
- ³³ Djumhur dan Danasuparta, *op.cit.*, hlm: 180-181.
- ³⁴ *Ibid.*, hlm: 175.
- ³⁵ *Ibid.*, hlm: 181-182
- ³⁶ *Ibid.*, hlm: 187
- ³⁷ Mestika Zed. “Engku Mohammad Sjafei dan INS Kayutanam: Jejak Pemikiran Pendidikannya”, *Jurnal TINGKAP*, Volume VIII No. 2, Oktober 2012, diunduh dari <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=101041&val=1549>, (diakses pada 21 Desember 2015).
- ³⁸ *Ibid.*
- ³⁹ AA. Navis. *Filsafat dan Strategi Pendidikan M. Sjafei: Ruang Pendidik INS Kayutanam*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1996. hlm: 20.
- ⁴⁰ *Ibid.*, hlm: 20-21.
- ⁴¹ Muhammad Isnaini. “Mohammad Sjafei: Pemikiran dan Praktik Pendidikan tentang Ruang Pendidik INS Kayutanam”, *Jurnal At-Tafkir*, Vol.II, No. 1 Januari-April 2009, dalam, <http://sumsel.kemenag.go.id/file/dokumen/PemikiranPendidikanSyafei.pdf>, (diakses pada 21 Desember 2015).
- ⁴² Djumhur dan Danasuparta, *op.cit.*, hlm: 187
- ⁴³ *Ibid.*
- ⁴⁴ *Ibid.*, hlm:188.
- ⁴⁵ Andi Halimah, “Sistem Pendidikan Muhammad Syafei (Tokoh Pendidikan Dari Sumatera Barat)”, makalah diunduh dari laman UIN Alauddin Makassar, dalam <http://www.uin-alauddin.ac.id/download-11.%20A.%20Halima%20Sistem%20Pendidikan.pdf>, (diakses pada 21 Desember 2015).
- ⁴⁶ Mestika Zed. *loc.cit.*
- ⁴⁷ Djumhur dan Danasuparta, *loc.cit.*

-
- ⁴⁸ Satuan ukuran luas tanah sama dengan 7.096 m² atau 500 tombak persegi. Lihat *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, edisi keempat. hlm: 149.
- ⁴⁹ Djumhur dan Danasuparta, *op.cit.*, hlm:191
- ⁵⁰ *Ibid.*
- ⁵¹ Djumhur dan Danasuparta, *op.cit.*, hlm:191-192.
- ⁵² Hasbullah, 2001. hlm: 267.
- ⁵³ Djumhur dan Danasuparta, *op.cit.*, hlm: 188-189.
- ⁵⁴ HAR Tilaar. *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2012, Cet. 1. hlm: 324-328.
- ⁵⁵ *Ibid.*, hlm: 329-330.
- ⁵⁶ Beberapa pokok pikiran Moh. Syafei berikut ini dikutip dari Mestika Zed. *loc.cit.*
- ⁵⁷ Harun Nasution. *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1975. hlm: 9.
- ⁵⁸ Junaidatul Munawaroh. "Rahmah el-Yunusiah: Pelopor Pendidikan Perempuan", dalam, *Ulama Perempuan Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002. hlm: 3.
- ⁵⁹ Syekh Muhammad Yunus, adalah syekh tarekat dari beberapa syekh di Minangkabau yang dianggap oleh masyarakat berilmu tinggi, alim dan keras hati, seperti Syekh Khatib di Padang, Syekh Amrullah Maninjau dan lainnya, baca Burhanuddin Daya, *Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam Kasus Sumatera Thawalib*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta, 1995. hlm: 180.
- ⁶⁰ Buku Peringatan 55 tahun Diniyah putri Padang Panjang, hlm: 177
- ⁶¹ Abudin Nata. *Tokoh-Tokoh pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005. hlm: 29.
- ⁶² Junaidatul Munawaroh, *op.cit.* hlm: 4.
- ⁶³ Edward, dkk., *Riwayat Hidup dan Perjuangan 20 Ulama Besar Sumatera Barat*, hlm: 315.

- ⁶⁴ Nuraida. *Rahmah Et Yunusiyah Dalam Perspektif Sejarah Perjuangan Wanita di Indonesia*. Skripsi Sarjana Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: t.p., 1990. hlm: 43.
- ⁶⁵ Junaidatul Munawaroh, *op.cit.* hlm: 5.
- ⁶⁶ *Ibid.*
- ⁶⁷ Buku Peringatan 55 tahun Diniyah putri Padang Panjang, hlm: 179.
- ⁶⁸ Hamruni, "Pendidikan Perempuan dalam Pemikiran Rahmah el-Yunusiah", hlm: 110-111. Lihat juga, Aminuddin Rasyad, "Rahmah El Yunusiyah, Kartini dari Perguruan Islam", dalam, *Manusia dalam Kemelut Sejarah*. Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan, Ekpnomi, dan Sosial. Jakarta: 1978. hlm: 237.
- ⁶⁹ Buku Peringatan 55 tahun Diniyah putri Padang Panjang, hlm: 178.
- ⁷⁰ Hamruni, "Pendidikan Perempuan dalam Pemikiran Rahmah el-Yunusiah", hlm: 111. Lihat Aminuddin Rasyad, dkk., *HJ. Rahmah El Yunusiyah dan H. Zaenuddin Labay El Yunusy, Dua Bersaudara Tokoh Pembaharu Pendidikan Islam*. hlm: 38.
- ⁷¹ Hamka. *Ayahku Riwayat Hidup DR. H. Abdul Karim Amarullah Dari Perjuangan Kaum Agama di Sumatera*. hlm: 245.
- ⁷² Burhanudin & Fathurahman (Ed.), *op.cit.* hlm: 18-19.
- ⁷³ *Ibid.*, hlm: 19.
- ⁷⁴ Diniyah School Puteri. *Buku Peringatan 15 Tahun Diniyah School Puteri*. Padang Panjang: 1938. hlm: 8. Lihat juga Burhanudin & Fathurahman (Ed.), *loc.cit.*
- ⁷⁵ Burhanudin & Fathurahman (Ed.), *loc.cit.*
- ⁷⁶ Hamruni, "Pendidikan Perempuan dalam Pemikiran Rahmah el-Yunusiah", hlm: 112. Lihat selengkapnya dalam, *Peringatan 55 tahun Diniyah Putri Padang Panjang*. Jakarta: Gh.ia Indonesia, 1978. hlm: 178.
- ⁷⁷ Junaidatul Munawaroh, *op.cit.*, hlm: 10.
- ⁷⁸ *Ibid.*
- ⁷⁹ Hamruni, *op.cit.*, hlm: 114. Lucy A. Wh.ley. *Meletakkan Islam Ke Dalam Praktik: Perkembangan Islam Dalam Perspektif Gender Di Minangkabau*, hlm: 217.
- ⁸⁰ Nantinya cita-cita ini terumuskan dalam tujuan pendidikan sekolah Diniyah Puteri yang didirikan Rahmah.

- ⁸¹ Lucy A. Whaley. "Meletakkan Islam ke Dalam Praktik: Perkembangan Islam Dalam perspektif Gender Di Minangkabau", dalam Taufik Abdullah, dkk., *Jalan Baru Islam Memetakan Paradigma Mufakhir Islam Indonesia*. hlm: 216.
- ⁸² Deliar Noer. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES, 1982. Cet. 2, hlm: 62.
- ⁸³ Saat itu Labay bertanya kepada Rahmah untuk menguji kemauan hati adiknya: "apakah Amah benar-benar telah siap dan sanggup mendirikan sekolah putri yang Amah cita-citakan itu? Apakah engkau tidak takut menghadapi tantangan kaum perempuan dan ninik mamak yang ingin berpegang teguh pada adat di negeri ini? Dengan tegas dan tanpa ragu-ragu Rahmah menjawab, "Insya Allah Amah siap dan sanggup...saya akan menghadapi mereka. Kalau saya tidak mulai dari sekarang, maka kaum saya akan tetap terbelakang. Saya harus mulai, dan saya yakin akan banyak pengorbanan dituntut dari diri saya." Sehubungan dengan cita-citanya ini Rahmah bersemboyan, "Jika Kakanda bisa kenapa saya, adiknya, tidak bisa. Jika lelaki bisa, kenapa perempuan tidak bisa". Junaidatul Munawaroh, *op.cit.*, hlm: 12.
- ⁸⁴ *Ibid.*, hlm: 10.
- ⁸⁵ *Ibid.*, hlm: 13.
- ⁸⁶ *Ibid.*, hlm: 14.
- ⁸⁷ *Ibid.*, hlm:1.
- ⁸⁸ Buku Peringatan 55 tahun Diniyah putri Padang Panjang, hlm: 181. Lihat juga Junaidatul Munawaroh. *op.cit.*, hlm: 14-15.
- ⁸⁹ Hamruni. *op.cit.*, hlm: 118.
- ⁹⁰ *Ensiklopedi Islam di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama, 1993. hlm: 979.
- ⁹¹ *Ibid.*
- ⁹² Junaidatul Munawaroh. *op.cit.*, hlm: 21.
- ⁹³ *Ibid.*, hlm: 22.
- ⁹⁴ *Ibid.*
- ⁹⁵ Aminuddin Rasyad, dkk., *op.cit.*, hlm: 51.
- ⁹⁶ Buku Peringatan 55 Tahun Diniyah Putri Padang Panjang, hlm: 191.

⁹⁷ Junaidatul Munawaroh. *op.cit.*, hlm: 23.

⁹⁸ *Ibid.*, hlm: 24.

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm: 25.

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm: 28.

¹⁰² Dina Afrianty. "Transformasi Pendidikan Islam di Minangkabau", dalam, Jajat Burhanudin dan Dina Afrianty (peny.), *Mencetak Muslim Modern: Peta Pendidikan Islam Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006. hlm: 32.

¹⁰³ *Ibid.*, hlm: 31.

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ Junaidatul Munawaroh. *op.cit.*, hlm: 29.

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm: 29-30.

BAB IV

Beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan

M. Nursam

4.1. Pengantar

Pembangunan (developmentalism)—baik sebagai konsep, paradigma, maupun ideologi—mulai dikenal negara-negara Dunia Ketiga, termasuk Indonesia, pada akhir Perang Dunia II. Gagasan pembangunan dilontarkan pada 20 Januari 1949, ketika Presiden Harry S. Truman untuk pertama kalinya memperkenalkan kebijakan pemerintah Amerika Serikat dengan melontarkan istilah “keterbelakangan” (underdevelopment). Inilah saat pertama diskursus pembangunan resmi diluncurkan dalam kaitan dengan konteks Perang Dingin. Kebijakan ini dimaksudkan untuk membendung pengaruh komunisme dan sosialisme di negara-negara Dunia Ketiga.¹

Untuk menyebarkan gagasan pembangunan ke negara-negara Dunia Ketiga, pada 1950-an dan 1960-an para ahli ilmu sosial, terutama pakar ilmu sosial yang tergabung dalam Center for International Studies di Massachusetts Institute of Technology (MIT), menyelenggarakan lokakarya yang berhasil menciptakan wacana resmi dan akademis tentang pembangunan. Sepanjang periode itu, para ahli ilmu sosial sangat produktif menciptakan pengetahuan dan teori tentang pembangunan dan modernisasi. Dalam masa itulah, pakar ekonomi seperti W.W. Rostow menciptakan “Teori Pertumbuhan”, sementara ilmuwan sosial lain seperti David

McClelland dan Inkeles mulai mengembangkan teori mengenai modernisasi. Pada 1968, para ahli ilmu sosial Amerika Serikat semakin jauh dalam mengglobalkan pembangunan. Mereka menyelenggarakan “Konferensi tentang Pelaksanaan Pasal IX Undang-Undang Bantuan Luar Negeri 1961”. Tugas utama mereka adalah mengkaji ketentuan mengenai Undang-Undang Bantuan Luar Negeri tahun 1966, sebagai tafsiran kaum liberal atas konsep pembangunan. Kesimpulan pengkajian tersebut adalah bahwa “partisipasi rakyat”—yang merupakan sasaran pasal IX—harus diletakkan seiring dengan bantuan pembangunan ekonomi untuk menjadi dua pilar utama kebijakan bantuan luar negeri Amerika Serikat. Sejak saat itulah diskursus mengenai partisipasi menjadi bahasa resmi di dalam Developmentalisme.²

Dalam sejarah Indonesia, dokumen pertama mengenai perencanaan pembangunan adalah Penetapan Presiden No. 3/1947 tentang pembentukan Panitia Pemikir Siasat Ekonomi pada tanggal 12 April 1947. Tugas dan kewajiban Panitia Pemikir adalah menyiapkan buah pikiran untuk menjadi rencana dan dasar pendirian Pemerintah Indonesia dalam menghadapi perundingan dengan Belanda dan penyelesaian soal-soal pembangunan negara. Panitia di atas menghasilkan dokumen yang disebut “Dasar-dasar Pokok Daripada Plan Mengatur Ekonomi Indonesia”. Rancangan ini berisi program pembangunan dengan tujuan memperbesar dan menyebarkan kemakmuran rakyat secara merata. Ini merupakan dokumen perencanaan pertama yang berhasil disusun dalam sejarah perencanaan pembangunan di Indonesia.³

Meski demikian, rumusan paling konkrit dan sistematis dari Pembangunan dilakukan pada masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Dan untuk tujuan itu Soeharto merekrut sejumlah tenaga ahli, disebut “teknokrat”, untuk merumuskan konsep pembangunan secara sistematis dan terukur. Tulisan ini akan menguraikan pemikiran tentang pembangunan oleh tiga orang tokoh yang terlibat—dengan cara mereka masing-masing—dalam proyek pembangunan Orde Baru. Mereka adalah Soedjatmoko, Widjojo

Nitisastro, dan Mubyarto. Ketiga tokoh ini telah memberi sumbangan pemikiran mengenai pembangunan di Indonesia khususnya pada masa Orde Baru. Ketiganya merupakan aktor-aktor penting dalam gagasan pembangunan di Indonesia. Soedjatmoko, meski tak memiliki ijazah sarjana, tetapi cakrawala pemikirannya membentang sangat luas. Widjojo Nitisastro, merupakan salah satu konseptor penting sekaligus pelaksana pembangunan di Indonesia selama Orde Baru Soeharto. Mubyarto, akademisi sekaligus aktivis pembangunan.

4.2. Pembangunan Ekonomi Orde Baru

Sebelum membahas mengenai pemikiran pembangunan dari ketiga tokoh di atas, akan diuraikan secara singkat mengenai pembangunan ekonomi di Indonesia, khususnya pada masa Orde Baru. Uraian ini relevan karena ketiganya bergumul dalam konteks sosial pemikiran pada masa Orde Baru. Dengan kata lain, periode Orde Baru adalah ruang dan waktu pergumulan pemikiran pembangunan ketiga tokoh yang akan dibahas dalam tulisan ini.

Seperti dicatat The Kian Wie,⁴ tahun-tahun terakhir pemerintahan Presiden Soekarno ditandai dengan memburuknya kondisi ekonomi. Hal ini tercermin pada kontraksi ekonomi Indonesia sebesar tiga persen pada 1963, hiperinflasi, dan anjloknya kapasitas produksi karena terabaikan dan kurangnya devisa untuk mengimpor suku cadang dan barang modal. Memburuknya ekonomi sejak masa awal kemerdekaan dapat dilihat dari fakta bahwa sesudah pulih pada awal 1950-an akibat perang dan revolusi, ekonomi Indonesia mulai mandek pada akhir 1950-an, dan kemudian tumbuh negatif dari awal sampai pertengahan 1960-an. Laju inflasi baru melonjak dengan kecepatan yang mengkhawatirkan sejak awal 1960-an. Inflasi naik tak terkendali dari 19 persen pada 1960 dan mencapai puncak sebesar 636 persen pada 1966. Penyebab pokok hiperinflasi itu adalah defisit anggaran pemerintah yang terus melonjak, yang dibiayai dengan cara sederhana, yaitu mencetak uang.

Jenderal Soeharto, yang mengambilalih kekuasaan eksekutif dari Presiden Soekarno pada awal 1966, mewarisi kebangkrutan ekonomi yang berada di tepi jurang kehancuran. Negara ini gagal membayar utang luar negeri sebesar US\$2,4 miliar, hiperinflasi sebesar 600 persen, produksi industri hanya di bawah 20 persen dari kapasitas. Infrastruktur, pelayaran, alat transportasi air, kereta api, dan jalan raya sudah using. Sementara itu, seluruh sistem kontrol pemerintah terhadap ekonomi digerogeti korupsi.

Menghadapi kebutuhan mendesak untuk menangani masalah-masalah ekonomi yang serius ini, Jenderal Soeharto berpaling kepada sekelompok ekonom muda dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) untuk mendapatkan saran-saran. Para ekonom itu adalah Widjojo, Ali Wardhana, Mohammad Sadli, Subroto, dan Emil Salim. Kontak Soeharto dengan para ekonom itu sudah dimulai sejak ia mengikuti kursus ilmu ekonomi dan pengetahuan sosial lainnya di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) di Bandung pada akhir masa Soekarno. Soeharto memperoleh pengetahuan dasar tentang ilmu ekonomi dari para ekonom FEUI sebagaimana peserta kursus Seskoad lainnya.

Sesudah Soeharto memegang kekuasaan, Komandan Seskoad, Letjen Soewarto, menyelenggarakan Seminar Angkatan Darat Kedua pada Agustus 1966. Tujuannya adalah untuk membahas tiga masalah besar, yaitu politik, ekonomi, dan militer. Para peserta seminar dibagi menjadi tiga kelompok, yang disebut "sindikot". Para ekonom dimasukkan ke dalam "Sindikot Ekonomi", sedangkan para ilmuwan sosial dan politik, termasuk seorang ekonom, Sarbini, dimasukkan ke dalam "Sindikot Politik". Tujuan seminar ini adalah mencari gagasan-gagasan dari luar lingkungan Angkatan Darat. Angkatan Darat tahu apa yang tidak dikehendakinya, terutama komunisme, tapi kurang begitu yakin tentang arah tujuan mereka. Para ilmuwan ekonomi dan sosial yang ambil bagian dalam seminar diundang karena dianggap rasional dan antikomunis.

Diskusi di Sindikat Ekonomi terpusat pada masalah stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Pimpinan diskusi Widjojo telah menyiapkan

program operasional untuk menangani masalah-masalah ekonomi yang serius di negeri ini. Soeharto ternyata terkesan. Segera sesudah seminar ini usai, Soeharto menunjuk kelima ekonom FEUI ini sebagai "penasihat ahli"-nya. Penunjukan ini menandai tampilnya para ekonom yang sering disebut Mafia Berkeley" (karena banyak di antara mereka belajar di University of California, Berkeley) atau "kaum teknokrat". "Teknokrat" adalah pejabat pemerintah puncak yang dalam menyiapkan kebijakan ekonomi dituntun oleh pertimbangan rasional dengan mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan prinsip-prinsip utama ilmu ekonomi, seperti biaya oportunitas dan kelangkaan sumberdaya. Yang diutamakan bukan "isme" ideologi, melainkan garis pragmatisme, yakni prinsip bahwa yang baik adalah yang berlaku.

Sesudah memegang kekuasaan pada 1966, Soeharto meminta tim ekonominya menyusun Program Stabilisasi dan Rehabilitasi. Tujuan utama program ini adalah stabilisasi ekonomi dengan menghentikan laju inflasi. Instrumen kebijakan pokoknya adalah anggaran berimbang, yang didasarkan pada prinsip bahwa pemerintah tidak semestinya mencetak uang untuk menutup defisit anggaran. Agar kebijakan ini lebih memadai, penerimaan pemerintah dalam anggaran berimbang juga akan mencakup bantuan luar negeri. Pengendalian pemerintah baru pada bantuan luar negeri sebagai sumber dukungan keuangan anggaran ini amat berseberangan dengan ucapan Presiden Soekarno "*go to hell with your aid*" yang anti-Barat.

Sejak awal, Pemerintah Orde Baru menyadari bahwa sikap anti-Barat bukan hanya ciri Pemerintah Orde Lama yang sudah kehilangan pamor, tapi juga bagian dari masalah yang dihadapi. Karena itu, pemerintah baru memutuskan meninggalkan kebijakan "memandang ke dalam", dan menempuh kebijakan "memandang ke luar", seperti tercermin pada kebijakan perdagangan dan investasi asing yang lebih liberal. Untuk mencapai hal itu, pemerintah baru memutuskan membangun kembali hubungan baik dengan negara-negara Barat maupun Jepang. Hubungan baik itu dianggap penting untuk

menjadwalkan kembali pengembalian utang luar negeri Pemerintah Soekarno yang berjumlah besar; juga untuk mencari bantuan luar negeri guna mendukung neraca pembayaran dan anggaran pemerintah; dan untuk menarik modal asing. Merasa senang dengan sikap Indonesia yang telah meninggalkan kebijakan anti-Barat dan antikapitalis, komunitas bantuan internasional memberikan respons positif terhadap permintaan Indonesia untuk menjadwalkan kembali pembayaran utang dan memperoleh bantuan luar negeri baru.

Datangnya pemerintah baru berarti juga ditolaknya pola etatisme Pemerintah Soekarno, yaitu negara menjadi pemain ekonomi dominan. Stigma negatif perusahaan swasta, yang menjadi ciri masa akhir Soekarno, disingkirkan. Sejak itu, modal swasta, baik domestik maupun luar negeri, dianjurkan untuk ditanam di berbagai kegiatan ekonomi guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan peluang kerja.

Sejalan dengan itu, Undang-Undang Penanaman Modal Asing diberlakukan pada Januari 1967. Undang-undang ini berisi berbagai insentif dan jaminan kepada para calon investor asing, di dalamnya termasuk masa bebas pajak dan jaminan tiadanya nasionalisasi, kecuali dianggap perlu bagi kepentingan nasional, dan itu pun dengan kompensasi penuh sesuai dengan hukum internasional yang berlaku. Kebijakan pintu terbuka bagi modal asing ini menarik para penanam modal asing baru untuk masuk ke negeri ini, terutama di sektor minyak bumi dan proyek-proyek pertambangan lain, dan sektor industri manufaktur.

Bila program stabilisasi difokuskan pada pemulihan stabilitas makroekonomi, khususnya pengendalian hiperinflasi, maka program rehabilitasi difokuskan pada perbaikan infrastruktur fisik dan fasilitas produksi. Pemerintah memprioritaskan perbaikan infrastruktur yang berhubungan dengan produksi dan distribusi pangan, seperti irigasi, jalan, dan jembatan. Dalam hal ini pemerintah juga lebih memprioritaskan pertanian, khususnya subsektor tanaman pangan, daripada Industri manufaktur.

Program stabilisasi dan rehabilitasi yang dilaksanakan tim ekonomi tersebut mampu memulihkan ekonomi secara mengesankan. Hiperinflasi dengan cepat dapat dikendalikan lewat kebijakan fiskal dan moneter yang ketat. Hal ini tercermin pada turunnya laju inflasi dari 636 persen pada 1966 menjadi 9 persen pada 1970.

Dengan pulihnya stabilitas makroekonomi pada akhir 1960-an, ekonomi Indonesia memasuki masa pertumbuhan pesat, yang pada umumnya dapat dipertahankan selama tiga dasawarsa. Pertumbuhan GDP per kapita Indonesia antara 1967-1997 naik rata-rata 4,5 persen, kinerja yang belum pernah terjadi sebelumnya, karena pertumbuhan ekonomi jauh melampaui pertumbuhan penduduk.

Seperti halnya ekonomi Asia kinerja tinggi (HPAE) lainnya—yakni Jepang dan empat "Macan" Asia yang dipuji Bank Dunia dalam laporannya mengenai "Mukjizat Asia Timur"— pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat didukung tingginya angka penanaman modal domestik. Pada pertengahan 1990-an, Indonesia adalah salah satu negara yang mencapai angka tertinggi dalam penanaman modal domestik neto di antara negara-negara berkembang. Penanaman modal ini didorong oleh tingginya tabungan domestik, yang jumlahnya mencapai 33 persen GDP pada 1996.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat juga disertai turunnya angka kemiskinan absolut dari 40 persen penduduk pada 1976 menjadi 11 persen pada 1996. Walaupun terjadi pertumbuhan penduduk, jumlah orang miskin turun dari sekitar 54 juta pada 1976 menjadi 23 juta pada 1996. Penelitian Bank Dunia mengenai angka kemiskinan di sejumlah negara berkembang memperlihatkan penurunan angka kemiskinan tahunan di Indonesia antara 1970-1987 sebagai yang tertinggi. Turunnya angka kemiskinan absolut ini terjadi baik di pedesaan maupun perkotaan. Di pedesaan, tempat sebagian besar penduduk Indonesia berada, angka kemiskinan turun karena Pemerintah Orde Baru amat memperhatikan naiknya produksi beras sebagai makanan pokok kebanyakan orang Indonesia. Untuk mencapai tujuan itu, selama 1970-an pemerintah memprioritaskan

pembangunan pedesaan, yang menjadi kebijakan pro-penduduk miskin yang sangat efektif.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, proses yang sama juga terjadi di bidang sosial. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah indikator sosial, termasuk angka pendaftaran murid sekolah dasar neto yang hampir mencapai 100 persen untuk lelaki dan perempuan, turunnya secara tajam angka kematian bayi dibandingkan tahun 1970, dan naiknya prosentase penduduk yang mendapat akses pada air bersih. Jadi, angka pertumbuhan ekonomi dan sosial di Indonesia sejalan dengan di negara-negara Asia Timur lain, satu-satunya kawasan di dunia berkembang yang dinilai baik selama beberapa dasawarsa, ditinjau dari kedua kriteria pertumbuhan di atas.

Namun demikian, di balik sejumlah keberhasilan yang diraih oleh Pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Jenderal Soeharto, terdapat sejumlah kegagalan. Seperti kebanyakan negara-negara Asia Timur lainnya, pesatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia berlangsung di bawah iklim pemerintahan Orde Baru yang sangat terpusat, otoriter, dan represif. Para pemimpin negara-negara otoriter sering membela pemerintahannya dengan menyatakan bahwa pembangunan ekonomi tidak mungkin berlangsung dalam iklim demokratis. Mereka menyatakan, partai-partai politik umumnya sibuk saling cekcok dan hanya memikirkan kepentingan politik mereka sendiri dan tidak memikirkan kepentingan nasional.

Secara umum, pesatnya pertumbuhan ekonomi di masa Orde Baru berkat kemampuan para teknokrat ekonomi menjaga kestabilan makroekonomi. Namun, pada awal 1990-an, disiplin keuangan ketat itu, yang telah dijaga oleh para teknokrat ekonomi sejak akhir 1960-an, mulai merosot. Hal ini dapat dilihat dari naiknya transaksi non-anggaran, yaitu transaksi pemerintah yang tidak tertera dalam anggaran resmi pemerintah pusat. Transaksi keuangan ini mencakup pengeluaran pemerintah tingkat bawah, lembaga-lembaga semi-pemerintah (seperti Bulog [Badan Urusan Logistik]), dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pengeluaran non-anggaran ini dialokasikan untuk membantu BUMN yang tidak sehat, perusahaan-perusahaan

para pengusaha kroni, dan "industri-industri strategis" yang dikuasai oleh Habibie, Menteri Riset dan Teknologi, terutama IPTN (Industri Pesawat Terbang Nusantara).

Merosotnya disiplin keuangan ini merupakan perkembangan yang mengkhawatirkan. Kondisi ini mencerminkan merosotnya pengaruh para teknokrat ekonomi dalam pembuatan kebijakan ekonomi dan naiknya pengaruh kaum non-ekonom, kebanyakan para insinyur, dalam mengalokasikan sumber-sumber anggaran yang langka. Akibatnya, kaum teknokrat ekonomi tidak cukup kuat lagi menolak tuntutan ceroboh untuk membiayai proyek-proyek mahal itu.

Walaupun keberhasilan pembangunan ekonomi dan sosial pemerintah Orde Baru sangat mengesankan, pada saat yang sama ketidakpuasan masyarakat makin meningkat. Meskipun dibungkam, ketidakpuasan itu tumbuh akibat penindasan politik yang keras dan pelanggaran berat hak asasi manusia, maraknya korupsi, penggelapan dana-dana pemerintah, praktik kolusi yang saling menguntungkan antara pemegang kekuasaan politik dan kroni bisnisnya—banyak di antara mereka adalah pengusaha besar Indonesia-China—dan diberlakukannya kebijakan yang merintangai persaingan domestik.

Kebijakan yang merintangai persaingan domestik itu mencakup pengendalian dalam pemasaran, prosedur pemberian izin industri yang berbelit-belit, dominasi pemerintah di sejumlah industri, kartel, instrumen *ad hoc* dalam industri-industri tertentu, serta pungutan liar dalam perdagangan dalam negeri. Selain membengkakkan biaya usaha dan mengurangi efisiensi, berbagai peraturan dan pembatasan terhadap persaingan domestik ini membuka jalan bagi munculnya pungutan yang menguntungkan kelompok kroni. Semua itu, tak pelak lagi, berakibat buruk terhadap iklim investasi bagi para pengusaha yang bonafide.

Kerusuhan sosial juga pecah di daerah-daerah tertentu karena hak-hak hukum individu atau kelompok diabaikan. Misalnya, pengambilan tanah secara paksa oleh penguasa dengan dalih demi

"pembangunan" tanpa memberikan ganti-rugi yang memadai. Namun "pembangunan" itu kadang-kadang berarti membangun lapangan golf untuk kaum elite atau membangun perumahan mewah untuk orang kaya baru.

Korupsi dan penggelapan dana pemerintah, yang sebagian diperoleh dari bantuan luar negeri yang lunak, tidak bisa dikritik secara terbuka karena tiadanya kebebasan politik. Demonstrasi mahasiswa yang menyuarakan demokrasi atau menentang korupsi dilarang. Sementara itu beberapa surat kabar dan majalah yang melaporkan praktik-praktik tersebut dibredel karena dianggap membahayakan stabilitas politik dan menggerogoti kewibawaan pemerintah. Dengan demikian konsentrasi kekuasaan politik, yang disertai konsentrasi kekayaan ekonomi, berada di tangan segelintir orang saja. Kedua konsentrasi itu dapat dilihat dari munculnya konglomerat-konglomerat besar yang dimiliki dan dikuasai oleh keluarga Soeharto dan kroni-kroni bisnisnya, yang seringkali adalah pengusaha besar Indonesia-China. Korupsi, kolusi, dan nepotisme yang mencolok (yang disebut dengan akronimnya KKN) tidak hanya menggerogoti kemampuan dan daya saing ekonomi nasional, tapi juga mengancam tujuan nasional yang diidamkan, yaitu "masyarakat adil dan makmur".

Apa yang digambarkan di atas antara lain merupakan potret singkat dari pembangunan ekonomi Orde Baru, baik sisi terang maupun sisi gelapnya. Selanjutnya akan diuraikan mengenai pemikiran pembangunan tiga tokoh yang telah disebut di atas, yakni Soedjatmoko, Widjojo Nitisastro, dan Mubyarto.

4.3. Soedjatmoko dan Pembangunan Holistik dan Demokratis

Lahir di Sawahlunto pada 10 Januari 1922 dari pasangan Mohammad Saleh Mangundiningrat dan Isnadikin, dan dibesarkan dengan tradisi Timur oleh keluarga dan Barat melalui pendidikan formal yang dijalani, Soedjatmoko tumbuh menjadi sosok intelektual yang akrab dengan dunia tradisi sekaligus dunia modern. Bagi Koko—panggilan akrabnya—dunia tradisi dan modern bukan sesuatu yang harus dipertentangkan tetapi saling melengkapi.⁵ Semua penulis tentang Soedjatmoko sepakat bahwa pemikirannya mencakup bidang yang sangat luas, beragam, dan multidimensi.

Sejak kecil, Soedjatmoko sangat dekat dengan dunia bacaan. Hal ini dimungkinkan karena lingkungan keluarganya yang sangat memperhatikan pendidikan. Ayahnya, Saleh Mangundiningrat, seorang dokter lulusan negeri Belanda pada 1929, senantiasa mendidik Soedjatmoko untuk bekerja keras, disiplin, jujur, menghargai sesama, percaya kepada pencipta, dan berbagai ajaran kebajikan lainnya. Dengan lingkungan keluarga yang demikian, Soedjatmoko tumbuh menjadi sosok yang mencintai ilmu pengetahuan. Rasa keingintahuan terusnya berlangsung dari bacaan-bacaannya mengenai filsafat, sastra, ensiklopedia, kebudayaan, dan lain-lain. Berbagai bacaan itu menjadi salah satu faktor yang membentuk sosok Soedjatmoko sebagai seorang pemikir.

Mengingat luasnya jangkauan pembicaraan Soedjatmoko mengenai pembangunan, di sini akan dipilih tiga tema yang memadai untuk menggambarkan konsep Soedjatmoko tentang pembangunan.⁶ *Pertama*, kerangka pemikiran Soedjatmoko tentang pembangunan, yang akan menjelaskan bagaimana visi Soedjatmoko mengenai hal tersebut. *Kedua*, unsur-unsur pembangunan, yakni faktor-faktor yang berfungsi sebagai "pemeran" dalam usaha pembangunan. Dan *ketiga*, nilai pembangunan, yakni pembicaraan yang menyangkut aspek nilai dari usaha pembangunan yang

dijalankan, jadi suatu paparan yang bersifat normatif mengenai sasaran dan tujuan pembangunan.

4.4. Kerangka pembangunan

Pengertian pembangunan di atas harus dilihat sebagai bagian dari gagasan Soedjatmoko mengenai masyarakat dan bagaimana proses yang berkembang di dalamnya. Masyarakat mencerminkan kompleksitas yang di dalamnya terjadi tarik-menarik antara berbagai kepentingan, yang pada akhirnya menimbulkan berbagai pertentangan. Pertentangan tersebut bisa berasal dari faktor ekonomi, karena perebutan sumberdaya yang bersifat terbatas; faktor politik, karena dorongan untuk berkuasa atau untuk mempertahankan kekuasaan; dan faktor sosial, karena adanya perbedaan kemampuan dan peluang dalam memanfaatkan kesempatan dan sebagainya. Dan pertentangan tersebut tidak terhindarkan dan harus dihadapi sehubungan dengan usaha pembangunan.

Soedjatmoko kemudian mengembangkan suatu hipotesa, berdasarkan pengalaman sejarah, bahwa masalah utama masyarakat tidak lain berupa usaha mencapai keseimbangan yang dinamis antara ketertiban, perubahan dan keadilan sosial. Diabaikannya keseimbangan ini akan menciptakan desintegrasi sosial dan suatu masa transisi dengan risiko yang tinggi bagi perubahan ke arah terciptanya masyarakat yang tertib. Dari sinilah pemikiran Soedjatmoko mengenai pembangunan dimulai.

Pembangunan adalah proses perubahan di dalam masyarakat yang harus berlangsung dalam suasana yang tertib dan secara sinambung menciptakan keadilan dalam masyarakat. Sebab, dalam kata-kata Soedjatmoko, "tanpa tingkat minimum ketertiban dan stabilitas tidak mungkin terpelihara kegiatan-kegiatan manusia produktif secara terus menerus". Sementara itu perubahan juga diperlukan, sebab tanpa adanya perubahan (perubahan-perubahan struktural dan sosial dan secara fundamental) kebebasan tidak punya

kesempatan. Sedangkan masalah keadilan, yang dalam masyarakat tercakup amat banyak ragam konsep mengenai apa yang disebut adil, menurut Soedjatmoko, tergantung pada kesepakatan yang tak terucapkan mengenai batas-batas yang dapat diterima tentang ketidakadilan dan ketidakjujuran, dan konsep tentang ketidakadilan sosial ini berubah sesuai dengan perubahan kondisi pembangunan.

Hal itu menjelaskan bahwa membangun berarti menghadapi berbagai persyaratan yang saling bertentangan. Dari segi budaya, misalnya, pembangunan merupakan usaha memadukan nilai-nilai tradisional dan modern, dalam arti menghubungkan usaha-usaha pembangunan sebagai inti moral bangsa kepada struktur-struktur terdalam dari kebudayaan-kebudayaan tertentu dan nilai-nilai dasarnya. Dan dari segi ekonomi akan berarti usaha mempertemukan kebutuhan-kebutuhan pihak pusat untuk menjatahkan secara paling rasional dan efisien sumber-sumber pembangunan yang langka dengan keperluan pembangunan dari bawah dengan unsur-unsur otonomi dan kepercayaan pada diri sendiri. Maka, proses pembangunan menimbulkan berbagai masalah sehubungan dengan perubahan nilai dan pertimbangan nilai. Karena itu, menurut Soedjatmoko, pembangunan tidak boleh dilihat sebagai suatu gerak lurus ke arah kemajuan (*a straight line Progression*).

Sejalan dengan hal itu, Soedjatmoko mengatakan bahwa pembangunan sesungguhnya merupakan suatu “transformasi sosial yang menyeluruh”. Ignas Kleden⁷ menjelaskan bahwa dengan pengertian transformasi tersebut berarti pembangunan harus memperhitungkan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat, yang harus melenyapkan semua ketimpangan dalam struktur yang memperkuat kemiskinan dan ketidakadilan, tetapi yang sekaligus juga dapat menjamin demokrasi dan kebebasan. Maka, transformasi tersebut tidak hanya menyangkut dimensi ekonomi, melainkan juga dimensi-dimensi lain. Tentang bagaimana arah transformasi tersebut, Ignas Kleden memaparkan sebagai berikut; dalam bidang ekonomi, transformasi tersebut akan mengakibatkan perubahan struktural, yang di satu pihak harus membebaskan

masyarakat dari berbagai ketimpangan struktural yang sangat menghalangi kemampuan mereka dalam mengorganisasikan dirinya, dan di pihak lain menyebabkan masyarakat tersebut tidak mungkin keluar dari kemiskinan, karena struktur yang ada secara ekonomis selalu akan merugikan mereka. Di bidang politik, transformasi tersebut akan menghasilkan suatu sistem politik, yang di satu pihak dapat menjadi sistem rekonsiliasi yang sanggup mengakomodasikan konflik-konflik kepentingan dari berbagai kelompok politik dengan menggunakan paksaan minimum, dan di pihak lain harus sanggup menghadapi masalah-masalah praktis yang dibawa oleh modernisasi. Dalam bidang kebudayaan, transformasi tersebut akan membuat anggota masyarakat bersangkutan sanggup melakukan penyesuaian diri secara kreatif terhadap perubahan-perubahan sosial yang diakibatkan oleh modernisasi dan perubahan sosial besar yang hampir tak dapat dikendalikan dan membawa dampak yang sangat mendalam seperti peledakan penduduk, kemajuan teknologi dan perkembangan luar biasa dalam komunikasi, serta ancaman terhadap kehancuran dunia baik oleh perusakan ekologis maupun oleh ancaman perang serta penyesuaian terhadap "*rising expectation*" terhadap hasil modernisasi.

Dengan itu, mudah dimengerti jika Soedjatmoko kemudian menjelaskan tentang perlunya pembangunan dipahami sebagai suatu program dengan tujuan banyak yang harus dihadapi dengan strategi yang tidak bersifat tunggal, suatu "*multitrack development strategy*". Artinya, pembangunan harus diarahkan untuk mencapai sasaran yang bermacam-ragam secara bersama-sama. Soedjatmoko meragukan teori-teori pembangunan yang gagal memberikan bimbingan untuk mencapai sasaran-sasaran ganda (*multiple goals*) pembangunan, demikian juga teori-teori pembangunan yang mensyaratkan suatu tingkat konsentrasi kekuasaan negara tanpa secara simultan menyediakan petunjuk bagaimana mengontrol kekuasaan seperti itu dengan efektif dan bagaimana mencegah agar negara sendiri tidak menjadi tujuan akhir dan mengekalkan dirinya sendiri sampai saat kebusukan dan kerusakan di dalam dirinya menyebabkan

kematiannya. Teori yang ditawarkannya dinamakan teori pembangunan demokratik. Teori ini muncul sebagai respon terhadap krisis keadaan yang dipandang telah menyajikan teori-teori pembangunan yang tak lagi dapat dipertahankan. Soedjatmoko mengatakan:

Pencarian teori pembangunan demokratik merupakan manifestasi tertentu dari krisis yang kini mengguncang seluruh umat manusia dan seluruh kebudayaan, kaya ataupun miskin, kuat maupun lemah sampai jauh ke dalam akar-akarnya yang terdalam.⁸

Teori ini didasarkan pada sebuah postulat bahwa pembangunan harus dijalankan dalam kebebasan dan untuk mencapai kebebasan, karena kebebasan merupakan kondisi esensial bagi pertumbuhan manusia dan individu manusia dan untuk kelangsungan hidup masyarakat dan sistem-sistem politik. Adapun ciri-ciri teori pembangunan demokratik yang digariskan Soedjatmoko adalah:(1) ia hendaknya memiliki kemampuan analitik dan menjelaskan hubungan antara perubahan dan pembangunan, ketertiban dan kestabilan dan keamanan serta keadilan sosial; (2) hendaknya menyediakan peta perjalanan bagi pilihan-pilihan (betapapun sementara sifatnya) menuju arah lintasan pembangunan yang menghormati dan secara konstan memperluas wilayah kebebasan manusia, martabat manusia dan hak-hak manusia.

4.5. Unsur-Unsur Pembangunan

Soedjatmoko mengartikan unsur-unsur pembangunan adalah faktor-faktor yang berfungsi sebagai "pemeran dalam pembangunan", serta bagaimana unsur-unsur tersebut saling berinteraksi. Ada dua unsur pembangunan yang sangat sentral dalam pemikiran Soedjatmoko, yakni unsur negara dan unsur masyarakat—termasuk masyarakat internasional.

1. Negara

Soedjatmoko membicarakan negara berdasarkan hasil pengamatan sejarah dan menunjuk negara yang dimaksudkannya sebagai suatu konsep yang muncul setelah berakhirnya dasawarsa pertama kepemimpinan demokratis, yang dilihatnya sebagai suatu fenomena baru. Soedjatmoko menyebut fenomena itu dengan istilah Negara Birokrasi Modernis (*Modernizing Birocratic State-MBS*) dengan ciri utama adalah berupa pemusatan kekuasaan yang terkonsentrasi pada eksekutif dan adanya komitmen yang kuat pada pembangunan dan partai-partai politik ditempatkan di bawah sasaran pembangunan.

Terdapat segi positif, tentu disamping negatif, dari munculnya negara serupa itu. Segi positifnya terutama karena negara memiliki kemampuan dalam menjaga stabilitas yang diperlukan bagi pembangunan, dan segi negatifnya karena kenyataan terlalu menguatnya kekuasaan yang dimiliki sehingga mematikan kreatifitas dan otonomi masyarakat yang sangat diperlukan sebagai prasarat bagi pembangunan yang berhasil. Terdapat empat hal yang menjadi sumber bagi kelemahan negara serupa itu: (1) birokrasi dan kekuasaan yang besar pada negara, membuatnya menjadi tidak peka dan banyak terjadi kegagalan dalam melakukan penyesuaian yang diperlukan pada waktunya; (2) efisiensi dan efektifitas menjadi prioritas dalam pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah; (3) adanya perhatian berlebihan terhadap kestabilan dan keamanan, sampai-sampai menghambat perubahan yang perlu; kreatifitas dan kemampuan inovatif disamping pertumbuhan sosial menuju kemandirian masyarakat; (4) ketiadaan kekuatan tandingan yang efektif dalam masyarakat telah menghasilkan disparitas kekuasaan yang sangat besar antara negara dan masyarakat.

Oleh karena itu, penting mendudukan dalam batas-batas mana negara harus menjalankan kekuasaannya. Soedjatmoko mengakui adanya orang-orang yang menghendaki kekuasaan yang lemah pada negara-negara sedang berkembang dengan alasan demi potensi pembangunan dan demokrasi, dan ia menekankan bahwa

selama masih ada kemiskinan dan pengangguran yang sangat luas dalam suatu lingkungan ketidakseimbangan struktural, maka pembangunan memerlukan pemerintah yang kuat. Namun, bersamaan dengan itu, ia juga mengatakan bahwa tugas pembangunan merupakan urusan yang sewajarnya dari pemerintah dan hendaknya ditempatkan di tangan birokrasi. Namun, itu hendaknya dialihkan kepada masyarakat luas atau kepada suatu tingkat komunitas ketika kemampuan mereka sudah meningkat untuk melakukan pengelolaan sendiri dan pemerintahan sendiri.

2. Masyarakat

Telah disinggung sebelumnya mengenai peran negara dalam kaitannya dengan masyarakat dalam menjalankan tugas pembangunan. Dapat dipastikan bahwa negara dan masyarakat secara bersama-sama merupakan satu kesatuan yang bertanggung-jawab dalam melaksanakan pembangunan, atau menurut Soedjatmoko "dalam menjalankan transformasi sosial secara menyeluruh." Namun, hubungan antara negara dan masyarakat menemui masalah karena ternyata di antara keduanya terdapat perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan tersebut, menurut Soedjatmoko, terlihat dalam bentuk yang paling sederhana adalah "dalam mendamaikan hak-hak negara untuk melindungi dirinya sendiri dan hak-hak azasi manusia dari individu dan masyarakat dengan kehidupan demokratis."

Secara implisit Soedjatmoko menghendaki bentuk perimbangan peran antara negara dan masyarakat, agar masing-masing dapat berjalan sesuai proporsinya. Pembangunan tidak akan berhasil tanpa mendalami bentuk-bentuk peranan yang tepat dan saling melengkapi dalam menjalankan pembangunan. Dalam hal tersebut Soedjatmoko mengatakan:

Pembangunan hendaknya memungkinkan gerak menjauhi tata sosial yang tetap dan pasti dengan hirarki permanennya, dan bergerak menuju suatu masyarakat yang semakin terbuka di

mana terdapat kemampuan yang konstan bagi saling pertukaran peranan di antara yang memerintah dan yang diperintah baik pada tingkat makro maupun tingkat mikro.

Atas dasar itu kiranya perlu dicatat pentingnya peranan masyarakat yang dirumuskan Soedjatmoko dalam hubungannya dengan pembangunan. Di sini dipilih segmen-segmen masyarakat yang terutama banyak dibicarakan, yakni Kaum Lemah dan Kaum Miskin; Kaum Wanita; Universitas dan Lembaga Penelitian; Kaum Elite; Pers dan Partai Politik; dan Masyarakat Internasional. Berikut ini akan dibahas salah satunya saja, yakni masyarakat internasional.

4.6. Masyarakat Internasional

Masyarakat internasional adalah unsur yang berada di luar pembangunan suatu negara namun tidak dapat dipisahkan dalam ikut menentukan dinamika pembangunan suatu negara.

One point that is apparent is that development can't be seen only in term of national efforts, but must be considered in the context of intrusiveness of international political and economic factors.

(Satu hal jelas bahwa pembangunan tak dapat dilakukan hanya dalam pengertian usaha-usaha nasional, melainkan harus juga mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi dan politik internasional yang terkait).

Peranan paling menonjol dari masyarakat internasional untuk negara berkembang terutama adalah berupa bantuan pembangunan. Soedjatmoko membahas masalah ini pada bagian kedua bukunya, dan menguraikan masalah-masalah yang timbul sehubungan dengan bantuan luar negeri dan ke mana hendaknya sasaran bantuan luar negeri diarahkan.

Dalam hubungannya dengan keperluan memperjuangkan hak-hak manusia dalam pembangunan, Soedjatmoko menghargai peran masyarakat internasional dalam apa yang dikatakannya sebagai upaya "memaksa pemerintah-pemerintah untuk dengan sungguh-sungguh memperhatikan pengakuan komitmen mereka atau

komitmen yang tulus dari mereka pada demokrasi dan untuk memperkuat impuls-impuls bagi kebebasan di dalam negeri," sambil mengingatkan adanya tuntutan publik tentang hak-hak manusia pada tingkat internasional yang kontraproduktif. Soedjatmoko menyarankan agar kritik tentang pelanggaran hak-hak manusia dijadikan bagian dari usaha yang lebih umum untuk membantu menimbulkan ketrampilan dan konsep-konsep yang cocok, meningkatkan kemampuan masyarakat-masyarakat berkembang bagi transformasi sosial yang manusiawi pada masyarakat mereka.

4.7. Nilai Pembangunan

Nilai normatif dari pembangunan, menurut Soedjatmoko adalah sebagai berikut: (1) pembangunan sebagai pembebasan manusia (*development as human liberation*), dan (2) Pembangunan sebagai pertumbuhan manusia dan peradaban (*development as human growth and civilization*).

1) Pembangunan sebagai pembebasan manusia

Bagi Soedjatmoko, pembangunan harus dijalankan dalam kebebasan dan ditujukan untuk mencapai kebebasan. Karena itu, sasaran pembangunan harus diarahkan pada mereka yang miskin dan yang lemah secara sosial, agar terbebas dari kekurangan kebutuhan pokok (sandang, pangan dan perumahan), di samping terbebas dari struktur-struktur sosial yang usang dan menindas, yang telah mematikan kreativitas dan vitalitas mereka dan telah mengungkung mereka tetap dalam kelemahan dan kemiskinan. Maka, pembangunan juga mencakup pendidikan, modernisasi ketrampilan tradisional serta ketrampilan-ketrampilan baru dan pengembangan kemampuan berorganisasi. Namun, perlu ditekankan juga bahwa pembangunan demi kebebasan hendaknya tidak bertentangan dengan kebebasan itu sendiri. Dalam hal ini Soedjatmoko mengatakan: "Tetapi apabila pembangunan juga dimaksudkan untuk meningkatkan keterbukaan masyarakat dan untuk memperbesar ruang lingkup kebebasan, maka peningkatan keefektifan sosial dan

kesadaran diri hendaknya berlangsung dengan cara-cara yang tidak berbenturan dengan tujuan ini."

Soedjatmoko mengingatkan adanya contoh di beberapa negara berkembang, di mana mereka yang semula memperoleh manfaat dari emansipasi ternyata sesudah berkuasa bersikap tidak toleran terhadap orang lain yang menggunakan kebebasan yang sama. Dengan mengutip peringatan Mahatma Gandhi, Soedjatmoko menegaskan mengenai betapa sering si tertindas, melalui perjuangan melawan si penindas, menjadi mirip dengan si penindas, dan sesudah merebut kemenangan bekas si tertindas pada gilirannya berubah menjadi penindas. Soedjatmoko mengumandangkan mengenai suatu pengertian kebebasan yang hendaknya dipahami secara arif. Peringatan mengenai bahaya memperlakukan kebebasan secara keliru diungkapkan Soedjatmoko sebagai berikut:

...'problematic' kebebasan terus berubah. Ketika kebutuhan-kebutuhan baru timbul, seluruh struktur dan kelembagaan, termasuk yang digunakan untuk meraih dan memelihara kebebasan, pasti akan mengalami kemerosotan atau menjadi usang dan mengalami gangguan fungsi.

2. Pembangunan sebagai pertumbuhan Manusia dan Peradaban

Jika pembangunan sebagai pembebasan manusia dapat ditafsirkan sebagai usaha membebaskan manusia dalam arti individu manusia, maka pada bagian lain Soedjatmoko juga mengungkapkan bahwa kebebasan hendaknya juga dihubungkan dengan konteks pertumbuhan manusia dan peradaban (*development as human growth and civilization*), yang kiranya menunjuk pada suatu peningkatan kualitas sekelompok manusia atau kualitas suatu masyarakat. *Pertama*, mengenai pertumbuhan manusia. Soedjatmoko menjelaskan sebagai berikut:

Pertumbuhan manusia adalah bahwa rakyat menjadi manusia-manusia bebas, orang-orang yang terbebas dari rasa ketidakberdayaan dan ketergantungan sendiri. Rakyat tidak lagi

takut dan tidak lagi bertanya-tanya pada diri sendiri, dengan rasa tidak pasti dan ketakutan, apakah tindakan-tindakan mereka dibolehkan atau tidak oleh penguasa yang lebih tinggi atau oleh adat-istiadat. Mereka tidak lagi takut apa yang akan terjadi seandainya mereka tidak melakukan apa yang diinginkan oleh orang lain—bahkan ketika mereka jelas-jelas mentaati hukum dan berdasarkan hak-hak mereka yang sah. Pertumbuhan manusia juga berarti sebagai bangkitnya rakyat, yang tanpa merasa kurang dari orang lain, secara sosial efektif dan merasa mampu serta bebas memikul tanggungjawab bagi kehidupan sendiri, bagi kehidupan keluarga serta komunitasnya.

Pertumbuhan manusia juga menuntut perlunya kaum lemah secara sosial memperoleh kembali rasa bermartabat mereka, dan berdasarkan rasa ketentraman batin itu mengakui kemanusiaan dasar orang lain.

Pertumbuhan manusia juga mencakup internalisasi persepsi, nilai-nilai dan sikap yang memungkinkan seseorang bisa mengalami kelangsungan hidup dan bisa menempuh kehidupan bermakna dalam keberadaban yang bermartabat, sekalipun dalam lingkungan yang berdesak-desakkan dan relatif miskin.

Pertumbuhan manusia menuntut perluasan rasa kedirian (*personal self*) dengan memasukkan pula orang lain selain diri sendiri, keluarga dan masyarakat serta mereka yang berada di luar persaudaraan nasional dan internasional antara sesama penganut agama.

Perluasan kedirian harus meliputi bangsa itu, dan pada akhirnya masyarakat manusia secara global, bahkan meluas pada generasi-generasi mendatang. Pada persepsi kedirian yang diperluas inilah pada akhirnya berakar kapasitas seseorang untuk memiliki rasa empati—cinta kasihnya, kesetiakawanannya dan tanggungjawabnya terhadap manusia yang lain. Persepsi kedirian yang diperluas serupa itu tidak memungkinkan orang berfikir atau bertindak dalam pengertian "saya" dan "mereka", melainkan dalam pengertian "anda" dan "saya" serta dalam pengertian "kita" keluarga umat manusia.

Pertumbuhan manusia seperti itu berasal dari penafsiran kembali serta perumusan kembali konsep manusia mengenai dirinya sendiri, makna hidupnya, dan tempatnya di dalam keseluruhan yang lebih luas.

Kedua, mengenai peradaban alternatif. Menurut Soedjatmoko, munculnya peradaban alternatif dewasa ini menjadi sesuatu yang niscaya. Hal ini karena adanya perubahan dalam penyebaran kekuatan secara global, dan keharusan untuk mengatasi kemiskinan absolut dan semua permasalahannya demi alasan keharusan politik dan moralitas yang nyata.

Maka itu, perubahan-perubahan yang sedang berlangsung sekarang ini merupakan suatu proses sejarah yang akan memunculkan peradaban alternatif, yakni suatu peradaban baru yang diistilahkannya sebagai budaya kosmopolitan. Suatu peradaban yang terbentuk oleh komunikasi modern serta adanya ketentuan-ketentuan tata krama serta gaya hidup yang sama-sama dimiliki, suatu hal yang digunakan secara bersama-sama oleh sektor-sektor penting kaum elite di berbagai negara.

Soedjatmoko berpandangan bahwa budaya kosmopolitan ini akan terus menjadi penyebar penting bagi nilai-nilai humanisme universal yang memancarkan makin tumbuhnya rasa kesetiakawanan manusia secara global selain makin tumbuhnya pengertian mengenai kerapuhan sistem ekologi bumi. Budaya ini terutama berakar pada kebudayaan-kebudayan barat; tetapi nanti tidak terelakkan lagi akan semakin diisi dan dirangsang pula oleh kebudayaan-kebudayaan dunia bukan Barat. Prasyarat bagi pemunculannya antara lain tergantung pada keberhasilan menyingkirkan kemiskinan absolut, pengelolaan transformasi sosial dan politik yang perlu bagi pembangunan dari bawah dan pada umumnya suatu pembaharuan diri dan perumusan kembali kebudayaan, yang juga meliputi pandangan-pandangan moral alternatif dari manusia, tentang hubungannya dengan masyarakat dan sejarah, dengan alam dan yang transendental. Inilah peradaban yang diharapkan mampu menopang tata internasional yang bertahan terus.

Demikianlah, mempertimbangkan semua pembahasan di atas, visi dan pemikiran Soedjatmoko tentang pembangunan dapat dirumuskan dalam beberapa poin berikut: *Pertama*, dilihat dari segi isi (*content*) konsep pembangunan dalam pemikiran Soedjatmoko jelas menunjukkan komitmen yang sangat kuat kepada manusia. Yang diinginkan Soedjatmoko adalah lahirnya manusia-manusia yang bebas dan pembangunan hendaknya didasarkan pada suatu kesadaran mengenai perlunya kebebasan dianggap sebagaimana kebutuhan pokok, sebagaimana kebutuhan pokok manusia lainnya. Sangat menarik mencatat pengertian kebebasan yang dimaksudkan Soedjatmoko, yang ternyata tidak identik misalnya dengan paham kebebasan liberal. Hal ini dapat dilihat dari ajaran Soedjatmoko mengenai etika kebebasan, yakni mengenai bagaimana memandang dan memperlakukan kebebasan, serta pada keperluan menghubungkan konsep kebebasan dengan konteks pertumbuhan manusia dan peradaban.

Kedua, dilihat segi pendekatan (metodologi), konsep pembangunan Soedjatmoko menggunakan pendekatan holistik, yakni dengan mengintegrasikan analisis proses-proses perubahan serta pertumbuhan di bidang kehidupan ekonomi, sosial dan kebudayaan⁵³. Dengan kata lain, ia menempatkan pembangunan dalam perspektif makro; pembangunan sesungguhnya terkait dengan berbagai dimensi yang meliputi sosial, politik, kebudayaan, dan ekonomi. Tepatlah penilaian Aswab Mahasin yang mengatakan:

Yang dicari Soedjatmoko dalam pergumulannya dengan diajarkan ahli-ahli ekonomi pembangunan bukan pula pembebasan revolusioner dari penghisapan kapitalisme dunia seperti pada mitos ekonomi politik baru. Ia mencari suatu alternatif baru bukan Barat yang mengambil tempat seiring dan berkedudukan sederajat dengan peradaban Barat. Ia tak bisa digolongkan kepada mainstream ekonomi pembangunan, yang umumnya dekat kepada aliran neo-klasik. Tetapi ia juga tidak tergolong kalangan ekonomi politik baru (*new political economy*) yang radikal. Sebagai budayawan ia menolak ekonomisme yang banyak melatarbelakangi

pemikiran pembangunan, ia memilih perspektif kultural yang holistik dan historis.⁹

Shigeharu Matsumoto, anggota Dewan Direktur Ishizaka Foundation Japan sekaligus kolega Soedjatmoko, berpandangan bahwa Soedjatmoko “menggunakan istilah pembangunan (*development*, atau dalam bahasa Jepang *kaihatsu*) dalam arti yang jauh lebih luas daripada pengertian kita umumnya mengenai kata tersebut. ... Ketika berurusan dengan negara-negara berkembang, ada kecenderungan di kalangan negara-negara industri maju untuk berbicara tentang pembangunan dalam sempit sebagai pembangunan ekonomi. Tetapi Dr. Soedjatmoko menggunakan kata ini dalam arti tidak hanya sekedar mencakup pemenuhan kebutuhan ekonomi dan material Dunia Ketiga, melainkan juga masuk realisasi nilai spiritual dan nilai-nilai lain. Dengan demikian, yang diartikannya bukan sekedar strategi pembangunan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat Dunia Ketiga. Melainkan suatu penghampiran komprehensif yang akan memulihkan sikap percaya diri di kalangan masyarakat yang mengalami kemerosotan akibat kemiskinan, dan membangun sistem-sistem serta nilai-nilai sosial yang akan menopang harga-diri para individu, bebas dari belenggu masyarakat tradisional dan memberikan peluang bagi kesuburan pertumbuhan potensi mereka.”¹⁰

Bagi Arief Budiman, “Soedjatmoko membahas masalah pembangunan dalam hubungannya dengan hak asasi manusia, kebutuhan dan pertumbuhan manusia. Bagi Soedjatmoko masalah ekonomi sekaligus masalah politik, masalah kebudayaan, masalah etika dan moral, masalah proses sejarah, dan seterusnya. Inilah kekuatan sekaligus kelemahannya [Soedjatmoko]....”¹¹ Dengan kata lain, Soedjatmoko di mata Arief Budiman adalah seorang generalis yang melihat sketsa masalah-masalah pembangunan secara relatif lengkap, tetapi tidak memberikan variabel mana yang penting dan yang tidak penting.

4.8. Widjojo Nitisastro: Rasionalitas dan Efisiensi Ekonomi

Lahir di Malang, 23 September 1927 dan meninggal di Jakarta, 9 Maret 2012 (pada umur 84 tahun), Widjojo Nitisastro dikenal sebagai arsitek utama perekonomian Orde Baru. Ia diangkat sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional periode 1971-1973 dan Menko Ekuin sekaligus merangkap sebagai Ketua Bappenas pada periode 1973-1978 dan 1978-1983. Widjojo sering dianggap sebagai pemimpin Mafia Berkeley—julukan yang diberikan kepada sekelompok menteri bidang ekonomi dan keuangan yang menentukan kebijakan ekonomi Indonesia pada masa awal pemerintahan Presiden Suharto.

Widjojo berasal dari keluarga pensiunan penilik sekolah dasar. Ayahnya adalah seorang aktivis Partai Indonesia Raya (Parindra), yang menggerakkan Rukun Tani. Ketika pecah Revolusi Kemerdekaan di Surabaya, ia baru duduk di kelas I SMT (setingkat SMA) di St. Albertus, Malang. Pada 1945, Widjojo bergabung dengan pasukan pelajar yang kemudian dikenal sebagai TRIP. Ia nyaris gugur dalam suatu pertempuran di daerah Ngaglik dan Gunung Sari Surabaya.

Seusai perang, Widjojo sempat mengajar di SMP selama 3 tahun. Ia kemudian memutuskan untuk melanjutkan pendidikan tingginya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) dan mengkhususkan diri pada bidang demografi. Ketika masih menjadi mahasiswa di FEUI, bersama seorang ahli dari Kanada Prof. Dr. Nathan Keyfiz, Widjojo menulis sebuah buku berjudul *Soal Penduduk dan Pembangunan Indonesia*. Kata pengantarnya ditulis oleh Mohammad Hatta. Hatta menulis, "Seorang putra Indonesia dengan pengetahuannya mengenai masalah tanah airnya, telah dapat bekerja sama dengan ahli statistik bangsa Kanada. Mengolah buah pemikirannya yang cukup padat dan menuangkannya dalam buku yang berbobot." Buku ini sangat populer di kalangan mahasiswa ekonomi. Widjojo lulus dengan predikat Cum Laude.

Sebagai salah satu mahasiswa paling cemerlang di kampusnya, Widjojo kemudian mendapat kesempatan untuk kuliah

di University of California di Berkeley atas beasiswa dari Ford Foundation. Kecemerlangan itu dibangun di atas kerja keras, disiplin, dan bertanggungjawab atas pilihannya. Ia lulus pada 1961 dan kembali ke Indonesia untuk mengajar di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SESKOAD).

Saat Widjojo lulus dari University of California di Berkeley, Indonesia yang berada di bawah pemerintahan Presiden Soekarno menjalankan politik demokrasi terpimpin. Di bawah politik ini, perekonomian Indonesia cenderung mengarah pada sosialisme/komunisme yang mempercayai bahwa pemerintah mengetahui segalanya tentang perekonomian dan karenanya pemerintah harus memiliki kontrol penuh atas perekonomian—karena itu, mekanisme pasar diabaikan. Pemerintah Soekarno juga tidak mempercayai analisis-analisis ekonomi ala Barat, terutama Amerika Serikat. Soekarno bahkan dengan bangga bahwa ia benar-benar tidak paham tentang analisis ekonomi.

Perekonomian Indonesia saat itu menjadi kacau, dengan tingkat inflasi yang sangat tinggi. Harga barang rata-rata pada 1965 adalah tujuh kali harga rata-rata pada 1964. Widjojo menyampaikan pendapatnya kepada pemerintah untuk mengubah paradigma ekonomi Indonesia. Saat inaugurasinya sebagai profesor ekonomi Universitas Indonesia pada 10 Agustus 1963, Widjojo membacakan pidato berjudul "Analisis Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan." Ia menyampaikan saran agar memasukkan analisis ekonomi dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Ia juga menyarankan adanya kombinasi mekanisme pasar dan intervensi pemerintah alih-alih membiarkan pasar terlalu bebas atau sebaliknya membuat pemerintah terlalu berkuasa.

Namun, secara politik posisi Widjojo dan kawan-kawannya sebagai seorang lulusan asal Amerika Serikat—yang memiliki ideologi bertentangan dengan ideologi sosialis/komunis—sangat sulit. Keadaan diperparah dengan meningkatnya tensi antara Indonesia dengan AS, Inggris, Malaysia, dan Singapura. Soekarno melancarkan konfrontasi terhadap Federasi Malaysia karena menganggap negara

itu sebagai negara boneka bentukan Inggris. Pendapat Widjojo akhirnya tidak didengar oleh Pemerintahan Soekarno.

Pada 1966, Jenderal Soeharto mengambil alih kekuasaan di Indonesia dari Presiden Soekarno melalui Supersemar. Meskipun belum menjadi presiden hingga dua tahun berikutnya, Soeharto mulai membangun dasar-dasar pemerintahan yang nantinya akan disebut sebagai rezim Orde Baru. Pada akhir Agustus 1966, Soeharto mengadakan seminar di SESKOAD untuk mendiskusikan masalah ekonomi dan politik serta bagaimana Orde Baru akan mengatasi permasalahan itu. Ekonom-ekonom FEUI, yang diketuai oleh Widjojo Nitisastro, mengikuti seminar itu.

Jika Sumitro Djojohadikusno adalah salah satu arsitek ekonomi Indonesia awal 1950-an, maka Widjojo, sang murid Sumitro, adalah arsitek (utama) ekonomi Orde Baru. Pada 1966, sebagaimana telah disebutkan di atas, Widjojo diangkat menjadi Ketua Tim Penasehat Ekonomi Soeharto, yang beranggotakan Ali Wardhana, Mohammad Sadli, Subroto, dan Emil Salim. Pada 1968, ia menjadi Ketua Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bapennas). Sejak 1971—1973, diangkat menjadi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. Kemudian dari 1973—1983, menjabat Menteri Koordinator Ekonomi dan Keuangan merangkap Ketua Bappenas. Dalam perjalanan karier di pemerintahan tampak bahwa Widjojo adalah konseptor sekaligus eksekutor; memproduksi gagasan sekaligus membukumkannya. Maka tidak terlalu keliru jika kepadanya disematkan predikat sebagai sosok arsitek ekonomi Orde Baru¹²—bahkan sampai masa awal Reformasi Widjojo masih diminta untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi, khususnya pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid pada tahun 2000.

Pemikiran ekonomi yang dianut Widjojo mengambil inspirasi dari pemikiran Keynes—ekonom Inggris—yang menyarankan kombinasi antara mekanisme pasar dan intervensi pemerintah. Konsep ekonomi Widjojo—yang kerap disebut pers sebagai Widjojonomics—menekankan prinsip kehati-hatian yang "sangat" (*prudent*). Dalam kaitan dengan pembangunan, pemikiran Widjojo

mengenai pembangunan bisa dilacak sejak awal, sebelum menduduki jabatan di pemerintah Orde Baru, yaitu ketika menyampaikan pidato pengukuhan Guru Besar Ekonomi di Universitas Indonesia pada 10 Agustus 1963. Dalam pidatonya inilah garis besar pemikiran Pembangunan Widjojo bisa dilacak.

Pembangunan, menurut Widjojo, merupakan proses menurut waktu, suatu proses transformasi yang merupakan suatu “*breakthrough*” dari keadaan ekonomi yang terhenti (stagnan) ke suatu pertumbuhan kumulatif yang bersifat terus-menerus. Inheren dalam proses ini adalah keharusan bagi masyarakat yang bersangkutan untuk mengadakan pilihan di antara berbagai alternatif. Pilihan ini di antaranya meliputi pilihan antara berbagai kecepatan pertumbuhan ekonomi, yang pada dirinya adalah pilihan mengenai kecepatan pertambahan produksi barang dan jasa. Oleh karena tingkat produksi barang dan jasa adalah suatu fungsi investasi, pilihan tersebut pada dasarnya adalah pilihan mengenai tinggi rendahnya tingkat investasi. Dengan lain perkataan, suatu masyarakat dalam proses pembangunan tidak dapat mengindarkan diri dari suatu pengambilan keputusan mengenai pilihan alternatif yang berkenaan dengan ketersediaannya untuk mengendalikan tingkat konsumsi guna memungkinkan pertambahan produksi serta konsumsi pada masa selanjutnya. Di samping itu terdapat pilihan yang harus diambil untuk memilih pola investasi, pembagian pendapatan, perkembangan institusional, dan berbagai macam pilihan lain.

Suatu masyarakat yang sedang membangun dapat mengambil keputusan tersebut secara implisit dengan menyerahkannya kepada berbagai kekuatan ekonomi yang terdapat dalam masyarakat. Akan tetapi, masyarakat bersangkutan dapat pula mengadakan pilihan secara sadar dan berencana. Dalam hal terakhir ini, terdapat suatu usaha pembangunan berencana yang salah satu aktivitas pokoknya berbentuk perencanaan pembangunan. Menurut Widjojo, perencanaan berkisar pada dua hal: *pertama*, penentuan pilihan mengenai berbagai tujuan konkret yang hendak dicapai dalam jangka

waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki masyarakat bersangkutan. *Kedua*, pilihan antara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai berbagai tujuan tersebut. Baik untuk penentuan tujuan yang meliputi jangka waktu tertentu maupun pemilihan cara-cara tersebut diperlukan ukuran atau kriteria tertentu yang lebih dulu harus dipilih.

Dalam telaah Widjojo, dalam masyarakat dunia yang terlibat dalam proses pembangunan, tampak bahwa usaha tersebut sebagian besar berbentuk pembangunan berencana, meskipun terdapat perbedaan mengenai arti dan praktik perencanaan. Perencanaan pembangunan, menurutnya, dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan proses pembangunan secara terus-menerus. Hal itu bisa terjadi jika faktor-faktor strategis proses pembangunan telah benar-benar dikuasai. Dengan kata lain, suatu hal yang mutlak dipahami terlebih dahulu adalah hakikat proses pembangunan sebelum menentukan cara pendekatan yang menjamin berhasilnya usaha perencanaan.

Apabila kita telaah hakikat proses pembangunan serta hubungannya dengan metodologi perencanaan, tampak bahwa lapangan ini merupakan pertemuan subur berbagai cabang ilmu pengetahuan, dengan analisa ekonomi menduduki tempat yang sentral, diperkuat pada satu pihak oleh ilmu-ilmu pengetahuan sosial yang lain dan di lain pihak oleh matematika dan statistik inferensial.

Dengan metodologi perencanaan pembangunan, analisis ekonomi setelah melewati penyederhanaan pada akhirnya ditemukan model ekonomi. Ada model ekonomi yang meliputi seluruh perekonomian, dan ada pula model ekonomi mikro. Dengan mengikuti jejak mekanika, suatu model ekonomi dapat bersifat statis dan dapat pula dinamis. Dalam hal yang pertama faktor waktu diabaikan sama sekali, sedang dalam hal yang terakhir waktu merupakan unsur yang eksplisit. Suatu model dinamis menggambarkan suatu proses, sedang suatu model statis adalah suatu "*moment opname*".

Pemakaian model ekonomi dapat membantu pengambil keputusan memilih tindakan secara rasional, dalam arti bahwa pengambil keputusan telah memperhitungkan serta membandingkan akibat berbagai tindakan alternatif yang dapat ia ambil. Model ekonomi dapat pula digunakan dalam menelaah berlangsungnya proses pembangunan ekonomi.

Dengan kata lain, usaha pembangunan ekonomi hanya akan berhasil apabila usaha tersebut ditempatkan dalam rangka usaha pembangunan yang bersifat menyeluruh dan yang meliputi segala sektor yang relevan. Di lain pihak, perekonomian yang digambarkan sebagai suatu keadaan keseimbangan dinamis yang stabil itu hanya akan berhasil untuk didorong ke arah pertumbuhan yang bersifat terus-menerus apabila dorongan tersebut benar-benar cukup kuat untuk meniadakan kekuatan negatif yang hendak mengembalikan keadaan keseimbangan. Dengan demikian, jelas kiranya bahwa usaha pembangunan hanya akan berhasil apabila ia merupakan usaha yang cukup besar dan yang meliputi segala bidang yang memegang peranan strategis.

Pembangunan yang cukup besar mengandung pengertian adanya suatu tingkat minimum yang harus dipenuhi, sedang batas ke atas tidaklah ditentukan. Dalam rangka perencanaan pembangunan, hal ini menjadi ketentuan konkret dalam bentuk besarnya investasi yang dilakukan. Oleh karena tidak ada ketentuan mengenai batas ke atas, terdapat pula berbagai alternatif mengenai besarnya investasi. Masing-masing alternatif ini mengandung akibat yang berbeda-beda, dalam arti tingginya tingkat produksi serta pendapatan yang diperoleh. Di lain pihak, investasi yang berbeda-beda besarnya itu juga mengandung implikasi mengenai besarnya simpanan masyarakat yang harus tersedia. Hal yang akhir ini erat hubungannya dengan kesediaan berkorban masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian, berhadapan dengan tiap tingkat produksi yang dapat dicapai terdapatlah suatu tingkat pengorbanan yang harus diberikan. Salah satu kegiatan perencanaan pada tingkat permulaan adalah menunjukkan dengan jelas berbagai alternatif yang masing-masing

terdiri dari suatu kombinasi hasil dan pengorbanan, yang disertai dengan implikasi masing-masing. Pilihan kemudian dapat dilakukan dengan kesadaran bahwa untuk mencapai hasil yang diharapkan diperlukan keikhlasan untuk menanggung beban pembangunan yang diperlukan.

Efisiensi, rasionalitas, konsistensi, dan pengambilan keputusan di antara pilihan alternatif adalah beberapa pengertian pokok dalam analisa ekonomi yang memegang peranan sentral dalam metodologi perencanaan. Di samping itu, perencanaan pembangunan masih mempunyai dimensi lain yang banyak jumlahnya. Salah satu di antaranya adalah segi institusional yang erat hubungannya dengan peranan pemerintah yang berhubungan pula dengan pemilikan alat produksi. Apabila alat produksi yang terdapat dalam suatu perekonomian tidak seluruhnya dimiliki oleh negara, peranan pemerintah dalam proses pembangunan terdiri atas hal-hal sebagai berikut: perencanaan pembangunan nasional yang di antaranya terdiri atas perumusan tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu, mobilisasi sumber pembangunan, dan mengalokasi sumber tersebut di antara pemakaian alternatif yang akan menjamin tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya, pemerintah bertugas untuk melaksanakan investasi langsung dan kemudian memimpin sendiri unit produksi yang dihasilkan dengan investasi tersebut. Dalam hal ini, tugas pemerintah ialah mengembangkan potensi dan daya kreasi rakyat ke arah investasi dan produksi sedemikian rupa sehingga tercapailah sasaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam rencana pembangunannya.

Perumusan suatu rencana adalah salah satu fungsi utama pemerintah. Akan tetapi, betapapun lengkap dan indahnya perumusan tersebut, aspek yang akan memengaruhi berlangsungnya proses pembangunan adalah pelaksanaan rencana tersebut. Jadi, salah satu persoalan penting dalam perencanaan ialah bagaimana agar manusia sebagai pelaksana rencana tersebut melaksanakan rencana itu sedemikian rupa sehingga tujuan rencana dapat tercapai. Jawaban atas pertanyaan ini tergantung dari gambaran kita

mengenai daya penggerak (*motivation*) para pelaksana tersebut. Dalam analisa ekonomi yang dianggap sebagai daya penggerak utama adalah perangsang atau insentif materiil. Di samping itu, masih terdapat faktor-faktor lain yang sedikit sekali memperoleh perhatian dalam analisa ekonomi, yakni faktor kesadaran dan faktor paksaan. Usaha untuk membikin manusia pelaksana rencana bertindak sesuai dengan tujuan rencana tersebut terdiri atas kombinasi di antara ketiga faktor tersebut di atas.

Suatu aspek lain dari perencanaan ekonomi yang kurang sekali memperoleh perhatian analisis ekonomi adalah aspek administrasi dan politik. Hal ini disebabkan sifat abstrak analisis ekonomi yang kurang memperhatikan segi institusional. Dalam konteks ini, satu segi penting dalam bidang administrasi adalah persoalan pengawasan untuk tercapainya tujuan rencana pembangunan. Pengawasan bukan soal yang mudah dan adalah tidak jarang bahwa pelaksanaan pengawasan tersebut justru menghindarkan tercapainya tujuan yang direncanakan. Dalam hubungan ini, penggunaan konsep pengawasan tidak langsung yang terdapat dalam analisa ekonomi mungkin akan dapat lebih menjamin tercapainya tujuan tersebut.

Dalam bidang administrasi perencanaan pembangunan, hal lain yang banyak memperoleh perhatian (oleh karena sering menimbulkan persoalan) adalah segi yang berhubungan dengan sentralisasi-desentralisasi dan koordinasi. Mengenai hal yang pertama, terdapat gejala pergeseran berganti-ganti: apabila telah terjadi sentralisasi yang berlebihan dalam pengambilan keputusan, terjadilah pergeseran ke desentralisasi, dan apabila hal yang akhir ini melampaui batas sehingga mempersulit tercapainya konsistensi antara rencana dan pelaksanaan, terjadilah pergeseran kembali ke sentralisasi. Dalam hubungan ini terdapat lapangan kerja bagi analisis ekonomi untuk membandingkan efisiensi berbagai alternatif yang ada. Mengenai koordinasi, ada kemungkinan bahwa hal tersebut sering digunakan sebagai substitut usaha menjamin konsistensi. Koordinasi juga mempunyai pengaruh yang langsung terhadap cara dan kecepatan pengambilan keputusan. Apabila konsistensi dapat

lebih dijamin dengan cara yang lebih otomatis, hal tersebut akan mengurangi persoalan yang timbul karena tindakan untuk mengusahakan koordinasi yang berlebihan.

Kembali uraian mengenai peranan analisis ekonomi dalam perencanaan pembangunan ini, tampak bahwa analisa ekonomi memang memegang peranan penting dalam metodologi perencanaan. Akan tetapi, tampak pula dengan jelas kelemahan yang inheren dengan peralatan analisa serta dengan pendekatan analisa ekonomi. Hal yang akhir ini berhubungan dengan kesimpulan yang telah diambil berdasarkan penggunaan model ekonomi, yakni bahwa "kecepatan pertumbuhan produksi, dan dengan demikian kecepatan pertumbuhan ekonomi, bukanlah gejala ekonomi semata-mata," dan juga pernyataan bahwa "suatu pengertian hanya akan diperoleh apabila persoalan dilihat dalam kerangka keseluruhan dari interrelasi yang kompleks". Kerjasama yang lebih sistematis antara analisa ekonomi dan ilmu pengetahuan sosial yang lain mungkin akan memperdalam pengertian tentang persoalan ini, meskipun perlu selalu diingat bahwa kerja sama antara berbagai ilmu pengetahuan tidak selalu memberikan hasil yang memuaskan dan mungkin mengandung hal-hal yang mengecewakan.

Peranan penting yang dimiliki oleh analisis ekonomi dalam metodologi perencanaan pembangunan berhubungan dengan sesuatu yang merupakan soal pokok bagi kedua-duanya, yakni logika proses pengambilan keputusan yang rasional di antara pilihan alternatif yang tersedia. Rasionalitas ini menampakkan diri pada pengertian efisiensi serta konsistensi, yang kedua-duanya merupakan hal yang sentral dalam perencanaan pembangunan. Dengan demikian, jelas kiranya bahwa bagi terlaksananya perencanaan pembangunan yang efektif, pertimbangan rasional yang memperoleh bentuk ukuran efisiensi dan konsistensi adalah sesuatu yang mutlak.

Jelas pula kiranya bahwa untuk perkembangan metodologi perencanaan diperlukan pertumbuhan analisis ekonomi.

Perencanaan menggunakan sepenuhnya hubungan umum di antara gejala ekonomi yang dikembangkan dalam analisis ekonomi. Hubungan ini kadang-kadang disebut hukum ekonomi, suatu sebutan yang kiranya kurang tepat dan dapat menimbulkan salah paham yang sesungguhnya dapat dihindarkan. Lepas dari persoalan istilah, perhatian yang khusus diberikan kepada pertimbangan efisiensi, rasionalitas, konsistensi dan apa yang dinamakan hukum ekonomi itu pasti akan mempercepat perkembangan usaha perencanaan pembangunan. Sebagaimana pernah dikemukakan oleh Oskar Lange, sarjana ekonomi Polandia yang ternama, maka: "... *the economic laws can be made to operate in accordance with the human will, just like man through modern technology can utilize the laws of nature and make them operate in a way which conforms to his will*". (Oskar Lange, *The Political Economy of Socialism*).

Pada permulaan uraian ini telah dinyatakan betapa "manusia telah berhasil mencapai kemajuan pesat dalam usahanya untuk lebih mengerti alam sekitarnya dan untuk sampai pada perumusan yang lebih baik mengenai hukum-hukum alam yang berlaku, yang kemudian dengan sadar digunakan untuk memperbaiki keadaan hidupnya sendiri". Kiranya dalam menuju ke masyarakat Indonesia yang sejahtera usaha kita untuk melaksanakan pembangunan berencana akan dapat lebih dipercepat apabila kita dapat lebih mengerti hakikat proses pembangunan dan dengan sadar menggunakan hukum ekonomi untuk keperluan pembangunan.

Sejalan dengan kritik pelaksanaan pembangunan di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia, mengenai rusaknya lingkungan hidup bersamaan dengan pelaksanaan pembangunan yang mengejar pertumbuhan ekonomi, Widjojo pun mengatakan bahwa "kini disadari sepenuhnya di Indonesia bahwa pembangunan yang tidak dipersiapkan dan dijalankan dengan baik akan merusak lingkungan. Di lain sisi juga disadari secara luas bahwa kemiskinan dan kurangnya pembangunan juga menjadi penyebab utama bagi

kerusakan lingkungan hidup. Karena itu, dirasakan bahwa pola pembangunan yang diterapkan di Indonesia haruslah pembangunan yang berkelanjutan dan berdasarkan pada pendekatan partisipatif. Bagaimana pun, pembangunan yang berkelanjutan bukannya membutuhkan sumber daya yang lebih sedikit, tetapi justru lebih banyak; dan biaya yang dibutuhkan bukannya lebih kecil, tetapi justru lebih besar.”¹³

Tidak diragukan lagi bahwa Widjojo Nitisastro adalah salah seorang arsitek pembangunan ekonomi Orde Baru. Latar pendidikan dan perjalanan kariernya menunjukkan kelasnya sebagai sosok yang disegani baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Jaringan internasionalnya sangat luas, yang dibuktikan dengan keanggotannya di berbagai badan dan atau lembaga-lembaga dunia. H. W. Arndt, Prof. Ekonomi di Australian National University, mengatakan bahwa “Prof. Widjojo Nitisastro, sang pemimpin kelompok para teknokrat yang bijaksana, yang memimpin ekonomi Indonesia secara harmonis dan efisien dan sukses selama seperempat abad, yang mungkin tak adaandingannya di dunia.”¹⁴

Kecemerlangan Widjojo dalam dunia akademik dikisahkan oleh John Bresnan, eksekutif Ford Foundation di Jakarta, di bawah ini.

... Cerita paling awal yang saya ingat tentang Widjojo adalah bahwa ketika mengunjungi Berkeley ia sangat terkesan dengan kedalaman dan keluasaan kuliah S-2 di sana. Sebenarnya ia adalah seorang anggota staf Fakultas [Ekonomi UI] yang pertama dikirim ke luar negeri untuk mendapat gelar dengan bantuan Ford pada 1957, dan kembali dengan gelar doktor tahun 1961, dengan kecepatan yang luar biasa dalam memenuhi syarat-syarat yang dituntut salah satu fakultas ekonomi terbaik di Amerika Serikat itu. Dengan cepat ia menjadi wakil dekan satu, kemudian direktur Institut Penelitian Ekonomi dan Sosial, dan dari posisi-posisi ini ia memainkan peran kunci dalam menentukan standar kuliah bagi personel Fakultas. Pada tahun 1965, sebanyak 47 anggota Fakultas dan staf Institut menerima beasiswa untuk kuliah di luar

negeri, hampir semuanya program S-2. Widjojo sudah membuka jalan dengan melakukannya sendiri.

Sebenarnya penghargaan Widjojo pada ekonomi sebagai ilmu sudah tampak sejak awal. Pada tahun 1955, ketika baru lulus dari Fakultas, ia telah berdebat dengan Wilopo, pemimpin Partai Nasional dan bekas perdana menteri, soal apakah koperasi harus menjadi bentuk dominan dalam organisasi ekonomi di Indonesia. Ia mendebat dengan menggunakan argumen klasik yang mendukung ekonomi modern campuran, yang kemudian dipilih Indonesia di bawah pengaruhnya.

Kesetiannya pada profesi juga telah menjauhkan Widjojo dari Presiden Soekarno yang dikenal tidak begitu menyukai ekonomi... Pada Hari Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1963 Soekarno menyinggung hal ini dalam pidatonya, "Saya bukan ekonom... saya seorang revolusioner, dan saya revolusioner dalam hal ekonomi. Perasaan dan pikiran saya tentang ekonomi sederhana, sangat sederhana. Bisa diformulasikan sebagai berikut: Bila bangsa-bangsa hidup di tanah gurun yang kering dan gersang bisa menyelesaikan masalah ekonomi mereka, mengapa kita tidak? ... Saya sudah mengeluarkan Deklarasi Ekonomi yang dikenal dengan Dekon serta empatbelas Peraturan Pemerintah. Sekarang saya hanya bilang: sabar sedikit lagi, dan lihatlah nanti!" Seminggu sebelumnya, dalam kuliah perdananya sebagai profesor ekonomi, Widjojo dengan mantap membela peran analisis ekonomi dalam perencanaan pembangunan. Dia berpendapat bahwa bila Indonesia ingin keluar dari ekonominya yang stagnan, maka diperlukan proses perencanaan dan pembuatan kebijakan yang menyadari pentingnya efisiensi, rasionalitas, konsistensi, pilihan yang jelas di antara alternatif yang ada, stabilitas harga dan insentif ekonomi. Peristiwa-peristiwa ini perlu diingat karena mengingatkan kita pada perkembangan Widjojo sebagai pemikir ekonomi yang sudah memusatkan perhatian pada masalah-masalah kelembagaan dan kebijakan sejak awal kemunculannya di publik.

Patut diingat bagaimana Widjojo dan empat ekonom UI menjadi penasihat ekonomi pemerintah Indonesia pada akhir 1966, karena prosesnya dengan gamblang menggambarkan bukan saja percaya diri

dan profesionalisme mereka, tetapi juga tentang daya persuasi mereka sebagai tutor bagi elite bangsa.

Pada tanggal 12 April 1966, satu bulan plus sehari setelah pengalihan kekuasaan dari Soekarno ke Jenderal Soeharto, Sultan Yogyakarta mengeluarkan laporan resmi pertama pemerintahan baru tentang keadaan ekonomi. Widjojo, Sadli, Subroto, Ali Wardhana, dan Emil Salim ikut berperan membuat konsepnya. Gambaran yang mereka buat adalah keadaan ekonomi yang secara keseluruhan parah, sehingga seorang pengamat asing berkata bahwa keadaan ini 'tidak ada duanya dalam dunia modern selain keadaan sesudah perang atau revolusi'.¹⁵

Emil Salim pun mempunyai pendapat yang sama seperti yang dikatakan oleh John Bresnan di atas. Menurut Emil, Widjojo dalam membicarakan pembangunan "... menggunakan bahasa 'kering' serba ilmiah mendudukan masalah pembangunan pada analisis ekonomi yang memuat pengertian-pengertian pokok, seperti efisiensi, rasionalitas, konsistensi, dan pengambilan keputusan di antara pilihan alternatif yang memegang peranan sentral dalam metodologi perencanaan pembangunan. Pandangan rasional ini tetap beliau emban dalam melaksanakan kebijakan pembangunan dalam pemerintahan Orde Baru selanjutnya. Pendekatan rasionalitas ekonomi ini tampak menonjol ketika Widjojo Nitisastro mengajukan sumbangan pikiran FEUI tentang 'Tracee Baru Kebijakan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan' melalui berbagai anggota MPRS yang bersidang dalam tahun 1966. Sidang MPRS 1966 kemudian menetapkan Ketetapan MPRS Nomor XXIII/1966 tentang 'Pembaruan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan' yang memuat pasal-pasal dari sumbangan pikiran FEUI yang ditulis dalam bahasa 'terang tanpa *tedeng aling-aling*'.¹⁶

4.9. Mubyarto dan Gagasan Ekonomi Pancasila

Mubyarto dilahirkan di Desa Demak Ijo, Sleman, Yogyakarta pada 3 September 1938. Nama Mubyarto selain bermakna

pengejawantahan rasa lega karena lahir setelah lama orang tuanya menginginkan anak laki-laki, juga berarti perubahan raut muka sebagai ekspresi kegembiraan. Ia melewati masa kecil di Yogyakarta dengan penuh penderitaan, karena orang tuanya miskin. Ayahnya bekerja sebagai mantri pengairan. Pernah, untuk membayar uang sekolah, ibunya sampai menggadaikan kain batiknya.¹⁷ Oleh orang tuanya Mubyarto dididik belajar keras dan disiplin.

Mubyarto lulus SD pada 1950. Setelah itu melanjutkan ke sekolah menengah dan pada 1956 lulus SMA. Atas kerja keras, ketekunan, dan kegigihannya setelah menjadi sarjana muda di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), ia berangkat ke Amerika Serikat untuk meraih Master di Vanderbilt Universitas serta Doktor di Iowa State University dengan disertasi berjudul “Elastisitas Surplus Beras yang dapat Dipasarkan di Jawa dan Madura” (1965).¹⁸ Setelah itu, ia kembali ke Indonesia dan mengajar di kampusnya di UGM.

Sebagai ahli ekonomi pertanian/pembangunan, Mubyarto sejak mendapatkan gelar doktor pada usia 27 di Iowa State University pada 1965, banyak melakukan penelitian yang berkaitan dengan pembangunan pertanian dan pedesaan. Tampaknya pengalaman masa kecilnya di desa dan alam pertanian menjadi salah satu faktor yang membawa Mubyarto bergumul dengan isu-isu pertanian dan pedesaan. Pergumulannya dengan pembangunan pertanian dan pedesaan membawanya kepada pemikiran pembangunan yang mempunyai dasar historis dan kebudayaan Indonesia. Mubyarto sampai pada kesimpulan bahwa teori-teori Barat, termasuk teori-teori pembangunan, tidak cukup mampu menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu diperlukan teori ekonomi baru yang lebih sesuai dengan kondisi sosial dan historis Indonesia. Mubyarto sampai pada gagasan mengenai sistem ekonomi Pancasila.¹⁹

Ketika membicarakan sistem ekonomi Pancasila, nama yang sering muncul dalam pikiran adalah Mubyarto. Meski kata “ekonomi Pancasila” sudah ditulis oleh Emil Salim pada 1965, tetapi *branding* mengenai ekonomi Pancasila dipegang oleh Mubyarto.²⁰ Sejak 1970-an, kritik terhadap pelaksanaan pembangunan di Indonesia sudah bermunculan. Ada yang mengatakan bahwa sistem ekonomi kita telah mendekati sistem ekonomi kapitalistik liberal, tetapi pada saat yang sama lebih bersifat etatistik.²¹ Dalam konteks sosial-ekonomi politik semacam itulah gagasan ekonomi Pancasila dari Mubyarto muncul.

Menurut Mubyarto, pembangunan nasional mempunyai tujuan akhir mewujudkan *keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan sila terakhir dari Pancasila sehingga, menurut Mubyarto, semua upaya pembangunan harus merupakan upaya *pengamalan Pancasila*. Mengamalkan Pancasila sebagai ideologi bangsa berarti setiap sila harus kita amalkan, yaitu: sila pertama dan kedua sebagai *landasan moralnya*, sila ketiga dan keempat sebagai *cara* atau *metode kerjanya*, dan sila kelima sebagai *tujuan akhir* dari pembangunan.²² Dengan kata lain, “sistem ekonomi Pancasila adalah aturan main tentang hubungan-hubungan ekonomi yang mengatur hubungan koordinatif antara manusia satu sama lain dalam kehidupan (ber) masyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan hidup materiil, sosial, maupun moral. Karena manusia ingin hidup sejahtera dan bahagia, maka pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup tersebut diusahakan seimbang dan serasi-selaras di antara ketiganya.”²³

Pancasila jika diterapkan dalam pembangunan ekonomi bangsa, oleh Mubyarto dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa, bahwa roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial dan moral;

- 2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, bahwa ada kehendak kuat dari seluruh rakyat masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial (egalitarian) sesuai dengan asas-asas kemanusiaan;
- 3) Persatuan Indonesia, bahwa prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian yang tangguh. Ini berarti nasionalisme menjiwai setiap kebijakan ekonomi;
- 4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, bahwa koperasi merupakan soko guru perekonomian dan merupakan bentuk yang paling kongkret dari usaha bersama;
- 5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, bahwa adaimbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kebijaksanaan ekonomi untuk mencapai keadilan ekonomi dan keadilan sosial.

Dalam konsep Ekonomi Pancasila, menurut Mubyarto, agama berperan penting. Agama memberi unsur moral sebagai salah satu pendorong utama pemikiran dan kegiatan ekonomi. Ini berbeda sekali dengan semangat liberalisme abad ke-18 dengan peranan besar dari ilmu-ilmu pengetahuan sehingga berakibat merenggangkan hubungan antara agama dengan semangat berdagang dan berekonomi. Walaupun kita catat bahwa Adam Smith mengembangkan ilmu ekonomi sebagai bagian dari filsafat moral, tetapi konsep homo-economicus menyoroti manusia dalam satu aspeknya saja yaitu aspek ekonomi, terlepas dari nilai moral agama.

Di Indonesia, pandangan hidup Pancasila memberi dasar kuat pada konsep ekonomi yang berlandaskan moral. Berhubung dengan itu, ilmu (teori) Ekonomi Pancasila yang ingin dikembangkan berbeda dari teori ekonomi klasik, terutama dalam aspek moralnya yang bersumber pada nilai-nilai agama.

Kalau dalam teori ekonomi Barat (Smithian), dan teori ekonomi Timur (Marxian), hakikat manusia adalah egoistis atau kolektif, maka dalam Pancasila manusia mencari keseimbangan antara hidup sebagai pribadi dan hidup sebagai anggota masyarakat, antara kehidupan materi dan rohani. Manusia Pancasila yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa adalah selain homo-economicus, juga homo-metafisikus dan homo-mysticus. Ini berarti bahwa dalam Ekonomi Pancasila manusia tidak dilihat hanya dari satu segi saja, yaitu instink ekonominya, tetapi sebagai manusia seutuhnya. Sebagai manusia yang utuh, ia berpikir, bertindak-laku, dan berbuat tidak berdasar rangsangan ekonomi semata, tetapi selalu memperhatikan rangsangan-rangsangan atau terangsang oleh faktor-faktor sosial dan moral; faktor sosial dalam hubungannya dengan manusia lain dan masyarakat di mana ia berada, dan faktor-faktor moral dalam hubungannya sebagai titah Tuhan dengan Penciptanya.

Setiap masyarakat mempunyai atau menganut sistem nilai tertentu, yaitu sistem preferensi yang dianggap disepakati oleh seluruh anggota masyarakat. Tanpa sistem nilai tertentu tidak akan ada kebudayaan dan sistem peradaban. Bangsa Indonesia dapat mencapai kemerdekaan dan dapat bertahan sebagai suatu bangsa karena memiliki sistem nilai. Sistem nilai atau falsafah dasar bangsa Indonesia yang kini sudah menjadi ideologi bangsa kita adalah Pancasila. Karena Pancasila sudah kita sepakati sebagai falsafah dasar yang menjadi pandangan dan pegangan hidup bangsa, maka ia menjadi moral kehidupan bangsa, ia menjadi ideologi yang menjiwai perikehidupan bangsa kita di bidang sosial-budaya, sosial-ekonomi, sosial-politik dan hankam.

Kalau moralitas teori ekonomi Smith adalah kebebasan (liberalisme) dan moralitas teori ekonomi Marx adalah diktator mayoritas (oleh kaum proletar), maka moralitas Ekonomi Pancasila mencakup ajaran-ajaran Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial.

Makna Ekonomi Pancasila yang paling fundamental adalah sebagai wadah berkembangnya "manusia Indonesia seutuhnya". Bagaimana kita bisa mengharapkan tumbuhnya manusia-manusia yang utuh apabila setiap langkah mereka "diatur" dengan peraturan-peraturan yang membatasi berkembangnya individualitas dan otonomitas mereka? Sistem Ekonomi Pancasila harus bisa memberi kesempatan seluas-luasnya bagi perkembangan individualitas dan otonomitas setiap anggotanya, sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing. Tetapi dalam sistem ini harus pula ada mekanisme yang bisa mengendalikan dan mengatasi ekses-ekses yang bersumber dari praktik-praktik monopolistik yang mungkin timbul. Dalam Ekonomi Pancasila, satu sumber legitimasi dari diambilnya tindakan pengaturan dan pembatasan kebebasan usaha ialah adanya ekses-ekses negatif dari praktik monopolistik tersebut. Apabila ekses-ekses ini tidak ada dan tidak ada kecenderungan praktik monopolistik, maka tidak ada alasan adanya pengaturan. Pengaturan seharusnya tidak dibuat semata-mata hanya karena selera birokrat untuk mengatur segala-galanya. Kunci dari semua ini, sekali lagi, ialah "keseimbangan" antara individualitas dengan sosialitas, antara otonomitas dan solidaritas.

Ekonomi Pancasila mendorong penciptaan perekonomian nasional yang tangguh. Pemikiran ini, kata Mubyarto, oleh sementara kalangan dengan mudah disalahtafsirkan sebagai ciri nasionalistik Ekonomi Pancasila. Kita sependapat bahwa secara definisi setiap bangsa akan berusaha memajukan kepentingan ekonomi bangsanya sendiri. Namun, makna "perekonomian nasional" di sini tidak terlalu dikaitkan dengan sentimen nasionalistik semata-mata, yang bisa menjurus kepada chauvinisme ekonomi. Konsep "perekonomian nasional" harus lebih diartikan sebagai cita-cita untuk membina suatu sistem ekonomi yang menunjang ketahanan nasional. Suatu sistem merupakan kesatuan dari bagian-bagiannya, sehingga memiliki daya "*survival*" yang mantap dalam kehidupan ekonomi internasional. Ini berarti bahwa kita harus berusaha keras mengintegrasikan bagian-

bagian ini dan menghilangkan unsur-unsur dualisme di dalam perekonomian yang cenderung melemahkan ketahanan nasional kita.

Dalam sistem Ekonomi Pancasila yang ideal digambarkan bahwa koperasi menjadi saka guru ekonomi nasional, maka tidak ada alasan untuk menyalahkan sistemnya bila ternyata koperasi belum memainkan peranannya sebagai saka guru. Koperasi hanyalah alat. Sebagai bentuk atau bangunan usaha, ia hanya akan berhasil apabila dikelola secara baik dan efisien dengan pengurus yang jujur dan berdedikasi. Memang tidak akan bermanfaat untuk menamakan setiap kebijakan dengan nama Pancasila. Pancasila diharapkan menjiwai setiap kebijakan bukannya dipakai sebagai nama (etiket) dari setiap kebijakan.

Barangkali di sinilah letak kesalahpahaman yang sering terjadi. Sistem Ekonomi Pancasila ialah suatu sistem "ideal" atau "idaman" yang di dalamnya antara lain kita temukan semangat usaha bersama yang kuat di antara pelaku-pelaku ekonomi. Jika dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 disebutkan koperasi merupakan bentuk perusahaan yang sesuai maka haruslah diartikan bahwa, dibanding perusahaan negara dan perusahaan swasta, koperasi ialah wadah yang paling mudah untuk mewujudkan semangat usaha bersama. Ini tidak berarti bahwa semangat usaha bersama tidak mungkin ditemukan dalam perusahaan negara atau perusahaan swasta. Hanya, asumsi dalam teori ekonomi koperasi ialah bahwa anggota-anggota koperasi memang lebih homogen. Anggota-anggota koperasi ialah orang, rumah tangga, atau perusahaan, yang berkumpul karena mereka merasa senasib sepenanggungan, mempunyai kepentingan ekonomi (dan sosial) yang sama, dan berkumpul dalam koperasi untuk bersama-sama memperjuangkan kepentingan (ekonomi dan sosial) mereka.

Di sinilah kita melihat perbedaan antara koperasi dan perusahaan swasta. Perusahaan swasta yang terutama bertujuan untuk mencari keuntungan, misalnya yang berbentuk PT, pada

dasarnya bukanlah merupakan usaha bersama untuk memperjuangkan kepentingan para pesero. Memang para pesero ini jelas bekerja sama menyumbangkan modal untuk mendapat dividen, tetapi mereka tidak berusaha bersama, karena setiap pesero setelah menyetor modalnya, lalu menyerahkan pengelolaan usaha PT pada direksi. Tanggung jawab setiap pesero hanya terbatas pada jumlah saham yang dimilikinya, tidak kurang dan tidak lebih.

Ciri-ciri lain Sistem Ekonomi Pancasila adalah semangat solidaritas sosial untuk mencapai masyarakat yang berkeadilan social, yaitu sila kelima dari Pancasila. Dalam menanggapi ciri Ekonomi Pancasila yang demikian banyak, orang juga mempertanyakan, apakah teori ekonomi Smith, dan yang terakhir teori ekonomi Keynes, belum dianggap memadai untuk menangani masalah-masalah ini. Karena dalam perkembangan terakhir, teori ekonomi klasik (kapitalis-liberal) telah menemukan metode-metode sosialistik untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran. Barangkali di beberapa negara kapitalis yang tidak besar, hasil-hasil kebijakan sosialistik ini tidak sukar kita kenali. Namun, keadaan di negara kapitalis terbesar di dunia yaitu Amerika Serikat, menunjukkan hasil yang kurang menggembirakan. Misalnya, dalam buku M. Carnoy & D. Shearer, *Economic Democracy* (M. Sharpe Inc., 1980), ditunjukkan bahwa pada tahun 1976, satu persen orang terkaya di A.S. memiliki hampir 36 persen dari kekayaan total neto bangsa Amerika, memiliki lebih separuh aset perusahaan, dan lebih separuh utang berjalan (*oustanding debt*). Kita tidak memiliki data-data serupa di Indonesia. Hanya jelas kita tidak ingin memiliki perekonomian (kapitalistik) yang demikian.

Masyarakat Pancasila yang berkeadilan sosial adalah masyarakat yang bersifat sosialistik, yaitu dengan memberikan perhatian besar pada mereka yang tertinggal. Inilah yang disebutkan pada pasal 34 UUD 1945, yang berbunyi bahwa "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara." Bahkan apa yang tercantum pada

pasal 33, yang selalu dianggap sebagai pedoman dasar pengelolaan perekonomian Indonesia, termasuk dalam bab kesejahteraan sosial. Masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, adalah tujuan perjuangan kemerdekaan Indonesia, tujuan untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam kaitan dengan gagasan sistem ekonomi Pancasila, Mubyarto sangat konsisten dan terus-menerus sampai akhir hayatnya memperjuangkan agar bisa diwujudkan dalam kehidupan perekonomian Indonesia. Pemikiran Mubyarto mengenai sistem ekonomi Pancasila yang bergaung sejak awal 1980-an memang menjadi wacana yang menarik dan menjadi perbincangan hangat di dunia intelektual. Di samping ada yang mendukung gagasan Mubyarto, ada juga yang mempertanyakan dengan sangat kritis. Salah seorang di antaranya adalah Arief Budiman. Di bawah ini kita kutip agak panjang pendapat Arief Budiman mengenai pemikiran sistem ekonomi Pancasila Mubyarto.

Lalu, apa yang ditawarkan Mubyarto dengan sistem perekonomian Pancasila (SPP)? Pertama-tama, Mubyarto meragukan ketepatan penggunaan teori ekonomi neo-klasik untuk memecahkan masalah pembangunan kita, khususnya pada periode Pelita III. Kalau pembangunan kita mau melaksanakan keadilan, kalau Pelita III ingin lebih pemeratakan kegiatan pembangunan (dan hasil-hasil pembangunan), maka menurut Mubyarto, teori ekonomi neo-klasik bukanlah resep yang tepat. Hal ini disebabkan karena teori-teori ekonomi neo-klasik yang banyak menggantungkan pada kekuatan pasar untuk melaksanakan alokasi sumberdaya dalam masyarakat dianggap oleh para pengamat sebagai lebih banyak menumbuhkan golongan ekonomi kuat. Kurang mampu meningkatkan peranan golongan ekonomi lemah.

Selanjutnya Mubyarto menjelaskan, kita harus mendasarkan Pelita III pada sebuah teori baru. Mengutip Keynes, Mubyarto berkata: "Tujuan yang berbeda tidak dapat dicapai hanya dengan mengubah kebijaksanaan serta strategi. Tetapi harus dengan cara mengubah teorinya (*Kompas*, 2 Mei 1979). Lalu, apa teori baru Mubyarto yang dinamakan SPP itu?

Tampaknya Mubyarto sendiri belum dapat merumuskan dengan tepat apa isi SPP-nya. Dia baru berhasil membuat pagar-pagar batas untuk mengurung "binatang" yang bernama SPP, sambil sekali-sekali meraba-raba dan menerka-nerka bagaimana persisnya bentuk dan rupa "binatang" ini. Pagar-pagar batas tersebut antara lain berbunyi sebagai berikut: "Mubyarto menolak pendapat Emil Salim (1979) yang mengatakan bahwa Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi pasar dengan unsur perencanaan. Menurut Salim, dalam Ekonomi Pancasila, kedua sistem, yakni sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando, ada dalam posisi equilibrium alias seimbang. Mubyarto beranggapan bahwa pikiran Salim masih terlalu terjat di dalam pola pemikiran dua kutub sistem ekonomi, yakni kapitalisme dan sosialisme. Mubyarto berpendapat bahwa SPP "mungkin sekali tidak berada di antara dua kutub tersebut, tapi di luarnya" (Mubyarto, 1980: 74.)

Mubyarto tidak berhenti di sini. Dia melanjutkan perburuannya. Dalam ceramahnya di Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia pada tanggal 19 November 1980, dia mempersempit daerah perburuannya. "SPP bukan saja tidak bisa dijumpai di hutan-hutan kapitalisme ataupun sosialisme, tapi SPP juga tidak terletak di hutan feodalisme. Katanya, SPP adalah "sistem ekonomi yang tidak mengandung aspek-aspek kapitalisme-liberalisme, statisme, dan feodalisme" (*Kompas*, 20 November 1980). "Kapitalisme ditolak karena sistem ini "lebih banyak menumbuhkan golongan ekonomi kuat" (*Kompas*, 22 Mei

1979.) Sosialisme juga ditolak karena sistem ini merupakan sistem ekonomi perencanaan, ekonomi peraturan, ekonomi negara yang menuju pada etatisme atau statisme. Dia menguraikan (Mubyarto, 1981: 3) "Ekonomi peraturan semacam ini jelas antitekal dengan maksud yang paling fundamental dari ekonomi Pancasila, yaitu sebagai wadah berkembangnya "manusia Indonesia seutuhnya". Bagaimanakah kita bisa mengharapkan tumbuhnya manusia-manusia yang utuh apabila setiap langkah mereka "diatur" dengan peraturan-peraturan yang membatasi berkembangnya individualitas dan otoaktivitas mereka? Sistem ekonomi Pancasila harus bisa memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi perkembangan individualitas dan otoaktivitas setiap anggotanya sesuai dengan bakat dan kemampuannya masing-masing.

Dengan keterangan di atas, Mubyarto memberikan penjelasan mengapa dia menolak kapitalisme dan sosialisme. Alasan mengapa dia menolak feodalisme memang tidak diberikan.

Daerah perburuan memang makin sempit, sehingga menambah kemungkinan untuk kita menangkap sang "binatang" yang bernama SPP tersebut. Berhasilkah Mubyarto melakukannya? Menurut saya, pada pikiran yang diterbitkan sampai akhir tahun 1981,¹ Mubyarto masih belum berhasil menjerat binatang perburuannya. Yang paling nyaris mendekati adalah ketika dia menguraikan lima ciri utama SPP. Mengutip Boediono (1981: 158-160), Mubyarto (lihat Tajuk Rencana *Sinar Harapan*, 19 Mei 1981, dan *Kompas*, 18 Mei 1981) menyatakan kelima ciri utama SPP. Pertama, koperasi sebagai sokoguru, karena koperasi merupakan bentuk yang paling kongkret dari sebuah usaha bersama. Kedua, roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomis, sosial, dan moral. Rangsangan sosial dan moral ini sangat ditekankan karena rangsangan-rangsangan inilah yang membedakan SPP dengan sistem ekonomi kapitalis

yang hanya menekankan rangsangan ekonomi saja. Ketiga, adanya kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah pemerataan sosial. Ini berbeda dengan sistem kapitalisme yang hanya punya rasa individual dalam mencari keuntungan yang sebesar-besarnya bagi dirinya dalam kegiatan ekonomi! Keempat, nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi." Kelima, adanya keseimbangan yang jelas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi.

Membaca uraian Mubyarto ini, timbul macam-macam pertanyaan. Dapatkah sistem koperasi yang menekankan kesejahteraan bersama dihidupkan di tengah-tengah sistem kapitalis yang menekankan keuntungan pribadi? (Lihat Budiman, 1984a.) Pertanyaan ini dapat dilanjutkan dengan jenis pertanyaan yang sama: Dapatkah rangsangan sosial dan moral menjadi efektif dalam sistem perekonomian yang kapitalistis? Di sini kita lalu mempersoalkan hakikat manusia. Apa sebenarnya hakikat manusia itu? Apakah manusia pada dasarnya makhluk sosial, atau makhluk individual yang egoistis? Kalau dalam kenyataan sehari-hari kita lihat bahwa manusia egoistis dalam sikapnya, pertanyaan kita adalah dapatkah keadaan ini diubah? Dapatkah hakikat manusia diubah?

Kemudian, dalam menguraikan SPP, Mubyarto juga menyebutkan tentang perlunya kehendak yang kuat dari masyarakat yang menginginkan pemerataan sosial. Kehendak itu sebenarnya sudah ada pada sebagian besar masyarakat kita, yakni golongan yang miskin atau dimiskinkan oleh sistem yang ada. Tapi ada sebagian kecil masyarakat kita, yang meskipun kecil tapi memiliki kekuatan ekonomi dan kekuatan politik yang besar, yang lebih senang dipertahankannya masyarakat yang tidak sama rata. Mereka adalah golongan elite yang diuntungkan oleh sistem kapitalisme yang menggejala. Mereka tidak ingin terjadinya pemerataan kekayaan, karena ini artinya kesempatan mereka

untuk mempertahankan kekayaan yang ada dihapuskan. Persoalan kita di sini, dapatkah kehendak kuat dari sebagian besar anggota masyarakat ini mengalahkan kekuasaan yang ada di tangan sebagian kecil anggota masyarakat yang tidak menghendaki pemerataan (dengan pelbagai argumen dan alasannya)? Pada titik ini kita harus bicara tentang peran negara dan pemerintah, karena negara adalah lembaga yang memonopoli pemakaian kekuasaan untuk memaksa masyarakat. Di pihak mana negara berada? Pertanyaan yang lebih mendasar lagi sebelum kita bisa menjawab pertanyaan ini: Apa sih sebenarnya negara itu?

Dalam membahas soal nasionalisme dalam kebijakan ekonomi (ciri utama keempat dari SPP) kita juga harus berurusan dengan persoalan hakikat negara. Dapatkah kaum elite Indonesia, yang diuntungkan secara pribadi dengan beroperasinya modal asing yang menghancurkan perusahaan-perusahaan nasional yang menjadi saingannya, berubah menjadi patriotik dan meletakkan kepentingan bangsanya jauh di atas kepentingan pribadinya? Kalau tidak, apakah negara akan memaksa mereka menjadi nasionalis-nasionalis dan patriot-patriot pembela bangsanya? Kembali kita lihat perlunya kita mengerti persoalan hakikat manusia dan hakikat negara.²⁴

Jusuf Kalla memberikan pendapatnya mengenai Mubyarto. "Mubyarto adalah tokoh pembela kepentingan rakyat. Idenya sangat banyak untuk pembangunan ekonomi bangsa. Dia juga sangat konsisten dengan ide-idenya. Salah satu ide yang saat ini masih digunakan sebagai kebijakan pemerintah adalah pengembangan desa tertinggal. Masih banyak ide beliau yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan ekonomi, terutama pemikiran ekonomi kerakyatan dan ekonomi pedesaan. Saya kehilangan kawan yang gigih memperjuangkan ekonomi pedesaan."²⁵

4.10. Catatan Akhir

Konsep pembangunan sudah diperkenalkan sejak awal kemerdekaan Indonesia. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa dalam sejarah Indonesia, dokumen pertama mengenai perencanaan pembangunan adalah Penetapan Presiden No. 3/1947 tentang pembentukan Panitia Pemikir Siasat Ekonomi pada tanggal 12 April 1947. Tugas dan kewajiban Panitia Pemikir adalah menyiapkan buah pikiran untuk menjadi rencana dan dasar pendirian Pemerintah Indonesia dalam menghadapi perundingan dengan Belanda dan penyelesaian soal-soal pembangunan negara. Panitia di atas menghasilkan dokumen yang disebut “Dasar-dasar Pokok Daripada Plan Mengatur Ekonomi Indonesia”. Selanjutnya berbagai kebijakan mengenai pembangunan terus dibuat sesuai dengan kebijakan dari pemerintahan yang sedang berjalan.

Selama masa revolusi, periode 1950 sampai 1960-an, wacana mengenai pembangunan terus berlangsung namun pelaksanaannya terkendala oleh situasi sosial politik yang terjadi. Pelaksanaan pembangunan baru berjalan dan berlangsung massif setelah masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Selama masa Orde Baru inilah, gagasan dan pelaksanaan pembangunan berlangsung secara sistematis dan berkesinambungan.

Ketiga tokoh pemikir pembangunan yang dibahas di atas (Soedjatmoko, Widjojo Nitisastro, dan Mubyarto) adalah tokoh yang terlibat dalam proses pembangunan Indonesia. Semua pemikiran yang dilahirkannya mengenai pembangunan pada dasarnya bermuara untuk mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia. Oleh karena pembangunan dan pelaksanaannya selalu melibatkan banyak kepentingan, terkadang pelaksanaan pembangunan yang seharusnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat tidak mudah dicapai. Pemikiran ketiga tokoh di atas merupakan dialog atas ide dan realitas pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia.

Dari segi kepribadian dari tiga tokoh di atas, dapat diambil pelajaran untuk pendidikan karakter bangsa. Terkait dengan pendidikan karakter, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menguraikan nilai-nilai pendidikan karakter yang terdiri dari 18 nilai, yaitu: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Kedelapan belas nilai dalam pendidikan karakter di atas dapat ditemukan pada sosok ketiga tokoh di atas.

Catatan Akhir :

- ¹ Lihat Mansour Fakhri, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996. hlm: 71. Penjelasan mengenai arkeologi pemikiran pembangunan di negara-negara Ketiga dan Indonesia khususnya sudah banyak dibahas oleh para ahli, antara lain Andrianof A Chaniago, *Gagalnya Pembangunan Membaca Ulang Keruntuhan Orde Baru*. Jakarta: LP3ES, 2012, dan Suwarsono & Alvin Y. So, *Perubahan Sosial dan Pembangunan*. Cetakan Kelima. Jakarta: LP3ES, 2013.
- ² Mansour, *ibid*, hlm: 71-72.
- ³ Lihat Mustopadidjaja AR, dkk. (editor), *Bapennas dalam Sejarah Perencanaan Pembangunan Indonesia 1945—2025*. Jakarta: LP3ES, 2012. hlm: 25.
- ⁴ Selengkapnya lihat Thee Kian Wie, “Pengantar” dalam Thee Kian Wie (editor), *Pelaku Berkisah: Ekonomi Indonesia 1950-an sampai 1990-an*. Jakarta: Penerbit Kompas, 2005. hlm: xliii—lix. Kecuali disebutkan sumber lain, bagian ini sepenuhnya mengutip Thee.
- ⁵ Mengenai biografi Soedjatmoko, lihat M. Nursam, *Pergumulan Seorang Intelektual: Biografi Soedjatmoko*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002. Lihat juga M. Nursam, *Prof. Dr. dr. Moh. Saleh Mangundiningrat: Potret Cendekiawan Jawa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- ⁶ Lihat Agus Wahyudi, “Konsep Pembangunan Menurut Soedjatmoko: Studi Buku “Pembangunan dan Kebebasan”, (Development And Freedom)”, Yogyakarta: Skripsi Filsafat UGM, 1992. Bagian ini banyak mengambil dari skripsi ini. Selain itu, karya-karya Soedjatmoko, antara lain: Soedjatmoko, *Dimensi Manusia dalam Pembangunan: Pilihan Karangan*. Jakarta: LP3ES, 1983; *Pembangunan dan Kebebasan*. Jakarta: LP3ES, 1984; *Etika Pembebasan: Pilihan Karangan tentang Agama, Kebudayaan, Sejarah dan Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES, 1984 dan; *Menjelajah Cakrawala: Kumpulan Karya Visioner Soedjatmoko* Jakarta: Gramedia, 1994.
- ⁷ Lihat Pengantar Ignas Kleden “Soedjatmoko: Sebuah Psikologi Pembebasan” dalam Soedjatmoko, *Etika Pembebasan*, *loc cit*.
- ⁸ Lihat Soedjatmoko, *Pembangunan dan Kebebasan*, *loc. cit*.

- ⁹ Lihat Aswab Mahasin, “Soedjatmoko dan Dimensi Manusia: Sekapur Sirih”, dalam Soedjatmoko, *Dimensi Manusia dalam Pembangunan*, *loc. cit.*
- ¹⁰ Lihat Shigehari Matsumoto, “Pendahuluan” dalam Soedjatmoko, 1984, *op. cit.*, hlm: vii-viii.
- ¹¹ Lihat Arief Budiman, “Sketsa Besar Seorang Generalis”, *Tempo*, 14 Juli 1984, hlm: 54; lihat juga kata pengantar Arief Budiman, “Soedjatmoko: Intelektual dan Guru”, dalam Budi Putra, *Sejarah Masa Depan: Percikan Pemikiran Soedjatmoko*. Padang: Pustaka Mimbar Minang, 2000.
- ¹² Pandangan berbagai pakar dalam berbagai disiplin ilmu mengenai sosok Widjojo Nitisastro dapat dilihat dalam Anwar, Moh. Arsjad, dkk (editor), *Esai Dari 27 Negara Tentang Widjojo Nitisastro: Penghargaan dari Para Tokoh*. Jakarta: Penerbit Kompas, 2010.
- ¹³ Lihat Widjojo Nitisastro, *Pengalaman Pembangunan Indonesia Kumpulan Tulisan dan Uraian Widjojo Nitisastro*. Jakarta: Penerbit Kompas, 2010. hlm: 195—196. Terkait dengan pembangunan berkelanjutan, pemikiran Otto Soemarwoto akan lebih menjelaskan konsepsi mengenai pembangunan berkelanjutan itu yang akan dibahas pada bagian selanjutnya dalam tulisan ini.
- ¹⁴ Lihat H. W. Arndt, “Apakah Pemerataan Itu Penting?”, dalam Moh. Arsjad Anwar, dkk. (editor), *Esai Dari 27 Negara Tentang Widjojo Nitisastro: Penghargaan Dari Para Tokoh*. Jakarta: Penerbit Kompas, 2010. hlm: 181. H. W. Arndt sekaligus pendiri proyek ANU Indonesia dan Editor *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 1964—1983, meninggal pada 2002.
- ¹⁵ Selengkapnya lihat John Bresnan, “Belum Pernah Ada Lima Profesor Melakukan Begitu Banyak Hal dalam Kurun Waktu yang Begitu Singkat untuk Membangun Kembali Ekonomi Sebuah Bangsa yang Besar”, dalam Moh. Arsjad Anwar, dkk. (editor), *op cit*, hlm: 77—78.
- ¹⁶ Lihat Emil Salim, “Kata Sambutan”, dalam Widjojo Nitisastro, *op. cit.*, hlm: xiii-xiv.
- ¹⁷ Lihat *Tempo*, *Apa dan Siapa Orang Indonesia 1985—1986*, dikutip dari Dumairy dan Tarli Nugroho, *Ekonomi Pancasila: Warisan Pemikiran Mubyarto*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014. hlm: 9.
- ¹⁸ Dumairy & Tarli Nugroho, *Ekonomi Pancasila Warisan Pemikiran Mubyarto*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014. hlm: 8.

- ¹⁹ Usaha Mubyarto merumuskan Sistem Ekonomi Pancasila (SEP), secara “resmi” dimulai pada pengukuhanannya sebagai Guru Besar Ekonomi di Universitas Gadjah Mada pada Mei 1979. Pidato ini kemudian diikuti dengan ceramah-ceramah dan diskusi di mana Mubyarto secara tidak jemu-jemu mengemukakan kembali gagasan SEP. Usaha ini mendapat tanggapan luas, dan makin ramai dibicarakan. Kemudian, pada September 1980 dalam rangka peringatan HUT ke-25 Fakultas Ekonomi UGM, diselenggarakan sebuah seminar tentang SEP, dan makalah-makalahnya kemudian diterbitkan dengan judul *Ekonomi Pancasila* (Mubyarto dan Boediono sebagai editor). Seminar yang sama dilaksanakan pada September 1981 di UGM. Sejak saat ini sampai akhir 1981 SEP menjadi polemik di kalangan intelektual dan akademisi serta di media massa. Selanjutnya lihat Arief Budiman, *Sistem Perkonomian Pancasila dan Ideologi Ilmu Sosial di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1989. hlm: 1—7. Lihat juga Dumairy & Tarli Nugroho, *Ekonomi Pancasila Warisan Pemikiran Mubyarto*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014.
- ²⁰ Mubyarto lulus sarjana jurusan agraria Fakultas Ekonomi UGM pada 1959, mendapat gelar Master of Arts (M.A.) di bidang Ekonomi Pembangunan dari Vanderbilt University pada 1962, dan berhasil mendapatkan gelar doktor dalam bidang Ekonomi Pertanian di Iowa State University pada 1965. Saat itu Mubyarto berusia 27—penerima gelar doktor paling muda di UGM.
- ²¹ Kritik semacam dilakukan oleh Bung Hatta dan Roeslan Abdulgani (dikutip dari Mubyarto). Menurut Arief Budiman, dasawarsa 1970-an merupakan dasawarsa yang penuh kontradiksi; pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibarengi dengan tuntutan pemerataan, lihat Arief Budiman, *op. cit.*, hlm: 2.
- ²² Selengkapnya lihat Mubyarto, *Ekonomi Pancasila Lintasan Pemikiran Mubyarto*. Yogyakarta: Aditya Media, 1997. hlm: 71.
- ²³ Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Evaluasi Dua Tahun PUSTEP UGM*. Yogyakarta: Aditya Media, 2003. hlm: 14.
- ²⁴ Selengkapnya lihat Arief Budiman, *Sistem Perkonomian Pancasila dan Ideologi Ilmu Sosial di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia, 1989, hlm: 4-7.
- ²⁵ Dikutip dalam Dumairy & Tarli Nugroho, *op cit.*, hlm: 229—230.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Rivai. "Bangsawan Fikiran", dalam *Bintang Hindia*, No. 11, Tahun IV, 1906.
-, "Peroebahan Pengadjaran Anak Negeri", dalam *Bintang Hindia*, No. 21, Tahun IV, 1907.
-, *Student Indonesia di Eropa*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2000.
- Abibullah Djaini. *Pemikiran dan Perjuangan Mohammad Natsir*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Adam, Ahmat. *Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran Keindonesiaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Adams, Cindy. *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung, 1982.
- Adi Sasono & Syarofin Arba. *Demitologisasi Politik Indonesia: Mengusung Elitisme dalam Orde Baru*. Jakarta: Center for Information and Development Studies (CIDES), 1998.
- Ahmad Faizin Karimi. *Pemikiran dan Perilaku Politik Kiai Haji Ahmad Dahlan*. Gresik: Muhipress, 2012.
- Ahmad Suhelmi. *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Ahmad Syafii Maarif. *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante*. Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1985.

....., *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*. Yogyakarta: Gema Insani Press, 1996.

Ajib Rosidi. *M. Natsir: Sebuah Biografi*. Jakarta: Penerbit PT Girimukti Pasaka, 1990.

Al-Chaidar & Herdi Sahrasad. *Negara Madinah: Refleksi Tentang Agama dan Pluralisme*. Jakarta: Madani Press, 2000.

Alfian. *Islamic Modernism in Indonesian Politics: The Muhammadiyah Movement During the Dutch Colonial Period, 1912-1942*. Madison: University of Wisconsin, 1969.

Amelz. *H.O.S Tjokroaminoto: Hidup dan Perjuangannya. Jilid I*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1952.

Amien Rais (ed.). *Pak Natsir 80 Tahun*. Jakarta: Media Dakwah, 1988.

....., *Belajar dari Demokrasi ala Soeharto: Upaya Membangun Masyarakat Madani dalam Kultur Feodal*. Bandung: Penerbit Pustaka Hidayah, 1999.

Aning S, Floriberta. *Seratus Tokoh yang Mengubah Indonesia: Biografis Singkat Seratus Tokoh yang Paling Berpengaruh dalam Sejarah Indonesia di Abad 20*. Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2007.

Anderson, Ben. *Revolusi Pemuda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988.

Anhar Gonggong. *H.O.S. Tjokroaminoto*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1985.

Ayub Ranoh. *Kepemimpinan Kharismatis: Tinjauan Teologis-Etis Atas Kepemimpinan Kharismatis Sukarno*. Jakarta: Penerbit BPK Gunung Mulia, 1999.

Abdullah, Taufik, "Dari Hasrat 'Kemajuan' kepembentukan Bangsa", dalam Taufik Abdullah dan A.B. Lopian (ed.), *Indonensia dalam Arus Sejarah*, Jilid 5, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2012.

....., "Kata Pengantar" untuk Restu Gunawan, *Muhammad Yamin dan Cita-Cita Persatuan*, Yogyakarta: Ombak, 2005.

Anwar, Moh. Arsjad, dkk. (editor). *Esai Dari 27 Negara Tentang Widjojo Nitisastro: Penghargaan dari Para Tokoh*. Jakarta: Penerbit Kompas, 2010.

AR, Mustopadidjaja, dkk. (editor). *Bapennas dalam Sejarah Perencanaan Pembangunan Indonesia 1945—2025*. Jakarta: LP3ES, 2012.

Arndt, H.W. *Pembangunan Ekonomi Indonesia: Pandangan Seorang Tetangga*. Terjemahan, Gadjah Mada University Press, 1991.

....., *Pembangunan Ekonomi: Studi tentang Sejarah Pemikiran*. Jakarta: LP3ES, 1991.

Budiman, Arief. *Sistem Perekonomian Pancasila dan Ideologi Ilmu Sosial di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1989.

-, *Kebebasan, Negara, dan Pembangunan: Kumpulan Tulisan 1965—2005*. Jakarta: Freedom Institute, 2006.
- Burhanudin, Jajat (ed.). *Ulama Perempuan Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.
-, & Dina Afrianty, (ed.). *Mencetak Muslim Modern: Peta Pendidikan Islam Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
-, & Oman Fathurahman (ed.). *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Chaniago, Andrinof A. *Gagalnya Pembangunan: Membaca Ulang Keruntuhan Orde Baru*. Jakarta: LP3ES, 2012.
- Dumari & Tarli Nugroho. *Ekonomi Pancasila Warisan Pemikiran Mubyarto*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014.
- Deliar Noer. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: PT. Djaya Pirusa, 1980.
- Denny Indrayana. *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran*. Bandung: Mizan Pustaka, 2007.
- Dijk, Cornelis. *The Netherlands Indies and the Great War 1914-1918*. Leiden: KITLV Press, 2007.
- Din Syamsuddin, "Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam", dalam Jurnal *Ulumul Quran*, Volume IV, Nomor 2, 1993.
- Djohan Efendi. *Pembaruan Tanpa Membongkar Tradisi: Wacana Keagamaan di Kalangan Generasi Muda NU Masa*

Kepemimpinan Gus Dur. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.

Daya, Burhanuddin. *Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam Kasus Sumatera Thawalib*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta, 1995.

Dewantara, Ki Hajar. *Bagian Pertama Pendidikan.* Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1962.

Djumhur & Danasuparta. *Sejarah Pendidikan.* Bandung: CV Ilmu, 1959.

Departemen Penerangan. *Susunan Kabinet Republik Indonesia, 1945-1970.* Djakarta: Pradnja Paramita, 1970.

Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jakarta: PT Delta Pamungkas, 2004.

Errington, Joseph, "Continuity and Change in Indonesian Language Development", dalam *The Journal of Asian Studies*, Volume 45, No. 2, 1986.

Edward, dkk. *Riwayat Hidup dan Perjuangan 20 Ulama Besar Sumatera Barat.* Padang: Islamic Centre Sumatera Barat, 1981.

Freire, Paulo. *Pedagogy of the Oppressed.* New York: Herder and Herder, 1970.

....., *Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan.* Jakarta: Gramedia, 1984.

....., *Politik Pendidikan Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

- Fuad Fachruddin. *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*. Jakarta: Pustaka Alvabet & Yayasan INSEP, 2006.
- Fakih, Mansour. *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Gie, Thee Kian, (Editor). *Pelaku Berkisah: Ekonomi Indonesia 1950-an sampai 1990-an*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Gunawan, Restu. *Muhammad Yamin dan Cita-Cita Persatuan*. Yogyakarta: Ombak, 2005.
- H.O.S. Tjokroaminoto. *Tafsir Program Asas dan Program Tandhim Syarikat Islam*. Jakarta: Yayasan Bina Sari, 1985.
-, *Islam dan Sosialisme*. Jakarta: Bulan Bintang, 2003.
-, *Islam dan Sosialisme*. Jakarta: Lembaga Penggali dan Penghimpun Sedjarah Revolusi Indonesia, Endang, dan Pemuda, 1963.
- Haris Priyatna. *Seteru 1 Guru: Novel Pergulatan 3 Murid Tjokroaminoto*. Bandung: Mizan Qanita, 2015.
- Hamka. *Ayahku Riwayat Hidup DR. H. Abdul Karim Amarullah Dari Perjuangan Kaum Agama di Sumatera*. Jakarta: Yayasan Uminda, 1982.
- Harahap, H.A.H. & B.S. Dewantara. *Ki Hajar Dewantara dan Kawan-Kawan Ditangkap, Dipenjarakan dan Disingkan*. Jakarta: Gunung Agung, 1980.

- Hoed, Benny H. *Semiotika dan Dinamika Sosial Budaya*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2008.
- Illich, Ivan. *Deschooling Society*. New York: Harper and Row, 1971.
-, *Bebaskan Masyarakat dari Belenggu Sekolah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000.
- Irfan Safrudin. *Ulama-ulama Perintis: Biografi Pemikiran dan Keteladanan*. Bandung: Majelis Ulama Indonesia, 2008.
- Iskandar Zulkarnain. *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*. Jakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2005.
- Iswara N. Raditya (et.al.). *Tujuh Bapak Bangsa*. Jakarta: Biora Institute & Indonesia Buku, 2008.
- J.H. Lamardy, "Belajar Kembali Menjadi Bangsa; Pengalaman Ahmadiyah", dalam Elza Peldi Taher. *Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai 70 Tahun Djohan Effendy*. Jakarta: Kompas & ICRP, 2011.
- Jan S. Aritonang. *Konteks Berteologi di Indonesia: Buku Penghormatan untuk HUT ke-70 Prof. Dr. P.D. Latuhamallo*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1988.
- Kamaruzzaman Bustaman Ahmad. *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis*. Magelang: Indonesia Tera, 2001.
- Khumaidi, "Islam dan Tata Negara: Pemikiran Sosial-Politik Mohammad Natsir", dalam Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan, *Kontekstualita*, Volume 20, Nomor 1, Juni 2005.
- Korver, A.P.E. *Sarekat Islam, Gerakan Ratu Adil*. Jakarta: Grafitipers, 1985.

- Kostituante Republik Indonesia. *Risalah Perundingan Jilid V*. Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik (MPR) Indonesia Indonesia, 1957.
- Kartodirjo, Sartono. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru Jilid 2: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*, Jakarta: Gramedia, 1990.
- Keith Foulcher. *Sumpah Pemuda: Makna dan Proses Penciptaan atas sebuah Simbol Kebangsaan Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2000.
- Kleden, Ignas dkk. *Kebudayaan sebagai Perjuangan: Perkenalan dengan Pemikir S. Takdir Alisjahbana*. Jakarta: PT Dian Rakyat, 1988.
- Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah. Edisi Kedua*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.
- Leirissa, RZ., dkk. *Sejarah Pemikiran tentang Sumpah Pemuda*. Jakarta: Depdikbud, 1989.
- Lembaga Soekarno-Hatta. *Sejarah Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila*. Jakarta: Inti Idayu Press, 1984.
- Lembaga Studi Ilmu Kemasyarakatan. *Rangkaian Peristiwa Pemberontakan Komunis di Indonesia: 1926, 1948, 1965*. Jakarta: Lembaga Studi Ilmu Kemasyarakatan, 1988.
- Leo Suryadinata. *Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia: Sebuah Bunga Rampai, 1965-2008*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.

- Lombard, Dennys. *Nusa Jawa: Silang Budaya, Jilid 1: Batas-batas Pembaratan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Lukman Hakiem (ed.). *100 Tahun Mohammad Natsir: Berdamai dengan Sejarah*. Jakarta: Penerbit Republika, 2008.
- Latif, Yudi. *Inteligensia Muslim dan Kuasa: Geneologi Inteligensia Muslim Indonesia Abad ke-20*. Bandung: Mizan, 2005.
- Muljana, Slamet. *Kesadaran Nasional: Dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan. Jilid 1*. Yogyakarta: LKIS, 2008.
- Munawaroh, Junaidatul. "Rahmah el-Yunusiah: Pelopor Pendidikan Perempuan", dalam, Jajat Burhanudin (ed.), *Ulama Perempuan Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- M. Masyhur Amin. *H.O.S. Tjokroaminoto, Rekonstruksi Pemikiran dan Perjuangannya*. Yogyakarta: Cokroaminoto University Press, 1995.
- M. Nasruddin Anshoriy Ch., & Djunaidi Tjakrawerdya. *Rekam Jejak Dokter Pejuang & Pelopor Kebangkitan Nasional*. Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2008.
- Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto. *Sejarah Nasional Indonesia: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Republik Indonesia, Volume 5*. Jakarta: PT Balai Pustaka, 2008.
-, *Sejarah Nasional Indonesia: Kemunculan Penjajahan di Indonesia, Volume 4*. Jakarta: PT Balai Pustaka, 2008.
- Mohammad Natsir. *Capita Selecta Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Pendis, 1954.

-, *Capita Selecta Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Pendis, 1957.
-, *Islam Sebagai Ideologi*. Jakarta: Pustaka Aida, 1959.
-, *Capita Selecta Jilid 1*. Bandung: Penerbit Sumup, 1961.
-, *Capita Selecta Jilid 1*. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Mrazek, Rudolf. *Engineers of Happy Land: Perkembangan Teknologi dan Nasionalisme di Sebuah Koloni*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Muhammad Iqbal & Kuncoro Hadi, "Sarekat Islam dalam Kancah Pergerakan Nasional 1912-1926", dalam Buletin Ilmu Sejarah, *Sanskerta*, Edisi III, September 2005.
- Muhammad Umar Syadat Hasibuan. *Revolusi Politik Kaum Muda*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Mulyono & Sutrisno Kutoyo. *Haji Samanhudi, Pahlawan Nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1979.
- Mahayana, Maman S., "Monumen Pujangga Baru," dalam *Sembilan Jawaban Sastra Indonesia*, Jakarta: Bening Publishing, 2005.
-, "Perkembangan Teori dan Kritik Sastra Indonesia," *Jurnal Kritik*, No. 2, 2012.
- Mihardja, Achdiat K. *Polemik Kebudayaan*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1986.

- Mubyarto. *Ekonomi Pancasila Lintasan Pemikiran Mubyarto*. Yogyakarta: Aditya Media, 1997.
-, *Membangun Sistem Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media, 2000.
-, *Ekonomi Pancasila: Renungan Satu Tahun PUSTEP UGM*. Yogyakarta: Aditya Media, 2003.
-, *Ekonomi Pancasila: Evaluasi Dua Tahun PUSTEP UGM*. Yogyakarta: Aditya Media, 2003.
-, *Revolusi Menuju Sistem Ekonomi Pancasila*. Yogyakarta: Aditya Media, 2004.
-, & Boediono (editor), *Ekonomi Pancasila*, edisi pertama, cetakan keenam. Yogyakarta: BPFE UGM, 1997.
- Nitisastro, Widjojo. *Pengalaman Pembangunan Indonesia: Kumpulan Tulisan dan Uraian Widjojo Nitisastro*. Kata Sambutan Emil Salim. Jakarta: Penerbit Kompas, 2010.
- Nursam, M., *Pergumulan Seorang Intelektual: Biografi Soedjatmoko*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Nursam, M., *Prof. Dr. dr. Moh. Saleh Mangundiningrat: Potret Cendekiawan Jawa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1996.
- Nurcholish Madjid. *Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina, 2000.

- Nasution, Harun. *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1975.
- Nata, Abudin. *Tokoh-Tokoh Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Navis. AA., *Filsafat dan Strategi Pendidikan M. Sjafei: Ruang Pendidik INS Kayutanam*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1996.
- Nuraida, "Rahmah Et Yunusiyah dalam Perspektif Sejarah Perjuangan Wanita di Indonesia," *Skripsi Sarjana* Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1990.
- P. Swantoro. *Dari Buku ke Buku, Sambung Menyambung Menjadi Satu*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2002.
- Pandji Islam*, Nomor 28, Edisi 15 Juli 1940.
- Pasha, Musthafa Kamal. *Civics Education*. Jakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002.
- "Politik Santun di Antara Dua Rezim", *Tempo*, edisi 14-20 Juli 2008.
- Pitit Soeharto & Zainoel Ihsan. *Cahaya di Kegelapan: Capita Selecta Kedua Boedi Oetomo dan Sarekat Islam Pertumbuhannya dalam Dokumen Asli*. Jakarta: Penerbit Jayasakti, 1981.
- Poeze, Harry, A. *Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri Belanda (1600-1950)*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008.
- Pramoedya Ananta Toer. *Panggil Aku Kartini Saja, Jepara, 25 Mei 1899: Sebuah Pengantar pada Kartini*. Jakarta: Hasta Mitra, 1997.

- Pusat Komite Pemilihan Umum Masjumi, *Masjumi Pendukung Republik*, tanpa tahun terbit.
- Pusponegoro, Marwati Djoned, dan Nugroho Notosusanto. *Sejarah Nasional Indonesia V*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Redaksi Ensiklopedia Indonesia (ed.). *Ensiklopedia Indonesia*. Jakarta: Ikhtiar Baru-Van Hoeve, 1983.
- Ricklefs, MC. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995.
- Ricklefs, MC. *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008*. Jakarta: Penerbit Serambi, 2008.
- Rosihan Anwar. *Sejarah Kecil "Petite Histoire" Indonesia, Volume 3*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004.
- RZ. Leireza, "PRRI: Membangun Indonesia tanpa Komunis" dalam *Majalah Tempo*, Edisi 14-20 Juli 2008.
- Rasyad, Aminuddin. "Rahmah El Yunusiyah, Kartini dari Perguruan Islam", dalam *Manusia dalam Kemelut Sejarah*. Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1978.
-, dkk., HJ. Rahmah El Yunusiyah dan H. Zainuddin Labay El Yunusy: *Dua Bersaudara Tokoh Pembaharu Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Pengurus Perguruan Diniyah Puteri Padang Panjang Perwakilan Jakarta, 1991.
- Rosyidi, Ajjp. *Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya, 2013.

- Raharjo, M. Dawam. *Pembangunan Pascamodernis: Esai-esai Politik*. Yogyakarta: Insist Press, 2012.
- Salim, Emi. *Kembali ke Jalan Lurus: Esai-esai 1966-99*. Jakarta: Penerbit Alfabet, 2000.
- Sjahir, et.al., *Menuju Masyarakat Adil dan Makmur: 70 Tahun Prof. Sarbini Sumawinata*. Jakarta: Gramedia, 1989.
- Soedjatmoko. *Dimensi Manusia dalam Pembangunan: Pilihan Karangan*. Jakarta: LP3ES, 1983.
-, *Pembangunan dan Kebebasan*. Jakarta: LP3ES, 1984.
-, *Etika Pembebasan: Pilihan Karangan tentang Agama, Kebudayaan, Sejarah dan Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES, 1984.
-, *Menjelajah Cakrawala: Kumpulan Karya Visioner Soedjatmoko*. Jakarta: Gramedia, 1994.
- Sketsa Perjalanan Bangsa Berdemokrasi*. Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika, 2005.
- Suwarsono & Alvin Y. So. *Perubahan Sosial dan Pembangunan*, cetakan kelima. Jakarta: LP3ES, 2013.
- Safwan, Mardanas. *Prof. Dr. Bahder Djohan: Karya dan Pengabdiannya*, Jakarta: Proyek ISDN, 1985.
- Soedjatmoko. "Merintis Masa Hari Depan", makalah dalam seminar sejarah I di Yogyakarta, dalam *Kumpulan Makalah Seminar Sejarah Nasional Pertama 14-18 Desember 1957*, hlm, 192.

- Soetomo. "Kenang-Kenangan", dalam Frdeick, William H. dan Soeri Soeroto. *Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi*. Jakarta: LP3ES, 2005.
- Supardji, Imam. *Dr Soetomo Riwayat dan Perjuangannya*. Jakarta: Djambatan, 1951.
- Sabam Sirait, "Pejuang Tanpa Pamrih", dalam Lukman Hakim (ed.). *M. Natsir di Panggung Sejarah Republik*. Jakarta: Penerbit Republika, 2008.
- Safrizal Rambem. *Sarekat Islam: Pelopor Nasionalisme Indonesia, 1905-1942*. Jakarta: Yayasan Kebangkitan Insan Cendekia, 2008.
- Saich, Tony. *The Origins of the First United Front in China: The Role of Sneevliet*. Leiden: BRILL, 1991.
- Shiraishi, Takashi. *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997.
- Slamet Muljana. *Kesadaran Nasional: Dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan, Volume 1, Seri Satu Abad Kebangkitan Nasional*. Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2008.
- Soekarno. *Di Bawah Bendera Revolusi, Jilid 1*. Jakarta: Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi, 1964.
-, *Indonesia Menggugat, Pidato Pembelaan Bung Karno di Muka Landraad Bandung 1930*. Surakarta: Penerbit Sasongko, 1978.
- Subagiyo Ilham Notodijoyo. *Sebelas Perintis Pers Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan, 1976.

-, *Harsono Tjokroaminoto: Mengikuti Jejak Perjuangan Sang Ayah*. Jakarta: Gunung Agung, 1985.
- Sumarno. *Perjuangan Bernegara Demokrasi H.O.S. Tjokroaminoto: Telaah Historis Pemikirannya dalam Pergerakan Nasional Sarekat Islam 1912-1934*. Jakarta: Fakultas Pengetahuan Ilmu Budaya, Universitas Indonesia, 2000.
- Suradi. *Haji Agus Salim dan Konflik Politik dalam Sarekat Islam*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- Tamar Djaja. *Pustaka Indonesia: Riwayat Hidup Orang-orang Besar Tanah Air*. Jakarta: Bulan Bintang, 1966.
- Taufik Rahzen. *Tanah Air Bahasa: Seratus Jejak Pers Indonesia*. Jakarta: Iboekoe, 2007.
-, *Kronik Kebangkitan Indonesia: 1908-1912, Volume 1 Dari Kronik Kebangkitan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Buku, 2008.
- Teguh Aprilianto, "Mohammad Natsir: Islam, Kebangsaan, dan Demokrasi" dalam *Jurnal Demokrasi dan HAM: Pemikiran Ekonomi-Politik Pemimpin Bangsa*, Volume 5, Nomor 1, 2006.
- Thohir Luth. *M. Natsir, Dakwah dan Pemikirannya*. Jakarta: Penerbit Gema Insani, 1999.
- Tjiptoning. *Apa dan Siapa: Nj. Sukarno, Mr. Sartono, Moh. Natsir, AK. Gani, Moh. Yamin, HA. Salim, Tri Murti, Dr. Halim, Ir. Djuanda, Mangunsarkoro, Adam Malik, Mr. Moh. Rum, Roeslan Abd.Gani*. Yogyakarta: Badan Penerbit Kedaulatan Rakjat, 1951.
- Tafsir, Ahmad. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.

- Tilaar, HAR. *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2012.
- Tim Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Tim Diniyah School Puteri. *Buku Peringatan 15 Tahun Diniyah School Puteri*. Padang Panjang, 1938.
- Tim Diniyah Putri Padang Panjang. *Buku Peringatan 55 tahun Diniyah putri Padang Panjang*. Jakarta: Ghallia Indonesia, 1978.
- Thoha, Ahmadie (Penerjemah). *Muqoddimah Ibn Khaldun*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Tim Penulis. *Sejarah Pemikiran Indonesia Modern*. Jakarta: Kemendikbud, 2015.
- Tjatan Redaksi, "Kongres Kebudayaan Indonesia", *majalah bulanan Kebudayaan*, diterbitkan Djawatan Kebudayaan Kementrian PPK, No. 9/10 September/ Oktober 1954, tahunke III.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, cetakan keempat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Van Niel, Robert. *Munculnya Elit Modern Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1960.
-, *Munculnya Elit Modern Indonesia*, (terj. Zahara Deliar Noer), cet. 2. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 2009.

- Williams, Michael C., *Sickle and Crescent: The Communist Revolt of 1926 in Banten*. Jakarta-Kuala Lumpur: Equinox Publishing, 2009.
- Wondoamiseno, "Republik Indonesia Belum Sesuai dengan yang Diidam-idamkan H.O.S Tjokroaminoto," dalam Amelz, *H.O.S Tjokroaminoto: Hidup dan Perjuangannya, Jilid I*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1952.
- Welmar. *Mengenang Maha Putra Prof. Mr. Muhammad Yamin Pahlawan Nasional RI*. Bukittinggi: Kristal Media, 1997.
- Wahyudi, Agus, "Konsep Pembangunan Menurut Soedjatmoko: Studi Buku "Pembangunan dan Kebebasan" (*Development And Freedom*)". Yogyakarta: Skripsi Filsafat UGM, 1992.
- Yudi Latif. *Inteligensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Abad ke-20*. Bandung: Mizan Pustaka, 2006.
-, *Negara Paripurna*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Yusril Ihza Mahendra, "Modernisasi Islam dan Demokrasi: Pandangan Politik Mohammad Natsir", dalam Jurnal *Islamika*, No. 3, Edisi Januari-Maret 1994.
- Yusuf Abdullah Puar. *70 Tahun M. Natsir*. Jakarta: Penerbit Pustaka Antara, 1978.
- Yamin, Muhammad, "Minang Membentuk Universitas", pada Perajaan Peresmian Fakultas Kedokteran dan FIPIA di Bukittinggi pada tanggal 17 September 1955.

-, "Menggapai Sejarah Nasional", dalam *Pemahaman Sejarah Indonesia*, diedit oleh William H. Frederick dan Soeri Soeroto. Jakarta: LP3ES, 1982.
-, "Mendjadilah Persatuan Bangsa Indonesia", pidato dalam rangka *Nation Building dan Character Building*, 28 Oktober 1964.
-, "Perdjoengan Menoedjoe Parlemen", dalam *Madjalah Partai Persatoean Indonesia*, no. 1, Desember 1939.
-, "Pergerakan Keboedajaan Indonesia", dalam *Surat Kabar Kebangoenan*, tanggal 4 Juni 1936.
-, Pidato yang diucapkan pada malam resepsi Kongres VII PGRI di kota Semarang pada tanggal 24 November 1954, "Kebaktian Guru Mendidik Bangsa", tanpa tahun, tersimpan di perpustakaan Nasional.
-, "Tjatur Sila Chalduniyah", *Makalah* disampaikan dalam Seminar Sejarah I tahun 1957 di Yogyakarta, dalam Kumpulan makalah Seminar Sejarah Nasional pertama, 14-18 Desember 1957.
-, *Gadjah Mada*. Djakarta: Balai Pustaka, 1971.
-, "Kemungkinan Perkembangan Bahasa-bahasa dan Kesusasteraan Indonesia di Masa Mendatang", ceramah pada Kongres Pemuda I, 2 Mei 1926.
-, *Penjelidikan Sedjarah Tentang Negara Seriwidjaja dan Radjakula Sjailendera Dalam Kerangka Kesatuan Ketatanegaraan Indonesia*, (tanpa penerbit, tanpa tahun).

-,, “Perkembangan Kebudayaan”, sambutan dalam Kongres Kebudayaan III selaku Menteri P.P dan K, kutipan dari *Madjalah Bulanan Kebudayaan*, Jogjakarta: Djawatan Kebudayaan Kementerian PPK, No. 9/10, September/Oktober 1951, tahun ke III.
-, Pidato Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tentang Usaha-usaha Pendidikan dan Pengajaran Kebudayaan dalam Konperensi Dinas Kementerian Penerangan pada tanggal 12 Oktober 1954, naskah stensilan, tersimpan di Perpustakaan Nasional.
-, *Sumpah Indonesia Raya*. Bukit Tinggi, Djakarta, Medan: NV. Nusantara, 1955.
-, “Tata Negara Majapahit Sapta Parwa: Risalah Sapta Parwa berisi 7 djilid atau parwa, hasil penelitian ketatanegaraan Indonesia tentang dasar dan bentuk Negara Nusantara bernama Madjapahit, 1293-1525”, (Djakarta: Prapanca, tanpa tahun).
-, Tentang Organisasi Kebudayaan, *Preadvis* dalam Kongres Kebudayaan II, Bandung, 1951.
-, *6000 Tahun Sang Merah Putih*. (tanpa penerbit,1951).
- Zaini Muchtarom. *Santri dan Abangan di Jawa*. Jakarta: Penerbit INIS, 1988.
- Zen Rahmat Sugito (*et.al.*). *Sang Guru: Peta Ringkas Hubungan Guru-Murid di Pelbagai Tradisi*. Yogyakarta: Ekspresi Buku, 2006.
- Zuhairi Misrawi. *Madinah: Kota Suci, Piagam Madinah, dan Teladan Muhammad SAW*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009.

Makalah/Artikel

Mestika Zed, “Engku Mohammad Sjafei dan INS Kayutanam: Jejak Pemikiran Pendidikannya” *Jurnal TINGKAP*, Volume VIII No. 2, Oktober 2012, diunduh dari <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=101041&val=1549> (diakses pada 21 Desember 2015).

Muhammad Isnaini, “Mohammad Sjafei: Pemikiran dan Praktik Pendidikan Tentang Ruang Pendidik INS Kayutanam” *Jurnal At-Tafkir*, Vol.II, No. 1 Januari-April 2009, dalam, <http://sumsel.kemenag.go.id/file/dokumen/PemikiranPendidikanSyafei.pdf> (Diakses pada 21 Desember 2015).

Andi Halimah, “Sistem Pendidikan Muhammad Syafei (Tokoh Pendidikan Dari Sumatera Barat).” Makalah diunduh dari laman UIN Alauddin Makassar, dalam http://www.uin-alauddin.ac.id/download-11.%20A.%20Halima_Sistem%20Pendidikan.pdf (diakses pada 21 Desember 2015).

